



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Wonosobo memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun guna mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah disepakati bersama untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat berjalan efisien, efektif dan berkelanjutan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 dalam bentuk visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok Pembangunan Daerah.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati Wonosobo.
 - a. RPJPD dituangkan dalam 4 (empat) tahapan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan yaitu:
 - b. RPJMD Periode I Tahun 2025–2029;
 - c. RPJMD Periode II Tahun 2030–2034;
 - d. RPJMD Periode III Tahun 2035–2039;
 - e. RPJMD Periode IV Tahun 2040–2045.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai uraian dan rincian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD ini mengacu pada RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7) masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahap selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 19 Agustus 2024

BUPATI WONOSOBO,
ttd
AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 20 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,
ttd

ONE ANDANG WARDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA
TENGAH (10-2015/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Wonosobo

M.Nurwahid, S.H
NIP. 197211101998031013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Kabupaten Wonosobo merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah. Posisi Kabupaten Wonosobo yang berada di ketinggian 250-2.250 meter di atas permukaan laut berkembang menjadi salah satu kabupaten yang dikenal dengan potensi pertanian dan keindahan alam yang menjadi daya tarik wisatawan, namun potensi ini juga sekaligus menjadi ancaman apabila sumber daya ini tidak dikelola dengan baik dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan harus dapat merumuskan konsep pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk memastikan pembangunan dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan generasi mendatang serta memberikan impact pada peningkatan kualitas hidup masyarakat namun tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan dalam hal ini perencanaan pembangunan daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menghasilkan RPJPD, RPJMD, dan rencana pembangunan tahunan. RPJPD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang disusun guna memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD menyebutkan bahwa penyusunan Rancangan Awal RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. Berdasarkan tata waktu penyusunan maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo berkewajiban untuk menyusun RPJPD periode 2025-2045 mengingat RPJPD Tahun 2005-2025 yang akan segera berakhir .

RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan untuk masa 20 (dua puluh) tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2045. Pelaksanaan RPJPD terbagi dalam beberapa tahapan perodesasi pembangunan perencanaan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan. Perencanaan pembangunan jangka panjang menjadi landasan yang esensial dalam mengoptimalkan potensi tersebut dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi, sosial, maupun daya dukung lingkungan.

RPJPD digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Kepala Daerah. Untuk selanjutnya RPJMD sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD tersebut merupakan rencana pembangunan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sehubungan dengan hal tersebut RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 menjadi sangat penting bagi pembangunan di Kabupaten Wonosobo. Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang RPJPD Tahun 2025-2045 perlu untuk ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH TAHUN 2025-2045



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

BAB 1 PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang..... I-1

1.2. Dasar Hukum I-2

1.3. Hubungan Antar Dokumen I-3

1.4. Maksud dan Tujuan I-5

1.5. Sistematika Penulisan..... I-5

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-7

2.1 Aspek Geografi dan Demografi..... II-7

2.1.1. Aspek Geografi..... II-7

2.1.2. Aspek Demografi..... II-47

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... II-50

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi II-50

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya II-61

2.2.3. Daya Saing Ekonomi Daerah..... II-65

2.2.4. Daya Saing Sumber Daya Manusia II-68

2.2.3. Daya Saing Infrastruktur..... II-70

2.2.5. Daya Saing Iklim Investasi II-78

2.3. Aspek Pelayanan Umum II-81

2.3.1. Bidang Pertanian dan Pariwisata..... II-81

2.3.2. Bidang Tata Kelola II-95

2.4. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025 II-100

2.4.1. Kesimpulan..... II-100

2.4.2. Rekomendasi dari Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025 ... II-102

2.5. Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik..... II-103

2.5.1. Analisis Proyeksi Kependudukan Per Lima Tahun II-103

2.5.2. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Per Lima Tahun II-117

2.6. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah II-138

2.6.1. Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah..... II-138

2.6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Berdasarkan RTRW Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043 II-140

2.6.3. Rencana Pola Penggunaan Wilayah II-142

2.7. Arah Kebijakan Transformasi..... II-148

2.7.1. Transformasi Sosial II-148



- 2.7.2. Transformasi Ekonomi II-149
- 2.7.3. Transformasi Tata Kelola II-150
- 2.7.4. Arah Kebijakan Landasan Transformasi II-151
- 2.7.5. Kerangka Implementasi Transformasi II-153

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS III-155

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah III-155

- 3.1.1. Permasalahan Pembangunan dari Aspek Geografi III-155
- 3.1.2. Masalah Pembangunan Aspek Kesejahteraan Masyarakat III-159
- 3.1.3. Permasalahan Daya Saing Daerah III-161
- 3.1.4. Aspek Pelayanan Umum II-164

3.2. Isu Strategis Daerah II-166

- 3.2.1. Isu Strategis Daerah III-168

3.3. Tantangan Pembangunan Daerah III-177

- 3.3.1. Megatren III-177
- 3.3.2. Perubahan Iklim, Daya Dukung dan Daya Tampung.. III-179

BAB 4 VISI DAN MISI DAERAH IV-181

4.1. Visi Daerah IV-181

- 4.1.1. Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka IV-182
- 4.1.2. Maju IV-184
- 4.1.3. Sejahtera IV-184
- 4.1.4. Berkelanjutan IV-184

4.2. Sasaran Visi Daerah IV-186

4.3. Misi Daerah IV-188

- Misi 1: Mewujudkan Agrobisnis dan Pariwisata yang Unggul, Kreatif, Inovatif dan Berkelanjutan IV-190
- Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas IV-190
- Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan IV-190
- Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Sosial yang Inklusif serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing IV-192
- Misi 5: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan IV-192

4.4. Upaya Super Prioritas (Game Changers) IV-193

- 4.4.1. Kolaborasi Pengarusutamaan Agrobisnis dan Pariwisata IV-194
- 4.4.2. Hilirisasi Industri Pertanian dan Ekonomi Sirkular IV-194
- 4.4.3. Transformasi Digital Sektor Publik IV-195
- 4.4.4. Reformasi Sumber Pendapatan Asli Daerah IV-196



- 4.4.5. Infrastruktur Pendukung Agrobisnis dan Pariwisata .. IV-196
- 4.4.6. Pengentasan Kemiskinan Terintegrasi..... IV-197
- 4.4.7. Ketahanan Keluarga dan Kesetaraan Gender IV-198
- 4.4.8. Pertanian dan Pariwisata Ramah Lingkungan IV-199
- 4.4.9. Reformasi Pengelolaan Sampah..... IV-200

BAB 5 ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOKV-202

5.1. Arah Kebijakan DaerahV-202

- 5.1.1. Arah Kebijakan Periode 1 (2025–2029) V-204
- 5.1.2. Arah Kebijakan Periode 2 (2030–2034) V-205
- 5.1.3. Arah Kebijakan Periode 3 (2035–2039) V-206
- 5.1.4. Arah Kebijakan Periode 4 (2040–2045) V-207

5.2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025–2045.....V-208

- 5.2.1. Sasaran Pokok 1: Terwujudnya pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata yang maju dan berkelanjutan V-208
- 5.2.2. Sasaran Pokok 2: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas..... V-216
- 5.2.3. Sasaran Pokok 3: Terwujudnya Infrastruktur Layanan Dasar dan Pendukung Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan V-218
- 5.2.4. Sasaran Pokok 4: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sejahtera dan Berkualitas..... V-221
- 5.2.5. Sasaran Pokok 5: Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Berketahanan Iklim dan Bencana V-225

5.3. Arah Kebijakan Pembangunan WilayahV-237

- 5.3.1. Kawasan Strategis dan Wilayah Pengembangan V-238
- 5.3.2. Kawasan Pengembangan Pertanian V-241
- 5.3.3. Pengembangan Pariwisata..... V-242

5.4. Keterkaitan Upaya Super Prioritas (Game Changers) dengan Arah Kebijakan.....V-243

BAB 6 PENUTUP VI-245



DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Hubungan RPJPD Kabupaten Wonosobo dengan Dokumen lainnya I-4

Gambar II. 1 Peta Administrasi Kabupaten Wonosobo II-7

Gambar II. 2 Topografi Kabupaten Wonosobo II-8

Gambar II. 3 Peta Kemiringan Lahan II-8

Gambar II. 4 Peta Curah Hujan di Kabupaten Wonosobo II-9

Gambar II. 5 Peta Jenis Tanah Kabupaten Wonosobo..... II-11

Gambar II. 6 Posisi Kabupaten Wonosobo Terhadap Delineasi DAS Serayu dan Wilayah Sungai (WS) Serayu..... II-12

Gambar II. 7 Peta Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) II-13

Gambar II. 8 Cekungan Air Tanah di Kabupaten Wonosobo II-15

Gambar II. 9 Peta Mata Air Kabupaten Wonosobo II-16

Gambar II. 10 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Wonosobo..... II-17

Gambar II. 11 Peta Perubahan Lahan Terbangun di Kabupaten Wonosobo Tahun 2000-2022 II-18

Gambar II. 12 Peta Risiko Multibahaya Kabupaten Wonosobo II-20

Gambar II. 13 Peta Kemampuan Lahan Kabupaten Wonosobo II-33

Gambar II. 14 Penggunaan Lahan di Kabupaten Wonosobo..... II-35

Gambar II. 15 Rekapitulasi Capaian Pembangunan Rendah Karbon di Kabupaten Wonosobo II-38

Gambar II. 16 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir (JER2) Tahun 2023 dan 2043 II- di Kabupaten Wonosobo II-45

Gambar II. 17 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Ruang Hidup (JEC1) Tahun 2023 dan 2043 di Kabupaten Wonosobo II-46

Gambar II. 18 Konektivitas dan Aksesibilitas Kabupaten Wonosobo terhadap Simpul/Hub Transportasi Udara, Laut dan Kereta Api II-72

Gambar II. 19 Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) II-87

Gambar II. 20 Destinasi Wisata Kabupaten Wonosobo II-93

Gambar II. 21 Letak “5 Dieng Baru” II-94

Gambar II. 22 Karakteristik Generasi (Gen X & Gen Y) dalam Membentuk Ekosistem Ekonomi Periode Tahun 2025-2045..... II-116

Gambar II. 23 Karakteristik Generasi (Gen Z & Gen Alpha) dalam Membentuk Ekosistem Ekonomi Periode Tahun 2025-2045..... II-117

Gambar V. 1 Keterkaitan Misi, Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Wonosobo Periode 2025-2045 V-208

Gambar V. 2 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Wonosobo dalam RTRW Tahun 2023-2043..... V-239



Gambar V. 3 Wilayah Pengembangan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045, B. Kondisi Fisiografis Pengembangan Kabupaten Wonosobo V-239

Gambar V. 4 Persebaran Lokus Pengembangan Kawasan Perdesaan yang sudah ditetapkan Bupati Tahun 2024 V-240





DAFTAR GRAFIK

Grafik II. 1 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018–2023..... II-21

Grafik II. 2 Capaian Parameter Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2018-2023..... II-22

Grafik II. 3 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 II-28

Grafik II. 4 Persentase Pengelolaan Sampah Tahun 2019-2023 II-38

Grafik II. 5 Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah II-40

Grafik II. 6 Jumlah Penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2023 II-47

Grafik II. 7 Persentase Angka Kemiskinan Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2023 II-50

Grafik II. 8 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Wonosobo Tahun 2002-2023 II-51

Grafik II. 9 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Wonosobo Tahun 2007-2023 II-51

Grafik II. 10 PDRB Per Kapita Wonosobo Tahun 2010-2023..... II-52

Grafik II. 11 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Wonosobo Tahun 2005–2023..... II-52

Grafik II. 12 Rasio Ketergantungan Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2023 II-53

Grafik II. 13 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2023 II-54

Grafik II. 14 Laju Pertumbuhan PDRB 6 (enam) Sektor Pendukung Agrobisnis dan Pariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2023 II-55

Grafik II. 15 Inflasi Tahunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2023 II-58

Grafik II. 16 Nilai Rata-Rata LQ PDRB ADHK Kabupaten Wonosobo II-59

Grafik II. 17 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Wonosobo Tahun 2004-2023 II-61

Grafik II. 18 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Wonosobo Tahun 2012-2023 II-63

Grafik II. 19 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Wonosobo Tahun 2018-2022 II-63

Grafik II. 20 Angka Harapan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2004-2023 II-68

Grafik II. 21 Kondisi Kemantapan Jalan di Kabupaten Wonosobo II-71

Grafik II. 22 Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 ... II-74

Grafik II. 23 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ... II-76



Grafik II. 24 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak.... II-77

Grafik II. 25 Persentase Akses Air Minum Layak di Kabupaten
Wonosobo Tahun 2019-2023 II-77

Grafik II. 26 Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten
Tahun 2020-2023 II-78

Grafik II. 27 Nilai Investasi Dalam Negeri di Kabupaten Wonosobo
Tahun 2019-2023 II-80

Grafik II. 28 Nilai ICOR Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2023 II-80

Grafik II. 29 Jumlah Produksi Tanaman Pangan
di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 (Ton) II-82

Grafik II. 30 Perkembangan Produksi Komoditas Tanaman Pangan
Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023..... II-82

Grafik II. 31 Perkembangan Nilai PoU (*Prevalensi of Undernourishment*)
Kabupaten Wonosobo II-85

Grafik II. 32 Jumlah Penduduk 15 Tahun ke atas yang bekerja di
Sektor Pertanian Tahun 2019-2023 II-86

Grafik II. 33 Kontribusi PAD dari Retribusi Tiket Wisata II-89

Grafik II. 34 Jumlah Wisatawan Kabupaten Wonosobo
Tahun 2005–2023..... II-89

Grafik II. 35 Hotel dan Penginapan di Kabupaten Wonosobo
Tahun 2012-2023 II-90

Grafik II. 36 Kontribusi Terhadap Pendapatan Sektor Pariwisata..... II-91

Grafik II. 37 Rata–Rata Lama Tinggal Wisatawan (hari) di Kabupaten
Wonosobo Tahun 2019-2023 II-91

Grafik II. 38 Nilai IRB & SAKIP Kabupaten Wonosobo
Tahun 2019-2023 II-95

Grafik II. 39 Nilai Indeks SPBE Domain dan Aspek II-97

Grafik II. 40 Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah
Tahun 2019-2023 II-98

Grafik II. 41 Piramida Penduduk Kabupaten Wonosobo II-113

Grafik II. 42 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur
Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2045..... II-115



DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Rerata Curah Hujan dan Hari Hujan Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2018–2023 II-9

Tabel II. 2 Curah Hujan Bulanan Kabupaten Wonosobo II-10

Tabel II. 3 Bendung Kewenangan Kabupaten II-14

Tabel II. 4 Luas per Penggunaan Lahan di Kabupaten Wonosobo II-17

Tabel II. 5 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang II-18

Tabel II. 6 Rekapitulasi Kejadian Bencana Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 - 2022 II-20

Tabel II. 7 Tingkat Sedimentasi (Sedimen Suspensi) yang Masuk Waduk Mrica yang Berasal dari Hulu Segmen Kabupaten Wonosobo II-24

Tabel II. 8 Status Pangan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 II-25

Tabel II. 9 Luas Grid Pangan Berdasarkan Status di Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 II-26

Tabel II. 10 Status Pangan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2045 II-27

Tabel II. 11 Luas Grid Pangan Berdasarkan Status di Kabupaten Wonosobo Tahun 2045 II-27

Tabel II. 12 Status Air Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 II-29

Tabel II. 13 Luas Grid berdasarkan Status Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 II-30

Tabel II. 14 Status Air Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2045 II-31

Tabel II. 15 Luas Grid berdasarkan Status Kabupaten Wonosobo Tahun 2045 II-32

Tabel II. 16 Luas Kawasan Tiap Kelas Kemampuan Lahan II-33

Tabel II. 17 Daya Dukung Lahan terhadap Penggunaan Lahan Eksisting di Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 II-33

Tabel II. 18 Persentase Luas RTH di Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2021 II-34

Tabel II. 19 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari Berbagai Sektor di Kabupaten Wonosobo Tahun 2018-2022 II-37

Tabel II. 20 Jumlah TPS dan TPS 3R serta Volume Sampah Masuk TPA Wonorejo Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2023 II-39

Tabel II. 21 Jasa Lingkungan Hidup Penyediaan Bahan Pangan (JEP1) Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 II-41

Tabel II. 22 Jasa Lingkungan Hidup Penyediaan Air (JEP2) Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 II-42

Tabel II. 23 Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir (JER2) Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 II-44



Tabel II. 24 Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Ruang Hidup (JEC1) Kabupaten Wonosobo Tahun 2022..... II-45

Tabel II. 25 Jumlah Penduduk Kabupaten Wonosobo berdasarkan *Sex Ratio* pada Tahun 2010-2023 II-48

Tabel II. 26 Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Wonosobo II-49

Tabel II. 27 Distribusi PDRB Kabupaten Wonosobo ADHB Menurut Lapangan Usaha..... II-57

Tabel II. 28 *Location Quotient* berdasarkan PDRB ADHK Kabupaten Wonosobo II-60

Tabel II. 29 Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023..... II-64

Tabel II. 30 Tabel Penilaian Indeks Daya Saing Daerah II-65

Tabel II. 31 Tabel Komponen Pilar Ketrampilan dalam IDSD II-69

Tabel II. 32 Komposisi Latar Belakang Pendidikan Tenaga Kerja Kabupaten Wonosobo Tahun 2023..... II-69

Tabel II. 33 Tabel Komponen Pilar Infrastruktur dalam IDSD II-70

Tabel II. 34 Kontribusi dan Persentase PMTB Terhadap PDRB Kab. Wonosobo (dalam miliar rupiah)..... II-81

Tabel II. 35 Perkembangan Komoditas Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 II-83

Tabel II. 36 Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023..... II-83

Tabel II. 37 Data Kelembagaan Pertanian dan Perikanan Tahun 2019-2023..... II-86

Tabel II. 38 PDRB Pariwisata Atas Dasar Harga Konstan (dalam Jutaan Rupiah) II-88

Tabel II. 39 Kontribusi masing-masing komponen terhadap pembentukan PDRB Pariwisata (dalam persen) II-88

Tabel II. 40 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Kabupaten Wonosobo 2019-2023..... II-96

Tabel II. 41 Capaian Nilai Indeks SPBE II-96

Tabel II. 42 Nilai RoA BUMD II-99

Tabel II. 43 Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Makro II-100

Tabel II. 44 Rekapitulasi Capaian Kinerja dan Predikat Kinerja RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025 II-102

Tabel II. 45 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 II-104

Tabel II. 46 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 II-105

Tabel II. 47 Proyeksi Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 II-106



Tabel II. 48 Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 II-108

Tabel II. 49 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Penduduk II-110

Tabel II. 50 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Penduduk II-112

Tabel II. 51 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Produktif dan Non Produktif Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 II-114

Tabel II. 52 Proyeksi Jumlah Anak Usia Sekolah, Jumlah Murid, Jumlah Guru dan Jumlah Sekolah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 II-120

Tabel II. 53 Proyeksi Jumlah Anak Usia Sekolah, Jumlah Murid, Jumlah Guru dan Jumlah Sekolah Kabupaten Wonosobo Tahun 2035 II-121

Tabel II. 54 Proyeksi Jumlah Anak Usia Sekolah, Jumlah Murid, Jumlah Guru dan Jumlah Sekolah Kabupaten Wonosobo Tahun 2040 II-122

Tabel II. 55 Proyeksi Jumlah Anak Usia Sekolah, Jumlah Murid, Jumlah Guru dan Jumlah Sekolah Kabupaten Wonosobo Tahun 2045 II-124

Tabel II. 56 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 II-126

Tabel II. 57 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Wonosobo Tahun 2030-2035 II-127

Tabel II. 58 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Wonosobo Tahun 2040-2045 II-128

Tabel II. 59 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2025 II-129

Tabel II. 60 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Wonosobo Tahun 2030-2035 II-130

Tabel II. 61 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Wonosobo Tahun 2040-2045 II-131

Tabel II. 62 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 II-132

Tabel II. 63 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 II-133

Tabel II. 64 Kebutuhan Fasilitas Sarana Peribadatan Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 II-135

Tabel II. 65 Proyeksi Kebutuhan Sarana Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga di Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 II-136

Tabel II. 66 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Hunian Tidak Bertingkat) di Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 II-137



Tabel III. 1 Isu Strategis Global, Nasional, Provinsi dan Daerah..... III-166

Tabel IV. 1 Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Wonosobo dengan
Visi RPJPD Jawa Tengah Tahun 2025-2045..... IV-185

Tabel IV. 2 Penyelarasan Sasaran Visi dan Indikator RPJPD
Kabupaten Wonosobo dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025-2045 IV-187

Tabel IV. 3 Indikator dan Target Capaian Sasaran Visi RPJPD
Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045..... IV-188

Tabel IV. 4 Penyelarasan Misi RPJPD Kabupaten Wonosobo dengan
RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJP Nasional
Tahun 2025-2045 IV-189

Tabel V. 1 Arah Kebijakan..... V-202

Tabel V. 2 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama
Pembangunan dan Target Terwujudnya Pembangunan
Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata yang Maju dan
Berkelanjutan Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045..... V-215

Tabel V. 3 Sasaran pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama
Pembangunan dan Target Terwujudnya Tata Kelola
Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas Kabupaten
Wonosobo Tahun 2025-2045 V-218

Tabel V. 4 Sasaran pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama
Pembangunan dan Target Terwujudnya Infrastruktur Layanan
Dasar dan Pendukung Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045..... V-220

Tabel V. 5 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama
Pembangunan dan Target Terwujudnya Sumber Daya
Manusia yang Sejahtera dan Berkualitas di Kabupaten
Wonosobo Tahun 2025-2045 V-224

Tabel V. 6 Sasaran pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama
Pembangunan dan Target Terwujudnya Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan
Kabupaten Wonosobo V-228

Tabel V. 7 Penyelarasan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan
RPJPD Kabupaten Wonosobo dengan RPJPD Provinsi
Jawa Tengah..... V-228

Tabel V. 8 Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Wonosobo
Tahun 2025-2045 V-230

Tabel V. 9 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok 234

Tabel V. 10 Keterkaitan Antara Upaya Super Prioritas
(*Game Changers*) dengan Arah Kebijakan..... V-244



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Wonosobo merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah. Kabupaten Wonosobo berkembang menjadi salah satu kabupaten yang dikenal dengan potensi pertanian dan keindahan alam yang menjadi daya tarik wisatawan. Lahan pertanian yang subur berpotensi untuk dikembangkan dalam sektor pertanian, hortikultura dan perkebunan yang menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Keindahan alam dan kearifan lokal Wonosobo sangat mendukung tumbuh dan berkembangnya sektor pariwisata dan berperan dalam menggerakkan perekonomian daerah. Kabupaten Wonosobo memiliki potensi alam dan budaya yang saling bersinergi dalam mendukung tumbuh dan berkembangnya sektor agrobisnis dan pariwisata. Di sisi lain, Kabupaten Wonosobo secara geografis memiliki ekosistem dan sumber daya alam yang vital seperti peran sebagai kawasan hulu beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS), terutama DAS Serayu Hulu yang kondisinya perlu dipulihkan. Kabupaten Wonosobo perlu menjaga daya dukung kualitas lingkungan, keanekaragaman hayati dan kawasan konservasi di daerah. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan harus dapat merumuskan konsep pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan jangka panjang menjadi landasan yang esensial dalam mengoptimalkan potensi tersebut dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi, sosial, maupun daya dukung lingkungan. Kabupaten Wonosobo berkomitmen untuk dapat mengarahkan sumber daya, energi dan investasi ke arah yang tepat untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menuju kesejahteraan yang berkelanjutan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memberikan mandat pada Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu bentuk dari perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJPD merupakan dokumen perencanaan daerah selama 20 tahun dan berisi substansi yang memuat visi, misi, serta arah pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan



pembangunan nasional. Proses penyusunan dokumen RPJPD dilakukan secara sistematis, terencana serta bertahap berdasarkan kondisi, potensi dan proyeksi kebutuhan kabupaten/kota. Penyusunan RPJPD dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik daerah Kabupaten Wonosobo yaitu fokus pada identifikasi dan penanganan isu-isu strategis dengan sasaran yang dinamis, berorientasi pada tindakan antisipatif dengan analisis yang tepat serta memberikan arah pembangunan Kabupaten Wonosobo selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Dokumen RPJPD sebagai instrumen pembangunan daerah perlu untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat dengan memperhatikan dinamika perubahan melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Dengan demikian, RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 ini disusun sebagai pedoman dalam acuan pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Wonosobo berkomitmen untuk mendorong pembangunan yang berorientasi jangka panjang, mendorong pemerataan serta mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Untuk mendukung hal ini, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendorong partisipasi masyarakat dalam agenda pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dari Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2045 meliputi:

- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- c. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- e. Undang-undang Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah



- Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 - m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
 - o. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

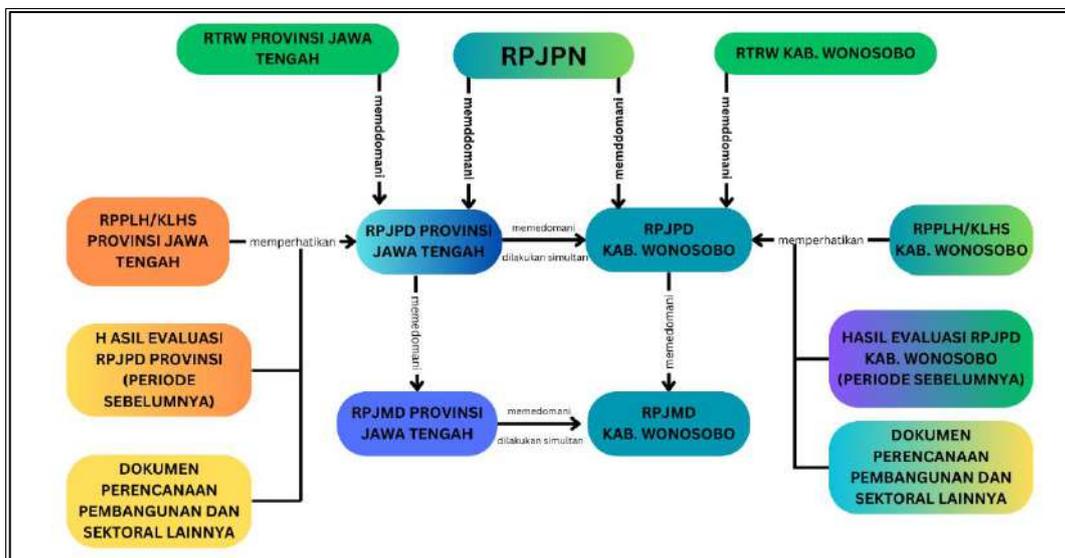
RPJPD Kabupaten Wonosobo adalah dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan daerah yang mencakup periode 20 (dua) tahun. Dokumen ini disusun berdasarkan pedoman dari RPJPN, RPJPD Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo. Dokumen ini



memiliki dimensi makro yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

Dokumen RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2045 disusun selaras dan berpedoman pada:

- 1) RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045, meliputi keselarasan dalam visi, misi/agenda pembangunan, arah pembangunan dan indikator kinerja utama pembangunan;
- 2) RTRW Kabupaten Wonosobo 2023-2043, meliputi keselarasan dalam arahan rencana tata ruang utamanya struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis daerah.



Gambar I. 1 Hubungan RPJPD Kabupaten Wonosobo dengan Dokumen lainnya

Gambar di atas menjelaskan bahwa penyusunan RPJPD Kabupaten Wonosobo berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten Wonosobo. Penyusunan RPJPD Kabupaten Wonosobo juga memperhatikan RPPLH/KLHS Kabupaten Wonosobo, hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Wonosobo periode sebelumnya dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektor lainnya. RPJPD Kabupaten Wonosobo dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah nantinya akan menjadi pedoman untuk penyusunan RPJMD Kabupaten Wonosobo setiap periode 5 (lima) tahun sekali.

Penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 juga memperhatikan:

- 1) Hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025, terutama pada tingkat ketercapaian kinerja dan rekomendasi;
- 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045, meliputi substansi isu strategis dan arah kebijakan;



- 3) Rencana sektoral lainnya yang secara substansi berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah seperti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan lainnya.

Dokumen RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2045 juga akan menjadi acuan dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Wonosobo pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan yang kemudian diturunkan menjadi RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 disusun dengan maksud untuk menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Wonosobo untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang, yang diwujudkan dalam visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok dan indikator utama pembangunan.

Tujuan Penyusunan RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 yaitu:

- Sebagai panduan pembangunan jangka panjang daerah bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- Menjaga arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun;
- Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah daerah maupun antara pusat dengan daerah;
- Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 terdiri atas:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045.

BAB II: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisi penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah yang memaparkan beragam aspek seperti: 1) aspek geografi dan demografi, 2) aspek kesejahteraan masyarakat, meliputi kesejahteraan ekonomi dan sosial budaya, 3) aspek daya saing, meliputi penjelasan daya saing ekonomi daerah, SDM, fasilitas/infrastruktur wilayah dan iklim investasi, 4) aspek pelayanan umum yang menjelaskan kondisi tata



kelola pemerintahan dalam rangka pemberian pelayanan umum tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, meliputi bidang pertanian dan pariwisata dan bidang tata kelola, 5) evaluasi hasil RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025, 6) tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan 7) pembangunan pusat pertumbuhan wilayah.

Bab ini juga menyajikan tren demografi dan analisis kebutuhan sarana prasarana publik pada Tahun 2025-2045 serta menjelaskan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

BAB III: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini berisi analisis permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

BAB IV: VISI DAN MISI DAERAH

Bab ini menyajikan visi dan misi yang menggambarkan keadaan atau cita-cita pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun mendatang. Visi dan Misi memedomani Visi Indonesia Emas 2045 serta hasil penyelarasan dengan RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 sesuai dengan karakteristik, inovasi dan pengembangan daerah.

BAB V: ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Bab ini menjelaskan hubungan antara arah kebijakan, sasaran pokok, arah pembangunan dan indikator utama pembangunan dalam tahapan pembangunan pada setiap 5 (lima) tahun selama 4 (empat) periode.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini memuat tentang kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta manajemen risiko.



BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

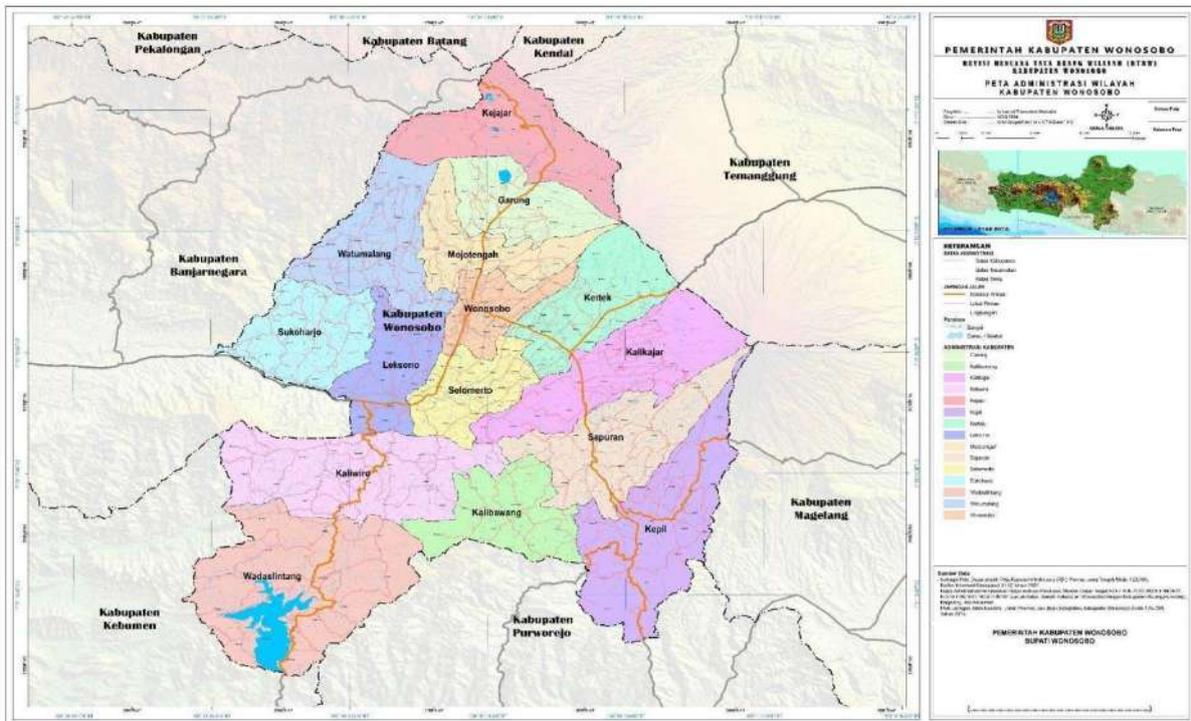
2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kondisi keruangan wilayah menggambarkan interaksi fenomena fisik geografis dan sosial dengan lingkungan. Kondisi fisik kewilayahan dan dinamika interaksi manusia dan lingkungan merupakan faktor penting yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi keruangan dengan mendeskripsikan tentang letak geografis, kondisi fisik medan dan penggunaan lahan yang digunakan sebagai pertimbangan untuk perencanaan pembangunan. Aspek demografi berkaitan dengan informasi dinamika kependudukan yang terdiri dari aspek statis dan dinamis kependudukan di Kabupaten Wonosobo seperti jumlah, struktur, maupun komposisi penduduk yang dijelaskan dalam subbab ini.

2.1.1. Aspek Geografi

a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Wonosobo merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah yang terletak di 7°.43'.13" dan 7°.04'.40" garis Lintang Selatan (LS) serta 109°.43'.19" dan 110°.04'.40" garis Bujur Timur (BT). Luas Kabupaten Wonosobo berdasarkan RTRW Tahun 2023-2043 yaitu 1.011,623 km² atau 101.162,3 ha atau setara dengan 3,03% dari luas keseluruhan wilayah Provinsi Jawa Tengah.



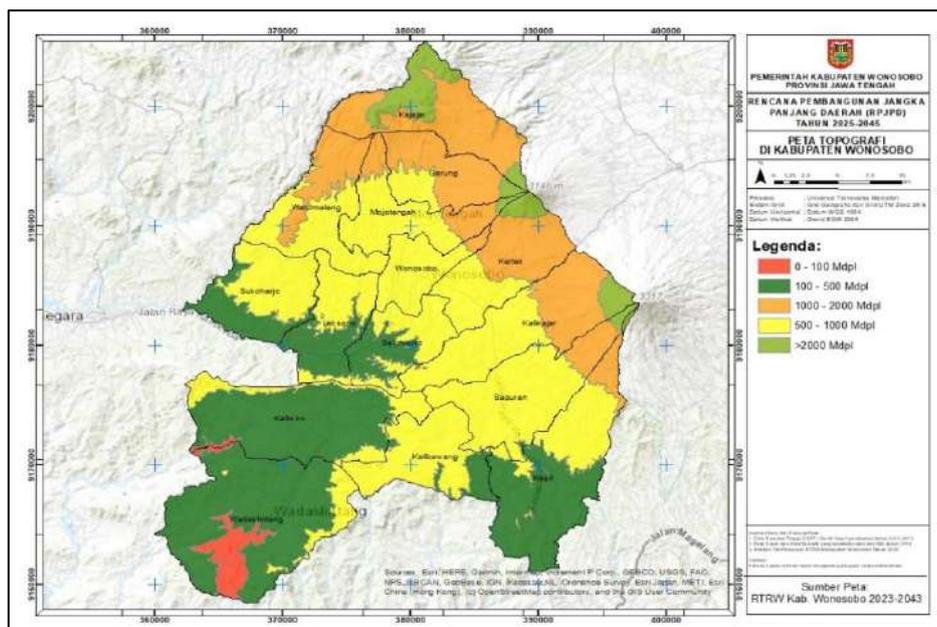
Gambar II. 1 Peta Administrasi Kabupaten Wonosobo

Sumber: DPUPR Kabupaten Wonosobo, 2023



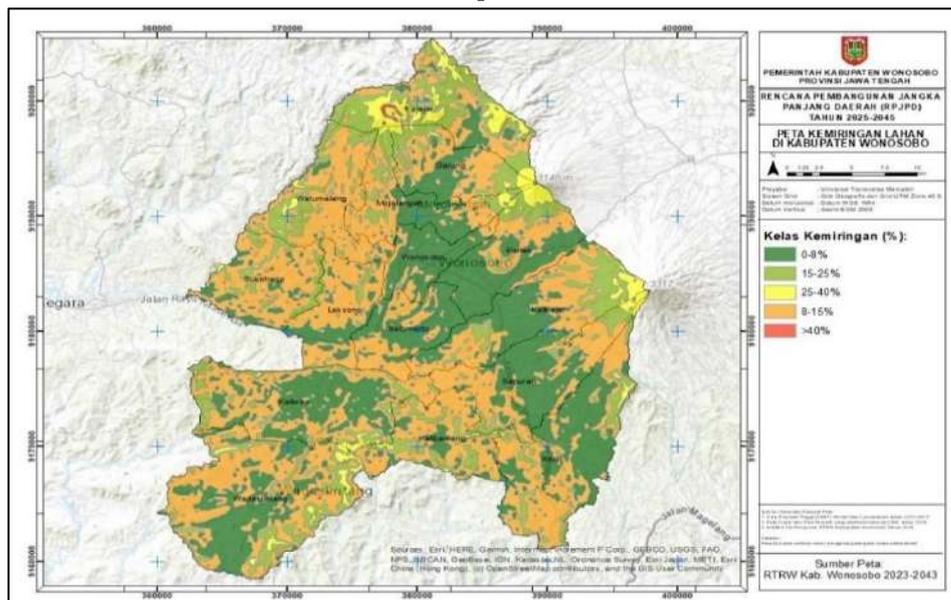
b. Kondisi Morfologi, Topografi dan Klimatologi

Kabupaten Wonosobo memiliki topografi perbukitan sampai pegunungan dengan ketinggian antara 250-2.250 meter di atas permukaan laut. Kemiringan lahan di Kabupaten Wonosobo juga cukup bervariasi, dimulai dari kemiringan dengan klasifikasi datar (0-8%) hingga kemiringan dengan klasifikasi sangat curam (>40%). Kondisi ini sering menyebabkan Kabupaten Wonosobo terdampak bencana alam seperti tanah longsor. Sebagian besar wilayah Kabupaten Wonosobo terletak di daerah pegunungan, yang menjadikannya lebih rentan terhadap potensi bencana alam yang terkait dengan topografi yang curam.



Gambar II. 2 Topografi Kabupaten Wonosobo

Sumber: DPUPR Kabupaten Wonosobo, 2023

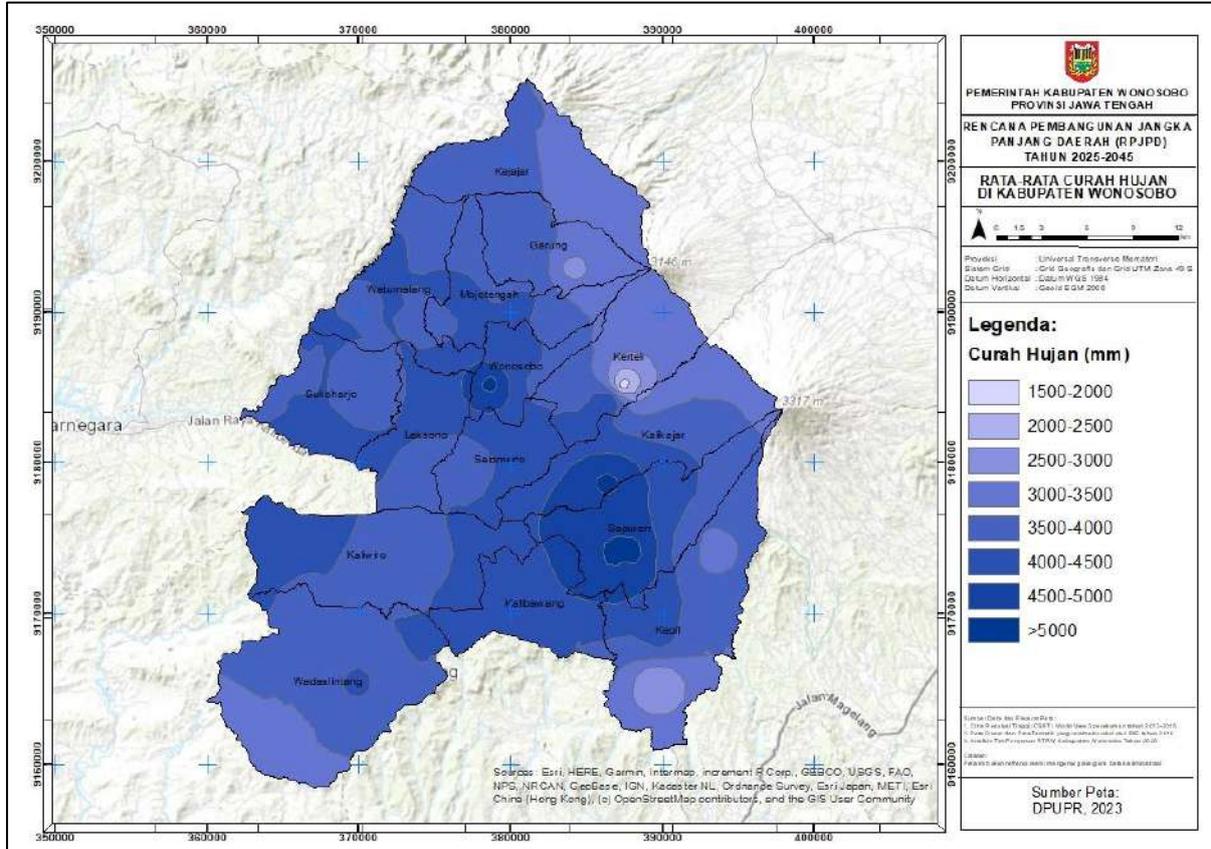


Gambar II. 3 Peta Kemiringan Lahan

Sumber: DPUPR Kabupaten Wonosobo, 2023



Kabupaten Wonosobo memiliki kondisi topografi yang beragam dengan dominasi topografi pegunungan hingga terdapat gunung yang berada di Kabupaten Wonosobo. Kondisi ini akan memberikan pengaruh terhadap kondisi cuaca lokal di Kabupaten Wonosobo. Dilihat dari kondisi curah hujan di Kabupaten Wonosobo tersaji dalam gambar peta berikut.



Gambar II. 4 Peta Curah Hujan di Kabupaten Wonosobo

Sumber: DPUPR Kabupaten Wonosobo, 2023

Curah hujan di Kabupaten Wonosobo diukur berdasarkan data dari 15 stasiun hujan yang terdapat di setiap kecamatan. Rentang 2018-2023 rata-rata curah hujan di Kabupaten Wonosobo sebesar 312,01 mm. Rerata curah hujan per kecamatan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel II. 1 Rerata Curah Hujan dan Hari Hujan Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2018–2023

No.	Nama Stasiun	Tinggi Stasiun (mdpl)	Rerata Curah Hujan (mm)	Rerata Hari Hujan
1	Wadaslintang	270	294,57	16
2	Kepil	550	359,86	15
3	Sapuran	760	384,02	16
4	Kalibawang	650	339,51	16
5	Kaliwiro	300	253,58	15
6	Sukoharjo	415	326,15	15
7	Leksono	600	302,72	16



No.	Nama Stasiun	Tinggi Stasiun (mdpl)	Rerata Curah Hujan (mm)	Rerata Hari Hujan
8	Selomerto	575	271,03	16
9	Kalikajar	1050	333,4	18
10	Kertek	847	348,3	17
11	Wonosobo	755	288,9	19
12	Watumalang	900	349,98	19
13	Mojotengah	856	266,82	17
14	Garung	1019	278,63	18
15	Kejajar	1400	282,71	29

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, 2024

Tabel II. 2 Curah Hujan Bulanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2016–2023

No.	Bulan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		(mm/bln)							
1	Januari	313	437	N/A	N/A	196,5	26,94	244,7	76,6
2	Februari	335	564	N/A	N/A	136,9	19,77	92,6	93,8
3	Maret	515	389	N/A	N/A	458,4	16,97	262,4	287,4
4	April	345	416	N/A	N/A	331,2	10,18	190,1	89,1
5	Mei	392	206	N/A	N/A	234,7	8,82	58,6	162,4
6	Juni	341	208	N/A	N/A	41,5	15,6	98,8	80,5
7	Juli	257	39	N/A	N/A	32,4	3,32	121,7	117,5
8	Agustus	159	6	N/A	N/A	12,3	6,19	101,5	2
9	September	479	84	N/A	N/A	37,2	13,55	333,5	13
10	Oktober	486	369	N/A	N/A	448,1	9,73	348,6	43,5
11	November	648	561	N/A	N/A	269,7	24,4	388,7	246,4
12	Desember	498	480	N/A	N/A	623,5	20,68	189,9	213,4

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo, 2017-2024

c. Kondisi Geologi dan Tanah

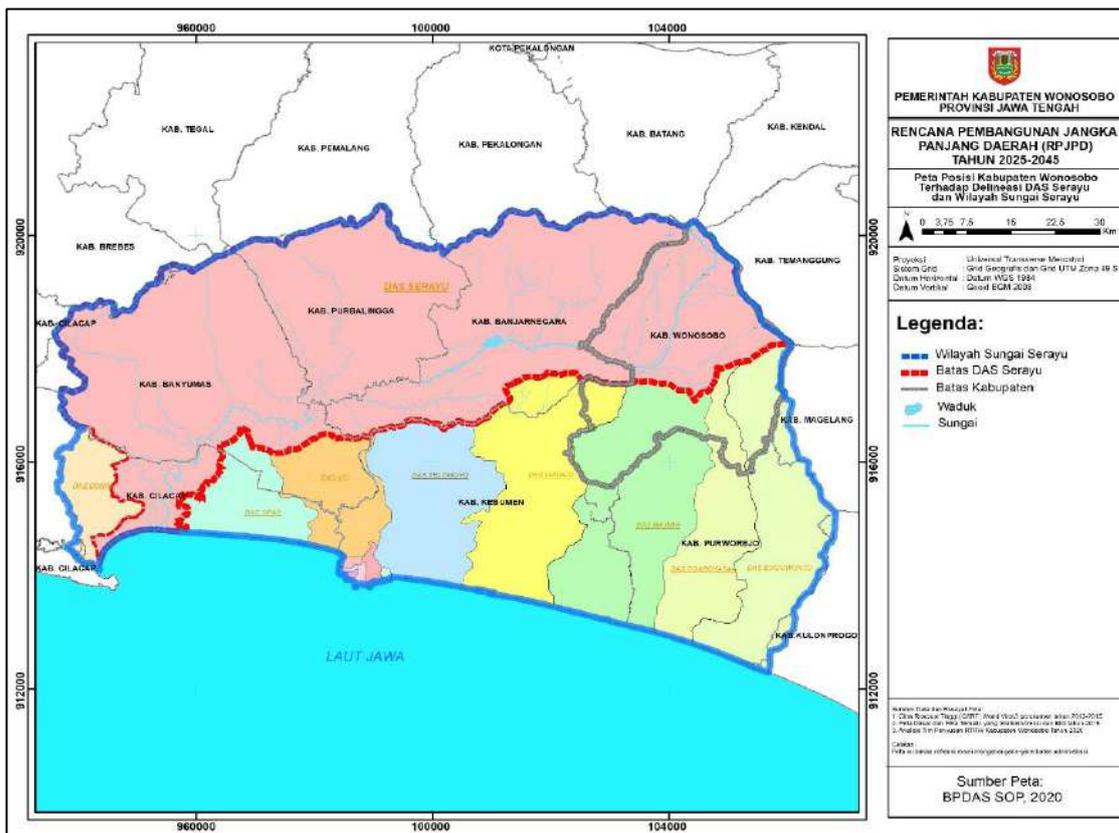
Kabupaten Wonosobo terletak di dalam zona fisiografi Pegunungan Serayu Selatan Bagian Utara dan menempati bagian tengah dari zona fisiografi tersebut. Wilayah ini didominasi oleh endapan gunungapi kuartar, yang masih menunjukkan ketampakan kerucut vulkanik seperti Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Sementara itu, di bagian lain terdapat gunungapi Dieng yang berumur lebih tua yang membentuk *plateau* (dataran tinggi). Sebagai daerah yang terletak di sekitar gunungapi muda, Kabupaten Wonosobo memiliki tanah yang subur. Kondisi ini mendukung perkembangan pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat Kabupaten Wonosobo.

Apabila ditinjau dari struktur geologinya, Kabupaten Wonosobo termasuk ke dalam kategori pegunungan muda. Kondisi ini menjadikan



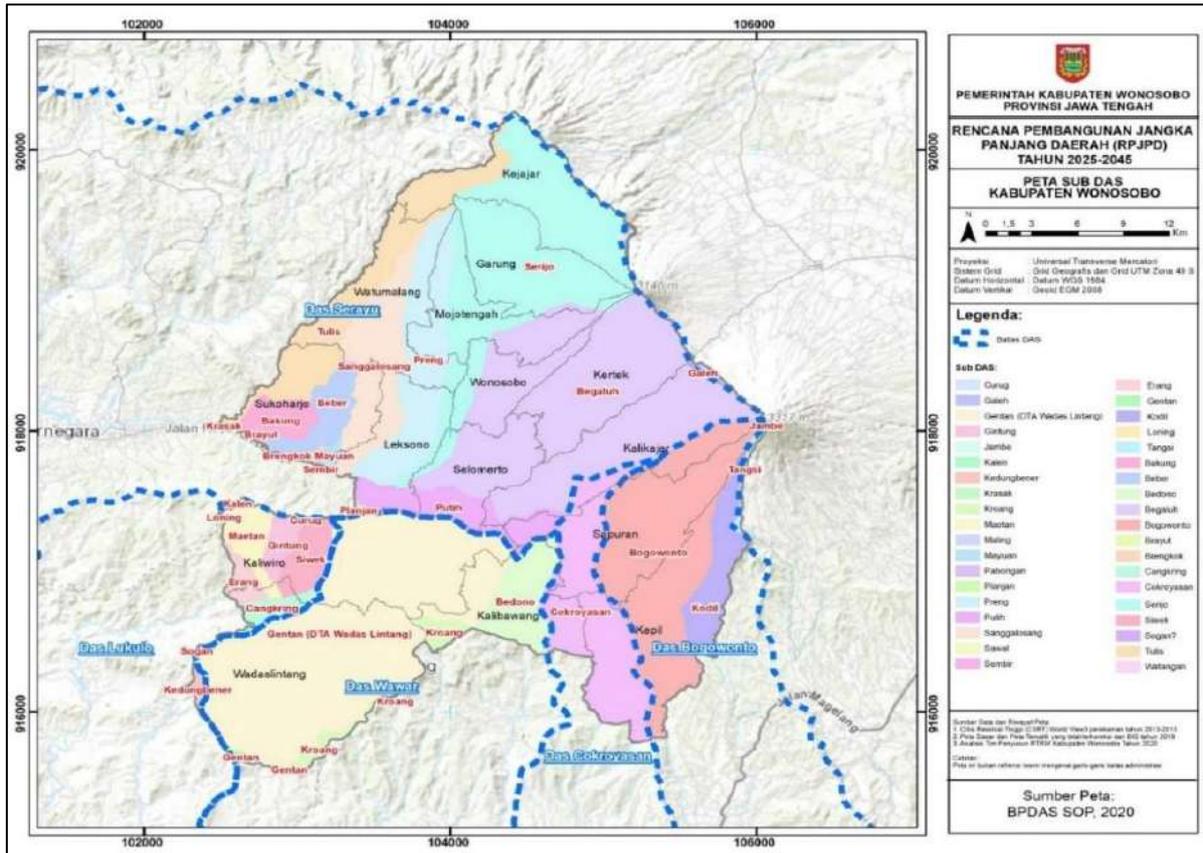
d. Kondisi Hidrologi

Kondisi geografis Kabupaten Wonosobo juga dapat dijelaskan melalui aspek hidrologi yang memiliki beberapa sumber daya yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan meliputi sungai, waduk dan telaga serta bendung. Air permukaan berupa sungai di Kabupaten Wonosobo sebagian telah digunakan untuk irigasi, pertanian dan air minum. Sungai tersebut adalah Sungai Serayu, Sungai Bogowonto, Sungai Begaluh, Sungai Semagung, Sungai Sanggrahan dan Sungai Luk Ulo. Aliran sungai yang berada di wilayah Kabupaten Wonosobo termasuk dalam beberapa daerah aliran sungai yaitu DAS Serayu, DAS Bogowonto, DAS Jalicokroyasan, DAS Wawar Medono, DAS Luk Ulo dan lain sebagainya. DAS yang terluas di Kabupaten Wonosobo adalah DAS Serayu. Wilayah Wonosobo menjadi kawasan hulu DAS Serayu. Saat ini, DAS Serayu termasuk dari 15 (lima belas) DAS prioritas nasional yang harus dipulihkan kondisinya. Akan tetapi, saat ini kondisi DAS Serayu dalam kondisi yang kritis terkait dengan adanya degradasi lahan yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di Waduk Mrica (Kabupaten Banjarnegara).



Gambar II. 6 Posisi Kabupaten Wonosobo Terhadap Delineasi DAS Serayu dan Wilayah Sungai (WS) Serayu

Sumber: BPDAS Serayu Opak Progo, 2020



**Gambar II. 7 Peta Sub Daerah Aliran Sungai (DAS)
di Kabupaten Wonosobo**

Sumber: BPDAS Serayu Opak Progo, 2020

Menurut pembagian kewenangan wilayah sungai, seluruh Kabupaten Wonosobo termasuk Wilayah Sungai Serayu Opak (WS SO) yang juga menjadi wilayah sungai strategis nasional. Pengelolaan DAS dan WS bukan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten, namun karena berada di level bawah dekat dengan masyarakat dan lokasi, maka perlu ada koordinasi dan sinergi baik dalam pengelolaan DAS maupun WS.

Air permukaan berupa waduk dan telaga yang ada di Kabupaten Wonosobo meliputi Waduk Wadaslintang, Telaga Menjer, Telaga Warna dan Telaga Cebong. Waduk Wadaslintang merupakan waduk buatan yang berada di selatan Kabupaten Wonosobo dan berbatasan dengan Kabupaten Kebumen. Telaga Menjer, Telaga Warna dan Telaga Cebong merupakan telaga alami yang berada di Kawasan Dieng. Telaga Menjer tidak hanya menjadi salah satu objek wisata di Kawasan Dieng, namun juga dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dengan bendungan dan disebut sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Garung. Sampai pada Tahun 2023, di Kabupaten Wonosobo juga terdapat Proyek Strategis Nasional (PSN) yang masih pada tahap pembangunan yaitu Bendung Bener yang menampung air Sungai Bogowonto. Area genangan Bendung Bener sebagian besar berada di Kecamatan Kepil, lainnya berada di Kabupaten Purworejo. Bendung Bener



nantinya dapat mengatur aliran Sungai Bogowonto. Saat hujan, debit air dikendalikan untuk mengurangi banjir yang terjadi di wilayah bawah terutama di Kabupaten Purworejo. Saat musim kemarau air yang disimpan di bendungan diatur untuk dialirkan ke tempat yang membutuhkan untuk mengairi sawah yang berada di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan kondisi tersebut, peran Kabupaten Wonosobo sangatlah tinggi dalam upaya konservasi sumber daya air.

Kabupaten Wonosobo juga memiliki sejumlah bendung kewenangan kabupaten di beberapa sungai yang tersebar. Terdapat 41 (empat puluh satu) bendung dengan luas area >50 ha dan luas area 30-50 ha yang memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Wonosobo.

Tabel II. 3 Bendung Kewenangan Kabupaten

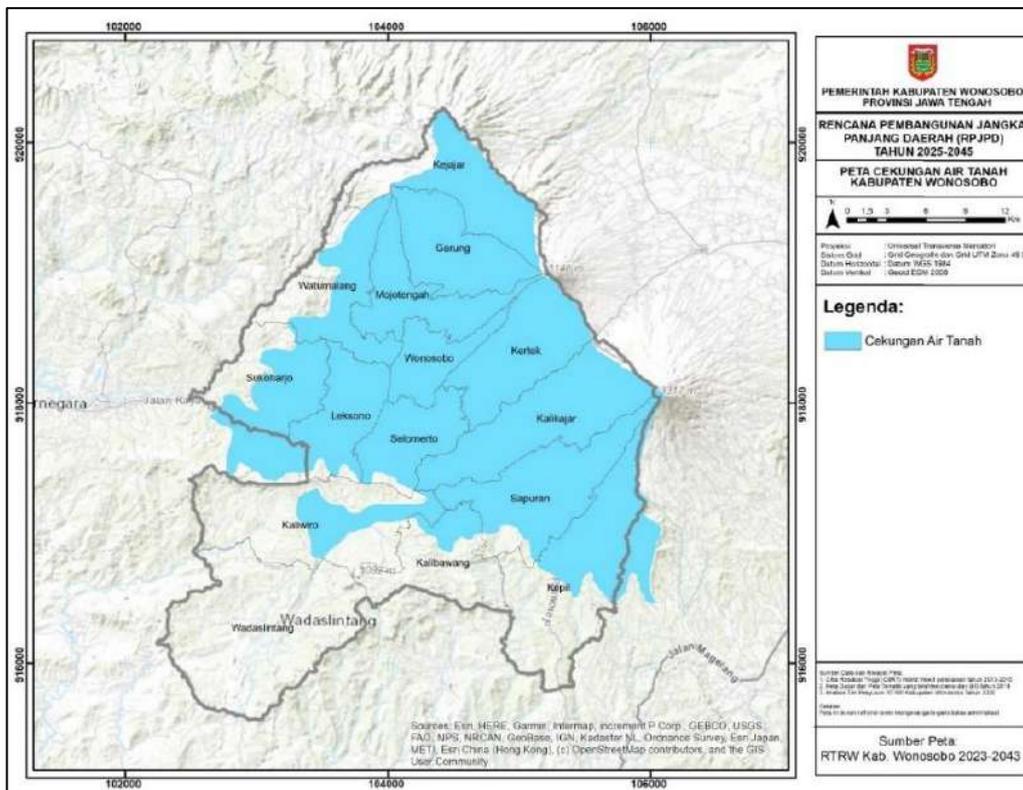
No	Daerah Irigasi	Luas Areal	Q Banjir	Q Sungai	Q kebutuhan
		(Ha)	(m ³ /dtk)	(m ³ /dtk)	(m ³ /dtk)
1	Aji Pagedangan	76	NA	0,29	0,54
2	Blaburan	70,24	NA	NA	0,5
3	Ceger	107,59	NA	NA	0,76
4	Geblok	55,16	445,51	59,95	0,39
5	Gintung	62,04	2,82	1,55	0,44
6	Jeruk	62	0,69	0,46	0,44
7	Jimat	115	445,51	59,95	0,81
8	Karangsari	141	0,59	0,35	1
9	Kedung Nongko	63,17	NA	NA	0,45
10	Kedung Tumpeng	103,96	6,62	3,58	0,73
11	Kembang	76,21	1,94	1,12	0,54
12	Klitih	190	1,39	1,09	1,34
13	Mangli	75,38	445,51	59,95	0,53
14	Muncar	314	1,78	1,39	2,22
15	Mungkung	165	5,382	2,69	1,17
16	Ngasinan	50	NA	NA	0,35
17	Rau	51	NA	NA	0,36
18	Wanganaji	297	445,51	59,95	2,1
19	Timbang	77	445,51	59,95	0,54
20	Tandu	84	445,51	59,95	0,59
21	Aji	40,60	NA	NA	0,29
22	Banjaran	30,00	NA	NA	0,21
23	Dalam	39,00	NA	NA	0,28
24	Jalaksono	47,93	NA	NA	0,34
25	Kedung Gupit	30,00	NA	NA	0,21
26	Kedung Mayong	39,01	NA	NA	0,28
27	Kemadu	47,85	NA	NA	0,34



No	Daerah Irigasi	Luas Areal	Q Banjir	Q Sungai	Q kebutuhan
		(Ha)	(m ³ /dtk)	(m ³ /dtk)	(m ³ /dtk)
28	Kudi	36,58	NA	NA	0,26
29	Kulon	37,27	NA	NA	0,26
30	Macan	32,65	NA	NA	0,23
31	Parakandowo	34,00	110,64	127,08	0,24
32	Penatus	37,39	NA	NA	0,26
33	Petung	36,40	NA	NA	0,26
34	Preng Leksono	39,00	NA	NA	0,28
35	Sarangan I	37,00	NA	NA	0,26
36	Sideng	35,86	NA	NA	0,25
37	Sijarakan	34,00	NA	NA	0,24
38	Sipring	36,85	NA	NA	0,26
39	Totogan	38,00	NA	NA	0,27
40	Tugu	42,00	NA	NA	0,30
41	Wuni	35,00	NA	NA	0,25

Sumber: DPUPR Kabupaten Wonosobo, 2024

Kabupaten Wonosobo dari sisi ketersediaan air tanah memiliki potensi air tanah yang sangat tinggi karena adanya Lembah Wonosobo yang berada di *intermountain* basin dari Gunungapi Sindoro dan Kompleks Gunung Dieng yang akhirnya membentuk Cekungan Air Tanah (CAT) Wonosobo.

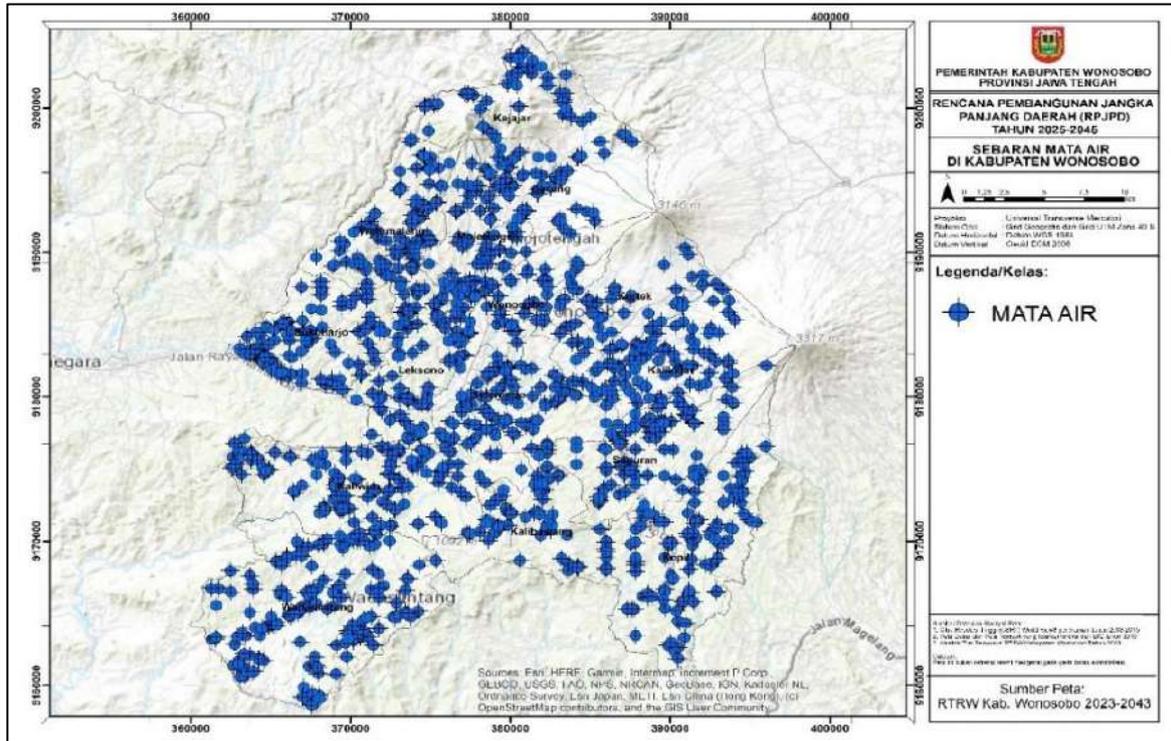


Gambar II. 8 Cekungan Air Tanah di Kabupaten Wonosobo

Sumber: DPUPR Kabupaten Wonosobo, 2023



CAT Wonosobo ini membentang di bagian utara-barat-tengah dan timur Wonosobo, sedangkan bagian selatan seperti Kecamatan Wadaslintang bukan termasuk area CAT Wonosobo. Sementara itu, dalam menjaga ketersediaan air maka perlu adanya peninjauan terhadap kondisi mata air yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan data yang tersedia, maka lokasi persebaran mata air di Kabupaten Wonosobo dapat dijelaskan dalam gambar peta berikut:



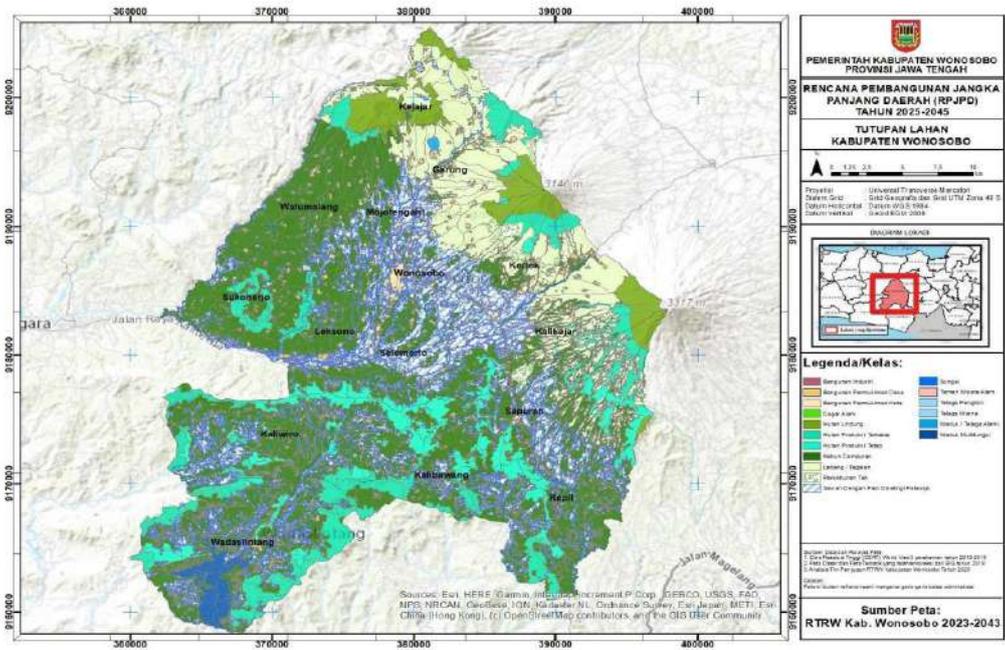
Gambar II. 9 Peta Mata Air Kabupaten Wonosobo

Sumber: DPUPR Kabupaten Wonosobo, 2023

Berdasarkan peta sebaran mata air di atas, hampir di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo terdapat mata air, yang didominasi di CAT Wonosobo. Kondisi ketersediaan mata air yang banyak ini juga mempengaruhi pada tingginya akses layanan air minum (capaian di atas 90%), meski untuk kategori aman masih di bawah 50%. Namun demikian, hal yang perlu diwaspadai adalah fenomena menurunnya debit mata air. Pada tahun 2023, persentase kondisi mata air yang menurun debitnya/rusak mencapai 12,07% (215 dari 1782 mata air yang terdata). Kondisi ini dipengaruhi oleh menurunnya kualitas daerah tangkapan air. Oleh karena itu, perlu upaya lebih dalam menjaga konservasi sumber daya air.

e. Kondisi Penggunaan Lahan

Gambaran penggunaan lahan di Kabupaten Wonosobo menggunakan Peta Rupa Bumi sebagai sumber dalam penyusunan RTRW Kabupaten Wonosobo tahun 2023-2043. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Wonosobo dapat digambarkan dalam peta berikut:



Gambar II. 10 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Wonosobo
Sumber: DPUPR Kabupaten Wonosobo, 2023

Penggunaan lahan di Kabupaten Wonosobo sampai 2023 masih didominasi oleh lahan pertanian yaitu sebesar 92,03% persen atau seluas 93.103,45 ha. Lahan pertanian ini terbagi menjadi lahan bukan sawah sebesar 80.383,38 ha (86%) dan lahan sawah 12.714 ha (14%). Total lahan sawah yang merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebesar 10.168,57 hektar (79,97%). Ketentuan ini sudah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nomor 521/566/2021 Tahun 2021 Tentang Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo dan sudah diinternalisasikan pada aturan tata ruang daerah. Dalam lima tahun terakhir ada alih fungsi lahan sawah rata-rata sebesar 2,48% per tahun ke lahan pertanian *non* sawah dan lahan *non* pertanian. Luas penggunaan lahan dapat dirincikan dalam tabel berikut:

Tabel II. 4 Luas per Penggunaan Lahan di Kabupaten Wonosobo

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)
1	Bangunan Industri	78,79
2	Bangunan Permukiman Desa	4.716,57
3	Bangunan Permukiman Kota	1.328,85
4	Cagar Alam	4,23
5	Hutan Lindung	4.601,38
6	Hutan Produksi Terbatas	9.311,93
7	Hutan Produksi Tetap	6.035,49
8	Kebun Campuran	46.303,04
9	Ladang/Tegalan	13.449,16
10	Perkebunan Teh	683,38



No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)
11	Sawah Dengan Padi Diselingi Palawija	12.714,84
12	Sungai	477,45
13	Taman Wisata Alam	35,91
14	Waduk/Telaga Alami	74,23
15	Waduk Multifungsi	1.346,75
Total		101.162,00

Sumber: DPUPR Kabupaten Wonosobo, 2023

Keterangan: Data Penggunaan Lahan dianalisis menggunakan data CSRT (Citra Satelit Resolusi Tinggi) Perakaman 2015 dan Validasi Lapangan Tahun 2019.

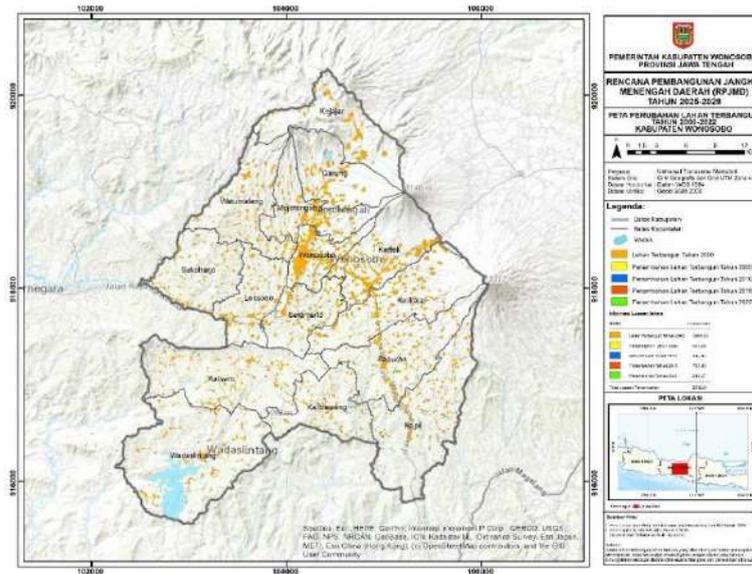
Tabel II. 5 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	84,14	84,25	81,78	84,06	84,13

Sumber: DPUPR Kabupaten Wonosobo, 2024

Sesuai Tabel II.5 di atas persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang mengalami fluktuatif, namun secara umum cenderung meningkat. Hal ini karena ada upaya untuk pengendalian pemanfaatan ruang terutama implementasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Regulasi ini sebagai perizinan dasar sebelum pelaku usaha dapat melanjutkan proses perizinan berusaha.

Kondisi perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Wonosobo juga dapat dilihat dari pola dan sebaran lahan terbangun. Berdasarkan data analisis spasial yang diolah dari data spasial kajian KLHS menggunakan metode *Normalized Difference Built Up Index* (NDBI) dapat terlihat bahwa perkembangan lahan terbangun pada gambar di bawah.



Gambar II. 11 Peta Perubahan Lahan Terbangun di Kabupaten Wonosobo Tahun 2000-2022

Sumber: DLH Kabupaten Wonosobo, 2023 (diolah)



Sebaran lahan terbangun berkorelasi dengan arah perkembangan perkotaan di Wonosobo. Perkembangan perkotaan di Wonosobo ditandai tumbuhnya wilayah perkotaan yang tidak terstruktur (*urban sprawl*) dan terjadi urbanisasi dalam konteks perubahan morfologi kenampakan perkotaan terutama di wilayah desa yang menjadi aglomerasi (pemekaran) perkotaan. Berdasarkan gambar di atas, perkembangan lahan terbangun paling besar terjadi pada periode tahun 2010-2015 dengan penambahan sebesar 753,43 hektar, meskipun secara visual pada peta di atas penambahan tidak terlihat secara jelas.

Perkembangan ruang di kawasan perkotaan cenderung mengalami perubahan fungsi kawasan dari kawasan tidak terbangun menjadi kawasan terbangun. Di Kawasan Perkotaan Wonosobo perkembangan selain dipengaruhi oleh kondisi topografi juga dipengaruhi oleh keberadaan pusat-pusat ekonomi, pendidikan serta koridor menuju Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN) Dieng. Hasilnya pembangunan di Kawasan Perkotaan Wonosobo lebih cepat mengarah pada 3 arah utama yaitu ke arah utara menuju Dieng, ke arah timur menuju Kawasan Perkotaan Kertek dan ke arah selatan menuju Kabupaten Banjarnegara dengan pusat berada di daerah sekitar Alun-Alun Wonosobo. Ketiga arah perkembangan yang ada pun dapat dilihat arah perkembangan ke utara lebih dominan dibanding ke arah lain. Hal ini dimungkinkan karena adanya jalur koridor KSPN Dieng yang mempunyai letak strategis skala nasional dan perkembangan pusat pendidikan di Kawasan Mojotengah.

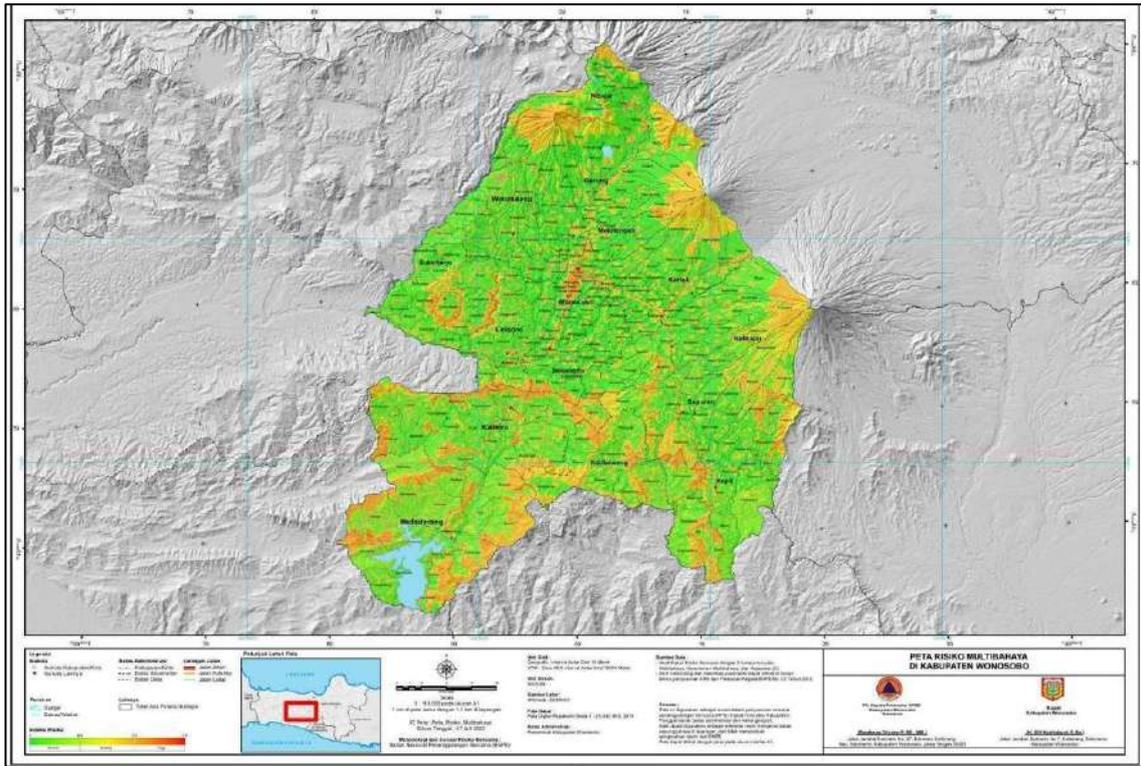
Kecenderungan perkembangan kawasan perdagangan dan jasa yang cukup pesat (banyak berkembang di koridor-koridor jalan utama) turut berdampak pada pengaturannya yang kurang memadai, baik dalam hal pengaturan Ruang Terbuka Hijau (RTH) maupun terkait pengaturan transportasi/lalu lintas. Seperti halnya di Kawasan Perkotaan Wonosobo, perkembangan kawasan perdagangan dan jasa berada di koridor jalan utama. Dampak dari aktivitas perdagangan dan jasa yaitu kemacetan, parkir di badan jalan, pelanggaran garis sempadan dan lain-lain.

f. Wilayah Rawan Bencana

Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Wonosobo tahun 2023-2028, menyebutkan bahwa terdapat sejumlah bencana alam yang mengancam Kabupaten Wonosobo, yakni bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem (puting beliung dan hujan lebat), gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunungapi dan tanah longsor. Faktor-faktor seperti topografi, hidrologi, perubahan penggunaan lahan dan iklim di Kabupaten Wonosobo berperan dalam meningkatkan risiko bencana. Selain itu, terdapat pula potensi terhadap risiko bencana *non* alam berupa epidemi dan wabah penyakit.



Berikut adalah peta yang menunjukkan risiko multibahaya yang ada di Kabupaten Wonosobo:



Gambar II. 12 Peta Risiko Multibahaya Kabupaten Wonosobo

Sumber: BPBD Kabupaten Wonosobo, 2023

Pemahaman terhadap risiko bencana di suatu wilayah dapat diperoleh melalui penelusuran terhadap sejarah kejadian bencana yang pernah terjadi. Dalam rentang waktu 2015-2022 tercatat 1.367 kejadian bencana yang melanda Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Wonosobo tahun 2023-2028, bencana hidrometeorologi menjadi bencana dengan kejadian yang paling sering terjadi di Wonosobo. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel II.6 yang menunjukkan rekapitulasi kejadian dan korban bencana alam hidrometeorologi selama kurun waktu tahun 2015-2022.

Tabel II. 6 Rekapitulasi Kejadian Bencana Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 - 2022

No.	Jenis Bencana	Total Kejadian	Korban Jiwa			Total Kerugian
			Meninggal Dunia	Luka-Luka	Mengungsi	
1	Banjir	36	-	-	-	Rp1.229.000.000
2	Banjir Bandang	8	-	-	-	Rp703.300.000
3	Cuaca Ekstrem	127	-	2	520	Rp5.655.865.000
4	Kekeringan	1	-	-	-	NA



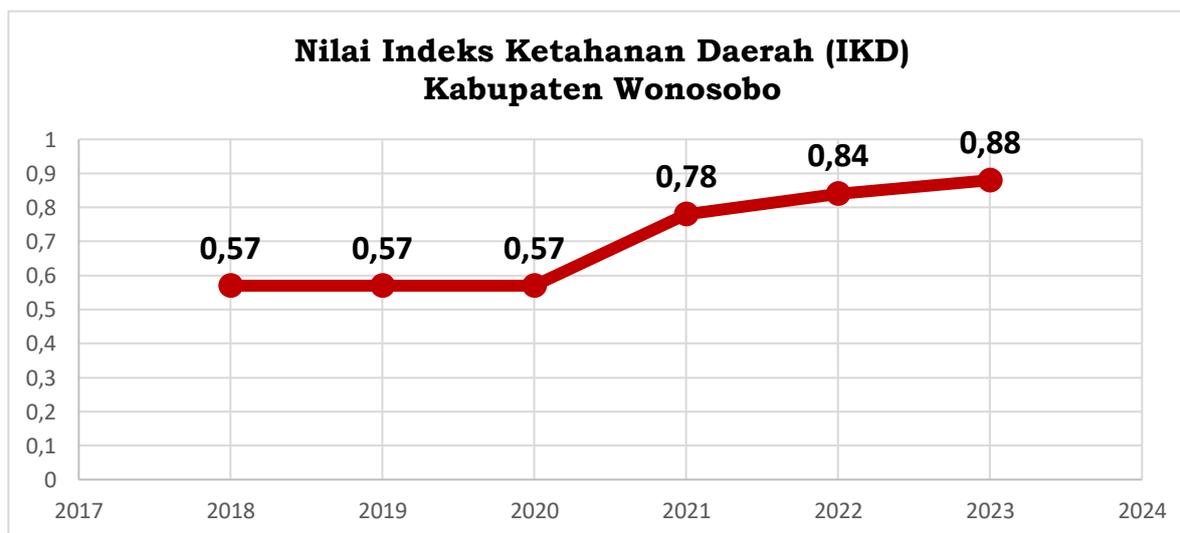
No.	Jenis Bencana	Total Kejadian	Korban Jiwa			Total Kerugian
			Meninggal Dunia	Luka-Luka	Mengungsi	
5	Tanah Longsor	1.178	7	13	104	Rp35.395.380.000

Sumber: BPBD Kabupaten Wonosobo, 2023

Selain bencana alam tanah longsor, bencana cuaca ekstrem juga menjadi jenis bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Wonosobo. Data BPBD Kabupaten Wonosobo menyebutkan bahwa di Kecamatan Kejajar terdapat potensi bahaya cuaca ekstrem pada kelas tinggi, bahaya kebakaran hutan, serta tanah longsor yang berada di kelas tinggi. Selama kurun waktu 2015-2022 terjadi 127 (seratus dua puluh tujuh) kejadian cuaca ekstrem yang melanda Kabupaten Wonosobo dan kerugian akibat cuaca ekstrem di Kabupaten Wonosobo ditaksir mencapai Rp5.655.865.000. Tabel di atas juga menunjukkan jenis bencana alam hidrometeorologi selain tanah longsor dan cuaca ekstrem yang terjadi di Kabupaten Wonosobo, yakni banjir dengan total kejadian sebanyak 36 (tiga puluh enam) kejadian, banjir bandang sebanyak 8 (delapan) kejadian, serta kekeringan sebanyak 1 (satu) kejadian selama kurun waktu 2015-2022.

g. Ketahanan Daerah

Wonosobo merupakan daerah yang memiliki risiko bencana, baik dari letusan gunung berapi maupun tanah longsor sehingga harus memiliki kesiapan dalam menghadapi bencana. Secara umum, indeks ketahanan daerah Kabupaten Wonosobo mengalami perubahan dari kategori sedang (Tahun 2018-2022) ke tinggi pada tahun 2023. Nilai tersebut tersaji dalam grafik di bawah ini.



Grafik II. 1 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018–2023

Sumber: BPBD Kabupaten Wonosobo, 2023



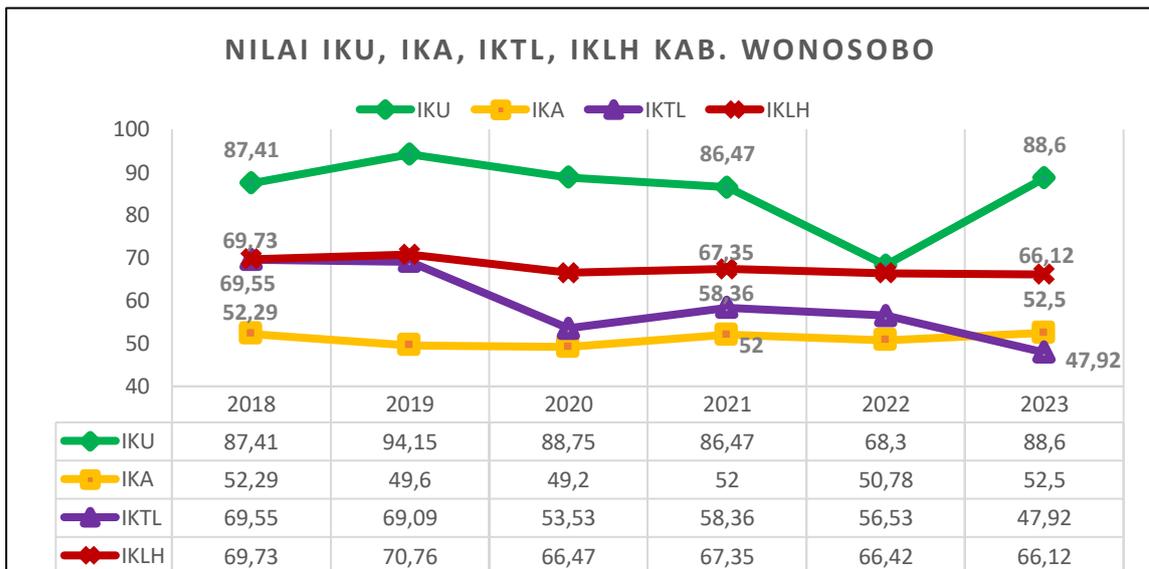
h. Lingkungan Hidup

Aspek lingkungan hidup memiliki urgensi yang tinggi dalam menentukan arah pembangunan dan kemajuan wilayah Kabupaten Wonosobo, terlebih bagi perencanaan pembangunan 20 (dua puluh) tahun mendatang. Dalam konstelasi regional Jawa Tengah, wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki peran strategis dalam konservasi lingkungan hidup terutama pada konservasi air dan tanah. Sebagian besar wilayah Kabupaten Wonosobo termasuk kawasan hulu daerah aliran sungai, bahkan menjadi kawasan hulu DAS prioritas nasional yaitu DAS Serayu yang harus dipulihkan kondisinya.

Indikator lingkungan hidup menjadi pertimbangan dalam pembangunan yang digunakan sebagai dasar untuk merealisasikan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kinerja urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Selain IKLH, gambaran aspek lingkungan hidup dapat dilihat dari analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan.

i. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Penilaian mutu lingkungan hidup dapat dihitung dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (*Environmental Quality Index*). IKLH merupakan acuan pengukuran yang digunakan untuk menilai dan mengetahui kualitas lingkungan dalam suatu wilayah tertentu. IKLH mencakup nilai sejumlah indikator, termasuk kualitas air, kualitas udara dan kualitas penggunaan lahan. Berikut merupakan data IKLH Kabupaten Wonosobo Tahun 2018-2023.



Grafik II. 2 Capaian Parameter Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo, 2024

Keterangan:

IKU : Indeks Kualitas Udara



IKA : Indeks Kualitas Air
IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Capaian IKLH Kabupaten Wonosobo mengalami tren yang dinamis setiap tahunnya. IKLH Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan sebesar 3,61 poin dari Tahun 2018 ke Tahun 2023. Kondisi IKLH Kabupaten Wonosobo masuk dalam kriteria sedang dan hanya pada Tahun 2019 masuk dalam kategori baik (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup). Berdasarkan Surat Sekretaris Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024, nilai IKLH Wonosobo berubah dari 66,12 menjadi 76,28. Perubahan capaian ini dikarenakan adanya perubahan metode perhitungan. Hal ini akan menjadi baseline dalam penyusunan target yang berlaku mulai tahun 2025.

Komponen pembentuk IKLH terdiri dari Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Dari ketiga komponen tersebut, indeks kualitas udara merupakan capaian terbaik dibanding indikator lainnya. Indeks Kualitas Udara Kabupaten Wonosobo selalu memperoleh predikat baik, bahkan pada tahun 2019 berhasil mencapai kategori sangat baik. Kualitas udara yang masih baik ini didukung dengan kondisi Kabupaten Wonosobo yang masih minim polusi udara dari industri dan transportasi (kendaraan bermotor). Indeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan angka yang masih berada pada kategori sedang. Sedangkan, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) justru mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir sehingga IKTL Kabupaten Wonosobo sampai tahun 2023 mencapai 47,92 poin. Beberapa kendala yang menjadi hambatan capaian indikator kualitas tutupan lahan di antaranya masih kurangnya penjagaan kawasan lindung, masih maraknya praktik budi daya pertanian yang tidak ramah lingkungan, belum optimalnya rehabilitasi lahan kritis dan masih belum optimalnya penegakan regulasi terhadap kepatuhan pada RTRW.

Selain IKLH, kondisi lingkungan hidup dapat dilihat dari tingkat sedimentasi Sungai Serayu sebagai sungai utama di Kabupaten Wonosobo. Kerusakan lingkungan di wilayah hulu, secara tidak langsung telah menciptakan ancaman tersendiri bagi keberlanjutan sumber daya air yang ada di Kawasan DAS dari hulu sampai dengan hilir yang melibatkan 5 (lima) wilayah administrasi kabupaten yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. DAS Serayu mengalami degradasi lahan yang ditandai dengan sedimentasi yang



terjadi di Waduk Mrica. Sedimentasi di Waduk Mrica selama 6 (enam) tahun terakhir sangat mengkhawatirkan.

Tabel II. 7 Tingkat Sedimentasi (Sedimen Suspensi) yang Masuk Waduk Mrica yang Berasal dari Hulu Segmen Kabupaten Wonosobo

No	Tahun	Sedimen Waduk Mrica (m ³ /tahun)	Sedimen Suspensi dari Sungai Serayu (m ³ /tahun)	Kontribusi Sedimen Suspensi dari Sungai Serayu Wonosobo terhadap Total Sedimen Waduk Mrica (%)
1	2016	6.839.330,00	4.433.494	64,82%
2	2017	8.190.072,06	4.058.604	49,56%
3	2018	5.623.806,24	2.232.645	39,70%
4	2019	6.830.332,94	2.889.591	42,31%
5	2020	6.428.998,49	2.676.834	41,64%
6	2021	10.302.911,98	6.588.680	63,95%
7	2022	10.837.956,37	4.165.389	38,43%
8	2023	7.996.680,53	3.450.948	43,15%

Sumber: PT. Indonesia Power, 2024

ii. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang menjadi acuan dalam perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pendekatan penilaian keduanya menghitung kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk mendukung kegiatan kehidupan manusia di dalamnya.

❖ Daya Dukung Pangan

Data yang dibutuhkan untuk menghitung daya dukung pangan dengan metode grid yaitu jasa penyedia pangan, produksi pertanian, penggunaan lahan dan data penduduk, serta dianalisis secara spasial untuk mengetahui persebarannya. Ketersediaan pangan digambarkan melalui tingkat penyedia jasa lingkungan untuk pangan, produksi pangan (terutama padi) dan jenis penggunaan lahan. Hasil produksi pangan dikonversi menjadi satuan kilo kalori (kkal) sedangkan kebutuhan pangan dihitung dengan pendekatan penggunaan lahan dan jumlah penduduk. Kebutuhan pangan penduduk juga dikonversi dalam satuan kilo kalori, yakni 2.100 kilo kalori per kapita per hari.

Berdasarkan hasil perhitungan, ditemukan bahwa status daya dukung pangan di Kabupaten Wonosobo masih berstatus belum terlampaui atau surplus. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah ketersediaan pangan yang lebih tinggi dibandingkan kebutuhannya, yakni kebutuhan pangan tahun 2023 sebesar 1.896.538.313,65 kkal, sedangkan



ketersediaannya bernilai 8.599.281.747,13 kkal. Kebutuhan pangan paling tinggi berada di Kecamatan Kertek, Wonosobo dan Mojotengah. Kebutuhan pangan yang tinggi selaras dengan kedudukan kecamatan tersebut sebagai pusat kegiatan di Kabupaten Wonosobo dengan jumlah penduduk yang lebih besar dari kecamatan lainnya. Sementara itu, ketersediaan pangan paling tinggi dimiliki oleh Kecamatan Wadaslintang, Kaliwiro dan Kalikajar yang memiliki lahan sawah dan tegalan/ladang yang relatif luas.

Tabel II. 8 Status Pangan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2023

Kecamatan	Kebutuhan Pangan (kkal)	Ketersediaan Pangan (kkal)	Status
Garung	117.952.744,31	462.565.314,59	BT (Surplus)
Kalibawang	60.909.295,94	450.922.818,77	BT (Surplus)
Kalikajar	152.590.055,83	790.883.696,63	BT (Surplus)
Kaliwiro	113.572.587,66	823.471.490,21	BT (Surplus)
Kejajar	102.080.342,53	344.114.114,35	BT (Surplus)
Kepil	140.013.786,27	719.819.693,32	BT (Surplus)
Kertek	191.236.079,35	542.641.057,45	BT (Surplus)
Leksono	101.201.305,88	437.074.965,57	BT (Surplus)
Mojotengah	151.108.736,75	596.263.706,46	BT (Surplus)
Sapuran	132.612.291,02	571.120.393,38	BT (Surplus)
Selomerto	121.320.041,93	374.541.329,38	BT (Surplus)
Sukoharjo	74.800.278,26	421.648.658,61	BT (Surplus)
Wadaslintang	134.959.032,06	1.000.303.090,15	BT (Surplus)
Watumalang	119.240.683,32	677.593.256,57	BT (Surplus)
Wonosobo	178.221.859,88	386.318.161,69	BT (Surplus)
Kab. Wonosobo	1.896.538.313,65	8.599.281.747,13	BT (Surplus)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo, 2023

Keterangan: BT : Belum Terlampaui (Surplus) & T : Terlampaui (Defisit)

Selanjutnya data ketersediaan pangan dianalisis secara spasial untuk mengetahui distribusi dan ketersediaan pangan dengan metode grid. Metode grid menghasilkan persebaran status grid berdasarkan perhitungan selisih antara kebutuhan dan ketersediaan pangan pada tiap grid. Luasan ketersediaan pangan per kecamatan berdasarkan metode grid digambarkan dalam tabel berikut.



**Tabel II. 9 Luas Grid Pangan Berdasarkan Status
di Kabupaten Wonosobo Tahun 2023**

Kecamatan	Terlampai (Defisit)		Belum Terlampaui (Surplus)		Luas Kecamatan (ha)
	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	
Garung	1.478,25	3,28%	3.006,00	5,44%	4.484,25
Kalibawang	2.461,24	5,46%	3.025,08	5,47%	5.486,32
Kalikajar	3.158,28	7,00%	4.759,10	8,61%	7.917,38
Kaliwiro	4.112,73	9,12%	5.611,99	10,15%	9.724,72
Kejajar	4.739,52	10,51%	2.744,66	4,96%	7.484,18
Kepil	5.532,36	12,26%	4.171,70	7,54%	9.704,06
Kertek	2.671,53	5,92%	3.110,18	5,62%	5.781,70
Leksono	1.610,65	3,57%	3.139,34	5,68%	4.749,99
Mojotengah	1.542,65	3,42%	3.780,00	6,83%	5.322,65
Sapuran	4.212,46	9,34%	3.253,50	5,88%	7.465,96
Selomerto	1.665,00	3,69%	2.853,00	5,16%	4.518,00
Sukoharjo	2.493,95	5,53%	2.924,90	5,29%	5.418,85
Wadaslintang	6.878,36	15,25%	6.293,23	11,38%	13.171,60
Watumalang	1.606,77	3,56%	4.502,28	8,14%	6.109,05
Wonosobo	618,75	1,37%	2.130,75	3,85%	2.749,50
Kab. Wonosobo	45.109,56	100%	55.305,71	100%	100.415,27

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo, 2023

Hasilnya, luas grid dengan status belum terlampaui (surplus) mendominasi sebesar 55.305,71 ha atau 55,08% dari total luas wilayah Kabupaten Wonosobo, sedangkan luas grid dengan status terlampaui (defisit) terdistribusi seluas 45.109,56 ha atau 44,92% dari total luas wilayah Kabupaten Wonosobo. Kecamatan Wadaslintang merupakan kecamatan dengan grid terlampaui yang paling luas, yakni 6.878,36 ha atau 52,22% dari luas Kecamatan Wadaslintang (13.171,6 ha). Hal ini disebabkan oleh adanya penggunaan lahan di Kecamatan Wadaslintang didominasi kebun campuran.

Secara keseluruhan, perlu dipahami bahwa dalam suatu kecamatan atau kabupaten yang berstatus belum terlampaui tidak bermakna seluruh wilayahnya tidak terlampaui/surplus pangan. Rincian dari luasan yang tidak terlampaui/surplus dapat dilihat pada Tabel II.9.

Pada Tahun 2045 proyeksi pangan dengan metode grid yang dipengaruhi komponen kebutuhan yang menyesuaikan dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, sedangkan ketersediaan cenderung tetap. Berdasarkan hasil perhitungan, ditemukan bahwa status daya dukung pangan di Kabupaten Wonosobo masih berstatus belum terlampaui (surplus).



Tabel II. 10 Status Pangan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2045

Kecamatan	Kebutuhan Pangan (kcal)	Ketersediaan Pangan (kcal)	Status
Garung	171.570.491,10	462.565.314,59	BT (Surplus)
Kalibawang	84.534.477,42	450.922.818,77	BT (Surplus)
Kalikajar	211.596.967,80	790.883.696,63	BT (Surplus)
Kaliwiro	137.474.494,98	823.471.490,21	BT (Surplus)
Kejajar	124.318.197,00	344.114.114,35	BT (Surplus)
Kepil	160.614.179,52	719.819.693,32	BT (Surplus)
Kertek	255.004.975,32	542.641.057,45	BT (Surplus)
Leksono	119.817.707,58	437.074.965,57	BT (Surplus)
Mojotengah	209.341.981,74	596.263.706,46	BT (Surplus)
Sapuran	184.218.516,36	571.120.393,38	BT (Surplus)
Selomerto	158.220.746,04	374.541.329,38	BT (Surplus)
Sukoharjo	82.262.422,50	421.648.658,61	BT (Surplus)
Wadaslintang	170.885.840,16	1.000.303.090,15	BT (Surplus)
Watumalang	146.934.436,50	677.593.256,57	BT (Surplus)
Wonosobo	245.072.795,34	386.318.161,69	T (Defisit)
Kab. Wonosobo	2.461.868.229,36	8.599.281.747,13	BT (Surplus)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo, 2023

Keterangan: BT : Belum Tercukupi (Surplus) & T : Tercukupi (Defisit)

Proyeksi Tahun 2045 jumlah kebutuhan pangan sebesar 2.461.868.229,36 kkal, sedangkan ketersediaannya bernilai 8.599.281.747,13 kkal. Kecamatan Kertek memiliki jumlah kebutuhan pangan paling besar bersama dengan Kecamatan Wonosobo. Kondisi ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk dengan populasi yang lebih besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Sedangkan, kebutuhan pangan paling rendah berada di Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Kalibawang. Luasan ketersediaan pangan per kecamatan berdasarkan metode grid digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel II. 11 Luas Grid Pangan Berdasarkan Status di Kabupaten Wonosobo Tahun 2045

Kecamatan	Terlampai		Belum Terlampai		Total (ha)
	ha	%	ha	%	
Garung	562,5	5,32%	6.502,50	7,13%	7.065,00
Kalibawang	274,5	2,60%	6.345,00	6,96%	6.619,50
Kalikajar	870,75	8,23%	8.295,75	9,10%	9.166,50
Kaliwiro	405	3,83%	9.774,00	10,72%	10.179,00
Kejajar	173,25	1,64%	5.809,50	6,37%	5.982,75
Kepil	634,5	6,00%	10.066,50	11,04%	10.701,00
Kertek	1.419,75	13,43%	4.821,75	5,29%	6.241,50
Leksono	427,5	4,04%	4.569,75	5,01%	4.997,25

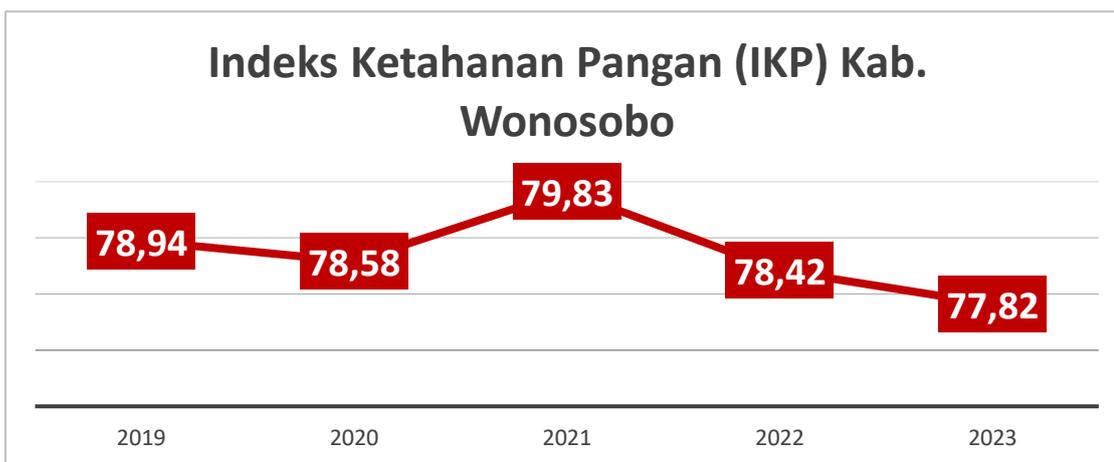


Kecamatan	Terlampauai		Belum Terlampauai		Total (ha)
	ha	%	ha	%	
Mojotengah	1.077,75	10,19%	3.861,00	4,24%	4.938,75
Sapuran	760,5	7,19%	4.941,00	5,42%	5.701,50
Selomerto	879,75	8,32%	2.722,50	2,99%	3.602,25
Sukoharjo	513	4,85%	5.361,75	5,88%	5.874,75
Wadaslintang	974,25	9,21%	11.938,50	13,10%	12.912,75
Watumalang	213,75	2,02%	5.114,25	5,61%	5.328,00
Wonosobo	1.388,25	13,13%	1.039,50	1,14%	2.427,75
Kab. Wonosobo	10.575,00	100,00%	91.163,25	100,00%	101.738,25

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo, 2023

Berdasarkan tabel di atas status pangan Kabupaten Wonosobo Tahun 2045 didominasi oleh status belum terlampauai sebesar 89,61% (dari luasan belum terlampauai 91.163,25 ha dibandingkan luas wilayah Kabupaten Wonosobo 101.738,25 ha), sedangkan grid yang sudah terlampauai sebesar 10,39%. Luasan yang memiliki status terlampauai paling besar adalah Kecamatan Kertek dan Kecamatan Wonosobo, sedangkan luasan terlampauai paling rendah adalah Kecamatan Kaliwiro.

Penyelenggaraan dan pengelolaan pangan memegang peranan krusial dalam menjamin ketersediaan pangan yang memadai di suatu wilayah. Kinerja pengelolaan pangan dapat dinilai dengan menganalisis dinamika perkembangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di daerah tersebut. Indeks Ketahanan Pangan ini terdiri dari tiga elemen utama, yaitu indeks ketersediaan, indeks keterjangkauan dan indeks pemanfaatan. Berikut merupakan data perkembangan IKP di Kabupaten Wonosobo tahun 2019-2023.



Grafik II. 3 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023

Sumber: Kementerian Pertanian, 2024



Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Wonosobo mengalami perubahan yang fluktuatif dari tahun 2019-2023, bahkan sejak tahun 2021 IKP selalu mengalami penurunan. Ketahanan pangan sangat tergantung pada tiga faktor utama, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

❖ **Daya Dukung Air Berbasis Grid**

Ketersediaan air di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023 dengan menggunakan analisis berbasis grid menghasilkan data kebutuhan dan ketersediaan air. Perhitungan mendasarkan pada penjumlahan kebutuhan dan ketersediaan air seluruh grid di tiap kecamatan. Kebutuhan air Kabupaten Wonosobo mencapai 1.711.666.506.86 m³ sedangkan ketersediaannya sebesar 12.274.589.807 m³. Hasil ini menunjukkan bahwa daya dukung air di Kabupaten Wonosobo belum terlampaui (surplus). Hasil analisis tiap kecamatan juga memperlihatkan bahwa ketersediaan air masih lebih tinggi dibandingkan kebutuhan air di seluruh kecamatan di Wonosobo

Tabel II. 12 Status Air Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2023

Kecamatan	Kebutuhan Air (m ³)	Ketersediaan Air (m ³)	Ststus
Garung	81.826.372	585.771.940	BT (Surplus)
Kalibawang	62.225.979	644.333.240	BT (Surplus)
Kalikajar	167.064.728	1.054.004.909	BT (Surplus)
Kaliwiro	160.048.146	1.072.133.335	BT (Surplus)
Kejajar	57.552.336	867.082.979	BT (Surplus)
Kepil	154.657.252	1.239.009.196	BT (Surplus)
Kertek	107.814.672	738.503.052	BT (Surplus)
Leksono	96.391.845	467.001.768	BT (Surplus)
Mojotengah	107.065.314	578.616.917	BT (Surplus)
Sapuran	101.166.127	852.170.390	BT (Surplus)
Selomerto	169.476.624	493.582.733	BT (Surplus)
Sukoharjo	66.771.117	641.499.547	BT (Surplus)
Wadaslintang	178.419.300	1.863.768.481	BT (Surplus)
Watumalang	108.271.060	845.903.040	BT (Surplus)
Wonosobo	92.915.629	331.208.279	BT (Surplus)
Total	1.711.666.506	12.274.589.807	BT (Surplus)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo, 2023

Keterangan: BT: Belum Terlampaui (surplus) dan T: Terlampaui (defisit)



Hasil analisis grid juga menghasilkan persebaran status grid berdasarkan perhitungan selisih antara kebutuhan dan ketersediaan air pada tiap grid. Luas grid yang telah terlampaui hanya sebesar 1,54% dari luas total wilayah Kabupaten Wonosobo. Luas grid yang masih berstatus belum terlampaui sebesar 99.782,86 hektar atau 98,46%. Berdasarkan perhitungan kebutuhan dan ketersediaan air pada masing- masing grid, Kecamatan Selomerto memiliki grid yang sudah terlampaui terluas yaitu 214,68 hektar atau 4,7% dari luas kecamatan. Sedangkan untuk kecamatan Kejajar memiliki persentase grid terlampaui terendah, yaitu 0,59% dari luas kecamatan.

**Tabel II. 13 Luas Grid berdasarkan Status
Kabupaten Wonosobo Tahun 2023**

Kecamatan	Terlampaui		Belum Terlampaui		Total
	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	
Garung	60.80	1.29	4,641.70	98.71	4,702.50
Kalibawang	47.77	0.86	5,512.65	99.14	5,560.41
Kalikajar	157.33	1.80	8,590.81	98.20	8,748.14
Kaliwiro	146.66	1.53	9,431.42	98.47	9,578.08
Kejajar	43.76	0.59	7,425.71	99.41	7,469.47
Kepil	127.28	1.28	9,847.93	98.72	9,975.21
Kertek	113.15	1.94	5,731.88	98.06	5,845.03
Leksono	105.39	2.39	4,313.37	97.61	4,418.76
Mojotengah	98.20	2.07	4,653.80	97.93	4,752.00
Sapuran	76.09	1.10	6,871.91	98.90	6,948.00
Selomerto	214.68	4.71	4,345.27	95.29	4,559.95
Sukoharjo	45.24	0.81	5,562.65	99.19	5,607.89
Wadaslintang	144.62	1.05	13,569.31	98.95	13,713.93
Watumalang	68.29	1.04	6,480.39	98.96	6,548.68
Wonosobo	108.50	3.73	2,804.08	96.27	2,912.58
Total	1,557.76	1.54	99,782.86	98.46	101,340.62

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo, 2023

Hasil proyeksi terhadap daya dukung air di Kabupaten Wonosobo belum mencakup perhitungan ketersediaan sumber air lain berupa mata air. Kondisi tersebut mempertimbangkan data yang dimasukkan dalam analisis daya dukung air di tahun 2023 sesuai Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 serta ketentuan perhitungan ketersediaan air pada SK 146 Tahun 2023, yang mengedepankan eksplanasi perhitungan air permukaan saja secara detail. Sementara itu, analisis daya dukung air pada tahun 2023 juga hanya memasukkan aspek input berupa curah hujan dari aliran permukaan saja. Oleh karena itu,



dinamika yang terjadi seperti fluktuasi debit mata air, menjadi kurang secara komprehensif.

Merujuk tata ruang tahun 2023-2043 yang kemudian dituangkan dalam dokumen KLHS RPJPD 2025-2045, hasil proyeksi status daya dukung air menunjukkan bahwa Kabupaten Wonosobo pada tahun 2045 berstatus “Belum Terlampaui (Surplus)”, dengan peningkatan rasio dari 1,67 pada tahun 2023 menjadi 25,27 pada tahun 2045. Kondisi ini didasarkan pada hasil analisis dengan metode grid yang dapat menggambarkan kondisi status daya dukung air secara detail.

Tabel II. 14 Status Air Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2045

Kecamatan	Kebutuhan Air (m ³)	Ketersediaan Air (m ³)	Status
Garung	32.339.736,00	819.766.802,36	BT (Surplus)
Kalibawang	15.538.435,20	634.882.493,66	BT (Surplus)
Kalikajar	45.564.768,00	981.912.255,37	BT (Surplus)
Kaliwiro	48.200.788,80	1.408.983.721,10	BT (Surplus)
Kejajar	20.850.048,00	547.981.857,97	BT (Surplus)
Kepil	41.568.379,20	1.400.040.675,72	BT (Surplus)
Kertek	43.331.587,20	660.701.791,16	BT (Surplus)
Leksono	29.987.884,80	680.099.573,12	BT (Surplus)
Mojotengah	31.313.606,40	697.668.628,58	BT (Surplus)
Sapuran	37.494.057,60	827.429.297,81	BT (Surplus)
Selomerto	24.622.358,40	360.919.578,52	BT (Surplus)
Sukoharjo	14.151.888,00	472.491.149,43	BT (Surplus)
Wadaslintang	45.681.321,60	1.472.001.714,20	BT (Surplus)
Watumalang	36.402.048,00	1.082.593.804,56	BT (Surplus)
Wonosobo	18.763.790,40	227.116.463,43	BT (Surplus)
Kab. Wonosobo	485.810.697,60	12.274.589.806,99	BT (Surplus)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo, 2023

Keterangan: BT: Belum Terlampaui (surplus) dan T: Terlampaui (defisit)

Luas grid pada Tahun 2045 yang telah terlampaui hanya sebesar 0,75% dari luas total wilayah Kabupaten Wonosobo. Luas grid yang masih berstatus belum terlampaui sebesar 100.982,25 hektar atau 99,25%. Berdasarkan perhitungan kebutuhan dan ketersediaan air pada masing-masing grid, Kecamatan Kertek memiliki grid yang sudah



terlampaui terluas yaitu 209,25 hektar atau 27,68% dari luas kecamatan.

**Tabel II. 15 Luas Grid berdasarkan Status
Kabupaten Wonosobo Tahun 2045**

Kecamatan	Terlampaui		Belum Terlampaui		Total (ha)
	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	
Garung	33,75	4,46	7.031,25	6,96	7.065,00
Kalibawang	0	0,00	6.619,50	6,56	6.619,50
Kalikajar	171	22,62	8.995,50	8,91	9.166,50
Kaliwiro	0	0,00	10.179,00	10,08	10.179,00
Kejajar	96,75	12,80	5.886,00	5,83	5.982,75
Kepil	0	0,00	10.701,00	10,60	10.701,00
Kertek	209,25	27,68	6.032,25	5,97	6.241,50
Leksono	15,75	2,08	4.981,50	4,93	4.997,25
Mojotengah	31,5	4,17	4.907,25	4,86	4.938,75
Sapuran	137,25	18,15	5.564,25	5,51	5.701,50
Selomerto	0	0,00	3.602,25	3,57	3.602,25
Sukoharjo	0	0,00	5.874,75	5,82	5.874,75
Wadaslintang	0	0,00	12.912,75	12,79	12.912,75
Watumalang	0	0,00	5.328,00	5,28	5.328,00
Wonosobo	60,75	8,04	2.367,00	2,34	2.427,75
Total	756	0.75	100.982,25	99.25	101.738,25

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo, 2023

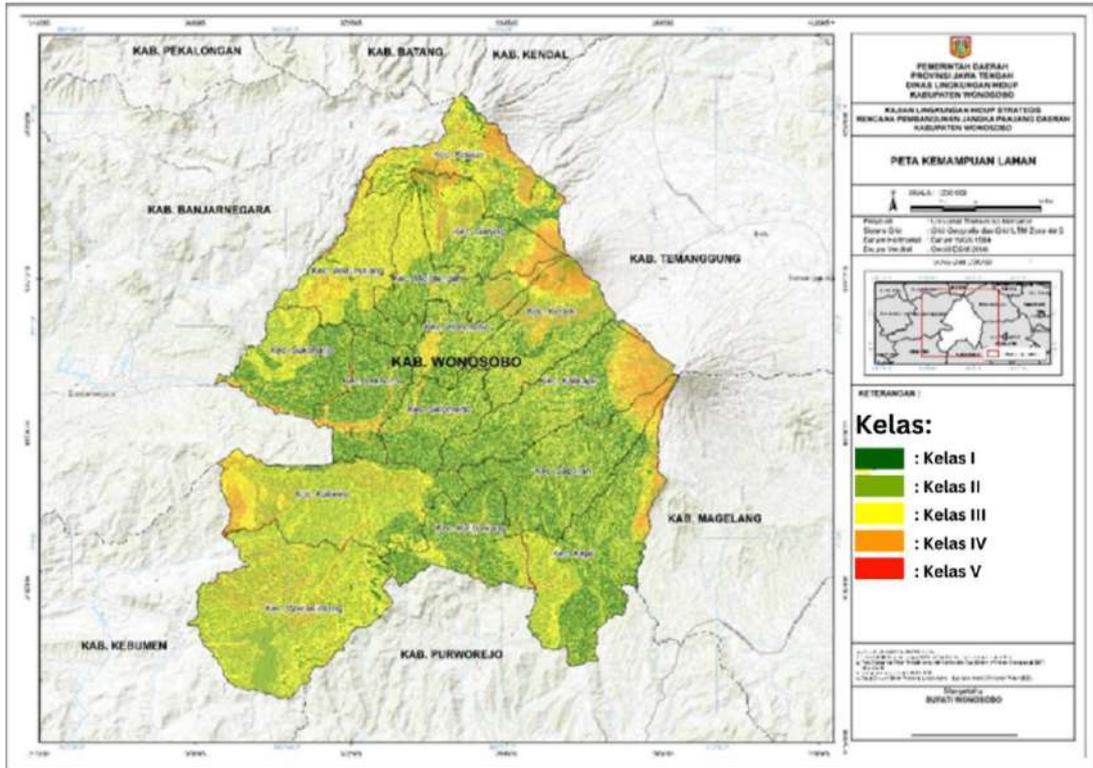
Konsekuensi pemakaian metode grid adalah dinamika alami berupa kemarau panjang maupun adanya aktivitas manusia yang berpotensi mempengaruhi ketersediaan air di Kabupaten Wonosobo tidak terdeteksi. Selain itu, hasil analisis grid ini dipengaruhi tahapan pembuatan grid yang harus utuh dan tidak mengikuti batas administrasi, sehingga luasan Kabupaten Wonosobo cenderung berbeda dengan tahun 2023.

❖ **Daya Dukung Kemampuan Lahan untuk Alokasi Pemanfaatan Ruang**

Kemampuan Lahan merupakan kondisi fisik dari setiap wilayah untuk dapat memberikan kemampuan lahan yang digunakan sebagai pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang di sini baik berupa wilayah konservasi, pertanian, permukiman, badan sungai dan lainnya. Kemampuan lahan ini dinilai dari kondisi geografisnya seperti tanah, topografi, drainase, geologi dan kondisi lingkungan hidup lainnya. Sehingga dengan menilai daya dukung kemampuan lahan ini dan diterapkan sebagai pemanfaatan tata ruang akan terjaga kondisi ideal dalam perencanaan tata ruang. Seperti kondisi lahan yang digunakan sebagai wilayah konservasi tentunya tidak digunakan sebagai permukiman, begitu pula lahan pertanian jangan digunakan sebagai



permukiman dan permukiman ditempatkan pada lahan yang memang tidak produktif. Analisis kajian KLHS Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 terhadap daya dukung lahan tersaji dalam Gambar II.12 berikut. Tabel II.16 menjelaskan luasan per kelas yang ada di Kabupaten Wonosobo dan Tabel II.17 menjelaskan kondisi daya dukung lahan terhadap penggunaan lahan terkini.



Gambar II. 13 Peta Kemampuan Lahan Kabupaten Wonosobo

Sumber: DLH Kabupaten Wonosobo, 2023

Tabel II. 16 Luas Kawasan Tiap Kelas Kemampuan Lahan

No.	Kelas Jasa	Luas (Ha)	Persentase
1	Kelas I	21.042,42	20%
2	Kelas II	34.390,05	34%
3	Kelas III	36.308,08	36%
4	Kelas IV	8.607,02	9%
5	Kelas V	620,45	1%

Sumber: DLH Kabupaten Wonosobo, 2023

Tabel II. 17 Daya Dukung Lahan terhadap Penggunaan Lahan Eksisting di Kabupaten Wonosobo Tahun 2023

Kelas	Penggunaan Lahan Eksisting	Luas (Ha)	Persentase (%)
I	Cagar Alam	4,23	0,00%
II	Bangunan Permukiman Desa	5.108,31	5,05%



Kelas	Penggunaan Lahan Eksisting	Luas (Ha)	Persentase (%)
II	Hutan Produksi Tetap	5.790,98	5,72%
II	Kebun Campuran	45.653,55	45,13%
II	Telaga Pengilon	4,22	0,00%
II	Telaga Warna	9,89	0,01%
II	Waduk/Telaga Alami	74,23	0,07%
II	Waduk Multifungsi	1.336,74	1,32%
III	Bangunan Industri	92,39	0,09%
III	Bangunan Permukiman Kota	1.490,79	1,47%
III	Hutan Produksi Terbatas	9.154,27	9,05%
III	Ladang / Tegalan	13.967,08	13,81%
III	Perkebunan Teh	683,38	0,68%
III	Sawah dengan Padi Diselingi Palawija	12.714,84	12,57%
III	Sungai	459,91	0,45%
III	Taman Wisata Alam	23,16	0,02%
IV	Hutan Lindung	4.594,03	4,54%
Total		101.162,00	100,00%

Sumber: DLH Kabupaten Wonosobo, 2023

iii. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memegang peranan yang signifikan dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat, mengurangi dampak perubahan iklim, menyediakan tempat rekreasi bagi masyarakat, serta meningkatkan estetika dan kualitas lingkungan hidup, baik perkotaan maupun perdesaan.

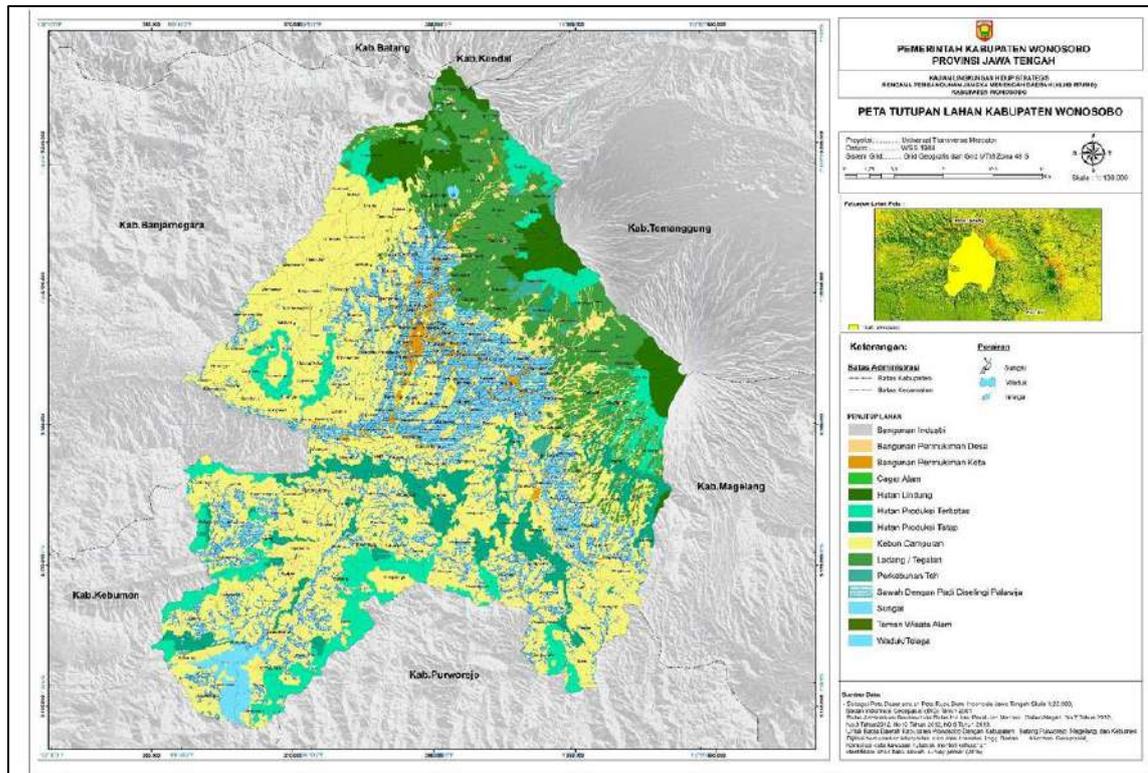
Tabel II. 18 Persentase Luas RTH di Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Luas RTH (%)	41,47	42,30	42,02	42,02	42,50

Sumber: DLH Kabupaten Wonosobo, 2021

Tingkat persentase luas RTH Kabupaten Wonosobo dari 2017-2021 menunjukkan adanya kenaikan meskipun relatif kecil. Perhitungan RTH ini masih berdasarkan asumsi penggunaan lahan yang masuk kriteria RTH seperti lapangan, makam, sempadan sungai, taman, jalur median jalan, jalur jalan, hutan rakyat. Dari perhitungan ini, persentase RTH telah melebihi standar minimal 30%. Pada saat ini, sedang dilaksanakan identifikasi ulang RTH sesuai pedoman Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya akan dituangkan dalam kebijakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan. Amanah RTH

pada pedoman tersebut bersifat lebih mendetail dan hanya pada kriteria tertentu. Kebijakan pemenuhan luasan RTH diarahkan pada 20% RTH publik dan 10% RTH privat.



Gambar II. 14 Penggunaan Lahan di Kabupaten Wonosobo

Sumber: DPUPR Kabupaten Wonosobo, 2023

Selain permasalahan deforestasi, kualitas lingkungan di Kabupaten Wonosobo juga dipengaruhi oleh pola penggunaan lahan yang utamanya digunakan untuk perkebunan kentang. Namun, kegiatan perkebunan kentang di Dataran Tinggi Dieng juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, karena proses penanamannya masih belum ramah terhadap lingkungan (penggunaan pupuk kimia dan menimbulkan erosi). Erosi dapat menyebabkan tanah menjadi tandus dan produktivitas lahan menurun. Sistem pengairan pertanian di wilayah Dataran Tinggi Dieng mengandalkan curah hujan (tadah hujan), sehingga ketika musim kemarau petani mengandalkan tampungan air (seperti telaga) dan sumber air untuk pengairannya.

Dampak negatif perkebunan kentang terhadap lingkungan dapat dikurangi melalui upaya-upaya konservasi lahan dan lingkungan. Upaya-upaya tersebut, antara lain melalui 1) pembukaan lahan secara terencana. Pembukaan lahan untuk perkebunan kentang harus dilakukan secara terencana dan memperhatikan aspek konservasi. Hutan lindung harus dilindungi dan penanaman kentang harus dilakukan pada lahan dengan kemiringan lereng yang rendah. 2) Pengelolaan lahan yang



berkelanjutan, di mana petani harus menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, seperti penggunaan pupuk organik, teknik konservasi tanah dan rotasi tanaman. 3) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi lahan dan lingkungan. Masyarakat perlu didorong untuk mendukung upaya-upaya konservasi lahan dan lingkungan. Upaya-upaya konservasi lahan dan lingkungan tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak negatif perkebunan kentang terhadap lingkungan dan meningkatkan kelestarian lingkungan di Kabupaten Wonosobo.

iv. Perubahan Iklim

Fenomena perubahan iklim akan berdampak pada perubahan masa tanam pertanian, munculnya embun upas, perubahan suhu. Aspek perubahan iklim dapat dilihat dari data emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Dampak perubahan iklim Wonosobo terutama pada kawasan yang rawan longsor akan meningkatkan potensi terjadinya bencana longsor dan banjir limpasan. Pada sisi pertanian, akan merusak tata waktu tanam sehingga terjadi ketidakpastian musim tanam. Munculnya embun upas juga dapat merusak tanaman. Di sisi lain, fenomena embun upas khususnya di Kawasan Dieng menarik minat wisatawan untuk merasakan sensasi udara dingin di bawah nol derajat *Celsius* sehingga terbentuk es/embun upas.

Berdasarkan data SIGN-SMART milik KLHK, emisi GRK di Kabupaten Wonosobo pada 2018 hingga 2022 didominasi oleh sektor energi dan pertanian. Sektor yang memiliki kontribusi paling kecil adalah sektor *Industrial Process and Product Use (IPPU)*. Emisi GRK yang tercatat dari sektor IPPU hanya ada pada 2022 dengan jumlah yang sangat kecil. Jumlah emisi pada sektor kehutanan secara umum menurun signifikan sejak 2020 hingga 2022. Sementara itu, sektor pertanian memiliki nilai yang fluktuatif sepanjang periode 2018-2022. Sektor energi mengalami peningkatan pada 2020 hingga 2022. Namun demikian, sektor limbah mengalami penurunan yang signifikan pada 2021.

Secara umum, emisi GRK di Kabupaten Wonosobo memiliki nilai yang fluktuatif sepanjang 2018-2022. Data total emisi pada 2022 cukup berbeda dengan data pada Laporan Akhir Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 dengan total 216,73 Gg CO₂. Hal ini tidak lepas dari signifikansi jumlah emisi sektor energi mencapai 298,53 Gg CO₂ dan sektor pertanian sebesar 285,48 Gg CO₂. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian dan pengintegrasian pada SIGN-SMART dengan penyedia data, dikarenakan data SIGN-SMART belum melalui *Quality Control (QC)* dan bersifat dinamis.



Pengurangan emisi GRK dari berbagai sektor di Kabupaten Wonosobo memerlukan kerjasama pentaheliks dan vertikal. Diperlukan aksi-aksi adaptasi dan mitigasi yang serius, mengingat Indonesia memiliki target penurunan emisi dari skenario *Business As Usual* (BAU) sebesar 314 Mton CO₂e pada 2030. Sejauh ini, progres pencapaian terhadap target BAU tersebut baru mencapai 11%.

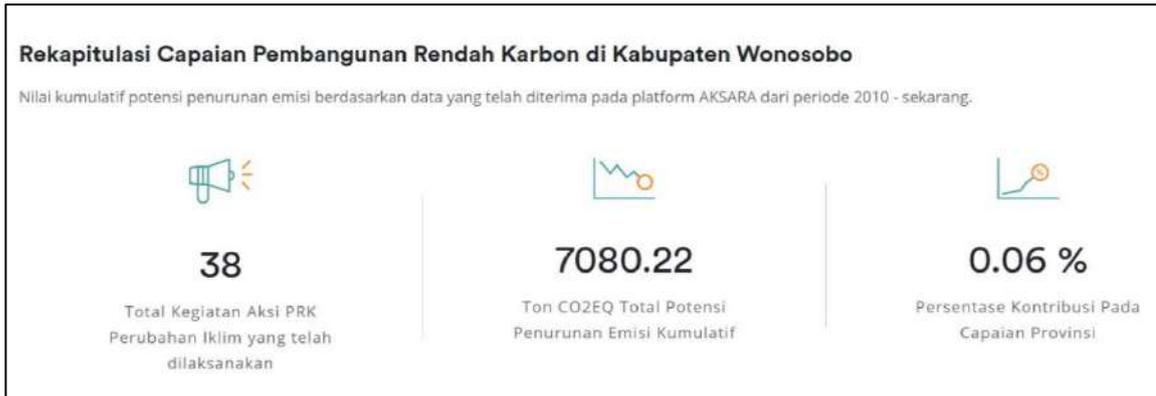
Tabel II. 19 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari Berbagai Sektor di Kabupaten Wonosobo Tahun 2018-2022

Sektor	Emisi (Giga ton CO ₂)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Energi	154,84	72,02	201,22	280,55	298,53
IPPU	0	0	0	0	0,26
Pertanian	156,78	82,62	201,63	154,86	285,48
Kehutanan	217,93	-167,66	-174,46	-188,92	-373,89
Limbah	25,14	27,7	63,98	7,62	6,35
Total	554,69	14,68	292,37	254,11	216,73

Sumber: Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional-Sederhana, Mudah, Akurat, Ringkas dan Transparan (SIGN-SMART) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diakses Juli 2024

Keterangan: Data Tahun 2023 belum rilis

Penurunan emisi GRK perlu dilakukan mengikuti pendekatan nasional berupa aksi-aksi yang mendukung pembangunan rendah karbon dan pembangunan ketahanan iklim. Potensi penurunan emisi GRK di Kabupaten Wonosobo tercantum pada Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Aksi Pembangunan Rendah Karbon Nasional (AKSARA) yang dikelola oleh Bappenas. Total potensi penurunan emisi kumulatif di Kabupaten Wonosobo pada 2020-2023 tersaji pada gambar di bawah. Potensi penurunan emisi kumulatif yang terhitung adalah sebanyak 6.624,36 TonCO₂eq. Data yang tersedia pada AKSARA menunjukkan potensi penurunan emisi kumulatif bernilai sama hingga tahun 2022. Jumlah ini meningkat pada 2023, yaitu sebesar 7.080,22 TonCO₂eq. Potensi penurunan emisi pada 2023 memberikan kontribusi sebesar 0,03% pada capaian Provinsi Jawa Tengah. Adanya potensi penurunan emisi ini juga disebabkan adanya kegiatan aksi pembangunan rendah karbon. Tercatat sejumlah 38 total kegiatan aksi pembangunan rendah karbon yang telah dilaksanakan di Kabupaten Wonosobo. Namun demikian, untuk kondisi pada 2023, data masih bersifat dinamis karena masih banyak aksi-aksi kegiatan inti maupun pendukung dari para pemangku kepentingan yang belum dilaporkan di aplikasi AKSARA.

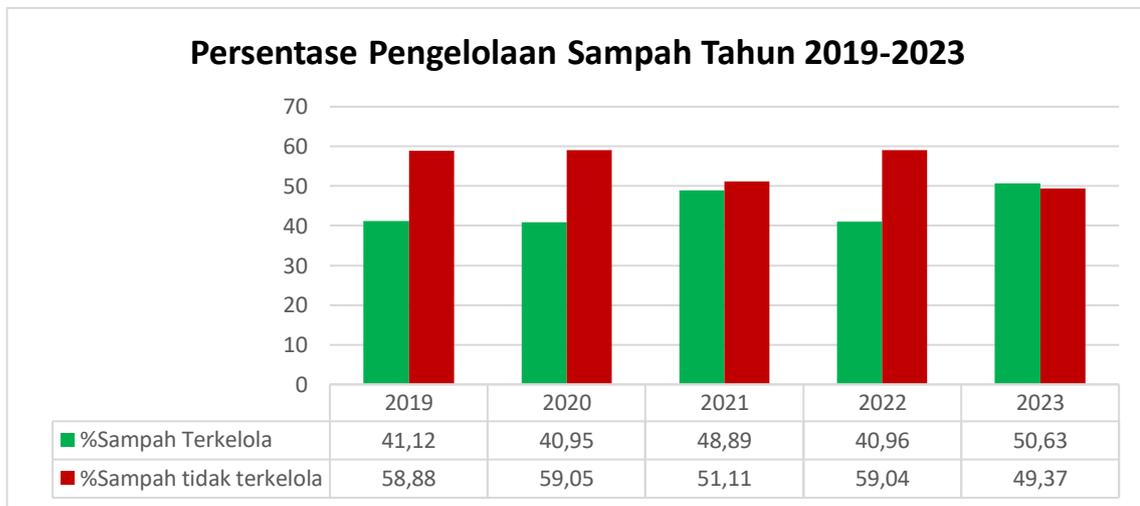


Gambar II. 15 Rekapitulasi Capaian Pembangunan Rendah Karbon di Kabupaten Wonosobo

Sumber: Aplikasi AKSARA Bappenas, 2024

v. Pengelolaan Sampah

Peningkatan jumlah dan aktivitas penduduk berimplikasi pada bertambahnya jumlah timbulan sampah. Timbulan sampah berjenis Sampah Rumah Tangga (SRT) dan sampah sejenis rumah tangga. Timbulan sampah di Kabupaten Wonosobo belum terkelola dengan baik. Kinerja pengelolaan sampah dapat diukur dari indikator persentase pengelolaan sampah. Perkembangan pengelolaan sampah di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik II. 4 Persentase Pengelolaan Sampah Tahun 2019-2023

Sumber: DLH Kabupaten Wonosobo, 2024

Secara umum, perkembangan pengelolaan sampah tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan meski belum mencapai angka optimal. Pada tahun 2023, pengelolaan sampah terkelola baru mencapai 50,63%, artinya masih ada 49,37% sampah yang dibuang sembarang/tidak terkelola. Di Kabupaten Wonosobo masih ditemui sampah yang dibuang ke sungai, keberadaan sampah di sungai mengganggu fungsi aliran sungai yang berdampak salah satunya pada kejadian banjir limpasan.



Penanganan sampah secara konvensional dengan cara kumpul-angkut-buang TPA, belum mampu mengendalikan sampah yang ada. TPA Wonorejo sebagai satu-satunya TPA eksisting di Kabupaten Wonosobo saat ini mengalami kelebihan kapasitas. Hal ini karena bertambahnya jumlah sumber sampah yang membuang sampah langsung ke TPA tanpa pengolahan terlebih dahulu. TPA Wonorejo didesain pada waktu itu hanya untuk melayani kawasan perkotaan Wonosobo (wilayah RIK-rencana induk kota) yang sekarang ini menjadi delineaasi RDTR Kawasan Perkotaan Wonosobo.

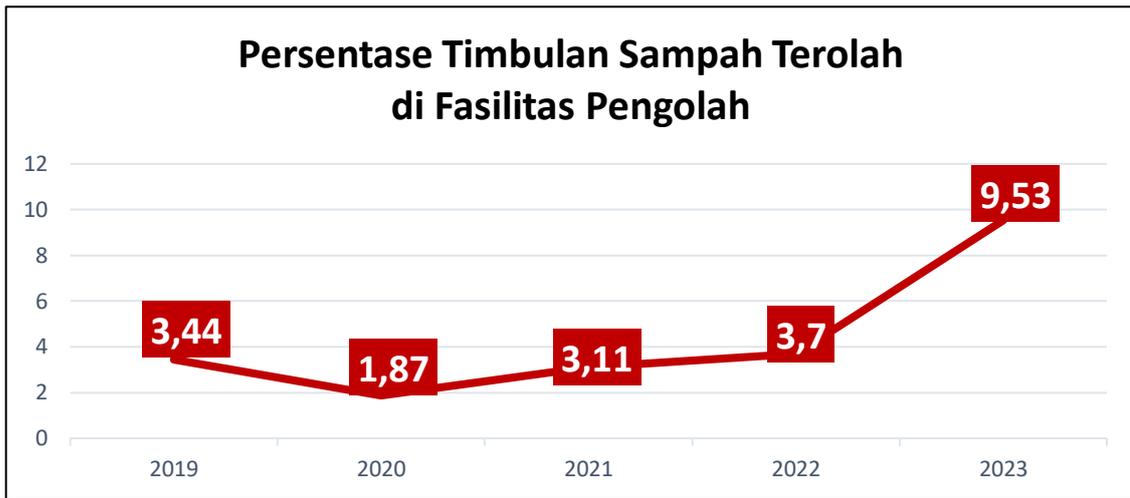
Tabel II. 20 Jumlah TPS dan TPS 3R serta Volume Sampah Masuk TPA Wonorejo Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2023

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	Buah	72	74	81	81	81	118	118
Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R	unit	4	7	12	16	18	19	22
Total Volume Sampah Masuk TPA	m³/tahun	N/A	121.346	72.069	147.162	149.119	154.240	142.058

Sumber: DLH Kabupaten Wonosobo, 2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel II.20, volume sampah masuk TPA mengalami kenaikan fluktuatif sejak 2019. Hal ini karena ada fenomena desa/kelurahan di luar wilayah layanan TPA eksisting mengirimkan sampah dari desanya (tanpa pengolahan terlebih dahulu) dengan menggunakan armada sampah milik desa.

Sejak 2017, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mencoba mengurangi volume sampah di TPA dengan cara membangun Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R). TPS 3R bertujuan untuk mengurangi kuantitas dan/atau memperbaiki karakteristik sampah, yang akan diolah lebih lanjut di TPA eksisting. Sampai dengan 2023, jumlah TPS 3R baru mencapai 22 unit dari 265 desa/kelurahan di Wonosobo (8,3%). Keberadaan TPS 3R merupakan upaya paradigma baru bahwa sampah tidak langsung dibuang ke TPA namun perlu ada pengumpulan, pemilahan, pengolahan terlebih dahulu. Idealnya sampah yang dibuang ke TPA adalah yang bersifat residu. Pengelolaan sampah ke depan akan didorong memperbanyak timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan. Potret kondisi timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan di Kabupaten Wonosobo masih sangat rendah (Grafik II.5).



Grafik II. 5 Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Sumber: DLH Kabupaten Wonosobo, 2023

Kegiatan pengolahan sampah yang berlangsung di fasilitas pengolahan sampah meliputi: TPS 3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya. Untuk data di Kabupaten Wonosobo hanya menghitung pada TPS 3R dan Bank Sampah, sedangkan PDU baru dibangun pada 2024 melalui skema dana DAK. Kegiatan pengolahan sampah menjadi energi dan/atau bahan bakar lainnya tidak dihitung ke dalam indikator sampah terolah. Dari data di atas, terlihat bahwa meski pada 2020 mengalami penurunan timbulan sampah terolahnya, namun semakin tahun menunjukkan kecenderungan kenaikan, walaupun angka capaiannya masih sangat rendah 3,7% pada 2022 dan naik menjadi 9,53% pada tahun 2023. Sampai pada tahun 2023. Peningkatan tren timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah menunjukkan adanya komitmen dari Pemda dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan pengolahan timbulan sampah sebelum dibuang ke TPA.

Selain sampah, terdapat limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Wonosobo. Tahun 2023 baru terdapat 19,64% kegiatan usaha yang memiliki persyaratan administrasi dan teknis penyimpangan sementara limbah B3.

vi. Keanekaragaman Hayati

Degradasi lahan terutama di kawasan hulu DAS menyebabkan perubahan ekosistem. Hal tersebut berdampak pada terganggunya habitat flora dan fauna sehingga mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati. Berdasarkan dokumen KLHS disebutkan bahwa terdapat beberapa jenis tanaman asli Wonosobo yang mulai sulit ditemukan, antara lain kemiri buah (*plum*), kerangan, kayu bendo, waru buntung, kalis, sengan jawa dan kayu amplas. Selain jenis-jenis tanaman



di atas, habitat beberapa jenis satwa mulai terganggu dengan ditemukannya jejak Harimau Jawa di kaki Gunung Bisma yang sangat dekat dengan kawasan permukiman.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Resort Wonosobo (BKSDA *Resort* Wonosobo) pada tahun 2023 mencatatkan 45 flora dan fauna yang berada di kawasan hutan konservasi yang dikelola, antara lain Taman Wisata Alam (TWA) Telaga Warna-Telaga Pengilon di Kecamatan Kejajar dan Cagar Alam Pantodomas di Kecamatan Sapuran. Jumlah tersebut terdiri dari 22 flora dan 23 fauna. Berdasarkan status lokal, hanya jenis fauna yang berada dalam posisi terancam, dengan total 5 (lima) fauna. Sementara itu, kucing hutan menjadi satu-satunya fauna yang dinyatakan terancam dan *critically endangered* menurut status konservasi *International Union for Conservation of Nature* (IUCN). Data kuantitatif terkait keanekaragaman hayati sangat terbatas, oleh karena itu, data BKSDA dianggap dapat mewakili kondisi keanekaragaman hayati di Kabupaten Wonosobo.

vii. Kinerja Layanan atau Jasa Lingkungan

Kinerja layanan atau jasa lingkungan diperoleh dari analisis Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH). Kinerja layanan atau jasa lingkungan yang diuraikan dalam dokumen RPJPD ini terdiri atas jasa lingkungan hidup penyedia bahan pangan, penyediaan air, pengaturan tata aliran air dan banjir dan pendukung ruang hidup.

❖ Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Bahan Pangan (JEP 1)

Jasa lingkungan hidup terdiri dari fungsi penyediaan atau *provisioning*, salah satunya penyediaan bahan pangan (JEP1). Jasa lingkungan hidup penyedia bahan pangan diartikan sebagai kemampuan ekosistem atau produk hayati yang mampu memberikan atau mendukung kebutuhan pangan makhluk hidup, utamanya manusia. Berdasarkan definisi operasional, JEP1 terdiri dari hasil laut, pangan dari hutan seperti tanaman dan hewan, hasil pertanian dan perkebunan untuk kebutuhan pangan, serta hasil peternakan. Pengukuran JEP1 dapat dilakukan oleh semua daerah, termasuk Kabupaten Wonosobo, seperti dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 21 Jasa Lingkungan Hidup Penyediaan Bahan Pangan (JEP1) Kabupaten Wonosobo Tahun 2022

No.	Kelas Jasa	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Sangat Rendah	5.081,13	5,09%
2	Rendah	37.661,29	37,72%
3	Sedang	36.849,88	36,90%
4	Tinggi	16.200,72	16,22%
5	Sangat Tinggi	5.605,66	5,61%



No.	Kelas Jasa	Luas (Ha)	Persentase (%)
	Total Luasan	99.855,84	100,00%

Sumber: DLH Wonosobo, 2023

Keterangan: Data Tahun 2023 belum rilis

Berdasarkan Dokumen DDDTLH Wonosobo tahun 2023, kelas JEP1 di Kabupaten Wonosobo didominasi oleh kelas rendah seluas 37.661,29 Ha, yang diikuti oleh kelas sedang seluas 36.849,88 Ha. Dominasi kelas JEP tersebut menggambarkan bahwa Kabupaten Wonosobo berpotensi mengalami krisis pangan pada masa mendatang, dikarenakan kemampuan lingkungan menghasilkan pangan rendah, bahkan berpotensi semakin menurun. Berdasarkan gambar di bawah, kelas sangat tinggi dan tinggi membelah Kabupaten Wonosobo dan melintasi Kecamatan Garung hingga Kecamatan Sapuran dari utara ke selatan, dengan luas yang jauh lebih kecil daripada kelas lainnya.

Kondisi jasa lingkungan pangan pada 2043 menggunakan basis data RTRW tahun 2023-2043. Hasilnya adalah kondisi penurunan jasa lingkungan penyedia bahan pangan secara merata di Kabupaten Wonosobo, bahkan beberapa lokasi mencapai kelas sangat rendah. Kecamatan Wonosobo dipastikan membutuhkan bantuan pasokan pangan dari kecamatan atau daerah lain, sedangkan daerah hulu pada sisi timur Wonosobo juga mulai didominasi kelas sedang secara acak. Megatren 2045 secara global telah menyebutkan bahwa teknologi dan efisiensi SDA tidak akan mampu menyelamatkan ketersediaan SDA. Oleh karena itu, perlu adanya antisipasi dan mitigasi untuk menyelamatkan kebutuhan pangan Kabupaten Wonosobo di masa mendatang.

❖ **Jasa Lingkungan Hidup Penyediaan Air (JEP 2)**

Jasa lingkungan hidup penyediaan air (JEP2) merupakan kebutuhan vital bagi para penduduk di Kabupaten Wonosobo. Jasa lingkungan hidup ini menggambarkan kemampuan ekosistem untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan memberikan manfaat secara langsung dan tidak langsung. Berdasarkan definisi operasional, JEP2 mencakup penyediaan air dari tanah yang melibatkan kapasitas penyimpanan, serta penyediaan air dari sumber permukaan. Penyediaan air di Kabupaten Wonosobo dijelaskan pada tabel di bawah.

**Tabel II. 22 Jasa Lingkungan Hidup Penyediaan Air (JEP2)
Kabupaten Wonosobo Tahun 2022**

No.	Kelas Jasa	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Sangat Rendah	5.636,70	5,64%
2	Rendah	14.213,62	14,23%
3	Sedang	14.959,45	14,98%



No.	Kelas Jasa	Luas (Ha)	Persentase (%)
4	Tinggi	65.194,73	65,29%
5	Sangat Tinggi	1.394,19	1,40%
Total Luasan		99.855,84	100,00%

Sumber: DLH Kabupaten Wonosobo, 2023

Keterangan: Data Tahun 2023 belum rilis

Berdasarkan Dokumen DDDTLH Wonosobo tahun 2023, jasa lingkungan hidup penyediaan air di Kabupaten Wonosobo tertinggi ada di kelas tinggi, sebesar 65,29% atau 65.194,73 Ha. Sementara itu, luasan terendah terletak di kelas sangat tinggi, yakni sebesar 1,40% atau 1.394,19 ha. Persentase tersebut menunjukkan Kabupaten Wonosobo masih kaya akan air bersih, baik air tanah maupun permukaan. Selain itu, ketersediaan air yang sangat baik hampir di semua kecamatan, kecuali perkotaan Wonosobo pada tahun 2023. Kecamatan Wonosobo dan sekitarnya menjadi perkotaan yang didominasi oleh bangunan dan penduduk, sehingga area serapan air berkurang dan lingkungan tidak mampu memberikan manfaat ketersediaan air bersih. Perubahan signifikan terjadi pada 2043, di mana Wonosobo diperkirakan akan mengalami defisit air bersih, padahal menjadi wilayah hulu dari DAS Prioritas Nasional. Satu-satunya lokasi dengan kelas sangat tinggi ada di Kecamatan Wadaslintang, yakni Waduk Wadaslintang. Oleh karena itu, perlu perencanaan khusus atau pencermatan kembali pada RTRW untuk meningkatkan ketahanan air dan mencegah penurunan kelas jasa lingkungan.

❖ **Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir (JER2)**

Fungsi jasa lingkungan terdiri dari empat fungsi, salah satunya fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan tata aliran air dan banjir menjadi salah satu jenis jasa lingkungan yang vital, karena menjadi tolak ukur ekosistem untuk melindungi daerah tersebut dari kerusakan tata aliran air dan banjir. Berdasarkan definisi operasional, jasa lingkungan hidup pengaturan tata aliran air dan banjir (JER2) menggambarkan siklus hidrologi, infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, maupun pemeliharaan air. Kondisi JER2 di Kabupaten Wonosobo dijelaskan pada tabel di bawah.



Tabel II. 23 Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir (JER2) Kabupaten Wonosobo Tahun 2022

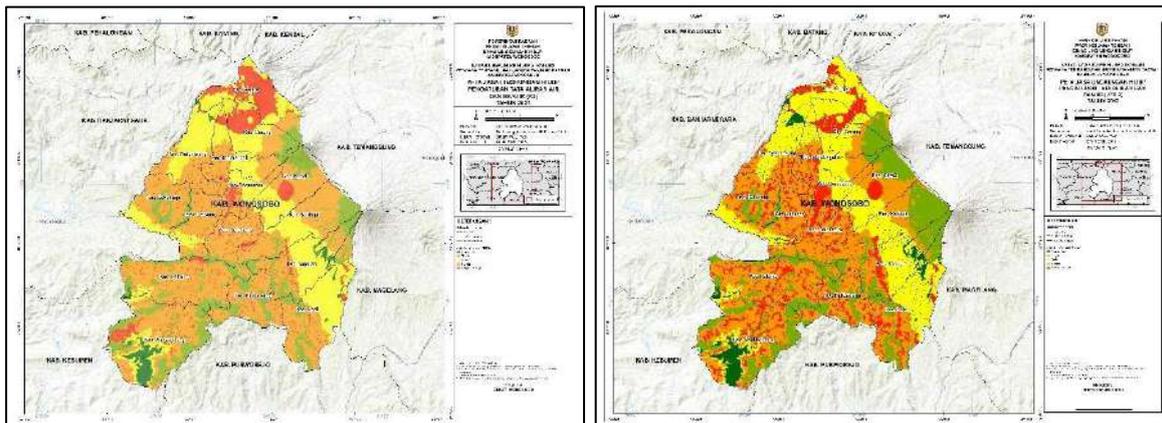
No.	Kelas Jasa	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Sangat Rendah	8.566,81	8,58%
2	Rendah	47.987,41	48,06%
3	Sedang	13.090,82	13,11%
4	Tinggi	27.789,54	27,83%
5	Sangat Tinggi	2.421,26	2,42%
Total Luasan		99.855,84	100,00%

Sumber: DLH Kabupaten Wonosobo, 2023

Keterangan: Data Tahun 2023 belum rilis

Berdasarkan Dokumen DDDTLH Wonosobo tahun 2023, dominasi JER2 tertinggi di Kabupaten Wonosobo adalah kelas rendah sebesar 48,06% atau seluas 47.987,41 Ha, sedangkan kelas dengan luasan terendah adalah kelas sangat tinggi, yakni sebesar 2,42% atau 2.421,26 Ha. Hasil di atas mengindikasikan bahwa Kabupaten Wonosobo rawan terhadap banjir dan buruk dalam pengelolaan atau konservasi air. Sementara itu, Kabupaten Wonosobo berperan sebagai hulu yang berpotensi mengalirkan banjir bandang bagi daerah tengah atau hilir.

Berdasarkan Gambar II.16 di bawah, Kecamatan Garung hingga Kecamatan Kepil membentuk semacam jalur yang memiliki kelas sedang. Kondisi Kecamatan Kejajar yang berbukit memberikan jasa lingkungan sangat rendah, sehingga berpotensi mendatangkan banjir dan siklus hidrologi yang tidak ideal. Sementara itu, pola sebaran tahun 2043 menggambarkan kondisi jasa lingkungan yang berpotensi mengalami peningkatan di bagian hulu, namun mengalami penurunan di perkotaan Wonosobo. Hal ini diindikasikan oleh pola ruang yang mengalami konservasi di bagian hulu, namun penyediaan lahan untuk lahan terbangun semakin pesat di kawasan perkotaan. Oleh karena itu, penanganan dan peningkatan kelas jasa lingkungan perlu dilakukan, baik secara alami dan buatan.



Gambar II. 16 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir (JER2) Tahun 2023 dan 2043 di Kabupaten Wonosobo

Sumber: DLH Kabupaten Wonosobo (2023), diolah

❖ **Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Ruang Hidup (JEC1)**

Jenis jasa lingkungan memiliki fungsi budaya atau kultural, salah satunya adalah tempat tinggal dan ruang hidup (*sense of place*) (JEC1). Jasa ini merepresentasikan bagaimana ekosistem memberikan kenyamanan bagi makhluk hidup untuk tinggal di suatu daerah. Berdasarkan definisi operasional, JEC1 merupakan ruang untuk tinggal serta hidup sejahtera, jangkar “kampung halaman” yang memiliki nilai sentimental. Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu daerah yang cukup layak ditinggali, seperti disajikan pada tabel di bawah.

Tabel II. 24 Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Ruang Hidup (JEC1) Kabupaten Wonosobo Tahun 2022

No	Kelas Jasa	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Sangat Rendah	16.046,24	15,82%
2	Rendah	33.676,54	33,21%
3	Sedang	42.379,82	41,80%
4	Tinggi	8.968,62	8,84%
5	Sangat Tinggi	327,45	0,32%
Total Luasan		101.398,68	100,00%

Sumber: DLH Kabupaten Wonosobo, 2023

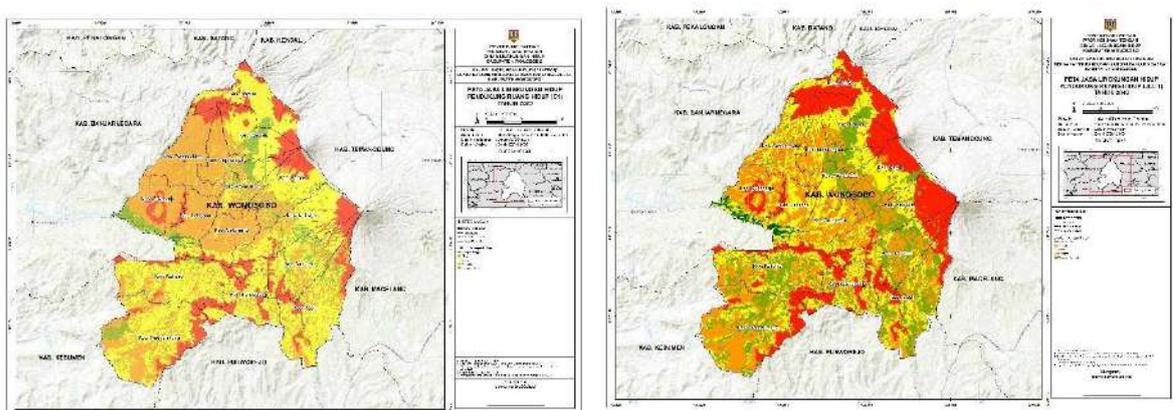
Keterangan: Data Tahun 2023 belum rilis

Berdasarkan Dokumen DDDTLH Wonosobo tahun 2023, jasa lingkungan hidup pendukung ruang hidup di Kabupaten Wonosobo didominasi oleh kelas sedang, dengan persentase 41,80% atau seluas 42.379,82 ha. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Wonosobo memiliki nilai *plus* dan *minus* secara seimbang untuk ditinggali, sehingga kelas jasa berada pada kondisi sedang. Selain itu, kelas jasa sangat rendah dan rendah memiliki persentase yang lebih



tinggi daripada kelas jasa tinggi dan sangat tinggi, yakni total 49,03% dibandingkan 9,16%.

Berdasarkan Gambar II.17, kelas jasa “sangat rendah” cenderung berada di perbatasan kecamatan atau kabupaten, sedangkan kelas jasa “rendah” cenderung berada di sisi barat laut kabupaten pada 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa perbatasan kurang layak ditinggali, dengan asumsi akses transportasi atau kesuburan tanah untuk pertanian atau hortikultura kurang sesuai. Sementara itu, jasa lingkungan pendukung ruang hidup dan tempat tinggal pada 2043 menunjukkan perbedaan signifikan dengan meluasnya kelas sangat rendah di sisi timur kabupaten. Namun, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Leksono dan Kecamatan Watumalang di bagian perbatasan mengalami peningkatan kelas secara umum. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa aksesibilitas dan rasa kepemilikan akan semakin meningkat di 2043, serta peningkatan area terlindung yang dikonservasi dan tidak direkomendasikan untuk ditinggali, sehingga tetap memerlukan penanganan dari pemerintah untuk melakukan perencanaan tata ruang untuk permukiman di lokasi tertentu.



Gambar II. 17 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Ruang Hidup (JEC1) Tahun 2023 dan 2043 di Kabupaten Wonosobo

Sumber: DLH Kabupaten Wonosobo (2023), diolah

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang memperhatikan bukan saja pembangunan aspek ekonomi, tetapi juga pembangunan aspek sosial dan aspek ekologi/lingkungan. Aspek ekonomi berfokus pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan. Aspek sosial fokus pada peningkatan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Sementara aspek lingkungan menitikberatkan pada perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim.

Namun demikian, sampai kini belum terdapat indikator pembangunan berkelanjutan yang disepakati bersama, sehingga untuk



Kabupaten Wonosobo penghitungan Indeks Pembangunan Berkelanjutan (IPB) disusun dari beberapa komponen yang terdapat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDBR) yang di dalamnya sudah mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Penyusunan rencana pembangunan IPB diperlukan agar kebijakan pembangunan pemerintah selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga tetap memperhatikan perlindungan lingkungan hidup.

2.1.2. Aspek Demografi

Perubahan jumlah penduduk di Kabupaten Wonosobo bersifat dinamis karena dipengaruhi kelahiran, kematian, serta migrasi atau perpindahan penduduk yang memasuki atau keluar dari Kabupaten Wonosobo. Data kependudukan di Kabupaten Wonosobo terbagi menjadi jumlah penduduk secara umum, struktur penduduk dan distribusi penduduk.

a. Jumlah Penduduk

Data Kependudukan Kabupaten Wonosobo menunjukkan jumlah penduduk pada 2023 mencapai 909.664 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 463.181 penduduk laki-laki dan 446.483 perempuan. Jumlah penduduk di Kabupaten Wonosobo mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun, terutama pada rentang 2010 hingga 2023. Pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Wonosobo pada 2010 hingga 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



**Grafik II. 6 Jumlah Penduduk Kabupaten Wonosobo
Tahun 2010-2023**

Sumber: BPS, Kabupaten Wonosobo dalam Angka 2006-2023



Grafik di atas menunjukkan tren peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Wonosobo pada 2010 hingga 2023 dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 1,47. Peningkatan penduduk paling banyak terjadi pada 2020 yang bertambah sebesar 88.633 jiwa dibandingkan pada 2019.

b. Struktur Penduduk

Struktur penduduk di Kabupaten Wonosobo berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada data *sex ratio*. Data ini menampilkan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan yang dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Data terkait jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo berdasarkan *sex ratio* pada 2010 hingga 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 25 Jumlah Penduduk Kabupaten Wonosobo berdasarkan Sex Ratio pada Tahun 2010-2023

No	Tahun/Year	Laki-Laki/ Male	Perempuan/ Female	Jumlah/ Total	Rasio Jenis Kelamin/ Sex Ratio
1	2010	383.305	372.789	756.094	102,82
2	2011	385.697	375.068	760.765	102,83
3	2012	387.967	377.222	765.189	102,85
4	2013	390.029	379.289	769.318	102,83
5	2014	392.017	381.263	773.280	102,82
6	2015	393.968	383.148	777.116	102,82
7	2016	395.716	384.951	780.667	102,80
8	2017	397.418	386.673	784.091	102,78
9	2018	399.028	388.319	787.347	102,76
10	2019	400.599	389.892	790.491	102,75
11	2020	448.152	430.972	879.124	103,99
12	2021	451.881	434.732	886.613	103,94
13	2022	456.748	439.598	896.346	103,90
14	2023	463.181	446.483	909.664	103,74

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo, 2011-2024

Semakin tinggi angka *sex ratio* di suatu wilayah, maka semakin banyak pula jumlah laki-laki pada wilayah tersebut. Penurunan angka *sex ratio* yang kemudian mendekati angka 100 mengindikasikan adanya keseimbangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Wonosobo. Penurunan angka *sex ratio* memiliki tiga makna, yakni terdapat banyaknya kelahiran bayi perempuan yang ada di Kabupaten Wonosobo, bertambahnya jumlah penduduk perempuan melalui migrasi masuk dan adanya penurunan jumlah laki-laki di wilayah tersebut. Penurunan jumlah penduduk laki-laki dapat diakibatkan oleh peningkatan angka mortalitas maupun peningkatan migrasi keluar wilayah.



c. Distribusi Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 26 Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Wonosobo

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	2010		2015		2020		2022		2023	
		Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
Wadaslintang	127	51.475	405	52.142	410	60.502	476	64.778	509	65.799	517
Kepil	94	56.262	599	56.992	607	64.478	687	68.028	725	68.717	732
Sapuran	78	53.938	694	55.824	718	61.209	788	64.662	832	65.946	849
Kalibawang	48	22.299	466	22.588	472	27.101	567	29.082	608	29.692	621
Kaliwiro	100	44.039	440	44.611	446	51.824	518	55.696	557	56.383	563
Leksono	44	39.225	890	40.556	920	46.186	1.048	48.414	1.099	49.018	1.112
Sukoharjo	54	31.284	576	32.574	600	35.459	653	36.837	679	37.111	684
Selomerto	40	44.926	1.131	46.494	1.171	53.516	1.348	56.064	1.412	57.149	1.439
Kalikajar	83	57.555	691	58.302	700	70.302	844	74.934	900	76.386	917
Kertek	62	76.512	1.231	78.874	1.269	90.207	1.452	94.550	1.522	96.150	1.547
Wonosobo	32	82.654	2.553	86.977	2.686	91.909	2.838	95.476	2.949	96.845	2.991
Watumalang	68	48.635	713	49.266	722	55.765	817	58.990	865	59.745	876
Mojotengah	45	58.262	1.293	60.368	1.339	67.481	1.497	68.916	1.529	70.530	1.565
Garung	51	48.026	938	49.131	959	56.988	1.113	59.482	1.161	60.703	1.185
Kejajar	58	41.002	712	42.417	736	46.197	802	47.884	831	48.599	843

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo, 2011-2024



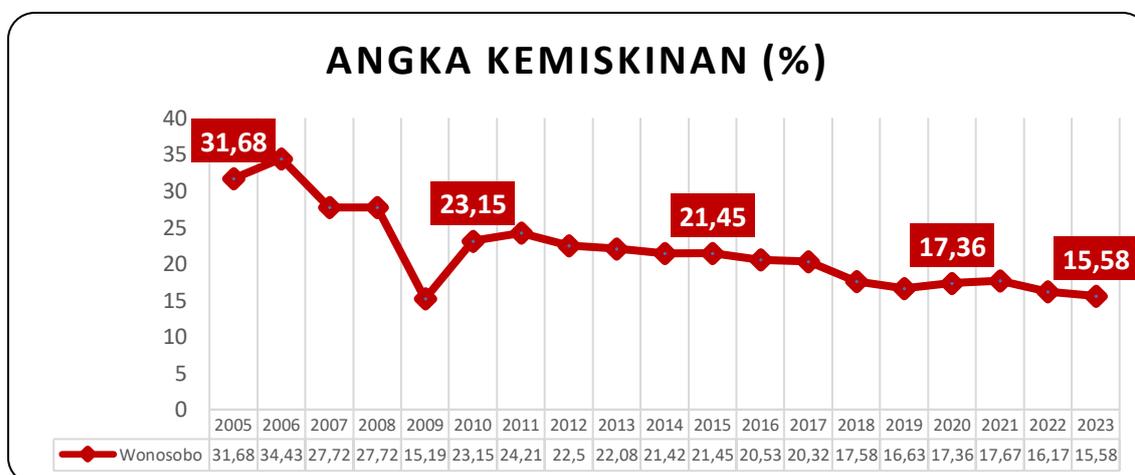
Kepadatan penduduk di Kabupaten Wonosobo mengalami tren peningkatan pada 2010 hingga 2023. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Wonosobo dengan angka 2552,63 pada 2010 dan meningkat menjadi 2948,61 pada 2022. Peningkatan kepadatan terendah terjadi di Kecamatan Sukoharjo yang dalam kurun waktu 12 tahun hanya mengalami penambahan sebanyak 102,08 jiwa per km². Sementara kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah berada pada Kecamatan Wadaslintang dengan kepadatan penduduk 509,42 jiwa per km².

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

a. Kemiskinan

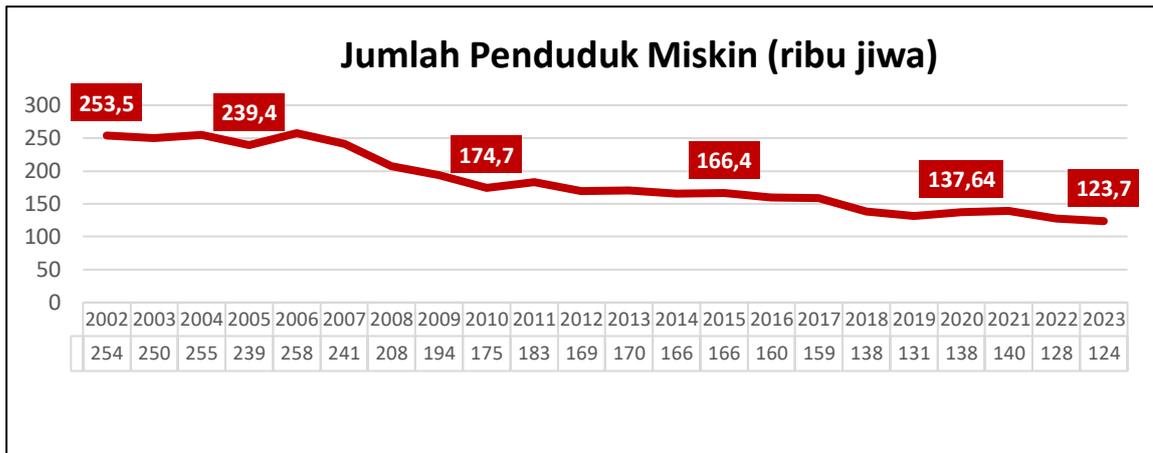
Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 2005-2023 meskipun fluktuatif namun menunjukkan tren menurun dan membaik. Kinerja penurunan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo juga menunjukkan tren positif setelah hampir kurun waktu 17 tahun berada di posisi 35 sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah, pada 2023 telah meningkat menjadi posisi 33. Penurunan angka kemiskinan ini juga signifikan dengan penurunan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang artinya ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin semakin rendah dan rata-rata pendapatan penduduk miskin mendekati garis kemiskinan.



Grafik II. 7 Persentase Angka Kemiskinan Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2023

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo, 2006-2024

Dalam kurun waktu 2002-2023 jumlah penduduk miskin telah berkurang 51,23% yang menggambarkan kinerja positif dalam upaya penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo.



Grafik II. 8 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Wonosobo Tahun 2002-2023

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo, 2003-2024

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Sejak 2007 sampai dengan 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Wonosobo cukup fluktuatif. Terhitung pada 2007, TPT mencapai 5,68% dan mencapai angka tertinggi pada 2013 dengan persentase 5,82%. TPT mencapai titik terendah 3,44% pada 2018. Namun, pada masa pandemi Covid-19, TPT kembali naik di persentase 5,37%. Pada tahun-tahun berikutnya, pengangguran semakin menurun karena perekonomian daerah sudah mulai menggeliat.



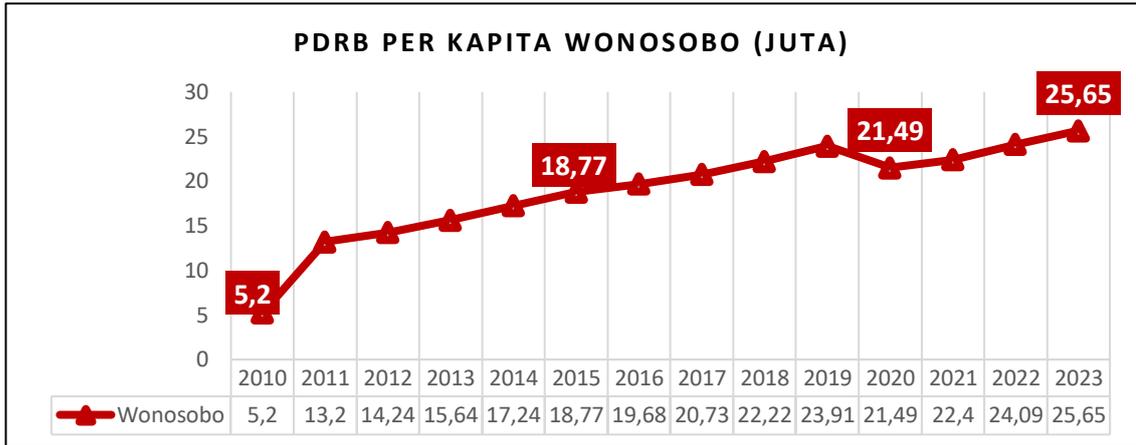
Grafik II. 9 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Wonosobo Tahun 2007-2023

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo, 2008-2024



c. PDRB per Kapita

Kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan PDRB per kapita dari tahun ke tahun. Pada 2010, PDRB per kapita Kabupaten Wonosobo 5,2 juta rupiah. Angka ini terus naik hingga 2019 dengan jumlah PDRB per kapita 23,91 rupiah. Pada 2010, PDRB per kapita Kabupaten Wonosobo sedikit turun pada titik 21,49 juta rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga 2023 dengan capaian PDRB per kapita 25,65 juta rupiah. Peningkatan indikator nilai PDRB per kapita ini menunjukkan adanya perkembangan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

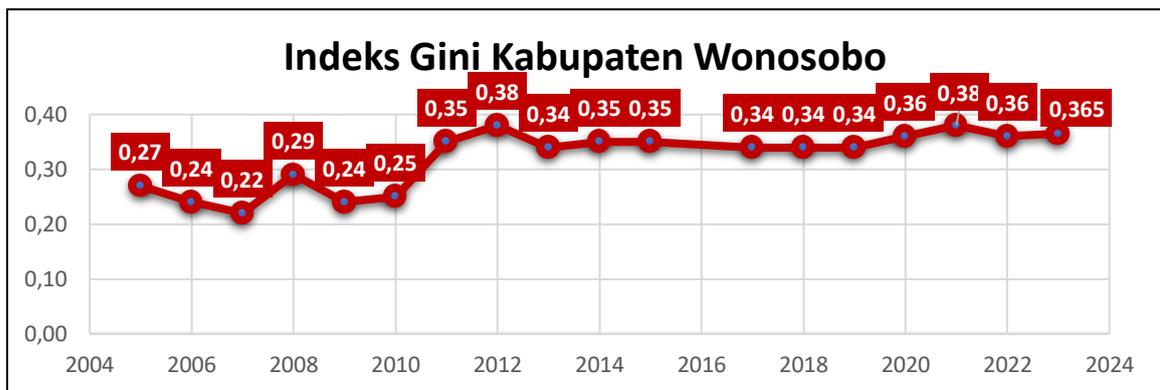


Grafik II. 10 PDRB Per Kapita Wonosobo Tahun 2010-2023

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo, 2011-2024 (diolah)

d. Indeks Gini

Perkembangan indeks gini Kabupaten Wonosobo meskipun fluktuatif namun cenderung naik. Ketimpangan pendapatan pada kurun waktu 2005-2023 berada dalam kategori ketimpangan rendah namun pada 2011 mulai naik dalam kategori ketimpangan sedang. Dalam perkembangannya ketimpangan pendapatan mengalami fluktuasi namun masih tetap dalam kategori ketimpangan sedang.



Grafik II. 11 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2023

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo, 2005-2024

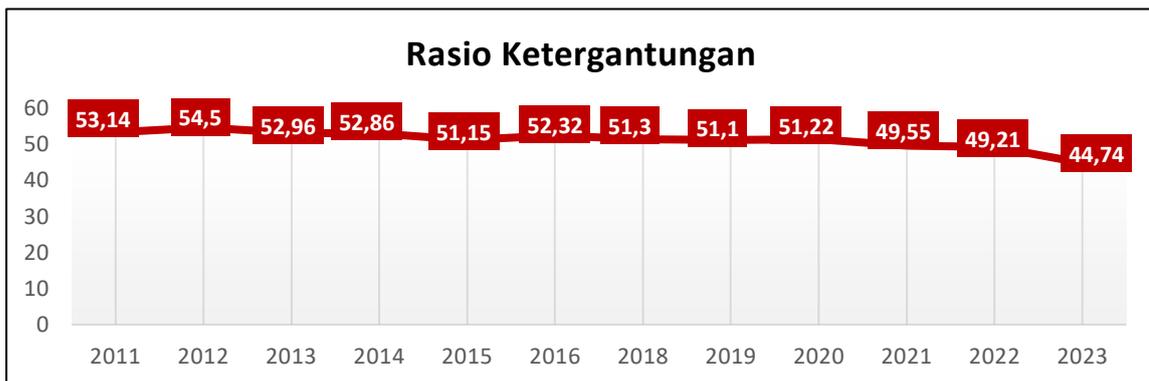


Klasifikasi Nilai Indeks Gini:

- $GR < 0,35$ dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- $0,35 < GR < 0,5$ dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (moderat)
- $GR > 0,5$ dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

e. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) di Kabupaten Wonosobo dari 2011 hingga 2023 secara tren mengalami penurunan. Penurunan ini menunjukkan bahwa penduduk usia non produktif (15 tahun ke bawah dan usia 65 tahun ke atas) lebih sedikit dibanding penduduk dengan usia produktif (15 tahun hingga 65 tahun). Pada 2023, Rasio Ketergantungan turun hingga 44,74% dari 53,14% pada 2011. Hal ini menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum dan tidak produktif. Tren penurunan rasio ini berpotensi positif terhadap perekonomian Kabupaten Wonosobo karena tingginya usia produktif. Berikut ini merupakan data Rasio Ketergantungan Kabupaten Wonosobo pada 2011-2023.

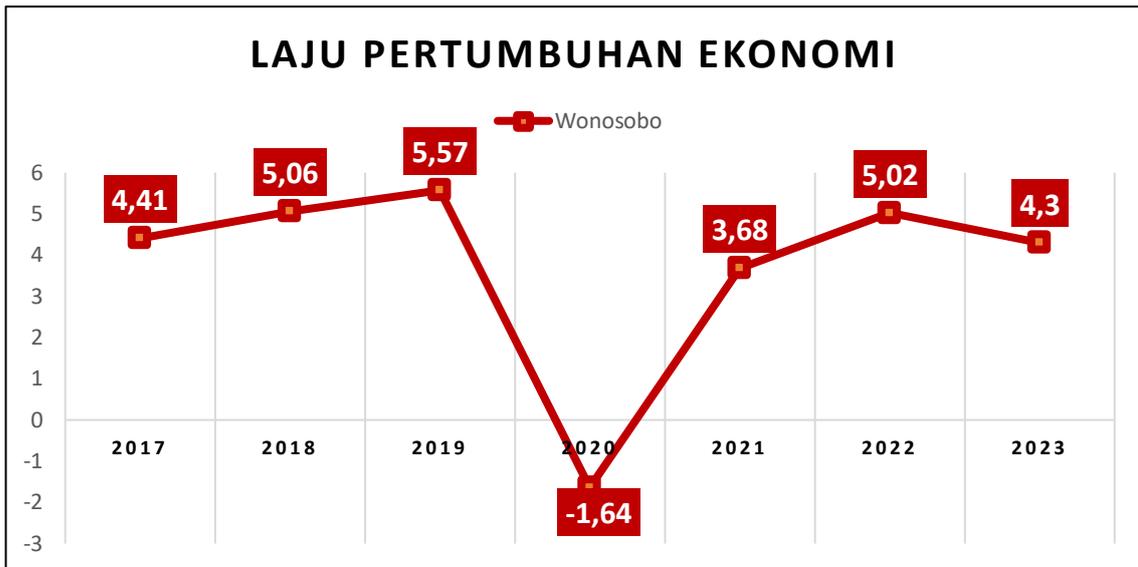


Grafik II. 12 Rasio Ketergantungan Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2023

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo, 2012-2024

f. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Wonosobo mulai tumbuh kembali sejak pandemi Covid-19 berakhir. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perubahan persentase dalam nilai PDRB dari tahun ke tahun. Berikut merupakan data laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo pada 2017-2023.

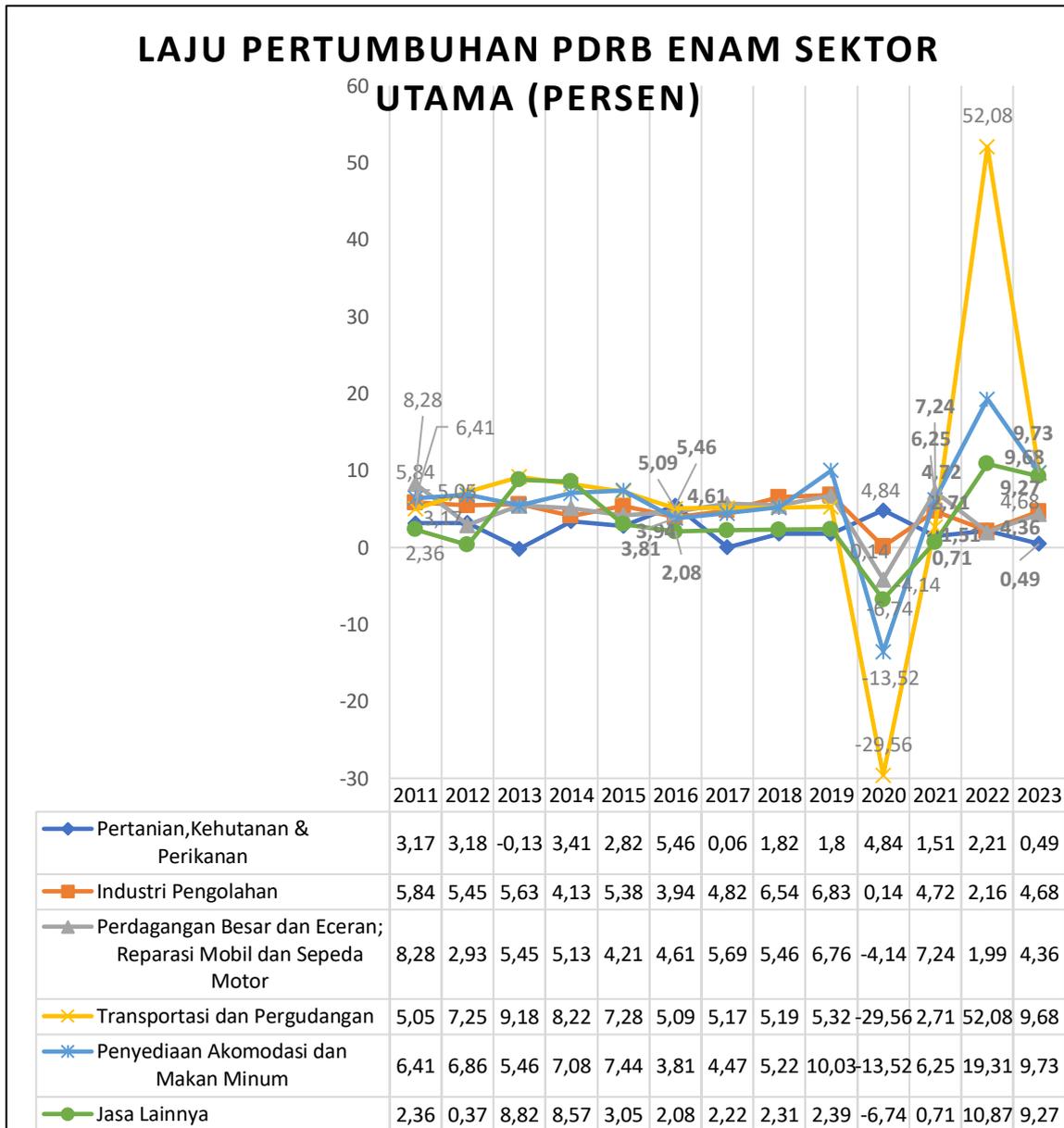


Grafik II. 13 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2023

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo, 2018-2024

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo pada periode 2017-2023 mengalami fluktuasi. Efek Covid-19 membuat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan pada 2020 mencapai -1,64. Angka ini merupakan angka laju pertumbuhan paling rendah sejak 2017. Perekonomian mulai pulih pada Tahun 2021 dengan laju pertumbuhan ekonomi 3,68. Hingga 2023, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo pasca Covid-19 cenderung meningkat meskipun peningkatannya masih lebih rendah daripada sebelum pandemi Covid-19.

Agrobisnis meliputi 3 (tiga) sektor yaitu pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Pariwisata meliputi 3 (tiga) sektor yaitu akomodasi makan minum, transportasi dan jasa lainnya. Sektor transportasi selama periode 2011-2023 mengalami rata-rata laju pertumbuhan PDRB tertinggi mencapai 7,16% diikuti oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 6,01% serta sektor jasa lainnya sebesar 3,56%. Akan tetapi, laju pertumbuhan ketiga sektor ini mengalami penurunan pada 2020 dan kembali naik pasca pandemi.



Grafik II. 14 Laju Pertumbuhan PDRB 6 (enam) Sektor Pendukung Agrobisnis dan Pariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2023

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo, 2012-2024

Sektor pertanian mengalami rata-rata laju pertumbuhan PDRB yang paling rendah di antara enam sektor pendukung agrobisnis dan pariwisata. Pada saat pandemi, laju sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami kenaikan hingga 4,84%. Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan meskipun melemah akibat pandemi, kembali meningkat signifikan pada 2021 dengan angka pertumbuhan mencapai 4,72% sementara kontribusi sektor perdagangan setelah turun drastis pada saat pandemi kembali naik signifikan hingga mencapai angka 7,24%. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan dapat menopang perekonomian Kabupaten Wonosobo di saat pandemi dan pasca pandemi.



g. Struktur Perekonomian

Perekonomian Kabupaten Wonosobo masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan rata-rata kontribusi sebesar 30 persen per tahun. Perekonomian Kabupaten Wonosobo tidak hanya digerakkan oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan saja tetapi juga didorong oleh sektor usaha lainnya meskipun kontribusinya cenderung lebih kecil. Sektor industri pengolahan turut berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Wonosobo dengan rata-rata kontribusi sebesar 17,4%. Demikian pula dengan sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor turut berkontribusi pada perekonomian Kabupaten Wonosobo dengan rata-rata kontribusi sebesar 17,0% per tahun pada periode 2010-2023. Secara rata-rata, sektor industri pengolahan menjadi sektor terbesar kedua dan sektor perdagangan menjadi sektor terbesar ketiga yang menggerakkan perekonomian Kabupaten Wonosobo selama periode 2010-2023. Meskipun sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor utama pada perekonomian Kabupaten Wonosobo akan tetapi kontribusinya mulai mengalami penurunan sejak 2017. Pada 2017, kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tercatat sebesar 30,9% menurun menjadi 28,8% pada 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Wonosobo masih bertumpu pada pertanian, akan tetapi secara perlahan mulai bergeser dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Kondisi ini perlu dijadikan perhatian mengingat sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan merupakan sektor pendukung pengembangan agrobisnis.



Tabel II. 27 Distribusi PDRB Kabupaten Wonosobo ADHB Menurut Lapangan Usaha

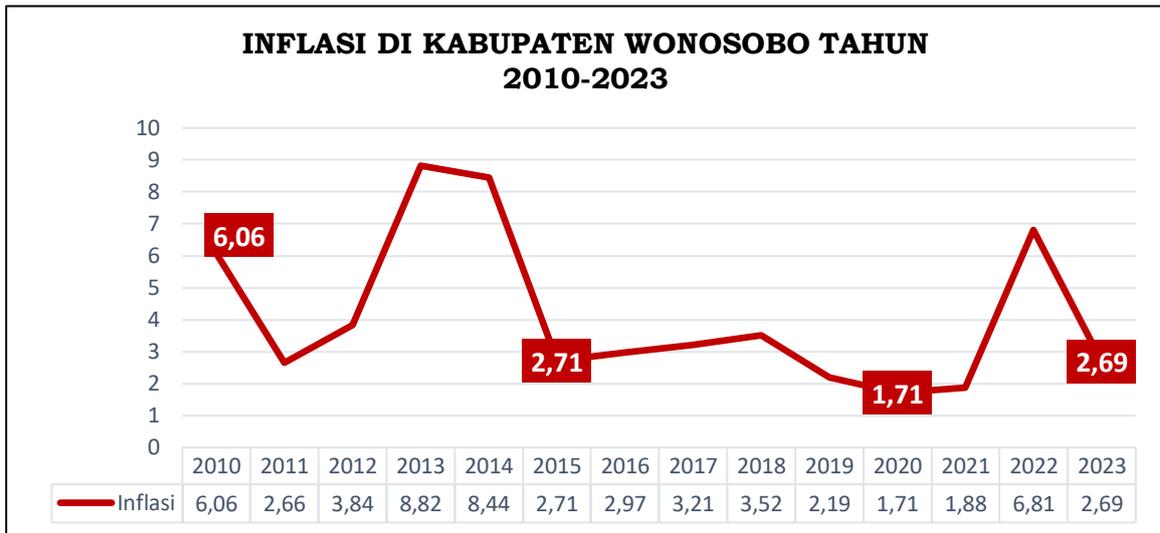
PDRB Lapangan Usaha	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Dalam Juta	%												
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	5.021.611	30,9	5.253.823	30	5.475.275	29,1	5.855.199	31,1	6.025.202	30,3	6.390.440	29,6	6.709.703	29
B. Pertambangan dan Penggalian	154.965	0,95	162.897	0,93	184.205	0,98	19.288	1,02	213.431	1,07	216.018	1	231.535	1
C. Industri Pengolahan	2.824.021	17,4	3.088.400	17,7	3.346.651	17,8	3.408.679	18,1	3.661.165	18,4	3.877.945	18	4.230.715	18
D. Pengadaan Listrik dan Gas	544	0,03	5.721	0,03	5.974	0,03	6.054	0,03	6.377	0,03	6.734	0,03	7.318	0
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16.606	0,1	17.527	0,1	18.663	0,1	19.968	0,11	20.946	0,11	21.888	0,1	22.762	0
F. Konstruksi	1.067.205	6,57	1.182.811	6,76	1.279.556	6,8	1.237.501	6,57	1.365.242	6,88	1.472.643	6,82	1.650.468	7
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.731.289	16,8	2.957.570	16,9	3.223.475	17,1	3.122.137	16,6	3.392.559	17,1	3.602.357	16,7	3.885.523	17
H. Transportasi dan Pergudangan	841.193	5,17	907.216	5,19	1.000.987	5,32	731.585	3,88	774.128	3,9	1.246.861	5,78	1.480.535	6
I. Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	520.348	3,2	558.391	3,19	612.544	3,26	527.621	2,8	570.851	2,87	70.317	3,26	768.075	3
J. Informasi dan Komunikasi	193.718	1,19	22.346	1,28	261.855	1,39	299.564	1,59	317.518	1,6	333.697	1,55	361.440	2
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	52.726	3,24	567.158	3,24	601.027	3,2	609.535	3,24	651.206	3,28	711.962	3,3	743.258	3
L. Real Estate	247.033	1,52	266.298	1,52	289.768	1,54	290.177	1,54	298.925	1,51	313.352	1,45	335.880	1
M,N. Jasa Perusahaan	43.123	0,27	47.861	0,27	54.095	0,29	51.593	0,27	53.613	0,27	5.779	0,27	62.444	0
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	427.108	2,63	449.848	2,57	469.787	2,5	470.103	2,5	46.007	2,32	475.777	2,2	506.623	2
P. Jasa Pendidikan	1.039.866	6,4	1.142.079	6,53	1.251.250	6,65	1.278.337	6,79	1.296.730	6,53	1.336.930	6,19	1.430.373	6
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	233.504	1,44	258.024	1,47	283.602	1,51	3.139	1,67	317.415	1,6	329.984	1,53	353.793	2
R,S,T,U. Jasa lainnya	360.815	2,22	40.416	2,31	448.952	2,39	423.847	2,25	431.483	2,17	493.069	2,28	549.476	2
Produk Domestik Regional Bruto	16.255.103	100	17.493.245	100	18.807.664	100	18.838.679	100	19.856.862	100	21.590.618	100	23.329.922	100

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo, 2018-2024



h. Inflasi

Inflasi diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK), yang mencerminkan perubahan harga sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Perubahan pola konsumsi yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi informasi, perubahan pendapatan masyarakat, perubahan pola penawaran, permintaan barang dan jasa serta faktor lainnya.



Grafik II. 15 Inflasi Tahunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2023

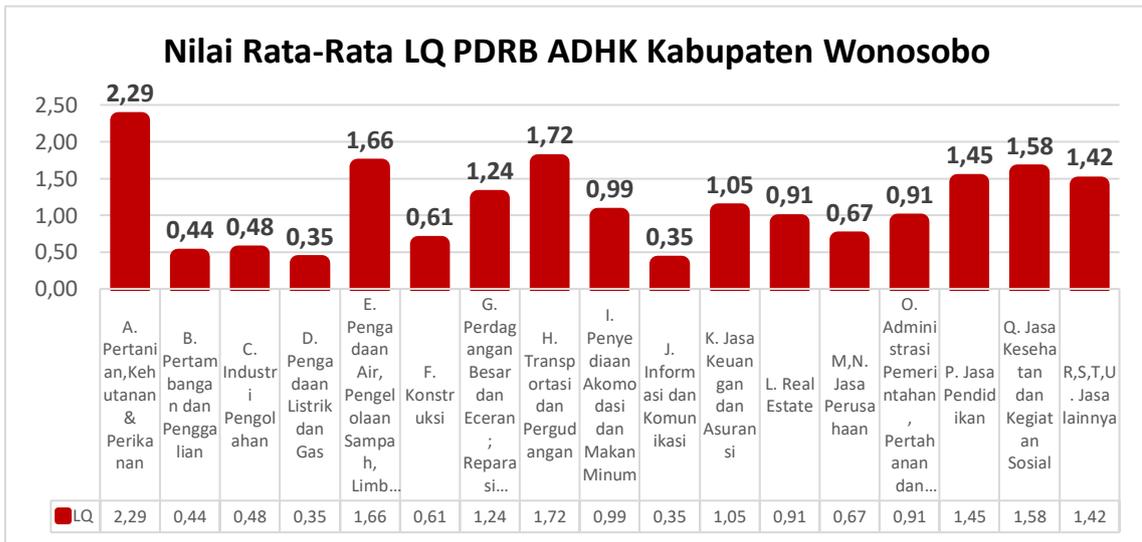
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2011-2024

Tingkat inflasi Kabupaten Wonosobo dalam kurun waktu 2010-2023 menunjukkan angka yang fluktuatif dan relatif terkendali dengan angka rata-rata 4,11% (Kabupaten Wonosobo pada 2019-2023 tidak menghitung angka inflasi dan menggunakan pendekatan angka inflasi Kabupaten Cilacap). Rata-rata tingkat inflasi Kabupaten Wonosobo masih lebih tinggi 0,09 poin dibandingkan Jawa Tengah. Andil inflasi Kabupaten Wonosobo banyak dipengaruhi oleh kenaikan pada harga kelompok makanan, minuman dan tembakau terutama komoditas beras, cabai merah, cabai rawit dan gula pasir. Cuaca ekstrem (*el nino*) menjadi salah satu penyebab beberapa komoditas gagal panen sehingga terjadi lonjakan harga.



i. Sektor Basis Pembangunan

Location Quotient (LQ) merupakan cara/pendekatan untuk mengukur kekhasan atau keunggulan suatu sektor ekonomi di Kabupaten Wonosobo dengan dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Pendekatan LQ menunjukkan sektor apa saja yang dominan menunjang perekonomian di suatu daerah. Analisis nilai LQ Kabupaten Wonosobo menunjukkan bahwa sektor Pertanian memiliki nilai LQ yang paling tinggi disusul dengan sektor transportasi dan pengadaan air. Dominasi sektor pertanian dalam analisis LQ ini sesuai dengan kondisi di lapangan di mana sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Kabupaten Wonosobo. Potensi sumber daya alam yang subur merupakan unsur utama Kabupaten Wonosobo dalam meningkatkan sektor pertanian. Tantangan ke depan adalah keberlanjutan pertanian Wonosobo baik dari segi sumber daya alamnya maupun sumber daya manusia, sehingga akan dapat menopang perekonomian daerah Wonosobo.



Grafik II. 16 Nilai Rata-Rata LQ PDRB ADHK Kabupaten Wonosobo

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo, 2011-2024 (diolah)



Tabel II. 28 Location Quotient berdasarkan PDRB ADHK Kabupaten Wonosobo

LQ Kabupaten Wonosobo ADHK															Rata-Rata
PDRB Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2,22	2,21	2,22	2,20	2,31	2,26	2,33	2,32	2,30	2,31	2,34	2,35	2,34	2,41	2,29
B. Pertambangan dan Penggalan	0,47	0,49	0,49	0,48	0,46	0,45	0,39	0,39	0,39	0,42	0,43	0,45	0,47	0,51	0,45
C. Industri Pengolahan	0,47	0,47	0,47	0,47	0,46	0,47	0,47	0,48	0,49	0,49	0,51	0,52	0,51	0,55	0,49
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,27	0,34
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,54	1,59	1,63	1,66	1,68	1,70	1,70	1,69	1,69	1,70	1,68	1,64	1,66	1,37	1,64
F. Konstruksi	0,59	0,59	0,60	0,61	0,61	0,61	0,62	0,62	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62	0,68	0,62
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,20	1,20	1,22	1,24	1,25	1,26	1,24	1,26	1,25	1,26	1,24	1,26	1,23	1,14	1,23
H. Transportasi dan Pergudangan	1,67	1,67	1,69	1,71	1,70	1,71	1,75	1,76	1,75	1,75	1,80	1,79	1,57	1,54	1,70
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,98	0,99	1,01	1,03	1,03	1,04	1,02	1,01	0,98	0,99	0,92	0,92	0,94	0,86	0,98
J. Informasi dan Komunikasi	0,32	0,33	0,34	0,34	0,34	0,35	0,34	0,36	0,37	0,38	0,37	0,37	0,38	0,24	0,35
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,99	1,00	1,02	1,03	1,05	1,06	1,05	1,07	1,09	1,08	1,07	1,07	1,08	1,24	1,07
L. Real Estate	0,92	0,90	0,90	0,91	0,91	0,91	0,90	0,91	0,91	0,92	0,91	0,90	0,89	0,74	0,89
M,N. Jasa Perusahaan	0,68	0,66	0,66	0,66	0,67	0,68	0,68	0,69	0,68	0,68	0,68	0,67	0,67	0,68	0,67
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,89	0,89	0,90	0,91	0,91	0,92	0,92	0,93	0,93	0,92	0,92	0,91	0,91	0,92	0,91
P. Jasa Pendidikan	1,52	1,48	1,46	1,48	1,45	1,45	1,44	1,45	1,45	1,45	1,43	1,43	1,43	1,61	1,47
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,49	1,50	1,52	1,56	1,57	1,59	1,59	1,61	1,62	1,63	1,61	1,60	1,60	1,63	1,58
R,S,T,U. Jasa lainnya	1,38	1,37	1,38	1,39	1,39	1,40	1,38	1,42	1,45	1,46	1,46	1,46	1,45	1,35	1,41

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo, 2011-2024

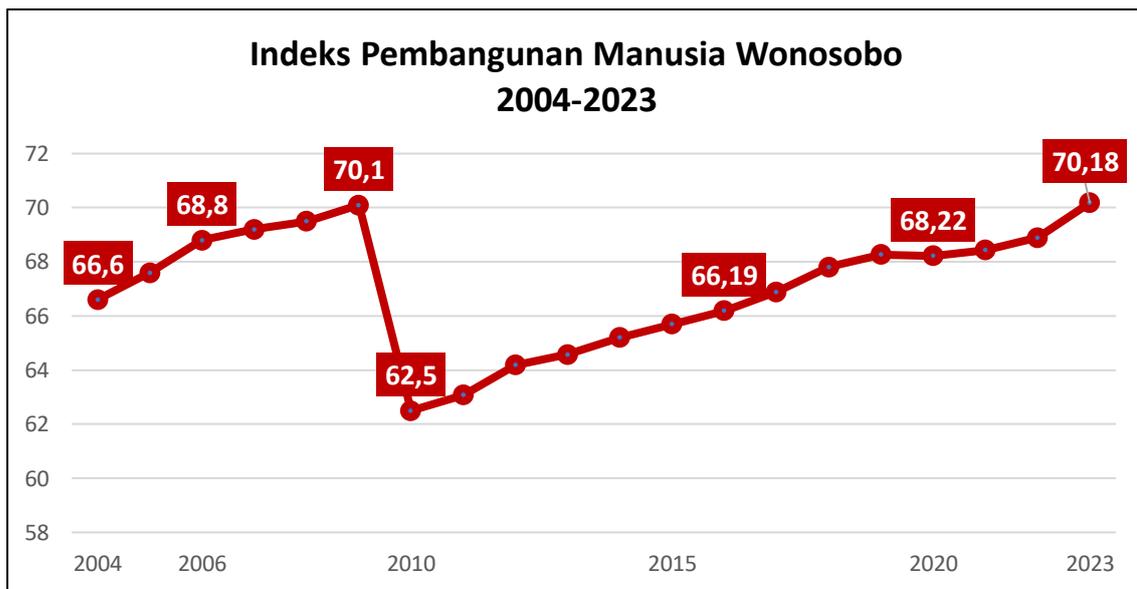


2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kabupaten Wonosobo memiliki angka IPM yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2004, IPM Kabupaten Wonosobo berada di angka 66,60 sebelum kemudian berhasil mencapai 70,10 pada 2009. Namun, pada 2010 angka ini menurun drastis mencapai 62,50. Penurunan ini banyak dipengaruhi oleh perubahan metode perhitungan IPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat di semua wilayah di Indonesia. Dengan adanya perubahan metode ini, maka indikator yang digunakan untuk mengukur IPM lebih tepat, khususnya terkait dengan kondisi pendidikan dan pendapatan masyarakat.

Sejak 2010 hingga 2019, tren IPM di Kabupaten Wonosobo terus meningkat dari angka 62,50 menjadi 68,27. Akan tetapi, angka IPM mengalami penurunan sebesar 0,05 pada 2020. Konteks pandemi menjadi penyebab IPM Kabupaten Wonosobo menurun. Kondisi ini tidak berlangsung lama, karena pada 2021 angka IPM kembali naik menjadi 68,43 hingga 70,18 pada 2023.



**Grafik II. 17 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Wonosobo Tahun 2004-2023**

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo, 2005-2024

Keterangan:

* Data 2010 dan tahun seterusnya menyesuaikan dengan perubahan metode perhitungan IPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat

Rendahnya nilai IPM Kabupaten Wonosobo karena dipengaruhi oleh faktor pendidikan yang masih rendah, khususnya terkait dengan angka lama rata-rata sekolah dan harapan lama sekolah. Salah satu penyebabnya yaitu tingkat kemiskinan Kabupaten Wonosobo yang tinggi. Akan tetapi, secara faktual bukan berarti mereka tidak



mendapatkan pendidikan sama sekali. Hal ini karena banyak anak di Wonosobo yang lebih memilih menempuh pendidikan informal.

Dimensi kesehatan, Usia Harapan Hidup (UHH) dipengaruhi oleh mortalitas yang didekati dengan kematian bayi dan kematian ibu, angka kesakitan, gizi masyarakat faktor lingkungan dan gaya hidup. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir harapan hidup selalu mengalami kenaikan namun belum optimal karena kasus kematian bayi yang masih tinggi atau meningkat 4,26% menjadi 12,55 pada tahun 2023 serta angka kesakitan yang masih tinggi. UHH pada tahun 2023 telah mencapai 74,01 atau naik 0,31% dibandingkan tahun 2020, namun jika dibandingkan provinsi dan nasional masih jauh tertinggal. Angka kematian ibu meskipun sudah menurun di tahun 2023 dengan jumlah kematian sebesar 4 kematian namun masih perlu mendapatkan perhatian agar tidak terjadi kenaikan mengingat masih banyaknya kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun serta ibu hamil risiko tinggi karena faktor usia dan penyakit bawaan. Faktor gizi masyarakat yang juga berpengaruh terhadap harapan hidup tercermin dalam angka stunting di Kabupaten Wonosobo yang masih tinggi. Pada tahun 2023 angka stunting naik 6,5% dibandingkan tahun 2022 menjadi 29,20% dan menjadi kabupaten dengan angka stunting tertinggi di Jawa Tengah. Angka kesakitan pada tahun 2023 sebesar 13,05 dipengaruhi antara lain masih adanya penyakit menular seperti penyakit TBC. Sampai dengan tahun 2023 cakupan temuan dan pengobatan penyakit TB masih di angka 92,71% dan angka keberhasilan dan pengobatan masih di angka 92,71%.

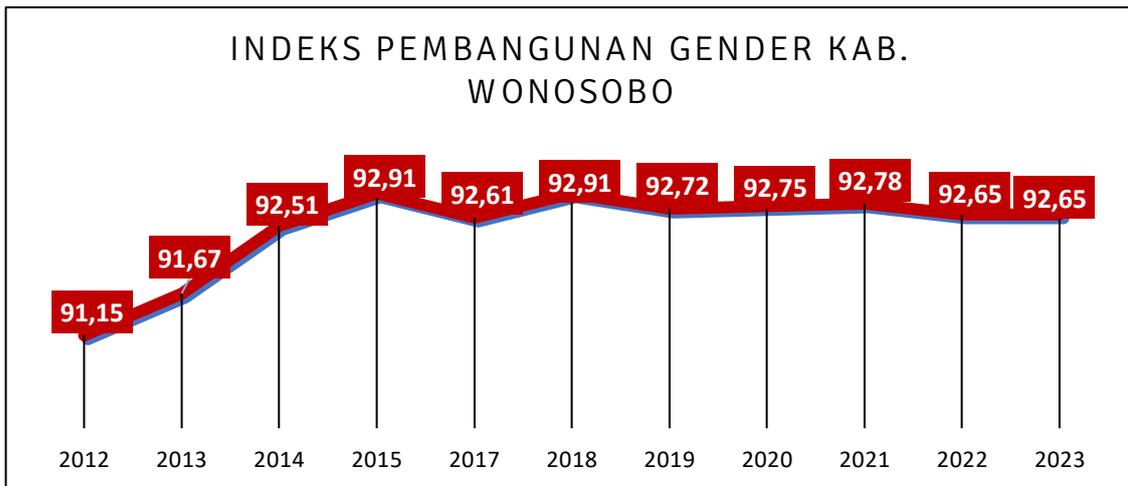
Pada 2023, untuk pertama kali IPM Kabupaten Wonosobo masuk dalam kategori tinggi. Namun, demikian jika dilihat dari capaian IPM antara laki-laki dan perempuan ada kesenjangan, di mana pada 2023 IPM laki-laki sebesar 73,68 atau kategori tinggi sedangkan perempuan 68,41 dengan kategori sedang. Perbedaan capaian IPM ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan pembangunan manusia di Kabupaten Wonosobo. Dalam dimensi kesehatan usia harapan hidup wanita lebih tinggi di mana UHH perempuan 75,97 tahun sedangkan laki-laki 72,20. Pada dimensi pendidikan rata-rata lama sekolah laki-laki 7,14 tahun dan harapan lama sekolah 11,80 tahun sedangkan perempuan 6,71 dengan harapan lama sekolah sebesar 11,82. Pada dimensi ekonomi pendapatan per kapita disesuaikan laki-laki Rp15.742.000 sedangkan perempuan Rp10.124.000.

b. Indeks Pembangunan Gender & Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang berguna untuk membandingkan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara perempuan dan laki-laki. Ketika IPG mendekati atau mencapai 100, hal tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan



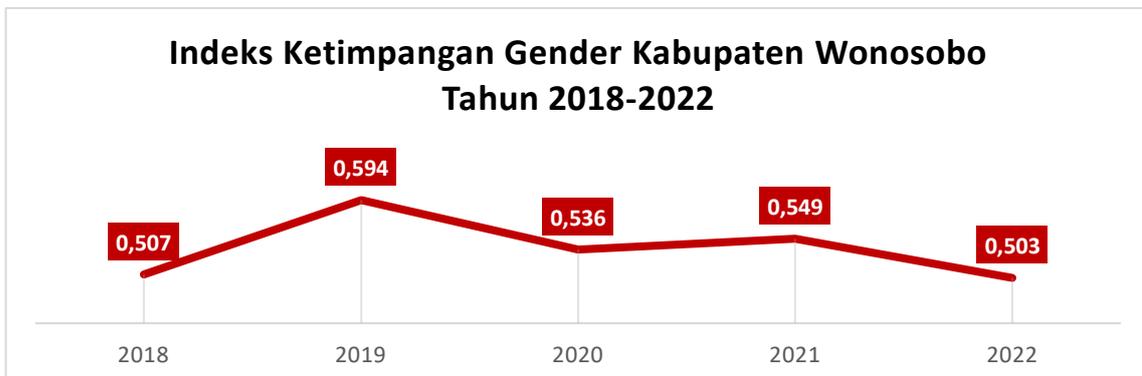
antara perempuan dan laki-laki semakin kecil. Selama periode 2012 hingga 2023, meskipun mengalami fluktuasi di beberapa tahun, tetapi Kabupaten Wonosobo mencatat perbaikan yang positif dalam capaian IPG. Bahkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, terjadi peningkatan sebesar 1,5 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan perempuan di Kabupaten Wonosobo sudah relatif baik. Upaya pembangunan gender dan pemberdayaan perempuan perlu ditingkatkan secara konsisten sebagai bentuk inklusivitas di berbagai sektor, termasuk dalam pemenuhan layanan kesehatan, pendidikan, maupun perekonomian.



Grafik II. 18 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Wonosobo Tahun 2012-2023

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013-2024

Sementara itu, indeks ketimpangan gender di Kabupaten Wonosobo menunjukkan penurunan sejak 2020 hingga 2022. Grafik berikut memperlihatkan indeks ketimpangan gender pada 2018 sampai dengan 2022.



Grafik II. 19 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Wonosobo Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo, 2019-2023

Keterangan : data 2023 belum rilis



Meskipun kesenjangan menurun, beberapa komponen pembentuk indeks ketimpangan gender ini masih perlu perhatian serius terutama pada tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, di mana pada 2022 TPAK perempuan 60,79 sedangkan laki-laki 87,88. Kesenjangan juga terjadi pada dimensi pendidikan, di mana hanya 18,17% pada perempuan usia 14-49 tahun yang berpendidikan SMA ke atas sedangkan laki-laki 20,43%.

Dimensi kesehatan reproduksi, proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan pertama berusia kurang dari 20 tahun sebesar 42,16 yang menggambarkan bahwa dari 1000 perempuan usia 15-49 tahun terdapat kelahiran hidup sebesar 42, artinya pernikahan usia anak masih terjadi di Kabupaten Wonosobo. Kesehatan reproduksi remaja menjadi poin penting dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi menjadi upaya untuk melindungi remaja dari risiko perkawinan anak, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, Infeksi Menular Seksual (IMS), HIV/AIDS dan kekerasan seksual.

c. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Desa memiliki peran penting dalam pembangunan mengingat sebagian besar penduduk Kabupaten Wonosobo bertempat tinggal di desa. Oleh karena itu, desa memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Keberhasilan pembangunan desa dalam 5 tahun terakhir diukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM). IDM ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan perdesaan. IDM diukur berdasar tiga dimensi yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi/lingkungan.

Sejalan dengan visi RPJPN 2025-2045, pengukuran keberhasilan pembangunan desa akan berganti menjadi Indeks Desa yang akan mulai diukur pada tahun 2025.

Tabel II. 29 Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023

Klasifikasi Desa	Jumlah (desa) s.d. Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Sangat tertinggal	1	0	0	0	0
Tertinggal	5	4	3	0	0
Berkembang	162	153	146	67	27
Maju	66	76	82	138	145
Mandiri	2	3	5	31	64
Total Desa	236	236	236	236	236
Persentase Desa Mandiri	0,85	1,27	2,12	13,14	27,12



Klasifikasi Desa	Jumlah (desa) s.d. Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata IDM	n.a	n.a	0,6980	0,7399	0,7748

Sumber: Dinsos PMD, 2024

Perkembangan 5 tahun terakhir, kemajuan pembangunan desa terlihat pada peningkatan jumlah desa mandiri dan tidak ada lagi desa sangat tertinggal dan tertinggal. Desa berkembang sudah menurun menjadi 11,44% sehingga diperlukan upaya lebih untuk meningkatkan kualitas pembangunan desa menuju desa mandiri.

2.2.3. Daya Saing Ekonomi Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Dalam perkembangannya, pengukuran IDSD menggunakan konsep dan metode pengukuran mengadopsi kerangka pengukuran *Global Competitiveness Index (GCI) 2019* dari *World Economic Forum*, yang disesuaikan dengan konteks daerah.

Daya saing ekonomi dalam kerangka Indeks Daya Saing Daerah dapat dilihat berdasarkan komponen pasar dan ekosistem inovasi, yang terdiri dari pilar pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi.

Tabel II. 30 Tabel Penilaian Indeks Daya Saing Daerah

Pilar	Dimensi	Indikator	Skor
Pasar Produk	Pasar Produk	Persaingan Sektor Jasa	3,03
Indeks Pilar Pasar Produk			3,03
Pasar Tenaga Kerja	Fleksibilitas	Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Aktif	1,86
		Upah Pekerja	3,17
	Meritokrasi dan Insentif	Kesetaraan Upah Perempuan dan Laki-laki	3,31
Indeks Pilar Pasar Tenaga Kerja			2,78
Sistem Keuangan	Kedalaman	Persentase kredit swasta terhadap PDRB Harga Berlaku (Persen)	1,13
		Nilai Akad Kredit Usaha Rakyat (Rupiah)	2,73



Pilar	Dimensi	Indikator	Skor
Indeks Pilar Sistem Keuangan			1,93
Ukuran Pasar	Ukuran Pasar	PDRB ADHK 2010 (Miliar Rupiah)	4,28
Indeks Pilar Ukuran Pasar			4,28
Dinamisme Bisnis	Persyaratan Administrasi	Pertumbuhan Nomor Induk Berusaha (NIB)	1,07
		Kinerja Pelayanan Publik	4,14
Indeks Pilar Dinamisme Bisnis			2,60
Kapabilitas Inovasi	Keanekaragaman dan Kolaborasi	Keanekaragaman tenaga kerja	3,44
	Riset	Publikasi ilmiah	3,45
		Aplikasi Kekayaan intelektual (KI)	3,30
		Belanja riset	0,40
		Indeks keunggulan lembaga riset	3,58
	Komersialisasi	Aplikasi merek dagang	2,38
Indeks Pilar Kapabilitas Inovasi			2,76

Sumber: Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2024

Pasar produk menjelaskan keterbukaan pasar produk melalui besarnya kesempatan yang sama bagi produsen untuk memasarkan produknya secara *fair* dan kompetitif, yang dilihat berdasarkan tingkat dominasi pasar dan persaingan sektor jasa. Kabupaten Wonosobo berada pada kondisi keterbukaan pasar yang cukup baik (skor 3,03 dari skala 5). Hal ini menunjukkan bahwa pasar tidak terlalu didominasi oleh kelompok tertentu serta usaha kecil dan menengah mampu bersaing cukup baik di antara kelompok usaha sedang dan besar, serta keberadaan sektor jasa yang memiliki kontribusi yang cukup baik.

Pasar tenaga kerja ditentukan oleh fleksibilitas tenaga kerja dan upah yang layak. Keberadaan pasar tenaga kerja yang efisien dan kebijakan pasar tenaga kerja yang aktif merupakan kunci untuk menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kabupaten Wonosobo berada pada kondisi pasar tenaga kerja yang cukup baik (skor 2,78 dari skala 5) yaitu dengan adanya standar upah yang telah mendekati Upah Minimum Regional (UMR) dan adanya kesetaraan upah antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian pasar tenaga kerja masih lemah pada aspek kebijakan pasar tenaga kerja yaitu masih



rendahnya jumlah kartu prakerja dibandingkan jumlah angkatan kerja yang ada di Kabupaten Wonosobo.

Sistem keuangan yang baik dapat meningkatkan kapasitas perekonomian dengan meningkatkan efisiensi penggunaan dana, serta memediasi lalu lintas dana melalui jasa sistem pembayaran. Kabupaten Wonosobo berada pada kondisi sistem keuangan yang masih rendah (skor 1,93 dari skala 5) yaitu walaupun sebenarnya nilai akad Kredit Usaha Rakyat (KUR) sudah cukup tinggi, namun persentase kredit swasta terhadap PDRB ADHB masih rendah. Ukuran pasar suatu daerah dilihat berdasarkan Produk Domestik Regional Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) dan ukuran pasar ini mempengaruhi produktivitas karena pasar yang besar memungkinkan pelaku bisnis untuk mengeksploitasi skala ekonomi. Ukuran pasar Kabupaten Wonosobo sangat besar (skor 4,28 dari skala 5) yang artinya berpeluang meningkatkan produktivitas bisnis dengan memperluas skala ekonominya.

Dinamisme bisnis menggambarkan kemudahan untuk memulai usaha dan melakukan bisnis dan kemudahan untuk melakukan divestasi dan keluar dari pasar suatu wilayah. Dinamisme bisnis ini kemudian dilihat dari pertumbuhan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan kinerja pelayanan publik dan dinamisme bisnis Kabupaten Wonosobo berada dalam kondisi cukup baik (skor 2,6 dari skala 5) karena kinerja pelayanan yang sudah baik namun pertumbuhan NIB yang masih rendah.

Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi di suatu daerah, juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas visi dan sudut pandang yang berbeda serta sejauh mana kapasitas daerah mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Kapabilitas inovasi Kabupaten Wonosobo berada pada kondisi yang cukup baik (skor 2,76 dari skala 5) dengan keanekaragaman tenaga kerja, publikasi ilmiah, aplikasi Kekayaan Intelektual dan keunggulan lembaga riset yang sudah baik, namun masih lemah pada belanja riset dan aplikasi merek dagang.

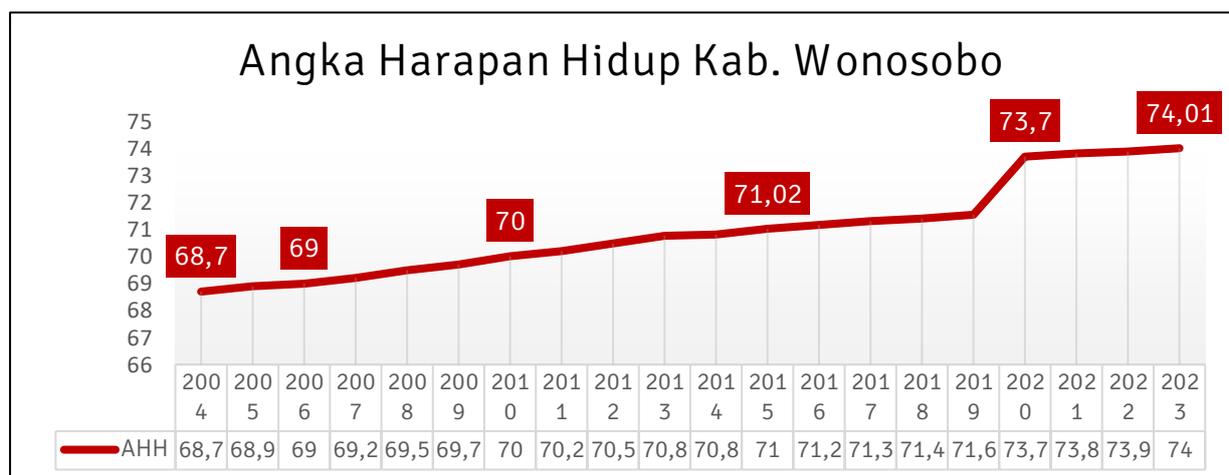
Berdasarkan pilar-pilar pembentuk daya saing ekonomi daerah yaitu pilar pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi, tampak bahwa secara umum ukuran pasar yang besar dan keterbukaan pasar produk menjadi keunggulan dari daya saing ekonomi Kabupaten Wonosobo. Ukuran pasar yang besar didominasi oleh sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sebagai sektor andalan. Pasar produk yang terbuka bagi persaingan terutama tampak dari kontribusi sektor jasa yang cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Wonosobo secara umum.



Sementara itu kelemahan dari daya saing ekonomi terutama dari sistem keuangan, pasar tenaga kerja, dinamisme bisnis dan kapabilitas ekonomi. Persentase kredit swasta dan nilai akad Kredit Usaha Rakyat yang masih rendah, kebijakan pasar tenaga kerja yang masih lemah, kesulitan persyaratan administrasi untuk menunjang dinamisme bisnis serta rendahnya komersialisasi inovasi masih menjadi tantangan bagi daya saing ekonomi Kabupaten Wonosobo.

2.2.4. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing Sumber Daya Manusia dalam konteks Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) terdiri dari dua pilar penting yaitu pilar kesehatan dan pilar keterampilan. Pilar kesehatan diukur melalui indikator angka harapan hidup telah mencapai skor 4,00 yang menunjukkan bahwa kesehatan di Kabupaten Wonosobo sudah baik. Sampai dengan 2023 angka harapan hidup mencapai 74,01 tahun. Artinya, bayi yang lahir di tahun tersebut memiliki harapan hidup yang cukup tinggi meskipun masih di bawah angka provinsi Jawa Tengah (74,58) namun angka harapan hidup Wonosobo di atas angka rata-rata nasional (73,93). Tren selama 20 (dua puluh) tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup positif.



**Grafik II. 20 Angka Harapan Hidup Kabupaten Wonosobo
Tahun 2004-2023**

Sumber: BPS Wonosobo, 2005-2024

Namun demikian aspek daya saing sumber daya manusia pada pilar keterampilan masih perlu perhatian serius. Poin pilar keterampilan hanya berada pada angka 2,97 pada skala 1-5. Pilar Keterampilan diukur dalam dua dimensi yaitu tenaga kerja saat ini dan tenaga kerja masa depan.



Tabel II. 31 Tabel Komponen Pilar Ketrampilan dalam IDSD

Pilar	Dimensi	Indikator	Skor
Kesehatan	Indeks Pilar Kesehatan	Angka Harapan Hidup	4.00
	Indeks Pilar Kesehatan	Angka Harapan Hidup	4.00
Keterampilan	Tenaga Kerja Saat Ini	Rata-rata tahun sekolah	2.29
		Keterampilan lulusan	2.14
		Kemudahan Menemukan Pekerja Terampil	1.07
	Tenaga Kerja Masa Depan	Angka Harapan Sekolah	3.28
		Berpikir Kritis dalam Mengajar	4.95
		Rasio murid-guru pendidikan dasar	4.06
	Indeks Pilar Keterampilan		2.97

Sumber: Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2024

Penyiapan tenaga kerja saat ini masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah yang tergambarkan pada capaian rata-rata lama sekolah di Wonosobo yang masih cukup rendah, berada di angka 6,89 tahun (BPS, 2023). Artinya, masyarakat usia dari 25 tahun ke atas rata-rata hanya lulusan SMP kelas 1. Dengan rendahnya tingkat pendidikan berimplikasi pada keterampilan lulusannya yang tentunya hal ini akan berdampak pada kemudahan menemukan pekerja terampil. Menurut data BPS, 62,33% tenaga kerja berlatar belakang pendidikan lulusan SD bahkan tidak tamat SD. Tabel berikut menjelaskan komposisi tenaga kerja di Wonosobo pada 2023.

Tabel II. 32 Komposisi Latar Belakang Pendidikan Tenaga Kerja Kabupaten Wonosobo Tahun 2023

Tingkat Pendidikan	Bekerja	%	Pengangguran	%	Jumlah Angkatan Kerja	%
Tidak tamat SD dan sd. Lulus SD	313.529	63,46	10.477	40,75	324.006	62,33
SLTP/ sederajat	81.904	16,58	7.277	28,3	89.181	17,16
SMA Umum/ sederajat	73.377	14,85	5.861	22,79	79.238	15,24
Universitas	25.275	5,12	2.097	8,16	27.372	5,27
Total	494.085	100	25.712	100	519.797	100

Sumber: BPS Wonosobo, 2024

Pemerintah Kabupaten Wonosobo masih memiliki tantangan besar terhadap kualitas tenaga kerja utamanya saat ini. Angka rata-rata lama



sekolah, keterampilan lulusan serta kemudahan menemukan pekerja terampil yang rendah akan menjadi penghambat pertumbuhan daya saing di masa depan.

Perencanaan peningkatan daya saing SDM ke depan, Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu fokus untuk meningkatkan keterampilan penduduk usia kerja, meningkatkan kualitas pendidikan dan kecakapan hidup agar memiliki daya saing yang tinggi serta menyiapkan generasi emas yang dapat mendukung tercapainya visi-misi Kabupaten Wonosobo.

2.3.3. Daya Saing Infrastruktur

Pilar infrastruktur mengukur keberadaan dan Infrastruktur dasar yang harus tersedia di suatu wilayah untuk mendukung daya saing daerah. Dalam perspektif IDSD, pilar infrastruktur terdiri dari beberapa dimensi yaitu transportasi jalan darat, jalur kereta api, transportasi udara, transportasi laut, utilitas kelistrikan dan utilitas air. Skor IDSD Kabupaten Wonosobo berdasarkan pilar infrastruktur hanya mencapai angka 2,39, dalam kategori cukup rendah (lihat tabel di bawah ini).

Tabel II. 33 Tabel Komponen Pilar Infrastruktur dalam IDSD

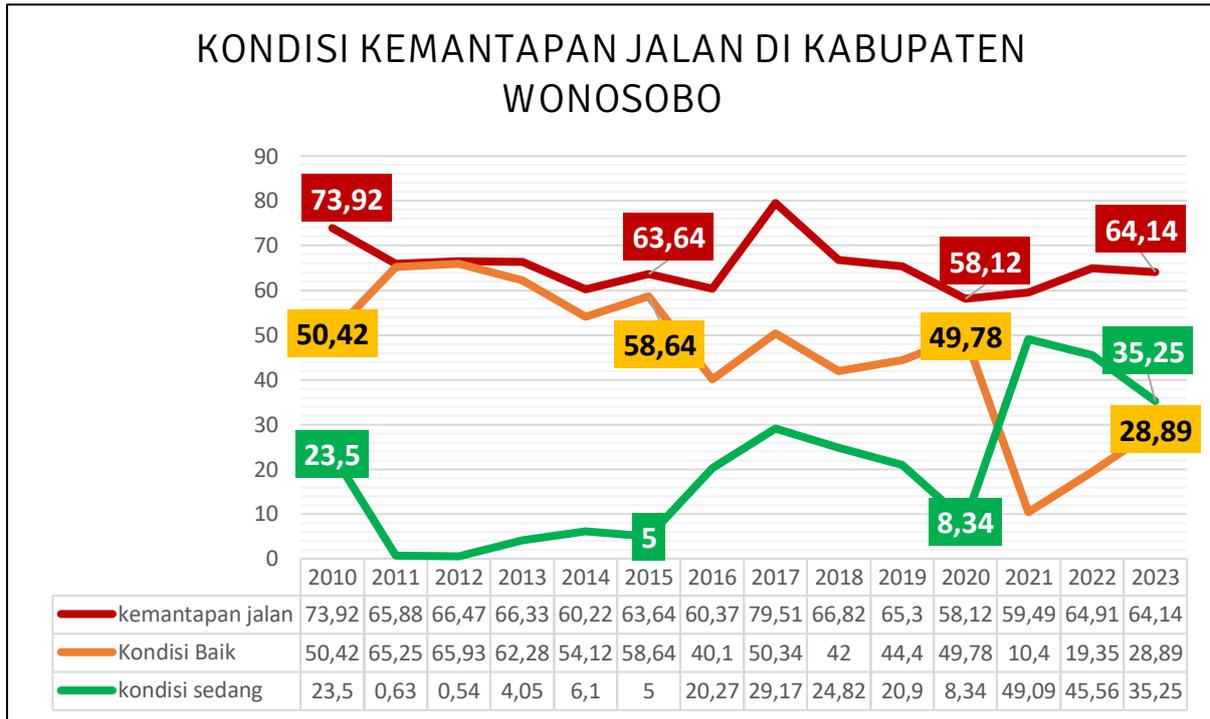
Pilar	Dimensi	Indikator	Skor
Infrastruktur	Infrastruktur Transportasi (Jalan Darat)	Aksesibilitas Jalan	1,18
	Infrastruktur Transportasi (Jalan Darat)	Kualitas Infrastruktur Jalan	3,17
	Infrastruktur Transportasi (Jalur Kereta Api)	Layanan Infrastruktur Stasiun Kereta Api	0,00
	Infrastruktur Transportasi (Udara)	Layanan Infrastruktur Bandara	5,00
	Infrastruktur Transportasi (Pelabuhan)	Layanan Infrastruktur Pelabuhan	2,12
	Infrastruktur Utilitas (Kelistrikan)	Rasio Elektrifikasi	5,00
	Infrastruktur Utilitas (Air)	Akses Air Minum Layak	0,45
	Infrastruktur Utilitas (Air)	Tingkat Kehilangan Air	2,21
	Indeks Pilar Infrastruktur		

Sumber: Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2024

Dimensi infrastruktur jalan darat diukur dari indikator pemenuhan standar pelayanan minimal aksesibilitas jalan dan kualitas infrastruktur jalan. Indikator pemenuhan standar pelayanan minimal aksesibilitas jalan dalam kategori rendah (Skor IDSD 1,18). Indikator kualitas infrastruktur jalan dalam kategori cukup baik (Skor IDSD 3,17). Aksesibilitas jalan yang masih rendah terkait dengan panjang jalan dibandingkan dengan luas wilayah. Untuk kualitas infrastruktur jalan masuk kategori cukup baik yang dihitung berdasarkan indikator “persentase jalan dalam kondisi baik”. Jika secara umum, kinerja kualitas jalan dapat dilihat dari tingkat kemantapan



jalan. Jalan mantap diukur dari jalan kondisi baik dan sedang sebagaimana grafik di bawah.



Grafik II. 21 Kondisi Kemantapan Jalan di Kabupaten Wonosobo

Sumber: DPUPR Kabupaten Wonosobo, 2024 (diolah)

Keterangan: data kondisi jalan tahun 2016-2023 mengacu pada Keputusan Bupati Nomor 620/300/2016 tentang Ruas Jalan Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan grafik di atas, kondisi jalan kewenangan kabupaten pada periode 2010 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Meskipun dari 2010 hingga 2023 terdapat penurunan kualitas kemantapan jalan, hal ini lebih disebabkan pada perubahan metode pengukuran kondisi jalan yang lebih detail dan memasukkan kriteria kekasaran jalan. Sejak 2020, pengukuran kondisi jalan menggunakan *Provincial/Kabupaten Road Management System (PKRMS)*. Pada tahun 2023 tingkat kemantapan jalan mencapai 64,14% dengan jalan kondisi baik baru mencapai 28,89%. Pada tahun 2023, dengan adanya SK jalan kabupaten yang baru (Surat Keputusan Bupati Nomor 620/415/2023) dilakukan perhitungan ulang terhadap kemantapan jalan yaitu sebesar 63,27%. Menurunnya angka kemantapan jalan selain adanya penambahan jumlah ruas dan pengurangan juga disebabkan adanya trase jalan baru yang masih belum sempurna (belum *asphalt*). Kondisi kemantapan jalan masih didominasi jalan kondisi sedang dibandingkan dengan kondisi baik. Untuk meningkatkan daya saing daerah perlu meningkatkan persentase jalan dalam kondisi baik.

Dimensi transportasi jalur kereta api diukur dari layanan infrastruktur kereta api yang berada di angka Skor IDSD yaitu 0,00. Hal ini dikarenakan belum aktifnya kembali jalur kereta api di Wonosobo. Jalur kereta api pada

masa lampau meliputi trase Purwokerto-Wonosobo yang sudah tidak aktif sejak 1980-an. Dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah regional, perlu mendorong upaya implementasi reaktivasi kereta api trase Purwokerto-Wonosobo.

Dimensi transportasi laut dan udara di Kabupaten Wonosobo dihitung berdasarkan radius pelayanan infrastruktur laut dan bandara. Dimensi transportasi udara diukur dari dimensi layanan infrastruktur bandara yang berada di angka 5,00. Definisi operasional dalam IDSD yang dipakai untuk layanan infrastruktur bandara berbeda dengan di indikator layanan infrastruktur kereta api. Definisi operasional dari transportasi udara adalah radius pelayanan bandara, sehingga Wonosobo diuntungkan dengan adanya tiga bandara yang cukup dekat dari kabupaten ini, yaitu di Semarang (Bandara A. Yani), Kulon Progo (Bandara *Yogyakarta International Airport*) dan Purbalingga (Bandara JB. Sudirman). Dimensi transportasi laut diukur dengan dimensi layanan infrastruktur laut yang berada di angka 2,12. Definisi operasional dari transportasi laut adalah radius pelayanan pelabuhan dan yang terdekat dari Wonosobo adalah pelabuhan Semarang yaitu Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Konektivitas Wonosobo dari sisi jalur transportasi dalam konteks konstelasi regional Jawa Tengah dan DIY dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar II. 18 Konektivitas dan Aksesibilitas Kabupaten Wonosobo terhadap Simpul/Hub Transportasi Udara, Laut dan Kereta Api

Sumber: Tim Penyusun, 2024

Berdasarkan gambar di atas, secara konstelasi regional, Wonosobo yang berada di posisi tengah Jawa Tengah, memang masih terkendala jarak dan konektivitas dengan simpul hub transportasi. Meskipun masih masuk dalam



radius pelayanan bandara dan pelabuhan, jarak tempuh dari simpul hub ke Wonosobo berkisar kurang lebih 3 (tiga) jam. Dalam konteks pariwisata waktu tempuh yang masih cukup lama menjadi salah satu kendala aksesibilitas wisatawan.

Mengacu pada sistem jaringan transportasi yang diamanatkan dalam RTRW Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043 meliputi sistem jaringan jalan; sistem jaringan kereta api; dan sistem jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP). Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud mencakup jalan umum, jalan tol, terminal penumpang dan jembatan. Adapun jalan umum tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo berfungsi sebagai jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan. Pada saat ini, di Kabupaten Wonosobo belum ada jalan tol. Berdasarkan rencana umum jaringan jalan nasional, jalan tol yang hendak dibangun meliputi trase Pekalongan-Wonosobo dan Wonosobo-Magelang. Untuk sistem jaringan kereta api perlu didorong upaya implementasi reaktivasi kereta api trase Purwokerto-Wonosobo. Sistem jaringan ASDP saat ini masih terbatas berada di Waduk Wadaslintang namun belum operasional belum optimal.

Dimensi infrastruktur utilitas kelistrikan diukur dari rasio kelistrikan yang berada di skor IDSD 5,00. Rasio kelistrikan di Wonosobo sudah mencapai 100% (BPS, 2023). Pemenuhan kebutuhan listrik, berdasarkan data tahun 2023, penduduk Kabupaten Wonosobo yang telah mendapatkan akses terhadap listrik sebesar 100% meskipun masih ada sekitar 6% yang menggunakan listrik PLN tanpa meteran (menyambung) dan sudah 94% menggunakan listrik PLN dengan meteran. Berdasarkan capaian indikator di atas dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo dapat memenuhi kebutuhan dasar listriknya dengan baik.

Dimensi utilitas air diukur dari indikator akses air minum layak yang berada di skor IDSD 0,45 dan tingkat kehilangan air di Skor IDSD 2,21. Akses air minum layak berdasarkan skor IDSD di Wonosobo masih cukup rendah. Namun jika berdasarkan data akses air minum layak dari DPUPR dan layanan Perusahaan Air Minum Daerah (Perumda) Tirta Aji, maka secara persentase akses air minum layak sudah mencapai 95,81%. Tingginya akses air minum layak ini didukung kondisi geografis sebagian besar Kabupaten Wonosobo yang berada di Cekungan Air Tanah (CAT) Wonosobo. Banyaknya mata air juga memudahkan dalam perluasan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan Sumber mata air banyak tersedia, namun 11% mata air dari 1.650 mata air yang terdata mulai mengalami kerusakan berupa berkurang debitnya mati. Cakupan akses air minum aman juga selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2023, capaiannya sebesar 50,88% meningkat jika dibandingkan dengan 2022 yaitu 48,78%. Akses air minum aman saat ini menjadi fokus dan target pemerintah pusat karena berkaitan



dengan Kesehatan Masyarakat. Akses air minum aman masih ditopang oleh Perumda Air Minum Tirta Aji karena telah melakukan uji kualitas air secara berkala pada tingkatan Sambungan Rumah (SR). Di sisi lain, masih terdapat 26,79% desa rawan air minum/bersih. Kerawanan tersebut dilihat dari secara hidrogeologi termasuk desa dengan kategori langka air tanah, desa dengan kendala air minum dan desa yang meminta *dropping* air bersih. Sementara itu, untuk wilayah yang menjadi layanan PDAM, hal yang masih jadi kendala adalah terhentinya kontinuitas aliran selama periode tertentu terutama terjadi pada saat musim kemarau. Pada indikator IDSD air minum juga terdapat indikator tingkat kehilangan air. Pada tahun 2023, tingkat kehilangan air pada skor IDSD sebesar 2,21. Jika berdasarkan data dari Perumda Tirta Aji, data tingkat kehilangan air sebesar 24,33%. Tingkat kehilangan air ini masih di bawah ambang batas tingkat kehilangan air 25%. Meski masih di bawah ambang batas, perlu ada upaya-upaya untuk menurunkan tingkat kehilangan air.

Perumda Tirta Aji mendukung layanan kebutuhan air bersih aman. Air bersih aman diartikan memenuhi standar kualitas air minum sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023. Layanan air minum aman ini berada di wilayah pelayanan Perumda Tirta Aji (PDAM) di wilayah perkotaan. Capaian Tahun 2023 akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan sebesar 41.76% (sesuai grafik di bawah ini).



Grafik II. 22 Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023

Sumber: PDAM Kabupaten Wonosobo, 2024

Kondisi infrastruktur di luar indikator IDSD yang terkait dengan infrastruktur dan perkembangan wilayah Kabupaten Wonosobo yaitu aspek keselamatan jalan dan ketersediaan layanan transportasi. Aspek keselamatan jalan ditandai dengan indikator persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten. Kondisi ideal yang dimaksud adalah kelengkapan jalan terpasang di atas 60% dari kebutuhan. Kondisi Kabupaten Wonosobo saat ini, belum ada satu pun ruas



jalan kabupaten yang telah terpasang kelengkapan jalannya di atas 60%. Hal ini menjadi kendala dalam penyediaan layanan jalan berkeselamatan. Kelengkapan jalan misalnya guardrail, cermin cembung, marka, lampu Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Alat Penerangan Jalan (APJ) dan lain-lain.

Terkait dengan pelayanan angkutan umum, Kabupaten Wonosobo secara regional hingga tahun 2023 belum terdapat layanan Trans Jateng (angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan regional (lintas kabupaten dalam provinsi). Hal ini karena pola aglomerasi regional perkotaan antarkabupaten belum terbentuk secara masif, bangkitan serta tarikan penumpangnya belum terlalu kuat. Untuk layanan angkutan umum di dalam wilayah Kabupaten Wonosobo pun belum memadai. Hal ini ditandai dengan rendahnya persentase trayek yang aktif yang hanya mencapai 58,33% dan persentase angkutan umum yang beroperasi hanya mencapai 43,07%. selain itu, kondisi angkutan umum yang sepi penumpang ini juga diindikasikan dari hasil survei statis pada triwulan II tahun 2024, rata-rata *load factor* penumpang hanya mencapai 35,60%. *Load factor* dalam konteks angkutan merujuk pada perbandingan antara kapasitas kursi penumpang yang digunakan dengan kapasitas kursi penumpang yang tersedia. *Load factor* yang rendah ini menunjukkan adanya ruang kosong yang mungkin dapat mempengaruhi pendapatan atau biaya operasional. rata-rata *load factor* ini diperoleh berdasarkan survei statis pada 3.702 sampel pergerakan angkutan selama periode triwulan II tahun 2024 di Terminal Mendolo pada trayek koridor yang dianggap masih ramai dibanding koridor lainnya (koridor Wonosobo-Kertek). Rendahnya rata-rata *load factor* ini disebabkan karena minat penduduk untuk menggunakan moda transportasi umum semakin berkurang. Berkurangnya minat diindikasikan karena kondisi kualitas angkutan umum yang kurang memadai, terbatasnya halte dan terminal yang representatif dan ketidakpastian jadwal operasi, serta dipengaruhi kemudahan kepemilikan kendaraan pribadi baik itu roda dua maupun roda empat. Peningkatan volume kendaraan pribadi juga berimplikasi pada kemacetan pada titik-titik dan saat tertentu terutama di pusat kota serta tata parkir yang belum memadai. Oleh karena itu, masih diperlukan peningkatan upaya pemerintah kabupaten untuk menyediakan layanan angkutan umum yang aman, nyaman, tidak hanya melayani kawasan perkotaan tapi juga perdesaan serta penataan parkir. Implementasi angkutan massal perkotaan dan perdesaan nantinya juga akan mendukung upaya pengurangan emisi gas rumah kaca karena berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi. Selain angkutan darat saat ini terdapat jalur angkutan penyeberangan di Waduk Wadaslintang yang menghubungkan antardesa di sekitar waduk, namun kondisi dermaga dan sarana pengangkutannya masih minim.



Aspek infrastruktur pelayanan dasar selain air minum yang telah dibahas pada IDSD, yaitu akses sanitasi. Indikatornya yaitu Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman. Sanitasi khususnya layanan air limbah domestik layak dan aman menjadi kebutuhan infrastruktur pelayanan dasar yang sangat terkait dengan aspek kesehatan lingkungan dan pengurangan cemaran pada badan air. Gambaran rumah tangga akses sanitasi aman di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada grafik.

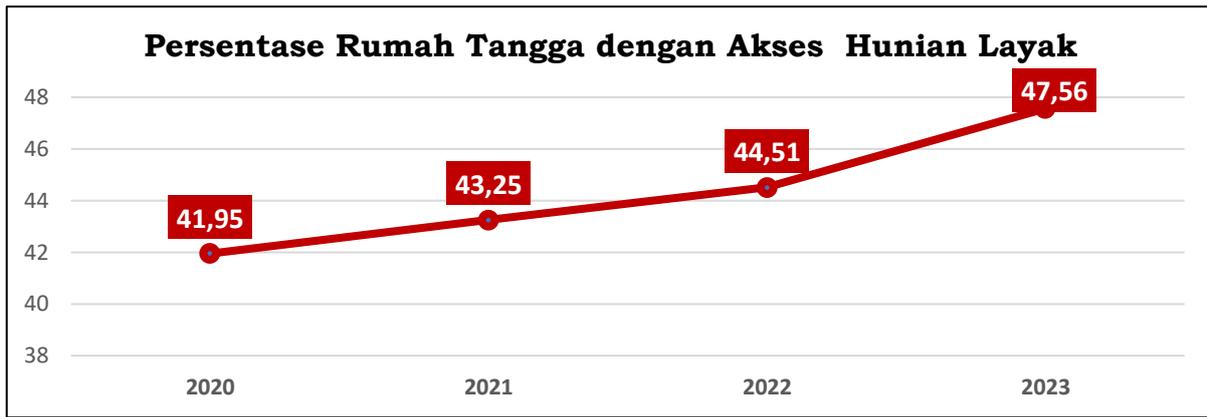


Grafik II. 23 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023

Sumber: DPUPR Kabupaten Wonosobo, 2024

Jika dilihat dari akses sanitasi dasar Kabupaten Wonosobo sudah masuk dalam kategori *Open Defecation Free* atau ODF (100%), namun untuk capaian akses sanitasi layak baru mencapai 69,56% (termasuk di dalamnya 1,69 kategori akses aman). Pada rumah tangga dengan akses aman, maka dilakukan penyedotan lumpur tinja.

Infrastruktur pelayanan dasar lainnya yaitu akses hunian layak. Rumah Tangga dengan akses hunian layak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 memiliki persyaratan terkait keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan untuk kesehatan penghuninya. Kriteria rumah tangga dengan akses hunian layak ini terdiri dari ketahanan bangunan, kecukupan luas, akses air minum layak dan memiliki akses sanitasi layak. Kabupaten Wonosobo pada 2023 memiliki nilai 47,56%, hal ini menunjukkan bahwa kondisinya masih perlu untuk ditingkatkan ke depannya untuk menjaga kesehatan penghuninya di semua lapisan masyarakat. Kondisi persentase rumah tangga dengan akses hunian layak tersaji dalam grafik berikut.

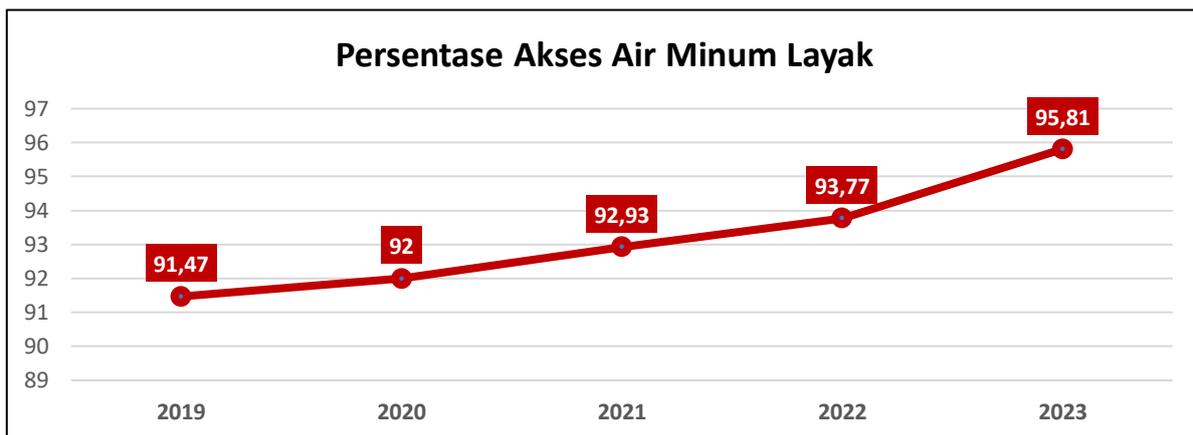


Grafik II. 24 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten Wonosobo Tahun 2020-2023

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo, 2024

Pengukuran hunian layak didasarkan pada proksi yaitu memenuhi empat kriteria berupa ketahanan bangunan (*durable housing*), kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*), memiliki akses air minum layak dan Memiliki akses sanitasi layak khususnya akses air limbah domestik layak.

Perkembangan rumah tangga dengan akses hunian layak dari 2019-2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Indeks Daya Saing Daerah menggambarkan kondisi air minum perkotaan, sedangkan untuk menggambarkan kondisi air minum se-kabupaten menggunakan pendekatan air minum layak. Air minum layak merupakan kondisi di mana sumber air minum dilindungi dan disalurkan dengan menggunakan pipa. Air minum layak memenuhi syarat sumber air terlindungi/ditampung yang dikelola baik oleh pemerintah atau masyarakat secara mandiri (*pamsimas*).



Grafik II. 25 Persentase Akses Air Minum Layak di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023

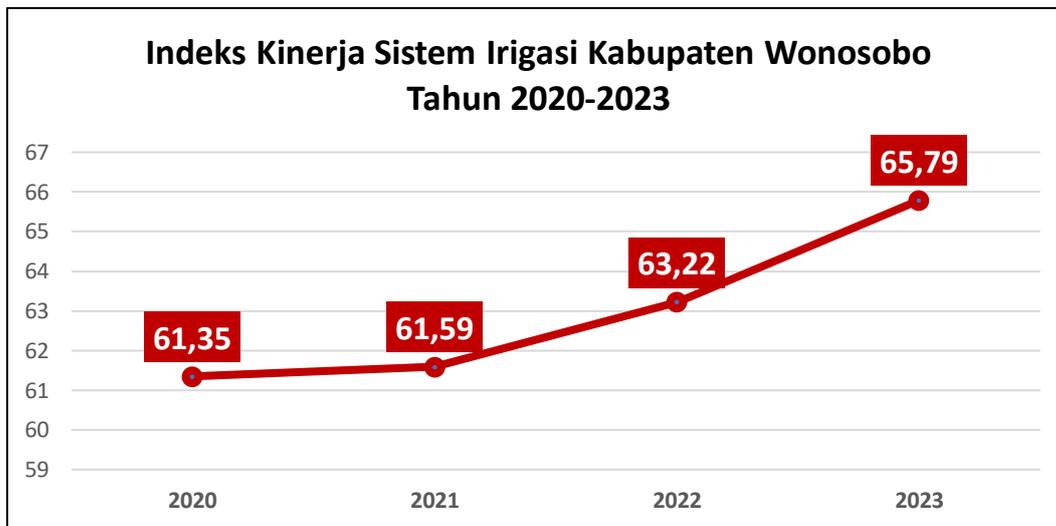
Sumber: DPUPR Kabupaten Wonosobo, 2024

Cakupan akses air minum layak pada tahun 2023 sebesar 95,81% mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 93,77%. Pada grafik terlihat bahwa setiap tahun untuk capaian akses air



minum mengalami kenaikan. Kenaikan ini dikarenakan komitmen pemerintah di dalam pencapaian akses air minum salah satunya melalui pendanaan pusat. Selain itu banyaknya mata air juga memudahkan dalam perluasan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan.

Infrastruktur lainnya yaitu jaringan irigasi. Sistem irigasi merupakan salah satu komponen pertanian yang vital yang berfungsi sebagai pengairan lahan pertanian. Kinerja jaringan irigasi dapat dilihat dari Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI). IKSI dihitung berdasarkan parameter aspek kondisi prasarana fisik, aspek produktivitas tanam, aspek sarana penunjang, aspek organisasi personalia, aspek dokumentasi dan kondisi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).



Grafik II. 26 Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten Tahun 2020-2023

Sumber: DPUPR Kabupaten Wonosobo, 2024

Berdasarkan grafik di atas pada tahun 2020-2023, kondisi kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten masuk dalam kategori “Kinerja Kurang dan Perlu Perhatian”. Ke depannya kondisi irigasi kewenangan kabupaten ini perlu diperhatikan untuk menunjang pertanian di Kabupaten Wonosobo.

2.2.5. Daya Saing Iklim Investasi

Daya saing iklim investasi dalam konteks IDSD dilihat melalui pilar-pilar institusi, infrastruktur, adopsi teknologi informasi dan komunikasi, serta stabilitas ekonomi makro. Aspek institusi menjelaskan ketentuan dalam bentuk tertulis (kebijakan) dan tidak tertulis (norma perilaku) yang mempengaruhi pelaku ekonomi dalam membuat keputusan optimal. Aspek adopsi teknologi informasi dan komunikasi mengukur tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi yang lebih produktif. Aspek stabilitas ekonomi makro memberikan gambaran tentang kemampuan daerah



mengelola ekonomi makro dari ancaman guncangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Berdasarkan nilai Indeks Daya Saing Daerah Iklim investasi memiliki pilar institusi yang baik. Pilar ini terdiri dari aspek keamanan, *check and balance*, transparansi, hak atas kepemilikan dan orientasi masa depan pemerintah daerah. Ancaman keamanan dan tindak kriminalitas yang rendah (skor IDSD 5,0), kinerja instansi pemerintah (skor IDSD 3,5) dan upaya reformasi birokrasi (skor IDSD 3,89), serta jaminan atas kepemilikan (4,97) menjadi keunggulan daya saing iklim investasi di Kabupaten Wonosobo. Sementara dari pilar adopsi teknologi dan informasi (skor IDSD 4,10), tersedianya jaringan 4G, tingginya jumlah pengguna internet telepon selular di Kabupaten Wonosobo juga turut menjadi penguat daya saing iklim investasi.

Dilihat dari stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo yang baik (skor IDSD 3,57) serta kapasitas fiskal daerah yang cukup baik (skor IDSD 3,65) menjadi faktor pendorong iklim investasi. Namun demikian tingkat pengangguran terbuka yang masih cukup tinggi (skor IDSD 2,9) serta rendahnya nilai investasi (skor IDSD 1,11) menjadi faktor yang melemahkan iklim investasi di Kabupaten Wonosobo. Pada tahun 2022, nilai investasi PMDN kabupaten Wonosobo mengalami penurunan dari 0,631 triliun menjadi 0,506 triliun, meski begitu jika dilihat dari kecenderungannya nilai investasi PMDN justru cenderung naik. Tren positif nilai investasi PMDN ini salah satunya dipicu oleh meningkatnya minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Wonosobo sehingga hal ini menjadi faktor penarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Wonosobo.

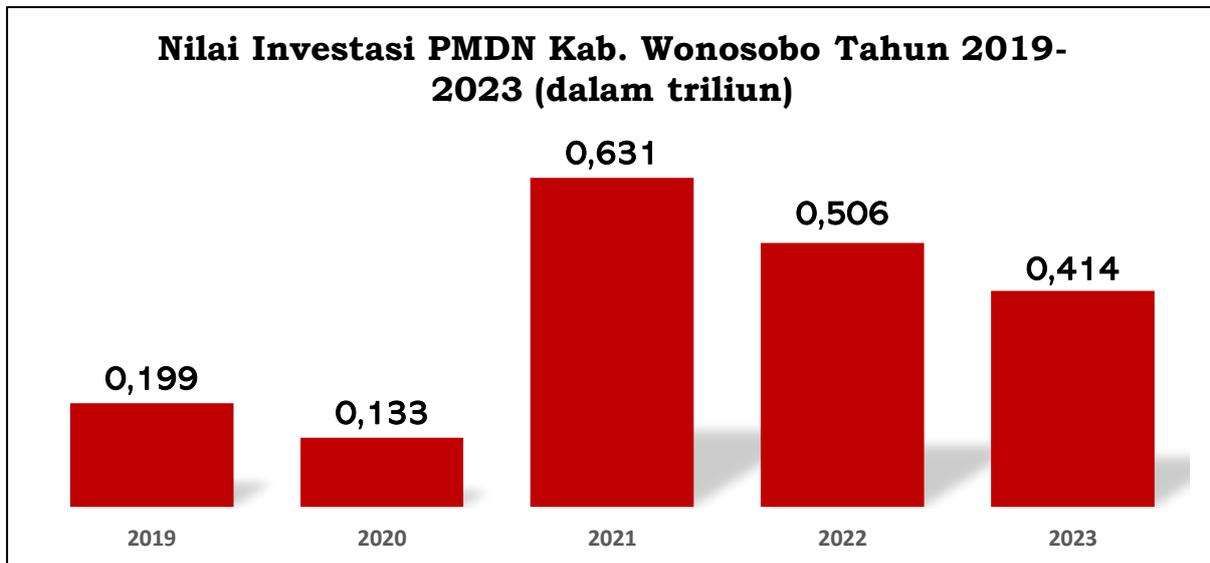
Sebagai salah satu komponen pembentuk Produk Domestik Regional Bruto, investasi merupakan faktor penting pendorong tumbuhnya perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi pada sektor *rill* dapat memunculkan industri manufaktur baru dan atau penambahan mesin, peralatan dan infrastruktur pada industri yang sudah ada dapat meningkatkan produktivitas industri suatu daerah sehingga akan semakin banyak barang dan jasa yang dapat dihasilkan dan pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan PDRB.

Munculnya industri baru dan meningkatnya produktivitas dapat menciptakan lapangan kerja baru. Peningkatan jumlah tenaga kerja secara agregat akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong konsumsi, yang pada gilirannya akan meningkatkan PDRB.

Pendapatan masyarakat yang bertambah selain berimplikasi terhadap meningkatnya tingkat konsumsi juga dapat meningkatkan jumlah tabungan masyarakat pada lembaga keuangan. Dengan bertambahnya total dana



pihak ketiga pada lembaga keuangan maka diharapkan penyaluran kredit usaha produktif juga meningkat sehingga turut mendukung peningkatan dan perluasan usaha dan industri di daerah.



Grafik II. 27 Nilai Investasi Dalam Negeri di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Wonosobo, 2024

Tingkat efisiensi penggunaan modal dalam proses produksi pada sektor ekonomi dapat dilihat dengan nilai ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*). Dalam kurun waktu 2011-2023 nilai ICOR fluktuatif dan cenderung meningkat dimana pada tahun 2023 mencapai 4,24. Hal ini menunjukkan masih terjadi inefisiensi dalam penggunaan investasi di Kabupaten Wonosobo. Secara lengkap nilai ICOR Kabupaten Wonosobo tersaji dalam grafik berikut.



Grafik II. 28 Nilai ICOR Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2023

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo, 2012-2024

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan total investasi yang terjadi di Kabupaten Wonosobo pada jangka tertentu. Kontribusi PMTB



sebagai salah satu indikator ekonomi yang menunjukkan nilai total investasi dalam suatu wilayah pada periode tertentu terhadap PDRB masih berkisar pada angka 2,5 Triliun rupiah atau kurang lebih 20% dari PDRB. Meskipun nilai PMTB bertambah namun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir persentase PMTB cenderung menurun.

Tabel II. 34 Kontribusi dan Persentase PMTB Terhadap PDRB Kab. Wonosobo (dalam miliar rupiah)

	2019	2020	2021	2022	2023
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.586,13	2.409,83	2.576,78	2.625,86	2.696,51
Persentase PMTB Terhadap PDRB Kab. Wonosobo	20,44	19,06	19,54	19,05	18,61

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Wonosobo, 2024

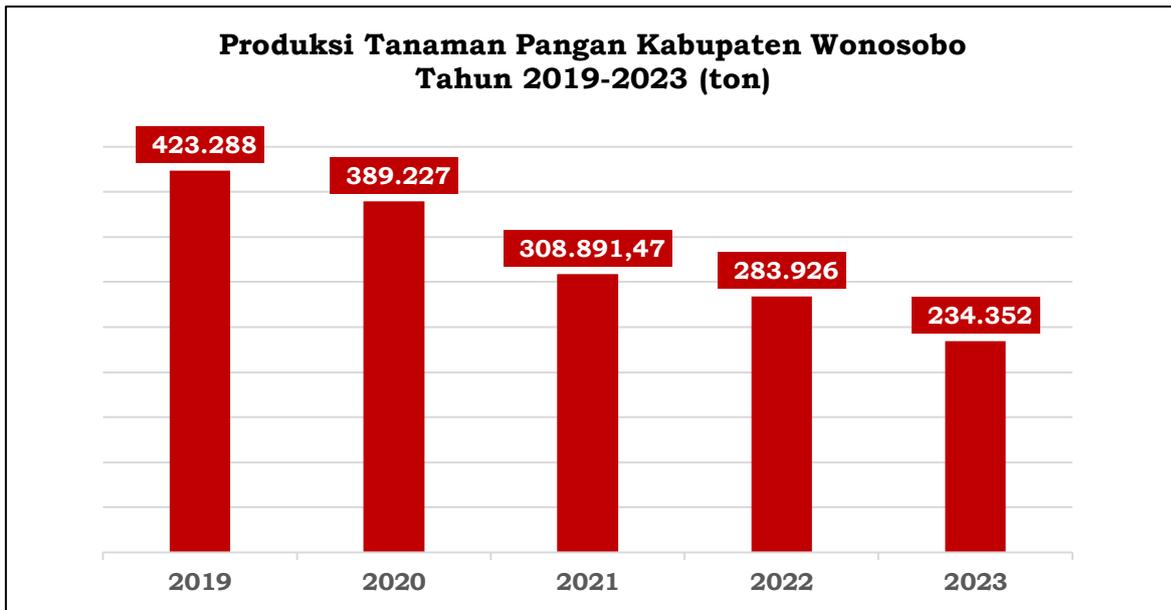
2.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum digunakan sebagai parameter untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.3.1. Bidang Pertanian dan Pariwisata

a. Pertanian

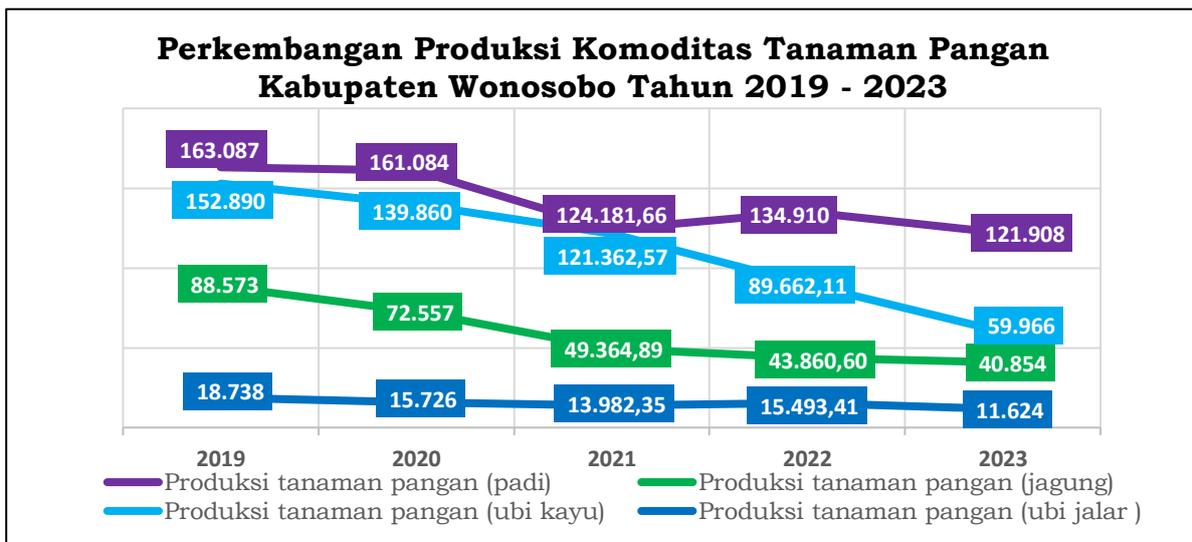
Produksi tanaman pangan sangat tergantung pada sarana produksi dan luas areal panen. Produksi tanaman pangan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 234.352 ton dibandingkan tahun 2022. Hambatan yang masih ditemui dalam upaya peningkatan produksi ini adalah berkurangnya luas baku sawah, perubahan pola tanam, terjadinya penurunan kemampuan lahan, kurangnya pergiliran varietas tanaman unggul dan kurangnya pengetahuan petani terhadap pertanian yang berkelanjutan. Secara lengkap perkembangan produksi tanaman pangan Kabupaten Wonosobo pada 2019-2023 sebagaimana grafik di bawah ini.



Grafik II. 29 Jumlah Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 (Ton)

Sumber: Dispaperkan Kabupaten Wonosobo, 2023

Komoditas tanaman pangan Kabupaten Wonosobo terdiri dari tanaman padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Tercatat pada tahun 2019, produksi padi di Kabupaten Wonosobo sebanyak 163.087 ton dan mencapai 121.908 ton pada tahun 2023. Jagung dan ubi kayu juga menjadi komoditas pertanian potensial yang banyak ditanam oleh petani di Kabupaten Wonosobo. Oleh karenanya, komoditas ini dapat dikembangkan sehingga menjadi sumber perekonomian unggulan di Wonosobo. Potensi akan olahan dari bahan mentah dari jenis tanaman di atas juga dapat memberikan potensi penambahan perekonomian bagi masyarakat Wonosobo.



Grafik II. 30 Perkembangan Produksi Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023

Sumber : Dispaperkan, Kabupaten Wonosobo, 2020-2024



Komoditas tanaman hortikultura dan perkebunan di Kabupaten Wonosobo selama lima tahun terakhir secara produksi tergambar dalam tabel berikut.

Tabel II. 35 Perkembangan Komoditas Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023

No	Jenis Data	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Produksi Hortikultura sayuran	Ton	178,784,9	184.045,40	184.286	170.495,40	159.842
2	Produksi buah-buahan hortikultura	Ton	134.655	128.664,10	131.884	191.737,90	99.604
3	Produksi tanaman perkebunan dan biofarmaka	Ton	8135,78	9.356,65	12.704,63	12.861,01	10.944,39
4	Produksi bunga tangkai	Tangkai	3.292.335	3.276.360	5.618.137	1.272.605	2.752.100

Sumber : Dispaperkan, Kabupaten Wonosobo, 2020-2024

Produksi komoditas hortikultura dan perkebunan semakin tahun semakin menurun, hal ini diindikasikan karena adanya sumber daya petani yang berkurang karena minat generasi muda rendah dan keterampilan petani belum mengacu pada pertanian modern yang berorientasi ekonomi. Selain itu luasan kepemilikan lahan pertanian oleh masyarakat semakin berkurang baik karena alih fungsi lahan, atau meningkatnya lahan pertanian rawan bencana. Perlu adanya perbaikan dalam tata niaga komoditas pertanian yang bisa memberikan kepastian pemasaran dan peningkatan kesejahteraan petani, yang selama ini masih terpengaruh oleh harga pasar, tingkat inflasi dan semakin meningkatnya ongkos produksi pertanian.

Kabupaten Wonosobo selain pertanian juga memiliki potensi di peternakan. Kondisi terakhir pada 2023 menunjukkan bahwa ternak unggas lebih dominan dibanding dengan ternak besar dan ternak kecil. Tabel berikut menyajikan populasi dan perkembangan produksi hasil peternakan di Kabupaten Wonosobo.

Tabel II. 36 Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Populasi Ternak Besar (ekor)	24.614	24.119	25.009	23.400	20.070
2	Jumlah Populasi Ternak Kecil (ekor)	278.514	299.567	332.938	369.442	273.582



No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
3	Jumlah Populasi Unggas (ekor)	2.851.147	2.924.965	3.150.634	2.902.278	9.505.679

Sumber : Dispaperkan Kabupaten Wonosobo, 2024

Berdasarkan data kinerja produksi pertanian, pada tahun 2023 sebagian besar produksi pertanian mengalami penurunan yang disebabkan adanya perubahan iklim, akan tetapi sektor pertanian masih tetap mendominasi kegiatan perekonomian Kabupaten Wonosobo yaitu sebesar 28,76%, sehingga dalam dua puluh tahun ke depan Kabupaten Wonosobo masih memprioritaskan sektor pertanian sebagai sektor utama penggerak perekonomian daerah. Hal ini didukung dalam RPJPN Tahun 2025-2045 menyebutkan bahwa Kabupaten Wonosobo menjadi salah satu bagian dalam pengembangan kawasan strategis pertanian yang mendukung kemandirian pangan bagian dari Citanduy-Serayu. Dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa Kabupaten Wonosobo sebagai kawasan budi daya baik sebagai awasan hutan produksi, kawasan perkebunan rakyat, kawasan pertanian, Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu KSP Agropolitan, sehingga sektor pertanian di Kabupaten Wonosobo masih perlu dipertahankan dan dikembangkan melalui hilirisasi pertanian. Selain itu dalam RTRW Kabupaten Wonosobo disebutkan bahwa penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan mewujudkan kabupaten berbasis agroindustri dan pariwisata yang didukung oleh pertanian berkelanjutan.

Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian di Kabupaten Wonosobo, didorong melalui penggunaan teknologi pertanian. Hal ditandai dengan adanya inovasi teknologi sehingga petani dapat mengoptimalkan produksi pertanian (dalam arti luas), mengelola sumber daya secara efisien dan meningkatkan mutu hasil pertanian. Penerapan teknologi pertanian di Kabupaten Wonosobo sudah mulai dilaksanakan melalui mekanisasi pertanian (traktor, *cultivator*, *sprayer* dan yang lainnya), pemantauan lingkungan (alat pemantau suhu, kelembaban dan kualitas tanah), pestisida dan pupuk ramah lingkungan (pestisida dan pupuk organik), pemanfaatan *Internet of Things* (IoT) untuk mengontrol suhu, air dan pupuk serta penggunaan *drone* untuk pemantauan dan pemetaan lahan.

Kabupaten Wonosobo merupakan daerah agraris yang memiliki potensi pertanian melimpah sehingga memiliki peranan penting dalam menciptakan kemandirian pangan serta meningkatkan perekonomian daerah. Kemandirian pangan adalah kemampuan dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan

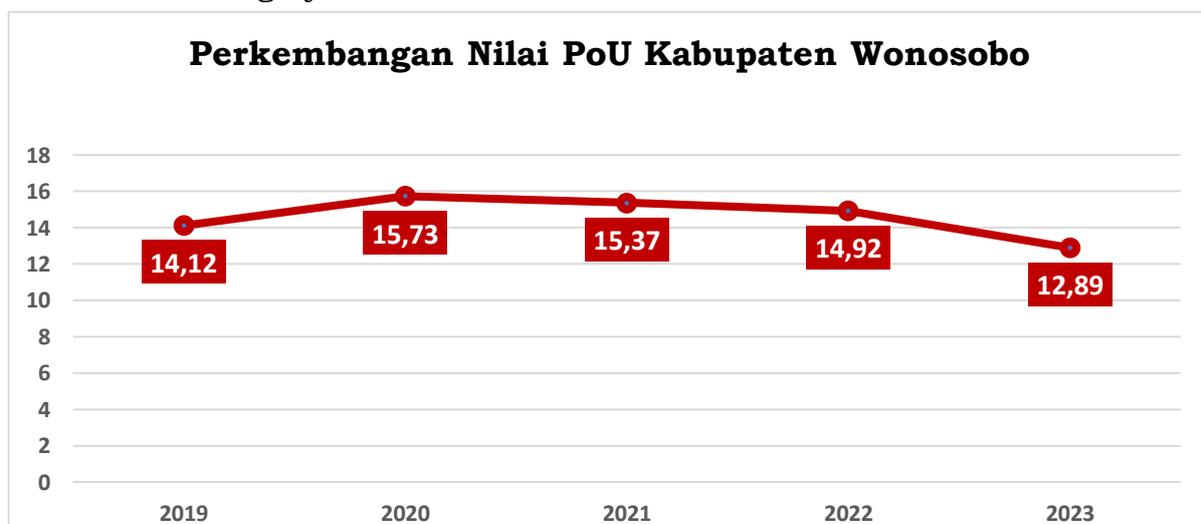


memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat.

Kemandirian pangan tidak lepas dari sifat produksi komoditas pangan itu sendiri yang bersifat musiman dan fluktuasi, karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim/cuaca, yang akan mempengaruhi ketersediaan pangan. Untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai dilakukan melalui produksi pangan domestik dan perdagangan, stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro, tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur.

Kemandirian pangan bisa dilihat dari tingkat ketahanan pangan suatu wilayah yang dinilai dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) maupun nilai prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*). Lima tahun terakhir IKP Kabupaten Wonosobo masih berada pada status wilayah dengan ketahanan pangan paling baik (nilai IKP>75,68). Nilai tertinggi pada tahun 2021 sebesar 79,83 kemudian menurun di tahun 2022 dan 2023 mencapai nilai 77,82. Penurunan nilai IKP menunjukkan bahwa gap antara produksi dengan kebutuhan pangan semakin kecil, prevalensi balita stunting masih tinggi serta persentase penduduk miskin masih tinggi.

Apabila dilihat dari nilai PoU, dalam lima tahun terakhir nilai PoU Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan di mana pada tahun 2023 mencapai nilai 12,89 persen menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Angka PoU Kabupaten Wonosobo ini masih dalam kategori sedang (nilai PoU 5%-19%). Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada penduduk Wonosobo yang mengonsumsi makanan, tetapi kurang dari kebutuhan energinya.

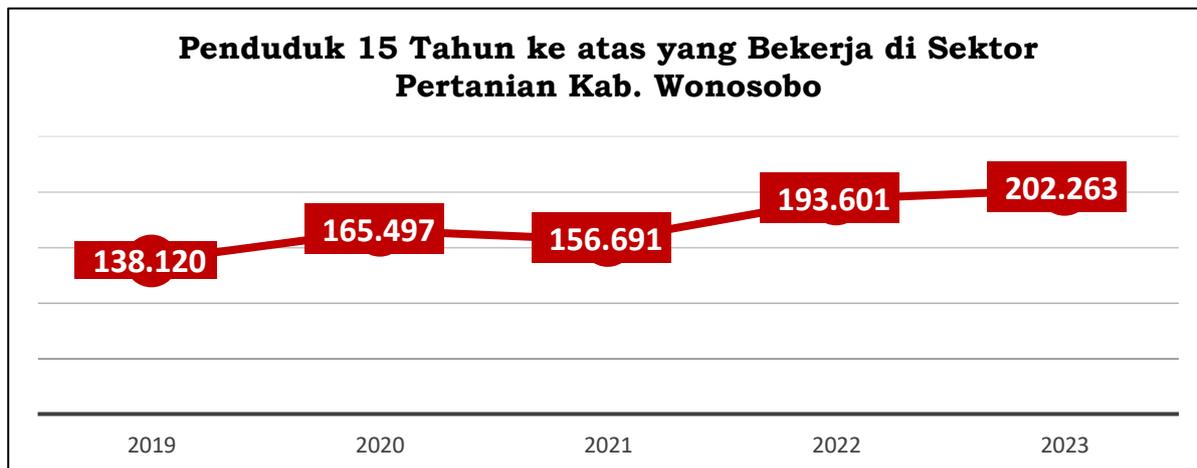


Grafik II. 31 Perkembangan Nilai PoU (*Prevalensi of Undernourishment*) Kabupaten Wonosobo

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2020-2024



Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian pada kurun waktu 2019-2023 cenderung naik dan mendominasi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Wonosobo atau 40% dari seluruh penduduk bekerja. Namun berdasarkan Sensus Pertanian 2023, 44,03% penduduk yang bekerja di sektor pertanian berusia 55 tahun ke atas dan 26% berusia 45-55 tahun dan hanya 31% petani yang berusia kurang dari 45 tahun.



Grafik II. 32 Jumlah Penduduk 15 Tahun ke atas yang bekerja di Sektor Pertanian Tahun 2019-2023

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2020-2024

Grafik II.32 menunjukkan data penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian juga tergabung dalam kelompok tani. Kelompok tani aktif dan lebih efektif dalam mengembangkan pertanian dan peternakan. Kelompok tani sebagai bentuk kelembagaan petani belum sepenuhnya tergolong dalam kelompok yang mapan secara organisasi. Kemampuan kelompok ditinjau dari kelasnya juga masih bervariasi, mulai dari non kelas, pemula, lanjut, madya dan utama, namun sebagian besar belum berbadan hukum. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kemajuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya dapat dilakukan melalui pemetaan kelompok tani.

Kelembagaan petani digunakan untuk mengelola aspek manajemen teknis maupun administrasi, mencakup kemampuan merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, mengevaluasi usaha tani dan mengembangkan kelompok tani itu sendiri. Berikut ini tabel kelembagaan pelaku utama pelaku usaha kelompok tani di Kabupaten Wonosobo.

Tabel II. 37 Data Kelembagaan Pertanian dan Perikanan Tahun 2019-2023

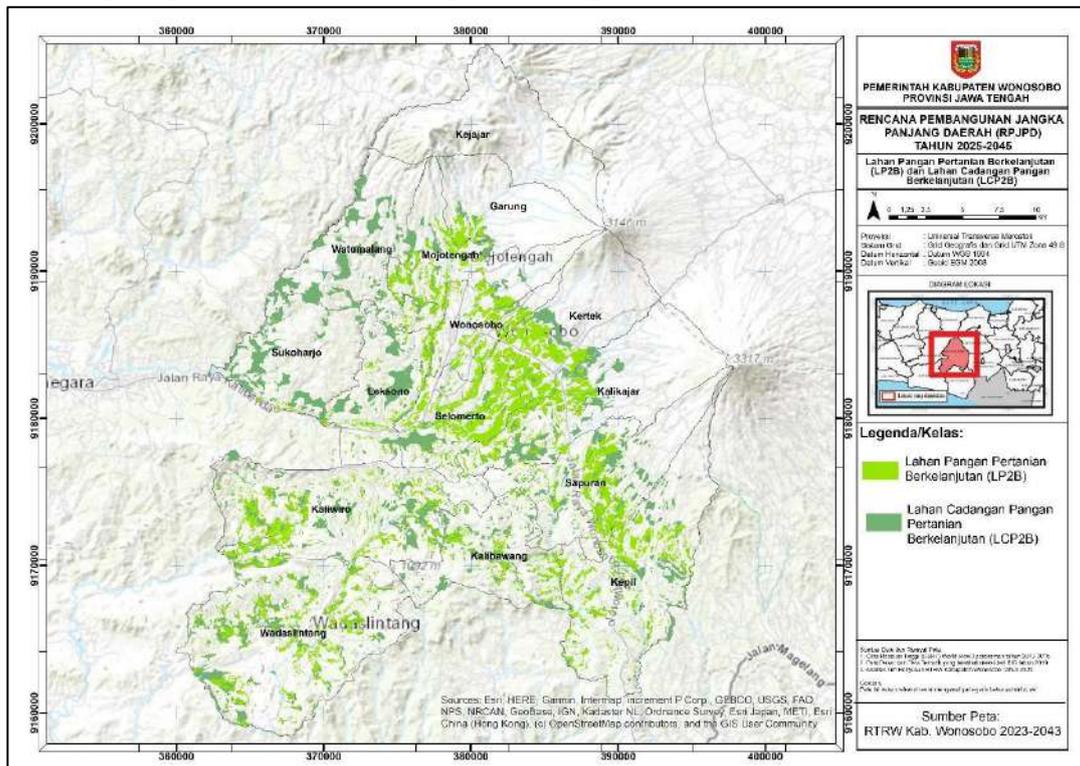
No.	Kelembagaan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Gapoktan Aktif	62,26	62,26	62,26	62,26	62,26



No.	Kelembagaan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
2	Persentase Kelompok Tani Aktif	N.A	N.A	50,32	49,61	69,96
3	Persentase Kelompok Tani Ternak Aktif	5,72	5,7	N.A	N.A	N.A
4	Persentase Kelompok Petani Ikan	10,05	10,1	10,1	53,88	57,36
5	Persentase Perbenihan Rakyat (UPR) Aktif	N.A	82,69	N.A	64,1	76,92

Sumber : Dispaperkan Kabupaten Wonosobo, 2024

Pemerintah pusat dalam memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan mengamanatkan kepada daerah untuk membuat lahan pertanian pangan berkelanjutan (lahan lestari). Kabupaten Wonosobo melalui RTRW 2023-2043 menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) di 14 kecamatan (kecuali Kecamatan Kejajar) untuk mendukung program pemerintah pusat tersebut. Luas total LP2B Kabupaten Wonosobo mencapai 10.168,57 hektar, sedangkan luas total LCP2B Kabupaten Wonosobo mencapai 9.260,43 hektar. Persebaran kedua jenis lahan pertanian pangan tersebut tersaji dalam peta di bawah ini.



Gambar II. 19 Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)

Sumber: DPUPR Kabupaten Wonosobo, 2023



b. Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor potensial di Kabupaten Wonosobo dengan beberapa indikatornya adalah jumlah wisatawan dan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pariwisata. Secara sederhana PDRB Sektor Pariwisata adalah total nilai tambah bruto (*gross value added*) yang dihasilkan dari seluruh kegiatan pariwisata di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. PDRB Sektor Pariwisata menunjukkan besarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah. Semakin tinggi nilai PDRB Sektor Pariwisata, semakin besar pula kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

PDRB Sektor Pariwisata dibentuk oleh beberapa komponen atau sub sektor dalam PDRB yaitu: sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sub sektor jasa angkutan penumpang, jasa agen perjalanan dan reservasi lainnya dan jasa pariwisata lainnya. Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata ditambahkan sebagai salah satu indikator utama pembangunan Kabupaten Wonosobo. Besaran dan kontribusi PDRB Sektor Pariwisata dapat diketahui dari tabel di bawah ini:

Tabel II. 38 PDRB Sektor Pariwisata Atas Dasar Harga Konstan (dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
PDRB Sektor Pariwisata	952.592,09	753.951,32	787.808,61	1.044.197,72	1.143.853,34	936.480,62
PDRB Total	13.793.040,27	13.566.176,25	14.064.764,70	14.770.503,78	15.405.984,62	14.320.093,92
Laju Pertumbuhan PDRB Pariwisata	10,78	(20,85)	4,49	32,54	9,54	7,30

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2024

Tabel II. 39 Kontribusi masing-masing komponen terhadap pembentukan PDRB Sektor Pariwisata (dalam persen)

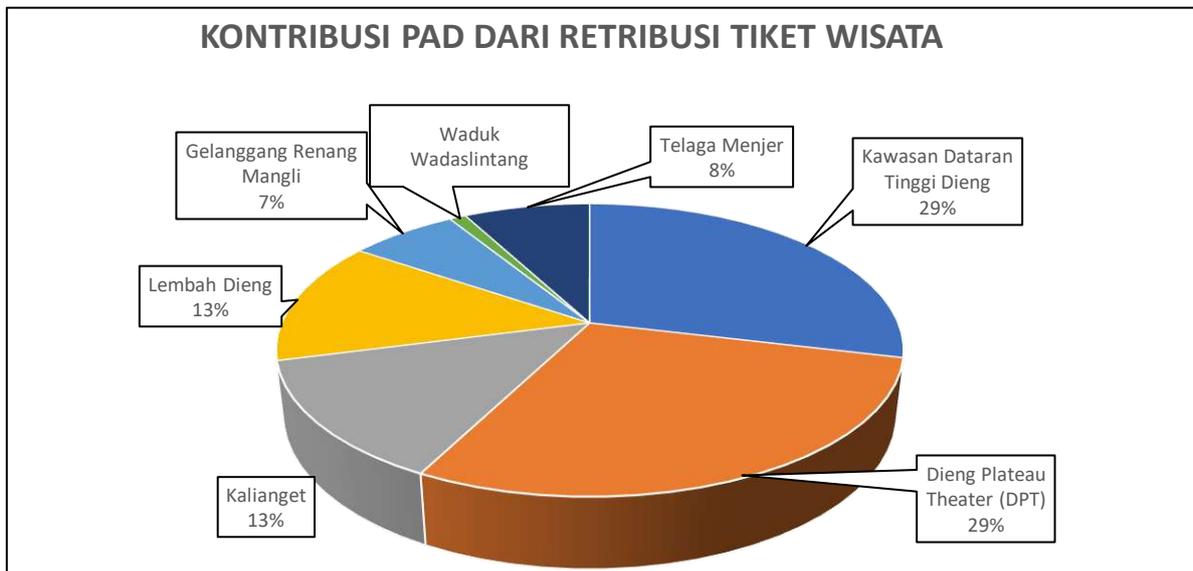
Uraian/ Komponen	2019	2020	2021	2022	2023
Jasa Akomodasi	17,9	14,55	14,42	13,8	13,23
Jasa Makan dan Minum	33,35	40,14	40,93	35,3	34,2
Jasa Angkutan Penumpang	44,32	40,11	39,69	46,8	48,59
Jasa Agen Perjalanan dan Reservasi Lainnya	0,58	0,69	0,67	0,53	0,5
Jasa Pariwisata Lainnya	3,85	4,51	4,29	3,58	3,48
Total PDRB Sektor Pariwisata	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2024

Kontribusi PAD sektor pariwisata dari retribusi tiket wisata berjumlah Rp6.171.685.500, meliputi kontribusi dari Kawasan Dataran Tinggi Dieng sebanyak Rp1.777.899.400, Dieng *Plateau Theater* (DPT) sebanyak Rp1.764.579.400, Kalianget sebanyak Rp1.290.446.000, Lembah Dieng



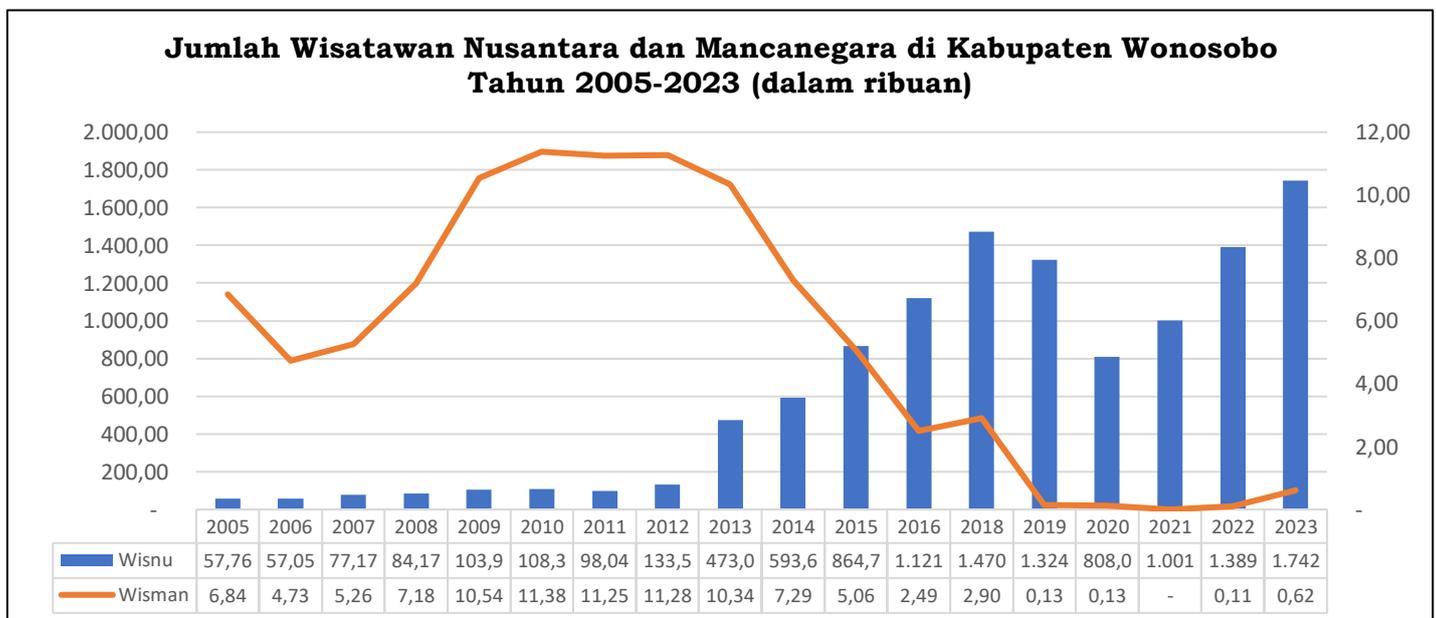
sebanyak Rp872.983.800, Gelanggang Renang Mangli sebanyak Rp298.340.000, Telaga Menjer sebanyak Rp87.176.000 dan Waduk Wadaslintang sebanyak Rp80.260.900.



Grafik II. 33 Kontribusi PAD dari Retribusi Tiket Wisata

Sumber : BPPKAD Kabupaten Wonosobo, 2023

Sementara Jumlah wisatawan Kabupaten Wonosobo yang sempat mengalami penurunan yang signifikan pada 2020 dan 2021 akibat pandemi Covid-19, kembali meningkat sejak tahun 2022, sebagaimana ditunjukkan grafik di bawah ini.



Grafik II. 34 Jumlah Wisatawan Kabupaten Wonosobo Tahun 2005–2023

Sumber : Disparbud Kabupaten Wonosobo, 2006-2024



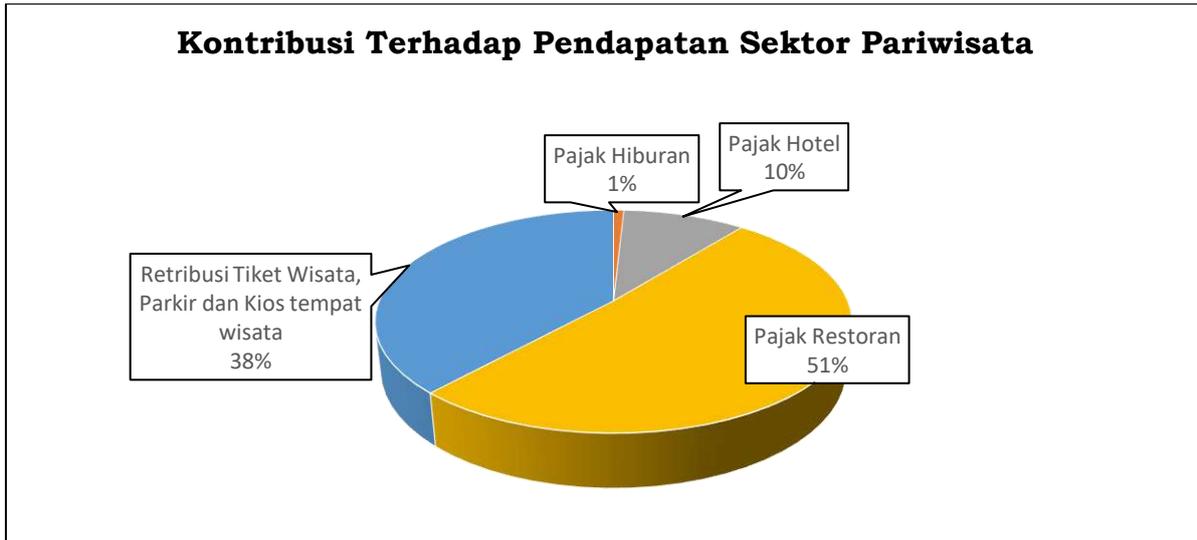
**Grafik II. 35 Hotel dan Penginapan di Kabupaten Wonosobo
Tahun 2012-2023**

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo, 2013-2024

Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu daerah wisata yang banyak diminati wisatawan perlu mengembangkan dan menguatkan bisnis akomodasi pariwisata. Jumlah hotel dan penginapan di Kabupaten Wonosobo menunjukkan penurunan tren dari 2012 hingga 2022. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kondisi akomodasi di Kabupaten Wonosobo semakin melemah selama sepuluh tahun terakhir (2012-2022) namun kembali meningkat pada 2023.

Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mendorong sektor pariwisata, seperti pemberian insentif kepada pelaku pariwisata dan pembukaan kembali objek wisata. Pada 2023, jumlah wisatawan baik nusantara maupun mancanegara mengalami kenaikan kembali dan berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonosobo.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD dalam kurun waktu 2019-2023 sempat menurun pada 2020 dikarenakan pandemi Covid-19 namun pada tahun-tahun selanjutnya grafiknya meningkat. PAD pada 2023 sebanyak Rp266.786.118.103 sedangkan pendapatan sektor pariwisata pada 2023 sejumlah Rp15.961.985.119 dan memberikan kontribusi sebesar 5,98% terhadap PAD. Pendapatan sektor pariwisata meliputi pajak hiburan sebanyak Rp133.356.609, pajak hotel sebesar Rp1.581.380.479, pajak restoran sebesar Rp8.144.052.731 dan retribusi tiket wisata, parkir dan kios di tempat wisata sebesar Rp6.103.195.300.



Grafik II. 36 Kontribusi Terhadap Pendapatan Sektor Pariwisata

Sumber: Disparbud Kabupaten Wonosobo Tahun 2023

Diagram di atas menunjukkan bahwa kontribusi terbesar dari sektor pariwisata adalah dari pajak restoran sebesar 51% diikuti dengan retribusi tiket wisata, parkir dan kios sebesar 38%, pajak hotel sebesar 10% dan pajak hiburan sebesar 1%. Berikut grafik lama tinggal wisatawan (hari) dari 2019 sampai dengan 2023 di Kabupaten Wonosobo.



Grafik II. 37 Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan (hari) di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023

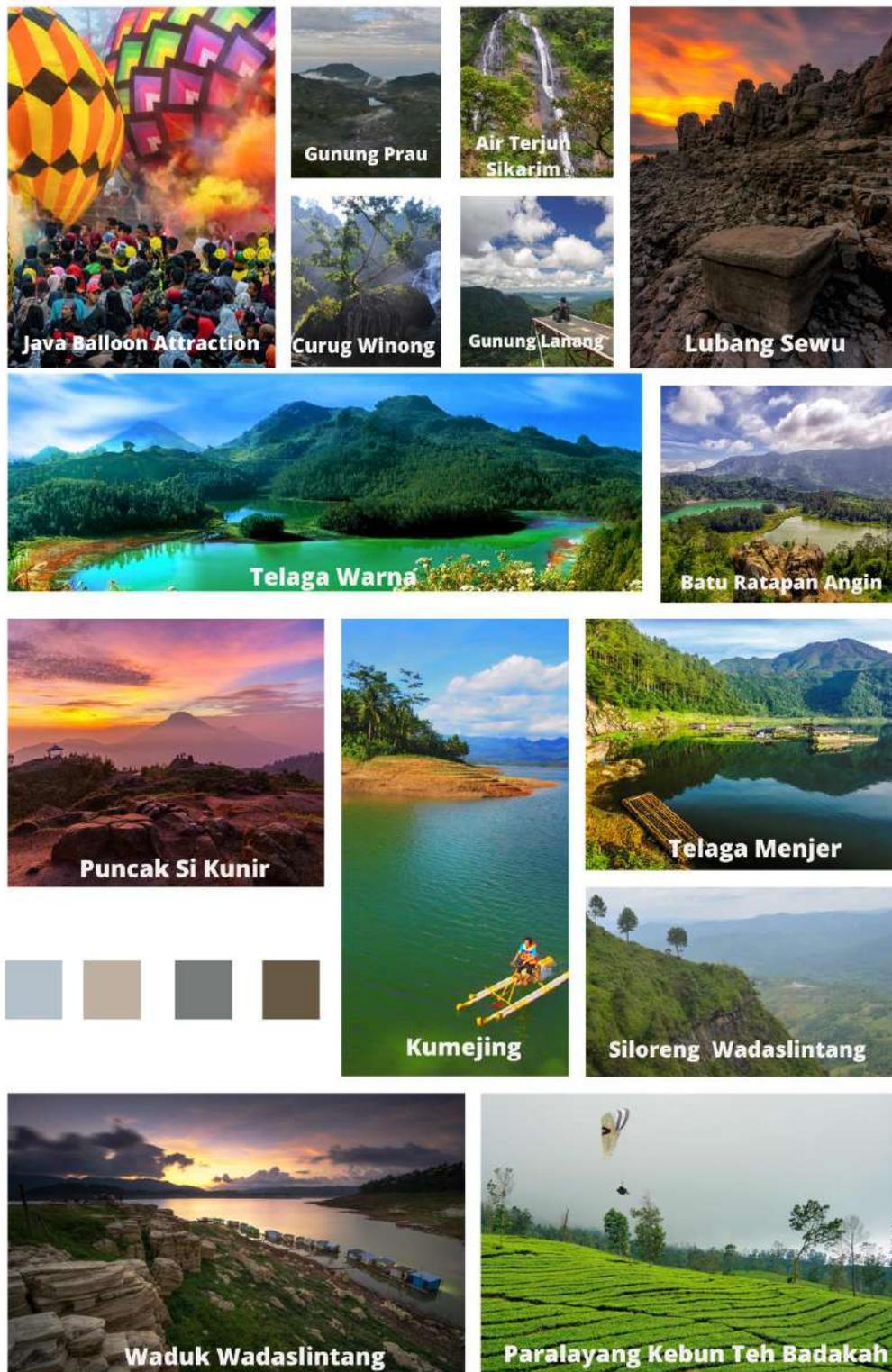
Sumber: Disparbud Kabupaten Wonosobo, 2024

Pemulihan sektor pariwisata semakin menguat pasca pandemi. Perputaran uang dari wisatawan berpotensi meningkatkan pendapatan daerah, apalagi jika mereka menetap dalam waktu yang lama. Menarik minat wisatawan untuk tinggal dan menetap dengan waktu yang lama merupakan tantangan. Rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Wonosobo mencapai 1,86 hari pada tahun 2023, angka rata-rata lama tinggal tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir. Ada 6 (enam) aspek yang harus diperhatikan



agar wisatawan tinggal dan menetap lebih lama di Wonosobo yaitu atraksi, aksesibilitas, akomodasi, aktivitas, *ancillary* dan amenities.

Kabupaten Wonosobo memiliki potensi keindahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai destinasi wisata. Destinasi wisata ini meliputi tujuan pariwisata yang dikelola secara *privat*, komunitas, maupun oleh pemerintah. Beberapa destinasi wisata di Kabupaten Wonosobo yang terkenal seperti Bukit Sikunir, Gunung Prau Wonosobo, Air Terjun Sikarim, Kebun Teh Tambi, Telaga Menjer, Telaga Warna, Telaga Pengilon, Telaga Cebong Dieng, Waduk Wadaslintang, Arum Jeram Serayu, Curug Winong, Pemandian Air Panas Kalianget, Goa Jaran, Lobang Sewu, Batu Ratapan Angin, Gunung Lanang Mergolangu dan Bukit Siloreng Indah. Selain keindahan alam yang dapat dieksplorasi sebagai destinasi wisata, berbagai *event* juga dapat mendorong pariwisata kreatif seperti yang telah diadakan sebelumnya di Kabupaten Wonosobo, seperti *Java Ballon Attraction*, *Wonosobo Night Fashion Carnival*, *Festival Dieng Detrac Train Run*, *Festival Air Wadaslintang*, *Wonosobo Costume Carnival*, *Rakanan Giyanti*, *Festival Tari Topeng Lengger*, *Ruwat Cukur Rambut Gembel*, *Paralayang Festival* dan *Festival Desa Wadaslintang*. Kabupaten Wonosobo perlu mengoptimalkan potensi keindahan alam serta mengeksplorasi *event* kesenian dan kebudayaan dengan lebih kreatif agar dapat mendukung sektor pariwisata dengan tetap menjaga kelestarian alam.



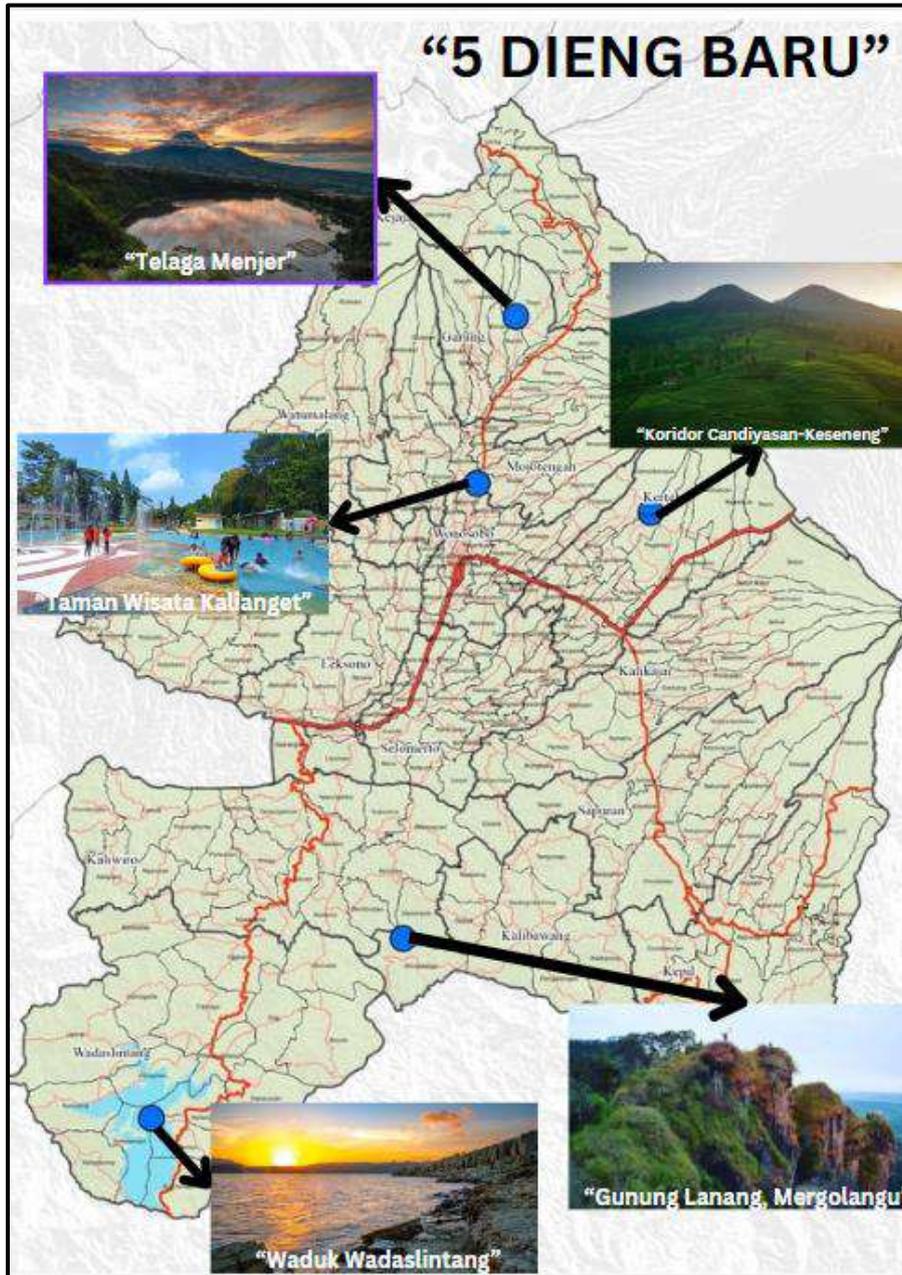
Gambar II. 20 Destinasi Wisata Kabupaten Wonosobo

Sumber: Disparbud Kabupaten Wonosobo, 2023

Pariwisata Kabupaten Wonosobo terkenal dengan Dieng sebagai destinasi utama yang terkenal. Perkembangan pariwisata ke depan tidak hanya Dieng yang akan dikembangkan, namun terdapat wilayah-wilayah lain yang akan dikembangkan untuk memunculkan Dieng-Dieng baru. 5 (lima)

Dieng baru menjadikan prioritas pengembangan pariwisata ke depan di Kabupaten Wonosobo. 5 (lima) Dieng baru terdiri dari:

1. Kawasan Telaga Menjer;
2. Kawasan Kalianget;
3. Koridor Candiyanan Keseneng;
4. Waduk Wadaslintang;
5. Gunung Lanang, Mergolangu Kalibawang.



Gambar II. 21 Letak “5 Dieng Baru”

Pembangunan 5 (lima) Dieng baru baik dari segi amenities, aksesibilitas, atraksi dan kelembagaan perlu untuk ditata dan dimantapkan dalam pembangunan jangka panjang ke depan di Kabupaten Wonosobo. Keberadaan 5 (lima) objek wisata Dieng Baru akan meningkatkan sektor

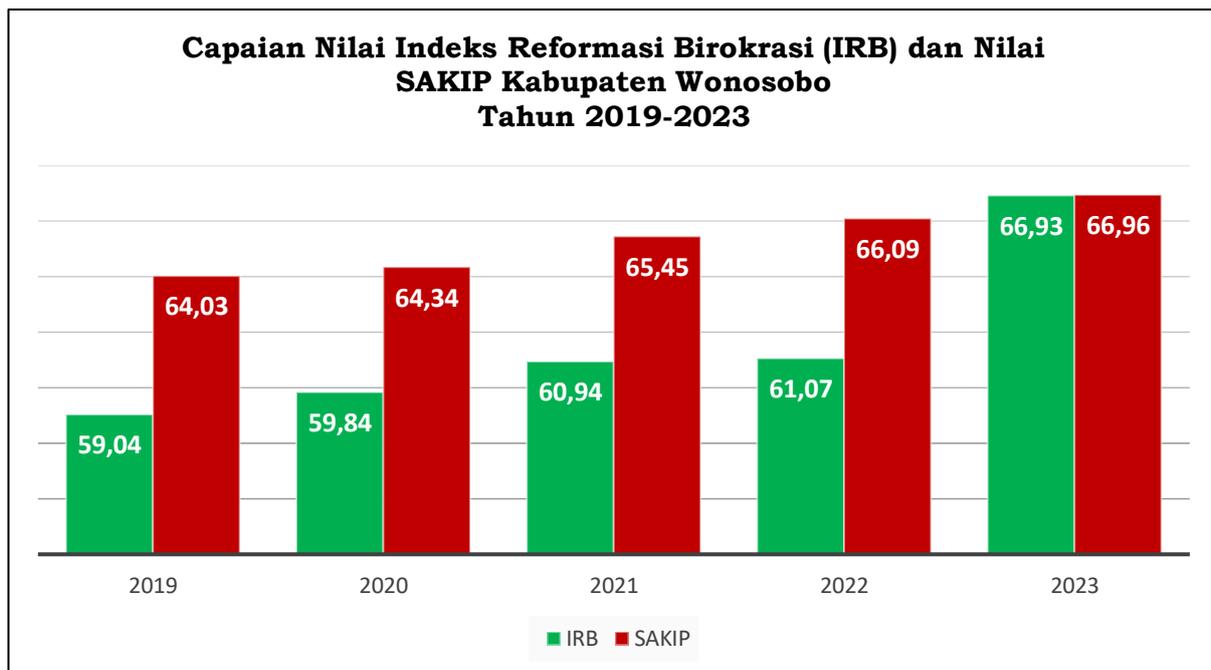


pariwisata di Kabupaten Wonosobo, selain itu juga pemerataan sektor pariwisata di kawasan potensial yang terdapat di Kabupaten Wonosobo.

2.3.2. Bidang Tata Kelola

Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk mewujudkan tata kelola pemerintah pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi merupakan upaya untuk membangun pemerintahan yang lebih berdaya guna dalam melakukan pembangunan daerah. Sasaran dari reformasi birokrasi yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.

Penilaian terhadap implementasi reformasi birokrasi dapat dilihat dari capaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2023, Kabupaten Wonosobo memperoleh nilai 66,93. Nilai ini meningkat dibandingkan dengan pencapaian 4 tahun sebelumnya. Pencapaian nilai IRB pada tahun 2023 ini merupakan modal untuk meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat yang semakin efektif dan efisien.



Grafik II. 38 Nilai IRB & SAKIP Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023

Sumber: Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2024

Indikator keberhasilan atas pelaksanaan reformasi birokrasi yang akuntabel dapat dilihat dari capaian nilai SAKIP yang ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB. Kabupaten Wonosobo secara konsisten telah memperbaiki akuntabilitas kinerjanya. Sejak 2019, nilai skornya naik sebesar 2,93 menjadi 66,96 pada 2023. Nilai SAKIP Kabupaten Wonosobo pada 2019-2023 berada pada kategori predikat B. Predikat ini menunjukkan sistem dan tatanan tata kelola pemerintahan yang baik. Semakin tinggi nilai



SAKIP maka semakin tercapai juga tahap *good governance* dalam suatu daerah. Terdapat indikasi bahwa sekitar satu per tiga dari unit kerja, terutama unit kerja utama, telah mencapai tingkat yang baik dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Namun, masih ada kebutuhan untuk peningkatan pada beberapa unit kerja, terutama dalam hal komitmen terkait manajemen kinerja. Pengukuran kinerja saat ini hanya dilakukan hingga tingkat eselon 2/unit kerja.

Indikator selanjutnya yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja di bidang tata kelola pemerintahan yang kapabel yaitu Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN). Indeks ini mengukur kualitas ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan. Capaian IP ASN selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II. 40 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)
Kabupaten Wonosobo 2019-2023**

	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai	NA	63	31,51	53,63	62,65
Keterangan	-	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah

Sumber: BKD Kabupaten Wonosobo, 2022-2023.

Kualitas profesionalitas ASN Kabupaten Wonosobo masih berada di level “sangat rendah” dengan nilai 31,51 pada 2021 dan naik menjadi “rendah” dengan nilai 62,65 pada tahun 2023. Masih rendahnya capaian nilai IP ASN disebabkan oleh masih rendahnya capaian pada komponen kompetensi sehingga ke depan perlu adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pelatihan bagi ASN terutama yang mendukung prioritas daerah.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam penyelenggaraan pemerintah daerah telah mendorong kebijakan pengembangan dan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan pelayanan publik di era digital. Capaian indeks SPBE di Kabupaten Wonosobo pada 2023 ini mengalami peningkatan menjadi 3,54.

**Tabel II. 41 Capaian Nilai Indeks SPBE
Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023**

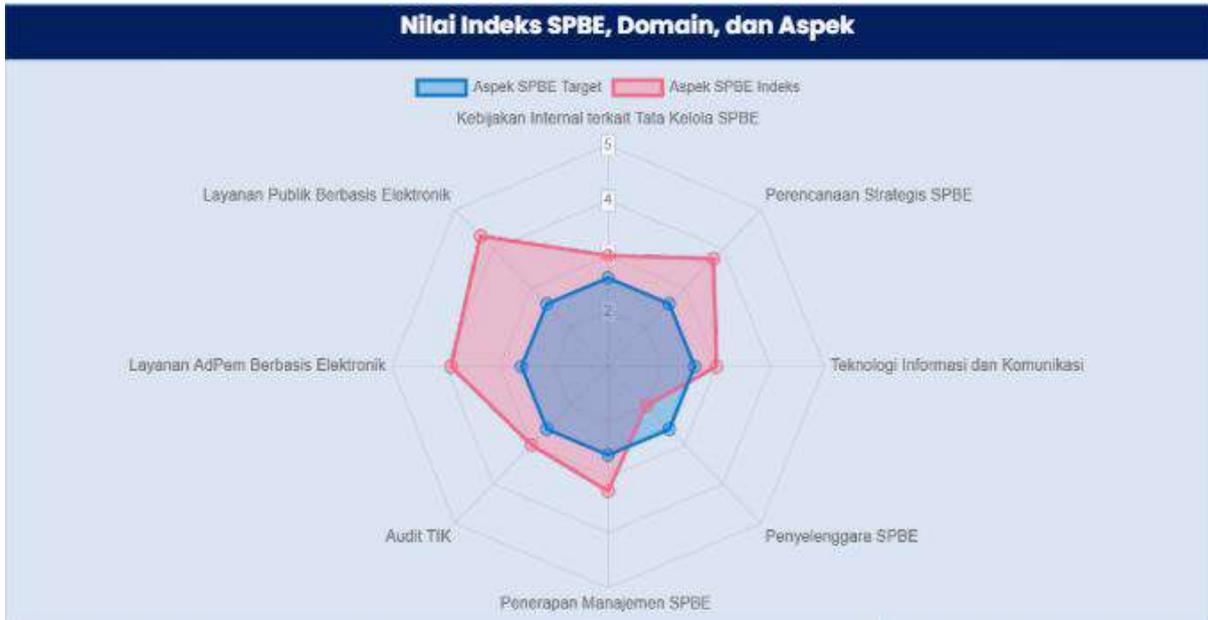
Nama Indeks	2019	2020*	2021	2022	2023
Indeks SPBE	2,94	NA	2,32	2,90	3,54
a. Domain Kebijakan SPBE	3,06	NA	1,90	2,09	3,00
b. Domain Tata Kelola SPBE	2,57	NA	1,90	2,20	3,10
c. Domain Manajemen SPBE	-	NA	1,90	1,45	3,18
d. Domain Layanan SPBE	3,09	NA	3,12	3,81	4,07

Sumber: Kementerian PANRB, 2020-2024

*Keterangan: 2020 tidak dilakukan penilaian.



Meskipun mengalami peningkatan, namun penerapan SPBE di Kabupaten Wonosobo masih memerlukan perbaikan terutama pada Domain Kebijakan, Tata Kelola dan Manajemen SPBE. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan efektif efisien melalui implementasi sistem penganggaran berbasis kinerja, administrasi pemerintahan dan pelayanan publik melalui implementasi Sistem Pemerintahan Elektronik dapat mendorong terbangunnya *smart government*.



Grafik II. 39 Nilai Indeks SPBE Domain dan Aspek

Sumber: Diskominfo Kabupaten Wonosobo, 2024

Kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang didasarkan pada kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), konsultasi dan pengaduan serta inovasi pelayanan selama kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 34 Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023

Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Wonosobo	NA	NA	3,60	3,68	4,05
Keterangan	-	-	Baik	Baik	Sangat Baik

Sumber: Kementerian PANRB, 2022-2024

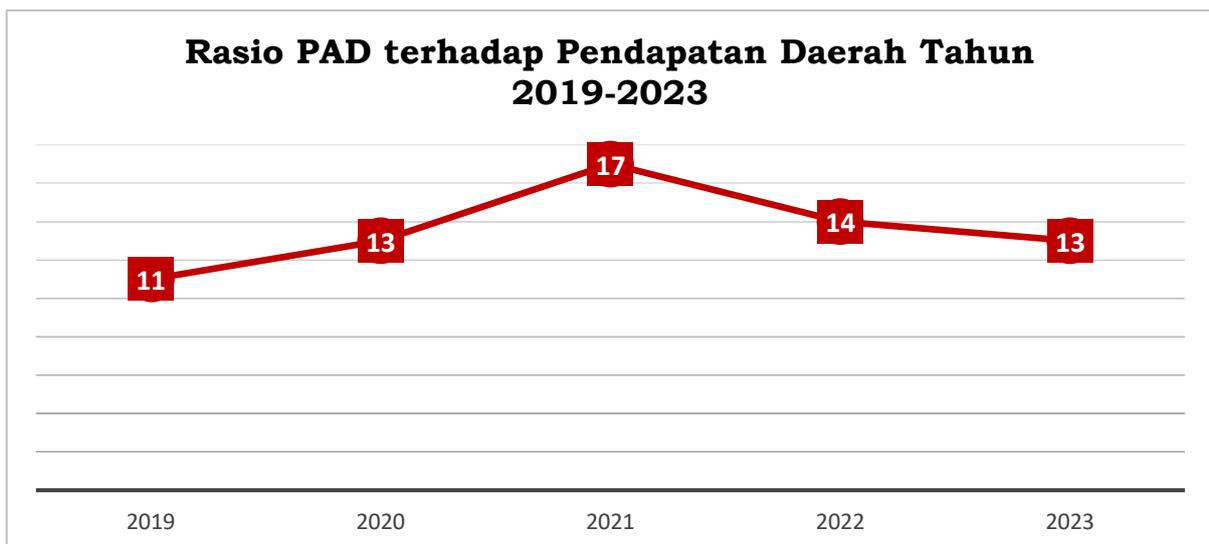
Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Wonosobo sudah mencapai 4,05 dengan status sangat baik. Meskipun capaiannya sudah Sangat Baik, namun masih perlu beberapa perbaikan pada aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi.



Indikator keberhasilan atas pelaksanaan reformasi birokrasi yang bersih dan akuntabel dapat dilihat dari capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH). Capaian IRH Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023 masih berada pada nilai 32,2 dengan kriteria C (Buruk) sehingga diperlukan perbaikan dalam hal penyederhanaan regulasi, peningkatan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan serta pemenuhan regulasi/deregulasi perundang-undangan hasil review sebagai komponen pengukuran IRH.

Implementasi Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel juga dapat dilihat hasil capaian Survei Penilaian Integritas (SPI). Survei ini dilakukan untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi serta mendorong upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan pemerintah daerah. Capaian nilai SPI Kabupaten Wonosobo dalam kurun waktu tahun 2022-2023 mengalami penurunan dari 74,79 (Waspada) menjadi 73,65 (Waspada). Masih terdapat beberapa perbaikan yang perlu dilakukan dalam hal 1) Intensifikasi, sosialisasi dan kampanye mengenai upaya pencegahan yang telah dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan, 2) Perbaikan mendasar dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan internalisasi aturan pengelolaan benturan kepentingan dan hukuman/sanksi.

Pengelolaan keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu komponen penting dalam upaya menuju kemandirian daerah untuk mengurangi ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat. Dalam kurun lima tahun terakhir rata-rata PAD Kabupaten Wonosobo mencapai 13,6% dari total pendapatan daerah. PAD Kabupaten Wonosobo mengalami kenaikan signifikan pada 2021 namun kembali turun pada dua tahun berikutnya sebagaimana ditunjukkan grafik di bawah ini:



Grafik II. 40 Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023

Sumber: BPPKAD Kabupaten Wonosobo, 2024



Selain pendapatan asli daerah, Pendapatan daerah juga diperoleh dari laba BUMD. Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah mendorong BUMD untuk berkinerja baik, salah satunya melalui peningkatan *Return On Assets* (RoA). RoA BUMD merupakan indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Secara umum *Return On Assets* (RoA) dapat didefinisikan sebagai perbandingan total laba bersih dengan total aset perusahaan. Semakin besar nilai perbandingan tersebut menunjukkan jika suatu perusahaan efektif dan efisien dalam menggunakan aset-aset yang dimiliki sehingga dapat menghasilkan keuntungan secara optimal. Sebaliknya rendahnya nilai RoA menunjukkan adanya *inefisiensi* dalam pengelolaan aset-aset perusahaan.

Tahun 2023 terdapat 10 (sepuluh) Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Wonosobo dimana 5 (lima) di antaranya (PD. Bhakti Husada, PT. Bimo Lukar, PT. Global Dharma, Perumda Air Minum Tirta Aji dan PT. BPR Bank Wonosobo) dimiliki secara penuh oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo sementara 5 (lima) (PT. PRPP Jateng, PT. BPR BKK Wonosobo, PT. BPR BKK Jateng Cabang Wonosobo, PT. BPD Jateng Cabang Wonosobo dan PT. Perkebunan Tambi) dimiliki bersama dengan Pemerintah Provinsi dan swasta dengan rata-rata nilai RoA sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 42 Nilai RoA BUMD

<i>Return On Assets (RoA) BUMD</i>	2019	2020	2021	2022	2023
	3,47	3,43	3,25	3,65	3,18

Sumber : *Bagian Perekonomian Setda.*

Dari tabel di atas dapat diketahui jika nilai RoA BUMD di Kabupaten Wonosobo masih berkisar pada angka 3–3,65%. Meskipun bernilai positif atau masih bisa menghasilkan laba hal tersebut menunjukkan jika sebenarnya masih ada ruang untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan aset-aset milik Badan Usaha. Nilai RoA dapat dipergunakan untuk mengukur efisiensi, membandingkan kinerja perusahaan dan sebagai alat analisis untuk mengetahui tren kinerja perusahaan sehingga dari data tersebut dapat diketahui jika terdapat BUMD yang masih harus meningkatkan kinerja dan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan laba bersih perusahaan.



2.4. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Dokumen RPJPD Kabupaten Wonosobo telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2005—2025. Dokumen RPJPD Kabupaten Wonosobo yang berakhir di tahun 2025 nanti, telah dilakukan evaluasi perencanaan pada tahapan pelaksanaan, yaitu Tahap I (Tahun 2006-2010), Tahap II (Tahun 2010-2015), Tahap III (Tahun 2016-2021) hingga Tahap IV (Tahun 2021-2026). Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 dilakukan dengan menginterpretasikan sasaran pokok dalam arah pembangunan di setiap misi dengan indikator kinerja sesuai hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD pada Tahap 1 hingga IV. Evaluasi RPJPD tersebut menjadi salah satu acuan dalam merumuskan isu dan permasalahan dalam merancang dokumen RPJPD Kabupaten Wonosobo periode selanjutnya. Selain itu, penelaahan dan evaluasi RPJPD Kabupaten Wonosobo 2005-2025 diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang periode berikutnya, yaitu RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045.

2.4.1. Kesimpulan

Pencapaian indikator makro pembangunan yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Indeks Gini digunakan untuk melihat kemajuan pembangunan daerah dalam jangka panjang di Kabupaten Wonosobo. Pencapaian indikator makro pembangunan di Kabupaten Wonosobo memiliki progres positif. Meskipun demikian, pertumbuhan realisasi di beberapa indikator makro pembangunan menunjukkan pola fluktuatif.

Tabel II. 43 Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Makro

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode (2005)	Capaian Tahun Berjalan (2022/2023)	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Manusia	67,60	68,89	Positif
2	Angka Kemiskinan	31,68	16,17	Positif
3	Angka Pengangguran	N/A (5,5 pada 2008)	5,01	Positif
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,19	5,02	Positif
5	Pendapatan Per Kapita	2.037.774	14.064.760 (2021)	Positif
6	Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)	0,27	0,36	Negatif

Sumber: Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2023



Pada indikator IPM, secara garis besar pertumbuhannya positif namun ada gap capaian indikator komposit IPM yang menyebabkan kenaikan IPM tidak begitu signifikan. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) hanya naik 1 poin per tahun. Rendahnya pendidikan menjadi salah satu penyebab kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Dengan rata-rata tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan terbatasnya lapangan kerja dan tingkat penghasilan yang diterima karena lapangan kerja yang bisa diakses pada sektor informal.

Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo meskipun mengalami penurunan pada 2005-2023, namun tingkat kemiskinan Kabupaten Wonosobo masih lebih tinggi dibanding Jawa Tengah dan Nasional. Sementara tingkat pengangguran di Kabupaten Wonosobo pada 2005-2023 mengalami fluktuasi. Pada 2009, tingkat pengangguran di Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan secara signifikan, namun pada tahun-tahun berikutnya kembali mengalami peningkatan. Meningkatnya pengangguran terbuka disebabkan melambatnya ekonomi dan beberapa sektor yang mengalami penurunan jumlah pekerja.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo pada 2005-2022 mengalami tren peningkatan. Pertumbuhan ekonominya bahkan sempat melebihi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini disebabkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di berbagai sektor dalam performa yang baik. Pendapatan per kapita Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 2006-2020 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan kenaikan daya beli masyarakat Kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang merefleksikan peningkatan kesejahteraan juga. Meskipun demikian, jumlah pendapatan per kapita Kabupaten Wonosobo masih jauh dari angka Provinsi Jawa Tengah.

Kondisi ketimpangan pendapatan di Kabupaten Wonosobo cenderung berada dalam kategori rendah dan moderat. Faktor yang mendukung rendahnya tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Wonosobo adalah pelaksanaan otonomi daerah yang dapat menentukan arah dan tujuan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Terkait pencapaian pembangunan dalam indikator makro secara singkat, menunjukkan bahwa beberapa indikator komposit penyusun IPM pertumbuhannya rendah. Kendati demikian indikator seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan menunjukkan progres positif. Bahkan jika ketimpangan pendapatan dibandingkan dengan nasional dan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo paling rendah ketimpangannya.



Tabel II. 44 Rekapitulasi Capaian Kinerja dan Predikat Kinerja RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005–2025

Periode	Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
Periode I Tahun 2005–2010	NA	NA
Periode II Tahun 2010-2015	NA	NA
Periode III Tahun 2015-2020	99,26	Sangat tinggi
Periode IV Tahun 2020-2022	67,90	Sedang
Kinerja RPJPD	83,58	Tinggi

Sumber: Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2023

Berdasarkan hasil akumulasi capaian akhir kinerja RPJPD dan predikat kinerja, Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025 meraih capaian 83,58%. Dengan demikian, evaluasi RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025 mendapatkan predikat kinerja tinggi (T). Akan tetapi, capaian akhir kinerja yang dituangkan dalam kuantitatif tersebut hanya terhitung dari periode tiga dan periode empat. Hal ini disebabkan tidak adanya indikator yang jelas pada dokumen RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025. Meskipun demikian, secara umum, deskripsi visi dan arah kebijakan umum pembangunan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Wonosobo sudah konsisten dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPN.

2.4.2. Rekomendasi dari Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025

Hasil rekomendasi evaluasi RPJPD bagi pemangku kebijakan dalam penyusunan perencanaan jangka panjang di Kabupaten Wonosobo diarahkan pada perbaikan dokumen dan sinkronisasi RPJPD serta peningkatan pencapaiannya, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Dalam rangka keterpaduan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, maka evaluasi terhadap hasil RPJPD ini supaya ditindaklanjuti dengan evaluasi terhadap hasil RPJMD Periode IV dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing perangkat daerah.
2. Memperbaiki arsitektur untuk RPJPD periode berikutnya terutama dalam perumusan dan pernyataan misi, sasaran pokok dan arah kebijakan. Selain itu, penting juga agar mencantumkan indikator kinerja pada level sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD.
3. Meningkatkan konsistensi RPJMD terhadap RPJPD terutama terkait misi dan arah kebijakan dengan melakukan penahapan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Wonosobo secara serial.



4. Merumuskan strategi yang lebih jitu untuk peningkatan indikator kinerja makro, khususnya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, menurunkan Angka Kemiskinan, menurunkan Angka Pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat.
5. Memformulasikan dan menetapkan target indikator kinerja pada level tujuan dan sasaran pada setiap tahapan RPJMD untuk RPJPD periode berikutnya.
6. Meningkatkan capaian indikator kinerja pembangunan RPJPD pada setiap penahapan RPJMD pada periode berikutnya sehingga dapat mengangkat predikat akhir kinerja RPJPD dari tinggi (T) menjadi sangat tinggi (ST).

Rekomendasi dari hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025 di atas perlu menjadi perhatian khusus dalam merumuskan RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045. Dengan memperhatikan catatan evaluasi dan rekomendasi tersebut diharapkan RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 terancang dengan lebih baik dan sistematis yang pada akhirnya memberikan dampak positif pada kinerja pemerintah dan pembangunan Kabupaten Wonosobo.

2.5. Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Proyeksi demografi dibutuhkan dalam membantu pemerintah daerah merencanakan kebutuhan dasar seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya (sampah, air dan listrik). Pengelolaan sumber daya manusia juga dapat dilakukan dengan melihat proyeksi demografi untuk merencanakan kebijakan ketenagakerjaan dan pelatihan keterampilan. Proyeksi demografi untuk perencanaan kebutuhan sarana prasarana adalah elemen penting dalam memandu pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat bagi Kabupaten Wonosobo.

2.5.1. Analisis Proyeksi Kependudukan Per Lima Tahun

a. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Wonosobo

Proyeksi penduduk digunakan untuk memprediksi pertumbuhan atau penurunan populasi guna membantu perencanaan pembangunan. Berikut adalah tabel proyeksi penduduk Kabupaten Wonosobo dari 2025-2045.



**Tabel II. 45 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Wonosobo
Tahun 2025-2045**

No	Kecamatan	Tahun 2023 (Ribu jiwa)	Proyeksi Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Wadaslintang	62,79	61,66	66,03	69,91	73,17	75,89
2	Kepil	66,42	67,24	70,12	72,51	74,13	75,26
3	Sapuran	62,88	65,72	68,63	71,01	72,69	73,86
4	Kalibawang	28,4	28	29,72	31,22	32,41	33,36
5	Kaliwiro	53,8	53,73	56,52	58,94	60,7	62,08
6	Leksono	47,96	49,16	51,96	54,35	56,31	57,86
7	Sukoharjo	36,42	37,66	38,84	39,75	40,3	40,59
8	Selomerto	55,76	56,91	60,33	63,25	65,7	67,66
9	Kalikajar	73,78	74,03	79,75	84,81	89,26	93,01
10	Kertek	93,71	95,77	101,16	105,77	109,72	112,9
11	Wonosobo	93,88	101,28	105,49	108,85	111,48	113,34
12	Watumalang	57,46	58,11	60,65	62,7	64,29	65,41
13	Mojotengah	69,74	72,29	75,94	78,95	81,49	83,43
14	Garung	59,31	59,85	63,27	66,17	68,69	70,7
15	Kejajar	47,36	49,73	51,88	53,65	55,17	56,34
Kab. Wonosobo		909,66	931,14	980,26	1.021,85	1.055,51	1.081,69

Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2024 dan Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan data proyeksi pertumbuhan penduduk di atas, dapat dilihat bahwa secara umum terdapat tren pertumbuhan penduduk di berbagai kecamatan dari 2023 hingga 2045. Kenaikan jumlah penduduk ini diproyeksikan mempengaruhi total populasi Kabupaten Wonosobo yang akan meningkat dari tahun ke tahun di mana populasinya diperkirakan mengalami peningkatan sekitar 18,91% dari 2023 hingga 2045. Beberapa kecamatan diproyeksikan mengalami pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan yang lain. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti migrasi, kebijakan pembangunan, atau faktor-faktor lokal lainnya. Kecamatan dengan pertumbuhan penduduk tinggi terlihat terjadi di Kecamatan Kertek, di mana pertumbuhan penduduk terlihat signifikan dari 2023 hingga 2045. Kenaikan ini dapat terjadi karena adanya faktor-faktor seperti pembangunan ekonomi, infrastruktur, atau daya tarik wilayah tersebut. Dengan adanya Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Wonosobo yang dilegalisasi melalui Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2022, wilayah Kertek dimungkinkan menarik penduduk dari wilayah lain karena membuka kesempatan ekonomi yang lebih besar di wilayah tersebut. Meskipun demikian, total populasi di beberapa wilayah di Kabupaten Wonosobo yang terus meningkat akan memiliki tantangan apalagi jika tidak diimbangi oleh kebijakan pembangunan, kesejahteraan sosial dan infrastruktur yang signifikan. Pertumbuhan penduduk yang cepat juga memberi tantangan ekonomi dan sosial, termasuk pengelolaan lapangan pekerjaan,



infrastruktur dan layanan dasar. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus terhadap keseimbangan perkembangan di seluruh wilayah.

b. Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Wonosobo (Jiwa/km²)

Proyeksi kepadatan penduduk bergantung pada proyeksi jumlah penduduk dan perkiraan perubahan luas wilayah. Berikut adalah tabel proyeksi kepadatan penduduk Kabupaten Wonosobo dari 2025-2045:

Tabel II. 46 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Tahun 2023 (jiwa/km ²)	Proyeksi Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)				
				2025	2030	2035	2040	2045
1	Wadaslintang	133,01	472,06	463,57	496,42	525,59	550,10	570,55
2	Kepil	99,59	666,91	675,14	704,06	728,06	744,32	755,67
3	Sapuran	74,73	841,43	879,43	918,37	950,22	972,70	988,36
4	Kalibawang	54,67	519,47	512,15	543,61	571,05	592,82	610,19
5	Kaliwiro	100,06	537,67	536,97	564,85	589,04	606,63	620,42
6	Leksono	45,86	1.045,74	1.071,91	1.132,96	1.185,07	1.227,81	1.261,61
7	Sukoharjo	55,64	654,60	676,89	698,10	714,45	724,34	729,55
8	Selomerto	41,90	1.330,78	1.358,23	1.439,85	1.509,54	1.568,01	1.614,79
9	Kalikajar	81,46	905,70	908,77	978,99	1.041,11	1.095,73	1.141,77
10	Kertek	61,45	1.524,90	1.558,42	1.646,13	1.721,15	1.785,42	1.837,17
11	Wonosobo	30,39	3.089,38	3.332,90	3.471,44	3.582,01	3.668,56	3.729,77
12	Watumalang	62,73	916,03	926,40	966,89	999,57	1.024,92	1.042,77
13	Mojotengah	49,75	1.401,87	1.453,13	1.526,49	1.587,00	1.638,06	1.677,05
14	Garung	46,54	1.274,34	1.285,94	1.359,43	1.421,74	1.475,88	1.519,07
15	Kejajar	73,84	641,41	673,51	702,63	726,60	747,19	763,03
Kab. Wonosobo		1.011,62	899,21	920,44	969,00	1.010,11	1.043,38	1.069,26

Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2024 dan Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Wonosobo

Data proyeksi kepadatan penduduk di atas menunjukkan variasi signifikan dalam kepadatan penduduk antarkecamatan di Kabupaten Wonosobo. Secara umum, terlihat tren peningkatan kepadatan penduduk di sebagian besar kecamatan selama periode proyeksi, di mana kepadatan penduduk di wilayah urban seperti Wonosobo, cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain. Kepadatan penduduk di berbagai kecamatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti luas wilayah, tingkat penduduk dan urbanisasi. Di Kecamatan Wonosobo, peningkatan kepadatan penduduk dipengaruhi beberapa faktor seperti fungsinya sebagai wilayah pusat administrasi, pendidikan dan ekonomi sehingga memiliki fasilitas, infrastruktur dan layanan publik yang baik. Hal ini menarik penduduk untuk tinggal. Wilayah-wilayah dengan proyeksi kepadatan penduduk yang tinggi, seperti Kecamatan Wonosobo atau kecamatan lainnya, memerlukan investasi



tambahan dalam infrastruktur perkotaan, seperti jaringan transportasi yang lebih efisien, fasilitas kesehatan dan pendidikan. Selain itu, untuk mendorong pengembangan ekonomi serta mengurangi angka pengangguran di wilayah penduduk yang semakin padat, maka perlu dukungan untuk industri lokal, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sektor usaha mikro dan kecil yang dapat menjadi strategi untuk meningkatkan kesejahteraan. Di sisi lain, untuk mengendalikan dan mengantisipasi pertumbuhan dan kepadatan penduduk terutama di wilayah-wilayah yang dengan kepadatan yang tinggi, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan atau program yang menggalakkan edukasi keluarga berencana serta peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi.

c. Proyeksi Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Wonosobo

Proyeksi Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Wonosobo merujuk pada estimasi atau perkiraan rasio antara jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di wilayah tersebut di masa depan. Rasio jenis kelamin dapat dikatakan meningkat jika jumlah laki-laki per seribu perempuan meningkat dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya. Proyeksi rasio jenis kelamin dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat memengaruhi distribusi proporsi pria dan wanita, seperti perbedaan dalam tingkat kelahiran atau migrasi di antara kelompok gender. Pemantauan dan analisis proyeksi rasio jenis kelamin sangat penting dalam memberikan informasi yang relevan untuk perencanaan pembangunan, kebijakan sosial dan manajemen sumber daya manusia di suatu wilayah, dalam hal ini adalah Kabupaten Wonosobo. Berikut adalah proyeksi rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Wonosobo dari 2025-2045:

Tabel II. 47 Proyeksi Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Tahun 2023	Proyeksi Rasio Jenis Kelamin Penduduk/ <i>Sex ratio</i>				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Wadaslintang	103.08	98.28	102.71	106.79	110.44	113.82
2	Kepil	105.52	104.39	105.10	105.85	106.03	106.20
3	Sapuran	104.79	104.64	104.58	104.51	104.05	103.57
4	Kalibawang	106.93	105.94	106.59	107.27	107.49	107.70
5	Kaliwiro	101.84	101.81	101.75	101.87	101.40	101.05
6	Leksono	100.01	101.96	100.87	99.87	99.00	98.19
7	Sukoharjo	103.86	101.73	97.89	94.52	91.20	88.15
8	Selomerto	100.22	102.19	101.02	99.86	98.96	98.08
9	Kalikajar	105.12	100.82	98.40	96.19	94.57	93.09
10	Kertek	103.50	104.71	104.19	103.67	103.60	103.53



No	Kecamatan	Tahun 2023	Proyeksi Rasio Jenis Kelamin Penduduk/ <i>Sex ratio</i>				
			2025	2030	2035	2040	2045
11	Wonosobo	101.99	102.77	102.08	101.36	100.92	100.47
12	Watumalang	103.57	104.56	103.90	103.21	102.65	102.05
13	Mojotengah	104.09	106.24	104.77	103.28	102.35	101.39
14	Garung	106.48	107.20	107.06	106.79	107.02	107.17
15	Kejajar	107.23	107.58	107.68	107.86	108.68	109.52
Kab. Wonosobo		103.74	103.58	103.16	102.74	102.44	102.14

Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2024 dan Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan data Proyeksi Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Wonosobo di atas, terlihat beberapa kecamatan memiliki rasio lebih tinggi dari 100, yang artinya lebih banyak laki-laki, sementara yang lain memiliki rasio di sekitar 100 atau bahkan di bawah 100, yang artinya lebih banyak perempuan. Dengan kata lain, beberapa kecamatan mengalami peningkatan rasio seperti di Kecamatan Kepil seperti di Kecamatan Sukoharjo yang memiliki proyeksi rasio jenis kelamin cenderung menurun dari tahun ke tahun. Di sisi lain, proyeksi rasio jenis kelamin di Kecamatan Kaliwiro cenderung relatif stabil selama periode proyeksi, yaitu berkisar di angka 101 hingga 2045. Ini mencerminkan tidak adanya perubahan distribusi jenis kelamin dalam populasi di kecamatan tersebut.

Sex ratio berdampak pada isu-isu sosial, ekonomi dan kesejahteraan seperti munculnya masalah pekerjaan dan pasar tenaga kerja, potensi konflik dan sosial budaya, isu ketidaksetaraan gender, serta penurunan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan populasi.

d. Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Wonosobo

Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk merupakan estimasi yang mengukur hubungan antara jumlah penduduk usia produktif dengan jumlah penduduk yang tergolong sebagai kelompok yang tergantung, atau kelompok yang dianggap bergantung pada penduduk usia produktif. Rasio ini memberikan gambaran tentang beban ketergantungan ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif dalam mendukung kelompok yang bergantung, yang terdiri dari anak-anak (usia 0-14 tahun) dan lansia (usia 65 tahun ke atas).



**Tabel II. 48 Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk
Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045**

No	Kecamatan	Tahun 2023	Proyeksi Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Wadaslintang	45.94	46.64	49.90	53.55	56.10	58.90
2	Kepil	44.52	45.47	47.92	50.46	52.38	54.36
3	Sapuran	44.31	45.06	47.47	49.82	51.79	53.76
4	Kalibawang	43.18	44.71	47.08	49.52	51.46	53.47
5	Kaliwiro	45.74	46.23	49.20	52.47	54.79	57.31
6	Leksono	46.16	47.62	50.87	54.14	56.75	59.42
7	Sukoharjo	43.88	43.97	46.78	49.70	51.87	54.10
8	Selomerto	44.59	46.46	48.66	50.86	52.45	54.10
9	Kalikajar	44.76	45.90	48.89	51.84	54.40	57.00
10	Kertek	44.87	46.36	49.49	52.43	54.91	57.30
11	Wonosobo	43.14	43.89	46.59	49.20	51.26	53.29
12	Watumalang	45.00	46.51	49.06	51.48	53.15	54.76
13	Mojotengah	44.68	44.68	47.13	49.24	51.38	53.35
14	Garung	46.05	47.13	49.91	52.50	54.69	56.79
15	Kejajar	44.33	44.75	47.90	50.69	53.06	55.21
Kab. Wonosobo		44.74	45.67	48.45	51.19	51.53	51.94

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo, 2024 dan Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Wonosobo

Rasio ketergantungan di Kabupaten Wonosobo cenderung meningkat dari 2023 hingga 2045 karena hampir semua kecamatan mengalami peningkatan rasio ketergantungan pada setiap periode per 5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia non-produktif terhadap penduduk usia produktif diperkirakan akan bertambah. Peningkatan rasio ketergantungan memberikan sinyal bahwa beban ekonomi yang harus ditanggung oleh populasi usia produktif mungkin meningkat, di mana peningkatan rasio ketergantungan ini dapat menciptakan tekanan ekonomi pada usia produktif. Pada 2045, diproyeksikan rasio ketergantungan naik, dari satu orang usia produktif menanggung beban terhadap 44 orang di 2023, menjadi 51 orang di 2045. Hal ini dapat berdampak negatif apabila perencanaan dan kebijakan pembangunan ekonomi tidak mengantisipasi beban ini. Peningkatan rasio ketergantungan dapat terjadi karena berbagai faktor demografis, termasuk pertumbuhan populasi, harapan hidup yang meningkat, atau perubahan dalam struktur usia.

Berdasarkan data proyeksi rasio ketergantungan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo dapat mengambil sejumlah



langkah untuk mengurangi beban atau mengantisipasi dampak peningkatan rasio ketergantungan. Di sektor ekonomi, pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja, investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Penguatan kebijakan kesejahteraan sosial juga perlu dilakukan untuk mendukung kelompok rentan, seperti anak-anak dan lansia, seperti penyediaan akses yang lebih baik pada pelayanan kesehatan, pendidikan dan dukungan jaminan sosial.

e. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (dalam Ribuan Jiwa) Penduduk Kabupaten Wonosobo

Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah estimasi perkiraan jumlah penduduk suatu wilayah pada masa mendatang yang memperhitungkan perbedaan jumlah antara pria dan wanita. Proyeksi ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana distribusi jenis kelamin diharapkan akan berkembang seiring waktu. Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan dalam tingkat kelahiran, tingkat kematian dan migrasi untuk masing-masing jenis kelamin. Berikut adalah data proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Kabupaten Wonosobo dari 2025-2045.



Tabel II. 49 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Tahun 2023			Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (dalam Ribuan)														
					2025			2030			2035			2040			2045		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	Wadaslintang	31,87	30,92	62,79	30,56	31,10	61,66	33,46	32,57	66,03	36,10	33,81	69,91	38,40	34,77	73,17	40,40	35,49	75,89
2	Kepil	34,11	32,32	66,43	34,34	32,90	67,24	35,93	34,19	70,12	37,29	35,22	72,51	38,15	35,98	74,13	38,76	36,50	75,26
3	Sapuran	32,18	30,71	62,88	33,61	32,12	65,72	35,08	33,55	68,63	36,29	34,72	71,02	37,07	35,62	72,69	37,58	36,28	73,86
4	Kalibawang	14,68	13,72	28,40	14,41	13,60	28,00	15,33	14,38	29,72	16,16	15,06	31,22	16,79	15,62	32,41	17,30	16,06	33,36
5	Kaliwiro	27,15	26,66	53,80	27,11	26,62	53,73	28,50	28,01	56,52	29,74	29,20	58,94	30,56	30,14	60,70	31,20	30,88	62,08
6	Leksono	23,98	23,98	47,96	24,82	24,34	49,16	26,09	25,87	51,96	27,16	27,19	54,35	28,01	28,30	56,31	28,67	29,19	57,86
7	Sukoharjo	18,55	17,86	36,42	18,99	18,67	37,66	19,21	19,63	38,84	19,32	20,43	39,75	19,22	21,08	40,30	19,02	21,57	40,59
8	Selomerto	27,91	27,85	55,76	28,76	28,15	56,91	30,32	30,01	60,33	31,60	31,65	63,25	32,68	33,02	65,70	33,50	34,16	67,66
9	Kalikajar	37,81	35,97	73,78	37,16	36,86	74,03	39,55	40,20	79,75	41,58	43,23	84,81	43,39	45,88	89,26	44,84	48,17	93,01
10	Kertek	47,66	46,05	93,71	48,99	46,78	95,77	51,62	49,54	101,16	53,84	51,93	105,77	55,83	53,89	109,72	57,43	55,47	112,90
11	Wonosobo	47,40	46,48	93,88	51,33	49,95	101,28	53,29	52,20	105,48	54,79	54,06	108,85	56,00	55,49	111,48	56,80	56,54	113,34
12	Watumalang	29,23	28,23	57,46	29,70	28,41	58,11	30,90	29,74	60,64	31,85	30,86	62,70	32,56	31,72	64,29	33,04	32,37	65,41
13	Mojotengah	35,57	34,17	69,74	37,24	35,05	72,29	38,85	37,08	75,94	40,11	38,84	78,95	41,22	40,27	81,49	42,00	41,42	83,42
14	Garung	30,58	28,72	59,31	30,96	28,88	59,85	32,72	30,56	63,27	34,17	32,00	66,18	35,51	33,18	68,69	36,57	34,13	70,70
15	Kejajar	24,51	22,86	47,36	25,78	23,96	49,73	26,90	24,98	51,88	27,84	25,81	53,65	28,73	26,44	55,17	29,45	26,89	56,34
Tahun		446,48	463,18	909,66	909,66	457,39	931,14	497,75	482,51	980,26	517,84	504,01	1,021,85	534,12	521,40	1.055,51	546,56	535,13	1.081,69

Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2024 dan Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Wonosobo



Pada 2045, proyeksi total penduduk mencapai 1.081,69 ribu jiwa dengan variasi dalam pertumbuhan masing-masing jenis kelamin di tiap kecamatan, namun secara keseluruhan, keduanya mengalami peningkatan. Kecamatan Kertek dan Wonosobo tetap menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, dengan proyeksi mencapai 112,90 ribu jiwa dan 113,34 ribu jiwa pada 2045. Kecamatan Kalibawang memiliki jumlah penduduk paling sedikit pada 2045, yaitu mencapai 33,36 ribu jiwa. Perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan di tiap kecamatan di tiap periode per lima tahun di Kabupaten Wonosobo relatif seimbang, artinya tidak ada perbedaan atau ketimpangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yang terlalu signifikan.

Meskipun demikian, peningkatan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin ini perlu diantisipasi di berbagai aspek, seperti perlunya keseimbangan pelayanan publik, seperti kesehatan yang mengakomodasi fasilitas kesehatan reproduksi dan pelayanan kesehatan spesifik gender. Di bidang pendidikan, perlu upaya untuk memberikan kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di sektor ekonomi, pemerintah perlu memperhatikan partisipasi ekonomi yang setara bagi pria dan wanita, serta mendorong kesetaraan gender di tempat kerja dan juga mendukung kewirausahaan perempuan. Pada infrastruktur publik, perlu mempertimbangkan kebutuhan yang dapat mendukung mobilitas dan partisipasi aktif pria dan wanita dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Di sektor politik, partisipasi politik pria dan wanita dalam struktur keputusan juga perlu menjadi perhatian. Langkah-langkah ini perlu dipertimbangkan dan direncanakan untuk mengantisipasi ketimpangan peran pada jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin ini karena pembangunan berkelanjutan melibatkan seluruh masyarakat dengan adil dan setara.

f. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur (dalam Ribuan) Penduduk

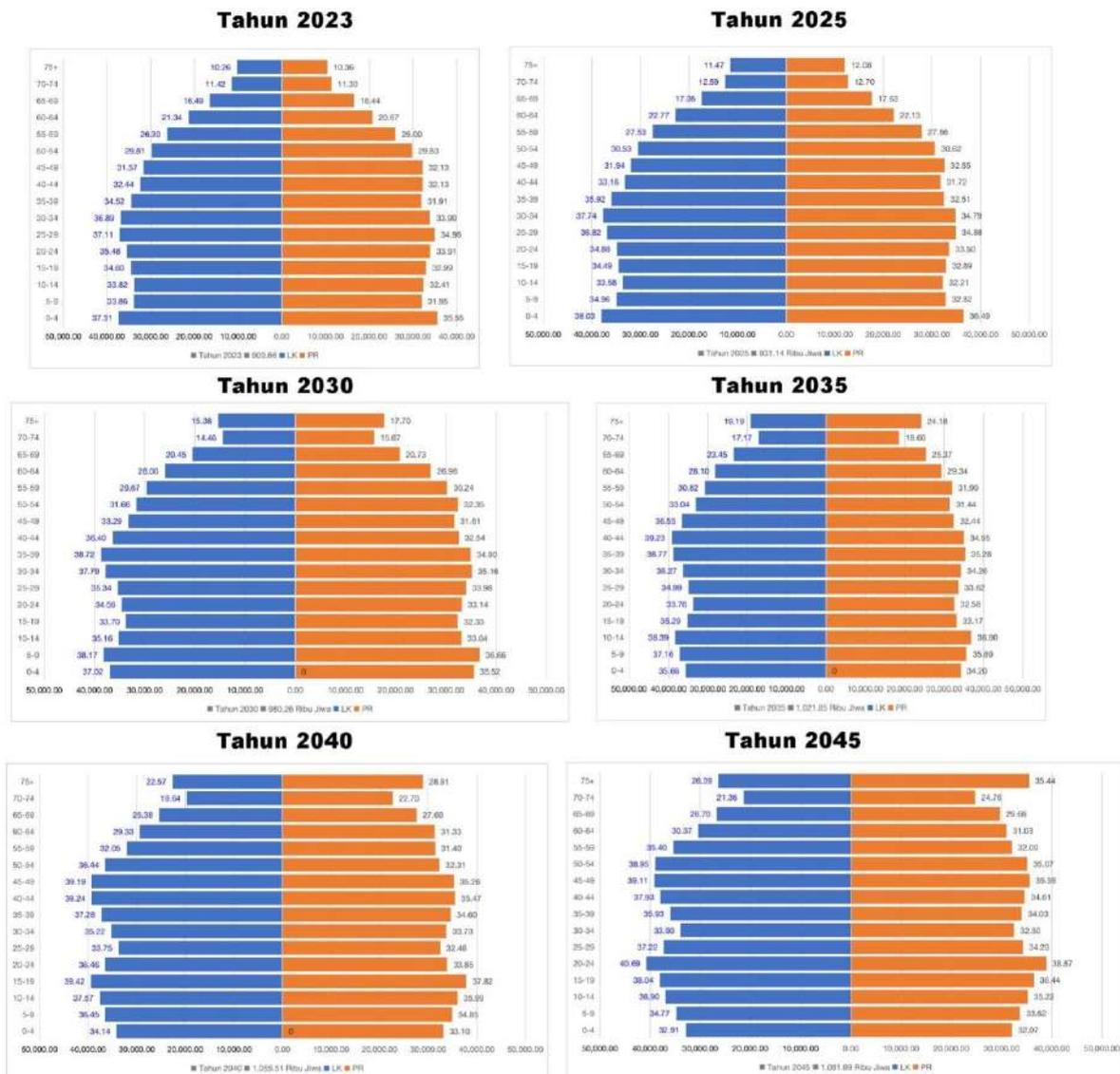
Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur bertujuan untuk memperkirakan jumlah penduduk yang dibagi ke dalam kelompok umur tertentu dalam suatu wilayah. Proyeksi ini memberikan gambaran tentang bagaimana struktur usia penduduk akan berkembang seiring waktu. Informasi ini sangat krusial karena memiliki implikasi besar dalam merencanakan program dan kebijakan pembangunan khususnya di bidang sosial, ekonomi, kesehatan pendidikan dan program sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis dari waktu ke waktu.



Tabel II. 50 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Penduduk Kabupaten Wonosobo 2023-2045

Kabupaten Wonosobo	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur (Dalam Ribuan) Penduduk Kabupaten Wonosobo																	
	Tahun 2023			Tahun 2025			Tahun 2030			Tahun 2035			Tahun 2040			Tahun 2045		
Kelompok Umur	LK	PR	L+P	LK	PR	L+P	LK	PR	L+P	LK	PR	L+P	LK	PR	L+P	LK	PR	L+P
0-4	37,31	35,55	72,89	38,03	36,49	74,52	37,02	35,52	72,53	35,66	34,2	69,87	34,14	33,1	67,24	32,91	32,07	64,98
5-9	33,86	31,95	65,81	34,96	32,82	67,79	38,17	36,66	74,82	37,16	35,69	72,85	36,45	34,85	71,31	34,77	33,62	68,39
10-14	33,82	32,41	66,24	33,58	32,21	65,8	35,16	33,04	68,2	38,39	36,9	75,28	37,57	35,99	73,57	36,9	35,22	72,12
15-19	34,60	32,99	67,59	34,49	32,89	67,38	33,7	32,33	66,03	35,29	33,17	68,46	39,42	37,82	77,24	38,04	36,44	74,47
20-24	35,48	33,91	69,36	34,88	33,5	68,39	34,55	33,14	67,68	33,76	32,58	66,34	36,46	33,85	70,31	40,69	38,87	79,56
25-29	37,11	34,96	72,07	36,82	34,88	71,7	35,34	33,98	69,32	34,99	33,62	68,61	33,75	32,46	66,21	37,22	34,23	71,45
30-34	36,89	33,90	70,78	37,74	34,79	72,53	37,79	35,16	72,95	36,27	34,26	70,53	35,22	33,73	68,95	33,9	32,5	66,4
35-39	34,52	31,91	66,43	35,92	32,51	68,43	38,72	34,9	73,62	38,77	35,28	74,05	37,28	34,6	71,88	35,93	34,03	69,96
40-44	32,44	32,13	64,56	33,16	31,72	64,88	36,4	32,54	68,94	39,23	34,95	74,18	39,24	35,47	74,71	37,93	34,61	72,55
45-49	31,57	32,13	63,69	31,94	32,55	64,48	33,29	31,61	64,9	36,55	32,44	68,99	39,19	35,26	74,45	39,11	35,59	74,69
50-54	29,81	29,83	59,68	30,53	30,62	61,15	31,66	32,35	64,01	33,04	31,44	64,47	36,44	32,31	68,75	38,95	35,07	74,02
55-59	26,30	26,00	52,30	27,53	27,86	55,39	29,67	30,24	59,91	30,82	31,99	62,81	32,05	31,4	63,44	35,4	32	67,39
60-64	21,34	20,67	42,02	22,77	22,13	44,9	26	26,96	52,97	28,1	29,34	57,44	29,33	31,33	60,66	30,37	31,03	61,4
65-69	16,49	16,44	32,94	17,35	17,63	34,98	20,45	20,73	41,18	23,45	25,37	48,83	25,38	27,6	52,98	26,7	29,66	56,36
70-74	11,42	11,30	22,72	12,59	12,7	25,29	14,46	15,67	30,13	17,17	18,6	35,77	19,64	22,73	42,36	21,36	24,76	46,11
75+	10,26	10,36	20,62	11,47	12,08	23,55	15,38	17,7	33,08	19,19	24,18	43,38	22,57	28,91	51,48	26,39	35,44	61,83
Total	463,18	446,48	909,66	473,76	457,39	931,1	497,75	482,5	980,26	517,8	504	1.021,85	534,12	521,40	1.055,51	546,56	535,13	1.081,69

Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2024 dan Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Wonosobo



Grafik II. 41 Piramida Penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2045

Berdasarkan piramida penduduk pada 2045, Kabupaten Wonosobo akan banyak memiliki penduduk produktif. Bonus demografi ini akan berdampak terhadap perencanaan pembangunan di Kabupaten Wonosobo. Kesiapan pemerintah kabupaten dalam menyiapkan hal tersebut akan memberikan pengaruh yang besar bagi kondisi SDM Kabupaten Wonosobo hingga 2045. Bonus demografi ketika dimanfaatkan dengan maksimal maka akan berdampak terhadap kemajuan daerah karena memiliki sumber daya manusia yang unggul, akan tetapi sebaliknya jika tidak dipersiapkan maka akan menjadi beban bagi pemerintah kabupaten ke depannya. Perencanaan dalam pengambilan kebijakan harus dimulai agar potensi bonus demografi yang dimiliki oleh Kabupaten Wonosobo tersebut akan berdampak positif.



Meskipun total populasi terus meningkat, namun terjadi pergeseran yang signifikan dalam distribusi usia. Hal ini terlihat dari piramida rasio umur pada gambar di atas. Kelompok usia muda (0-4 tahun) menunjukkan peningkatan, menandakan kebutuhan akan pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk balita dan ibu hamil yang perlu diperhatikan. Sementara itu, pertumbuhan yang lebih cepat terjadi pada kelompok usia lanjut (75 tahun ke atas), mencerminkan adanya tren penuaan populasi yang mengindikasikan perlunya perencanaan kebijakan kesehatan dan sosial yang memadai untuk mendukung kebutuhan lansia. Dengan memperhitungkan proyeksi ini, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berubah seiring waktu.

g. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Produktif dan Nonproduktif

Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan usia produktif dan non-produktif merupakan suatu analisis demografi yang membagi penduduk ke dalam dua kategori usia berdasarkan potensi produktivitas mereka dalam kegiatan ekonomi. Usia produktif yang dimaksudkan dalam kelompok usia ini diharapkan dapat berkontribusi secara aktif dalam kegiatan dan pembangunan ekonomi, sementara kelompok non produktif memiliki ketergantungan ekonomi lebih besar daripada kontribusi ekonomi, yaitu anak-anak yang masih memerlukan perawatan dan pendidikan dan lansia yang sudah tidak mampu aktif secara ekonomi karena pensiun atau kesehatan yang menurun. Analisis usia produktif dan nonproduktif membantu pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam merancang kebijakan dan strategi yang sesuai dengan karakteristik demografi masyarakat. Proyeksi ini juga penting digunakan untuk mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi dari perubahan struktur usia penduduk.

Tabel II. 51 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Produktif dan Non Produktif Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045

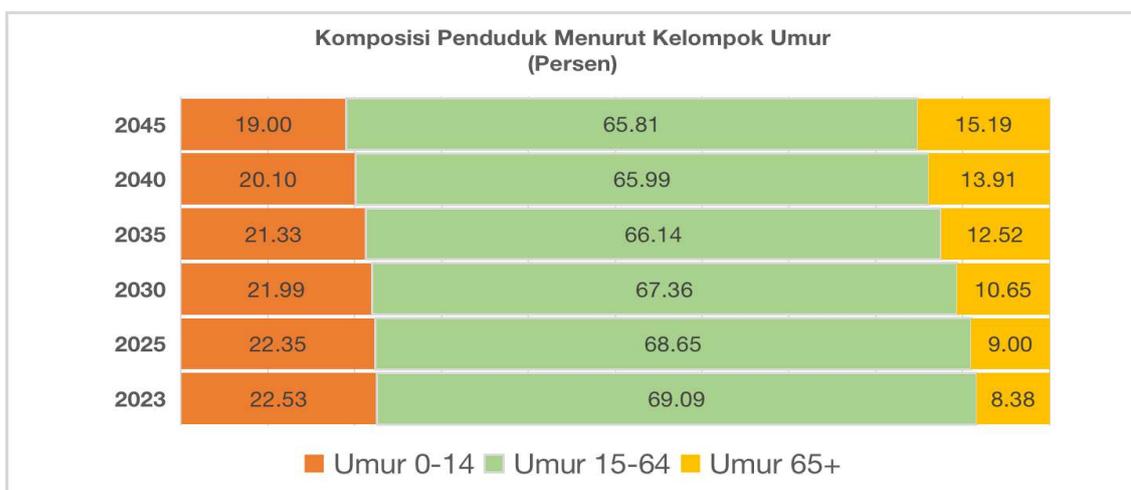
Kelompok Umur	Tahun 2023	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Produktif dan Non Produktif (Ribu Jiwa) Kabupaten Wonosobo				
		2025	2030	2035	2040	2045
Umur 0-14	204,93	208,10	215,55	218,00	212,11	205,49
Umur 15-64	628,48	639,22	660,32	675,88	696,58	711,90
Umur 65+	76,27	83,82	104,39	127,98	146,82	164,30
Total	909,66	931,14	980,26	1.021,85	1.055,51	1.081,69

Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2024 dan Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Wonosobo



Data proyeksi jumlah penduduk berdasarkan usia produktif dan nonproduktif di Kabupaten Wonosobo menunjukkan perubahan setiap 5 tahun hingga 2045. Kelompok usia non produktif 0-14 tahun mengalami kenaikan proyeksi jumlah penduduk dari 2023 dan mencapai puncaknya pada 2035 sebanyak 218 ribu jiwa. Namun, terdapat penurunan pada 2040 dan 2045, dengan jumlah penduduk usia 0-14 tahun menjadi 212,11 ribu jiwa dan 205,49 ribu jiwa, secara berturut-turut. Jumlah penduduk usia produktif yaitu 15-64 tahun terus mengalami peningkatan dari 610,26 ribu jiwa pada 2020 menjadi 711,90 ribu jiwa pada 2045. Kenaikan yang relatif stabil sepanjang periode proyeksi ini menunjukkan pertumbuhan penduduk usia produktif yang cukup signifikan. Sementara itu jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas menunjukkan peningkatan yang cukup tajam dari 2023 hingga 2045. Pada 2023, jumlahnya sebanyak 76,27 ribu jiwa dan meningkat terus menjadi 164,30 ribu jiwa pada 2045. Peningkatan signifikan pada jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas perlu menjadi catatan bahwa dalam pertumbuhan tersebut terdapat juga tren penuaan penduduk.

Proyeksi penduduk kelompok usia nonproduktif 0-14 yang pertumbuhannya cukup signifikan, perlu mendapat perhatian khusus terutama pada perencanaan penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan, penyediaan dan penciptaan lapangan kerja dengan strategi ekonomi yang baik dan berkelanjutan akan mengakomodasi pertumbuhan penduduk usia produktif. Sementara untuk usia non produktif kelompok lansia, diperlukan peningkatan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang baik untuk menjaga pertumbuhan penduduk dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wonosobo.



Grafik II. 42 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2045

Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2024 dan Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Wonosobo

h. Karakteristik Generasi untuk Proyeksi Usia Produktif di Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan proyeksi data jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, dapat dilihat bahwa 2025 akan membuka pintu untuk dinamika baru dalam usia produktif di berbagai sektor ekonomi, dengan generasi X, Y, Z dan Alpha yang akan berkontribusi secara signifikan. Dengan memahami karakteristik unik masing-masing generasi maka pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang proaktif pada periode 2025-2045 sehingga kehidupan ekonomi dapat menjadi lingkungan yang dinamis dan inovatif, menciptakan kesempatan yang berkelanjutan bagi semua generasi untuk berkembang dan berkontribusi. Berikut adalah narasi mengenai bagaimana karakteristik unik masing-masing generasi akan membentuk ekosistem ekonomi pada periode ini:



Gambar II. 22 Karakteristik Generasi (Gen X & Gen Y) dalam Membentuk Ekosistem Ekonomi Periode Tahun 2025-2045

Sumber: Barkup, S.B, 2014



Gambar II. 23 Karakteristik Generasi (Gen Z & Gen Alpha) dalam Membentuk Ekosistem Ekonomi Periode Tahun 2025-2045

Sumber: Barkup, S.B, 2014

2.5.2. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Per Lima Tahun

Analisis proyeksi kebutuhan sarana prasarana per lima tahun melibatkan pendekatan strategis yang memperhitungkan perkembangan jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat dalam kurun waktu per lima tahun. Proses ini melibatkan pemetaan dan penilaian terhadap sarana dan prasarana yang ada, serta proyeksi pertumbuhan untuk menentukan kecukupan atau kekurangan yang mungkin terjadi. Dengan merinci kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, kebutuhan air bersih, listrik dan fasilitas umum lainnya, analisis ini memberikan dasar bagi pemerintah Kabupaten Wonosobo dan lembaga terkait untuk merencanakan investasi



dan pengembangan yang tepat guna, memastikan bahwa perkembangan wilayah dapat diimbangi dengan fasilitas yang memadai. Selain itu, analisis ini juga dapat menjadi panduan strategis untuk sektor swasta dalam mengidentifikasi peluang bisnis dan kontribusi mereka dalam mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

a. Proyeksi Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Wonosobo

Di bidang pendidikan, untuk menghitung dan merencanakan sarana prasarana untuk usia wajib belajar pada 20 (dua puluh) tahun mendatang, perlu melihat proyeksi jumlah anak usia sekolah, proyeksi jumlah siswa, proyeksi jumlah guru dan proyeksi jumlah sekolah.

Data proyeksi Jumlah Anak Usia di Kabupaten Wonosobo memberikan gambaran mengenai jumlah anak usia sekolah pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) atau sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat di Kabupaten Wonosobo. Proyeksi ini juga memberikan pandangan tentang distribusi dan konsentrasi anak usia sekolah di setiap kecamatan, memungkinkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk merinci alokasi sumber daya yang efektif dan efisien. Sebagai hasilnya, proyeksi ini tidak hanya mempermudah perencanaan pendidikan, tetapi juga memainkan peran krusial dalam memastikan akses dan kualitas pendidikan yang merata bagi generasi mendatang.

Data proyeksi jumlah siswa atau murid anak di Kabupaten Wonosobo memberikan informasi tentang estimasi jumlah siswa pada berbagai jenjang pendidikan, seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) atau sederajat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. Hal ini bertujuan untuk dapat memahami dan mengantisipasi kebutuhan pendidikan di masa yang akan datang. Proyeksi ini memainkan peran penting dalam merancang kebijakan dan program pendidikan yang efektif, termasuk alokasi anggaran dan pengembangan sarana serta prasarana pendidikan. Dengan mempertimbangkan proyeksi jumlah siswa, pemerintah dan lembaga pendidikan dapat merancang strategi pendidikan yang berfokus pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Selain itu, proyeksi ini juga memberikan gambaran distribusi siswa di setiap kecamatan, memungkinkan penyesuaian kebijakan pendidikan dengan karakteristik demografis dan sosio ekonomi setiap wilayah. Dengan demikian, proyeksi jumlah siswa menjadi dasar untuk pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, mendukung pertumbuhan intelektual anak-anak Kabupaten Wonosobo serta mempersiapkan mereka untuk tantangan masa depan.

Proyeksi jumlah guru dan jumlah sekolah di Kabupaten Wonosobo merupakan aspek penting dalam perencanaan pendidikan. Data proyeksi ini memberikan gambaran tentang kebutuhan sumber daya manusia dan



sarana prasarana pendidikan yang akan diperlukan untuk mendukung pertumbuhan jumlah siswa atau murid. Dengan melibatkan proyeksi jumlah guru, pemerintah dan lembaga pendidikan dapat merencanakan alokasi tenaga pengajar yang efektif dan efisien, memastikan kecukupan jumlah guru untuk memenuhi kebutuhan pendidikan.

Sementara itu, proyeksi jumlah sekolah membantu dalam perencanaan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, seperti gedung sekolah, perpustakaan dan fasilitas lainnya. Proyeksi ini sangat penting karena memungkinkan pihak terkait untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah siswa dan menyesuaikan kebijakan dan anggaran pendidikan dengan kebutuhan di masa yang akan datang. Dengan melihat proyeksi jumlah siswa, jumlah guru dan jumlah sekolah maka dapat menciptakan dasar yang kokoh untuk pengelolaan sistem pendidikan yang berkelanjutan dan berkualitas.



Tabel II. 52 Proyeksi Jumlah Anak Usia Sekolah, Jumlah Murid, Jumlah Guru dan Jumlah Sekolah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025

Kecamatan	Proyeksi Jumlah Anak Usia Sekolah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2025			Proyeksi Jumlah Siswa/Murid di Kabupaten Wonosobo Tahun 2025			Proyeksi Jumlah Guru di Kabupaten Wonosobo Tahun 2025			Proyeksi Jumlah Sekolah (Unit) Kabupaten Wonoosbo Tahun 2025		
	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat
Wadaslintang	6.213	4.965	2.591	910	4.197	1.850	59	247	116	33	40	10
Kepil	7.039	5.684	2.968	1.031	4.805	2.120	66	283	133	28	41	8
Sapuran	7.144	5.701	2.970	1.046	4.819	2.121	67	284	133	19	31	7
Kalibawang	2.945	2.324	1.196	431	1.964	854	28	116	54	12	18	6
Kaliwiro	5.190	4.315	2.263	760	3.648	1.616	49	215	101	21	32	8
Leksono	5.449	4.193	2.091	798	3.544	1.493	51	209	94	20	21	5
Sukoharjo	3.740	3.084	1.590	548	2.607	1.136	35	153	71	25	26	5
Selomerto	6.336	4.878	2.486	928	4.123	1.775	60	243	111	24	28	6
Kalikajar	8.232	6.160	3.027	1.206	5.207	2.162	78	307	135	23	41	6
Kertek	11.355	8.331	4.099	1.663	7.042	2.927	107	415	183	29	33	5
Wonosobo	11.046	8.670	4.496	1.618	7.329	3.211	104	431	201	40	41	12
Watumalang	6.224	4.840	2.350	911	4.091	1.678	59	241	105	21	31	7
Mojotengah	8.515	6.293	3.335	1.247	5.320	2.382	80	313	149	22	29	8
Garung	7.108	5.190	2.538	1.041	4.387	1.813	67	258	114	15	24	5
Kejajar	5.952	4.348	2.103	872	3.675	1.502	56	216	94	24	25	5
Total	102.488	78.976	40.103	15.010	66.758	28.640	966	3.931	1.794	356	461	103

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Wonosobo, 2024 (data diolah)



Berdasarkan proyeksi 2025, terlihat bahwa di beberapa kecamatan, seperti Kertek dan Wonosobo, memiliki jumlah anak usia sekolah yang cukup tinggi, yang mencerminkan potensi peningkatan kebutuhan pendidikan di wilayah tersebut. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa terdapat ketimpangan antara proyeksi jumlah anak usia sekolah dan proyeksi jumlah siswa di semua kecamatan, terutama pada jumlah usia anak sekolah PAUD yang artinya tidak semua jumlah usia anak usia sekolah mengenyam pendidikan. Maka dalam perencanaan 20 tahun ke depan pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu memperhatikan pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan agar semua penduduk usia sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik.

Tabel II. 53 Proyeksi Jumlah Anak Usia Sekolah, Jumlah Murid, Jumlah Guru dan Jumlah Sekolah Kabupaten Wonosobo Tahun 2035

Kecamatan	Proyeksi Jumlah Anak Usia Sekolah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2035			Proyeksi Jumlah Siswa/Murid di Kabupaten Wonosobo Tahun 2035			Proyeksi Jumlah Guru di Kabupaten Wonosobo Tahun 2035			Proyeksi Jumlah Sekolah (Unit) Kabupaten Wonosobo Tahun 2035		
	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat
Wadaslintang	5.845	6.033	3.398	1.023	6.033	3.398	68	302	170	32	35	11
Kepil	6.096	6.215	3.550	1.067	6.215	3.550	71	311	177	27	35	10
Sapuran	6.531	6.167	3.418	1.143	6.167	3.418	76	308	171	18	25	9
Kalibawang	2.735	2.650	1.445	479	2.650	1.445	32	133	72	12	15	6
Kaliwiro	4.545	4.831	2.759	795	4.831	2.759	53	242	138	20	27	9
Leksono	5.319	4.745	2.325	931	4.745	2.325	62	237	116	19	16	6
Sukoharjo	3.194	3.299	1.643	559	3.299	1.643	37	165	82	25	22	6
Selomerto	6.126	5.554	2.741	1.072	5.554	2.741	71	278	137	23	23	7
Kalikajar	8.805	7.184	3.344	1.541	7.184	3.344	103	359	167	22	34	8
Kertek	11.349	9.810	4.660	1.986	9.810	4.660	132	491	233	28	23	8
Wonosobo	10.366	9.591	4.574	1.814	9.591	4.574	121	480	229	39	31	15
Watumalang	5.759	5.278	2.565	1.008	5.278	2.565	67	264	128	20	25	8
Mojotengah	8.905	6.740	3.101	1.558	6.740	3.101	104	337	155	21	22	10



Kecamatan	Proyeksi Jumlah Anak Usia Sekolah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2035			Proyeksi Jumlah Siswa/Murid di Kabupaten Wonosobo Tahun 2035			Proyeksi Jumlah Guru di Kabupaten Wonosobo Tahun 2035			Proyeksi Jumlah Sekolah (Unit) Kabupaten Wonosobo Tahun 2035		
	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat
Garung	7.272	5.746	2.753	1.273	5.746	2.753	85	287	138	14	19	6
Kejajar	5.832	4.989	2.446	1.021	4.989	2.446	68	249	122	23	19	6
Total	98.679	88.832	44.722	17.270	88.832	44.722	966	4.443	2.235	343	371	125

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Wonosobo, 2024 (data diolah)

Tren peningkatan jumlah siswa, guru dan jumlah sekolah yang sama juga masih terjadi di 2035 meskipun terdapat penurunan jumlah usia anak sekolah pada tingkat PAUD. Jumlah peningkatan siswa, guru dan jumlah sekolah di Kabupaten Wonosobo memang tidak terlalu signifikan, namun tetap perlu memperhatikan kapasitas guru dan ruang belajar. Kebutuhan tiap kecamatan juga harus diperhatikan mengingat adanya kemungkinan migrasi jumlah anak sekolah antarkecamatan. Misalnya murid di Kertek mengenyam pendidikan di Kecamatan Wonosobo, atau sebaliknya.

Tabel II. 54 Proyeksi Jumlah Anak Usia Sekolah, Jumlah Murid, Jumlah Guru dan Jumlah Sekolah Kabupaten Wonosobo Tahun 2040

Kecamatan	Proyeksi Jumlah Anak Usia Sekolah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2040			Proyeksi Jumlah Siswa/Murid di Kabupaten Wonosobo Tahun 2040			Proyeksi Jumlah Guru di Kabupaten Wonosobo Tahun 2040			Proyeksi Jumlah Sekolah (Unit) Kabupaten Wonosobo Tahun 2040		
	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat
Wadaslintang	5.571	6.118	3.637	975	6.118	3.637	65	306	182	31	35	11
Kepil	5.526	5.985	3.656	967	5.985	3.656	64	299	183	26	35	10
Sapuran	6.119	5.932	3.449	1.071	5.932	3.449	71	297	172	17	25	9
Kalibawang	2.587	2.612	1.494	453	2.612	1.494	30	131	75	12	15	6
Kaliwiro	4.152	4.714	2.861	727	4.714	2.861	48	236	143	20	27	9



Kecamatan	Proyeksi Jumlah Anak Usia Sekolah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2040			Proyeksi Jumlah Siswa/Murid di Kabupaten Wonosobo Tahun 2040			Proyeksi Jumlah Guru di Kabupaten Wonosobo Tahun 2040			Proyeksi Jumlah Sekolah (Unit) Kabupaten Wonosobo Tahun 2040		
	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat
Leksono	5.171	4.680	2.308	905	4.680	2.308	60	234	115	18	16	6
Sukoharjo	2.874	3.151	1.572	503	3.151	1.572	34	158	79	25	22	6
Selomerto	5.927	5.491	2.713	1.037	5.491	2.713	69	275	136	22	23	7
Kalikajar	8.960	7.222	3.294	1.568	7.222	3.294	105	361	165	21	33	8
Kertek	11.173	9.872	4.675	1.955	9.872	4.675	130	494	234	27	22	8
Wonosobo	9.862	9.353	4.342	1.726	9.353	4.342	115	468	217	38	30	15
Watumalang	5.430	5.114	2.512	950	5.114	2.512	63	256	126	19	25	8
Mojotengah	8.951	6.504	2.776	1.566	6.504	2.776	104	325	139	20	21	10
Garung	7.234	5.626	2.691	1.266	5.626	2.691	84	281	135	13	19	6
Kejajar	5.679	4.956	2.478	994	4.956	2.478	66	248	124	22	19	6
Total	95.216	87.330	44.458	16.663	87.330	44.458	966	4.369	2.225	331	367	125

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Wonosobo, 2024 (data diolah)

Di tahun 2040, terjadi penurunan jumlah usia anak sekolah. Hal ini dapat disebabkan adanya penurunan angka kelahiran atau migrasi. Tren ini juga berpengaruh pada penurunan jumlah murid di Kabupaten Wonosobo. Meskipun penurunan tidak terlalu signifikan, namun ini berpengaruh pada jumlah kebutuhan guru dan juga kebutuhan sekolah. Untuk itu, perlu dipertimbangkan bahwa dengan proyeksi yang fluktuatif ini, berapa jumlah guru yang harus direkrut dan perlu atau tidaknya pembangunan sekolah. Jika kebutuhan jumlah sekolah menurun, artinya pada periode-periode sebelumnya, sangat dimungkinkan hanya membutuhkan tambahan ruang belajar saja. Pada 2045 pun, tren penurunan jumlah usia anak sekolah, jumlah siswa, jumlah guru dan jumlah sekolah terus berlanjut meskipun tidak secara signifikan.



Tabel II. 55 Proyeksi Jumlah Anak Usia Sekolah, Jumlah Murid, Jumlah Guru dan Jumlah Sekolah Kabupaten Wonosobo Tahun 2045

Kecamatan	Proyeksi Jumlah Anak Usia Sekolah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2045			Proyeksi Jumlah Siswa/Murid di Kabupaten Wonosobo Tahun 2045			Proyeksi Jumlah Guru di Kabupaten Wonosobo Tahun 2045			Proyeksi Jumlah Sekolah (Unit) Kabupaten Wonosobo Tahun 2045		
	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	PAUD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat
Wadaslintang	5.289	6.126	3.839	926	6.126	3.839	62	306	192	30	34	11
Kepil	4.952	5.687	3.727	867	5.687	3.727	58	284	186	25	34	10
Sapuran	5.705	5.619	3.448	998	5.619	3.448	67	281	172	16	24	9
Kalibawang	2.438	2.539	1.530	427	2.539	1.530	28	127	77	12	15	6
Kaliwiro	3.756	4.541	2.936	657	4.541	2.936	44	227	147	20	26	9
Leksono	5.024	4.544	2.278	879	4.544	2.278	59	227	114	17	15	6
Sukoharjo	2.553	2.958	1.494	447	2.958	1.494	30	148	75	25	21	6
Selomerto	5.731	5.349	2.670	1.003	5.349	2.670	67	267	134	21	22	7
Kalikajar	9.123	7.135	3.226	1.597	7.135	3.226	106	357	161	20	32	8
Kertek	1.003	9.776	4.663	1.926	9.776	4.663	128	489	233	26	20	8
Wonosobo	9.360	8.968	4.101	1.638	8.968	4.101	109	448	205	37	28	15
Watumalang	5.100	4.871	2.442	892	4.871	2.442	60	244	122	18	24	8
Mojotengah	9.004	6.152	2.450	1.576	6.152	2.450	105	308	123	19	20	10
Garung	7.201	5.413	2.615	1.260	5.413	2.615	84	271	131	12	18	6
Kejajar	5.527	4.844	2.494	967	4.844	2.494	65	242	125	21	18	6
Total	91.766	84.522	43.913	16.060	84.522	43.913	966	4.226	2.197	319	351	125

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Wonosobo, 2024 (data diolah)



b. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Sampah dan Sarana Persampahan

Data proyeksi kebutuhan air bersih dan limbah di Kabupaten Wonosobo memberikan gambaran tentang tuntutan infrastruktur dasar yang harus disesuaikan dengan pertumbuhan populasi dan merupakan landasan penting dalam perencanaan pengembangan wilayah. Sumber acuan standar yang digunakan adalah SNI 8632-2018 tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, BSN 2018. Dalam acuan tersebut disebutkan bahwa klasifikasi kota didasarkan pada jumlah penduduk, volume limbah per individu per hari dan berat limbah per individu per hari sebagai berikut:

- a. Kategori kota kecil jika memiliki jumlah penduduk di bawah 100.000 orang,
- b. Kota sedang jika penduduknya berada dalam kisaran 100.000 hingga 500.000 orang,
- c. Kota besar jika jumlah penduduknya antara 500.000 hingga 1.000.000 orang,
- d. Kota metropolitan jika jumlah penduduknya lebih dari 1.000.000 orang.
- e. Pada skala kota kecil dan kota sedang, volume sampah per individu per hari berkisar antara 2,75 hingga 3,00 liter, sementara berat limbah per individu per hari berkisar antara 0,60 hingga 0,75 kilogram.
- f. Pada skala kota besar dan kota metropolitan, volume sampah per individu per hari adalah antara 3,00 hingga 3,60 liter dan berat limbah per individu per hari berkisar antara 0,65 hingga 0,80 kilogram.

Proyeksi kebutuhan sarana pengelolaan sampah ditekankan pada kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Fasilitas TPST dirancang untuk mengolah sampah secara menyeluruh mulai dari pengumpulan, pemilahan hingga pengolahan akhir.

Perhitungan proyeksi sampah menggunakan data penduduk dan standar volume sampah per 2,75 liter/hari/orang dan berat sampah 0,4 ton/hari/orang (Dokumen Kajian Analisis Teknis Pembiayaan dan Roadmap Persampahan Kabupaten Wonosobo, DLH 2022). Sedangkan untuk jumlah kebutuhan TPST diasumsikan bahwa setiap TPST memiliki kapasitas pengolahan volume sampah per unit kurang lebih 20 ton/hari (menyesuaikan kelengkapan peralatan). Proyeksi produksi sampah dan kebutuhan pengelolaan sampah tersaji dalam tabel berikut:



**Tabel II. 56 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Wonosobo Tahun 2025**

Kecamatan	Tahun 2023 (Baseline)			Proyeksi Tahun 2025			
	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Volume (m ³ /Hari)	Berat (Ton/Hari)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Volume (Liter/Hari)	Berat (Ton/Hari)	Kebutuhan Kumulatif TPST (unit)
Wadaslintang	62.790	N/A	N/A	61.658	169.559,50	24,66	1
Kepil	66.420	N/A	N/A	67.241	184.912,75	26,90	1
Sapuran	62.880	N/A	N/A	65.723	180.738,25	26,29	1
Kalibawang	28.400	N/A	N/A	28.002	77.005,50	11,20	1
Kaliwiro	53.800	N/A	N/A	53.728	147.752,00	21,49	1
Leksono	47.960	N/A	N/A	49.160	135.190,00	19,66	1
Sukoharjo	36.420	N/A	N/A	37.663	103.573,25	15,07	1
Selomerto	55.760	N/A	N/A	56.909	156.499,75	22,76	1
Kalikajar	73.780	N/A	N/A	74.027	203.574,25	29,61	1
Kertek	93.710	N/A	N/A	95.773	263.375,75	38,31	2
Wonosobo	93.880	N/A	N/A	101.282	303.846,00	40,51	2
Watumalang	57.460	N/A	N/A	58.106	159.791,50	23,24	1
Mojotengah	69.740	N/A	N/A	72.288	198.792,00	28,92	1
Garung	59.310	N/A	N/A	59.847	164.579,25	23,94	1
Kejajar	47.360	N/A	N/A	49.734	136.768,50	19,89	1
Total	909.660	N/A	N/A	931.141	2.585.958,25	372,46	19

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Wonosobo, 2024 (data diolah)

Pada 2023, jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo adalah 909.660 ribu jiwa dan pada proyeksi untuk 2025 menunjukkan peningkatan jumlah penduduk menjadi 931.141 ribu jiwa. Proyeksi untuk 2025 menunjukkan volume sampah sekitar 2.585.958,25 m³/hari. Total berat sampah yang dihasilkan oleh seluruh kecamatan pada 2025 berkisar antara 573.88 ton/hari dan kebutuhan kumulatif TPST sebanyak 29 unit. Dengan adanya penambahan penduduk, dipastikan peningkatan jumlah volume sampah Pemerintah setempat perlu memperhatikan dan merencanakan infrastruktur pengelolaan limbah yang sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan kesehatan masyarakat.



**Tabel II. 57 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Wonosobo Tahun 2030-2035**

Kecamatan	Tahun 2030				Tahun 2035			
	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Volume (Liter/Hari)	Berat (Ton/Hari)	Kebutuhan Kumulatif TPST (unit)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Volume (Liter/Hari)	Berat (Ton/Hari)	Kebutuhan Kumulatif TPST (unit)
Wadaslintang	66.031	181.585,25	26,41	1	69.912	192.258,00	27,96	1
Kepil	70.122	192.835,50	28,05	1	72.510	199.402,50	29,00	1
Sapuran	68.627	188.724,25	27,45	1	71.014	195.288,50	28,41	1
Kalibawang	29.716	81.719,00	11,89	1	31.222	85.860,50	12,49	1
Kaliwiro	56.517	155.421,75	22,61	1	58.937	162.076,75	23,57	1
Leksono	51.955	142.876,25	20,78	1	54.351	149.465,25	21,74	1
Sukoharjo	38.838	106.804,50	15,54	1	39.749	109.309,75	15,90	1
Selomerto	60.326	165.896,50	24,13	1	63.250	173.937,50	25,30	1
Kalikajar	79.751	219.315,25	31,90	2	84.805	233.213,75	33,92	2
Kertek	101.162	303.486,00	40,46	2	105.769	317.307,00	42,31	2
Wonosobo	105.485	316.455,00	42,19	2	108.853	326.559,00	43,54	2
Watumalang	60.645	166.773,75	24,26	1	62.701	172.427,75	25,08	1
Mojoagung	75.938	208.829,50	30,38	2	78.951	217.115,25	31,58	2
Garung	63.272	173.998,00	25,31	1	66.174	181.978,50	26,47	1
Kejajar	51.876	142.659,00	20,75	1	53.605	147.537,50	21,44	1
Total	980.261	2.747.379,50	392,10	20	1.021.848	2.863.737,50	408,74	20

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Wonosobo, 2024 (data diolah)

Proyeksi untuk 2030 hingga 2035 menunjukkan peningkatan lebih lanjut. Data proyeksi menunjukkan meningkatnya jumlah penduduk, sehingga mempengaruhi volume timbunan sampah yaitu 2.747.379,50 m³/hari di 2030 dan 2.863.737,50 m³/hari di 2035. Peningkatan juga terjadi pada berat sampah, yaitu 619,15 ton/hari di 2030 dan meningkat menjadi 645,30 ton/hari pada 2035. Data ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam proyeksi jumlah penduduk, volume sampah dan berat sampah dari 2023 hingga 2035. Sedangkan untuk jumlah kebutuhan kumulatif TPST pada Tahun 2030 sebanyak 31 unit dan Tahun 2035 kebutuhan kumulatifnya menjadi 32 unit.

Pemerintah setempat perlu mengambil langkah-langkah efektif dalam pengelolaan sampah, seperti peningkatan program daur ulang, edukasi masyarakat dan investasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah, seperti pertimbangan atau strategi pengelolaan sampah dengan memastikan TPS dan TPA yang ada masih mampu menampung sampah. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik juga dapat membantu mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan program ini harus didukung oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo.



**Tabel II. 58 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Wonosobo Tahun 2040-2045**

Kecamatan	Tahun 2040				Tahun 2045			
	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Volume (Liter/Hari)	Berat (Ton/Hari)	Kebutuhan Kumulatif TPST (unit)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Volume (Liter/Hari)	Berat (Ton/Hari)	Kebutuhan Kumulatif TPST (unit)
Wadaslintang	73.168	201.212,00	29,27	1	75.892	208.703,00	30,36	2
Kepil	74.130	203.857,50	29,65	1	75.261	206.967,75	30,10	2
Sapuran	72.690	199.897,50	29,08	1	73.864	203.126,00	29,55	1
Kalibawang	32.406	89.116,50	12,96	1	33.363	91.748,25	13,35	1
Kaliwiro	60.702	166.930,50	24,28	1	62.076	170.709,00	24,83	1
Leksono	56.307	154.844,25	22,52	1	57.861	159.117,75	23,14	1
Sukoharjo	40.299	110.822,25	16,12	1	40.592	111.628,00	16,24	1
Selomerto	65.698	180.669,50	26,28	1	67.656	186.054,00	27,06	1
Kalikajar	89.264	245.476,00	35,71	2	93.014	255.788,50	37,21	2
Kertek	109.723	329.169,00	43,89	2	112.898	338.694,00	45,16	2
Wonosobo	111.484	334.452,00	44,59	2	113.341	340.023,00	45,34	2
Watumalang	64.285	176.783,75	25,71	1	65.408	179.872,00	26,16	1
Mojotengah	81.493	224.105,75	32,60	2	83.425	229.418,75	33,37	2
Garung	68.692	188.903,00	27,48	1	70.701	194.427,75	28,28	1
Kejajar	55.172	151.723,00	22,07	1	56.337	154.926,75	22,53	1
Total	1.055.513	2.957.962,50	422,21	21	1.081.689	3.031.204,50	432,68	22

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Wonosobo, 2024 (data diolah)

Tren peningkatan jumlah volume dan berat sampah terus berlanjut berdasarkan proyeksi 2040-2045. Pertumbuhan penduduk membutuhkan pengelolaan sampah yang mencapai 2.957.962 Volume (m³/hari) di 2040 dan semakin meningkat mencapai 3.031.204,50 Volume (m³/hari di 2045). Sedangkan kebutuhan kumulatif TPST di Tahun 2040 sebesar 33 unit dan Tahun 2045 menjadi 34 unit.

Perlu dilakukan perencanaan dan implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan untuk mengatasi peningkatan timbunan sampah di masa mendatang. Pemerintah bisa mendorong kampanye kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik dan meningkatkan praktik daur ulang. Pemerintah setempat perlu meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah, termasuk fasilitas daur ulang dan tempat pembuangan akhir yang ramah lingkungan. Di saat yang sama, pemerintah perlu melibatkan masyarakat secara aktif dan pihak swasta agar dapat mempercepat pencapaian target pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

c. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Proyeksi kebutuhan air bersih sangat penting karena memberikan pandangan dan pemahaman yang mendalam tentang permintaan air di masa depan. Dengan memahami proyeksi kebutuhan air bersih, pemerintah



Kabupaten Wonosobo dapat mengambil langkah-langkah preventif dan proaktif untuk memastikan ketersediaan air yang memadai untuk keperluan masyarakat sekarang dan masa depan, serta menjaga keberlanjutan sumber daya air dan lingkungan hidup.

Standar yang digunakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, bahwa untuk ukuran kuantitas air minum dengan parameter kebutuhan pokok minimal sehari sejumlah 60 liter/orang/hari melalui SPAM.

Dengan memahami varian kebutuhan air bersih berdasarkan jumlah penduduk, pihak terkait dapat merancang dan mengimplementasikan kebijakan serta infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik masing-masing kota. Hal ini dapat membantu menjaga ketersediaan air bersih yang memadai untuk masyarakat perkotaan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah proyeksi kebutuhan air bersih di Kabupaten Wonosobo hingga 2045 berdasarkan jumlah penduduk:

**Tabel II. 59 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih
Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2025**

Kecamatan	Tahun 2023		Tahun 2025	
	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Pemenuhan air Bersih (M ³ /Hari)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Pemenuhan Air Bersih (M ³ /Hari)
Wadaslintang	62.790	N/A	61.658	5.549
Kepil	66.420	N/A	67.241	6.052
Sapuran	62.880	N/A	65.723	92.012
Kalibawang	28.400	N/A	28.002	39.203
Kaliwiro	53.800	N/A	53.728	75.219
Leksono	47.960	N/A	49.160	68.824
Sukoharjo	36.420	N/A	37.663	52.728
Selomerto	55.760	N/A	56.909	79.673
Kalikajar	73.780	N/A	74.027	103.638
Kertek	93.710	N/A	95.773	134.082
Wonosobo	93.880	N/A	101.282	141.795
Watumalang	57.460	N/A	58.106	81.348
Mojotengah	69.740	N/A	72.288	101.203
Garung	59.310	N/A	59.847	83.786
Kejajar	47.360	N/A	49.734	69.628
Total	909.660	N/A	931.141	1.134.740

Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2024 dan Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Wonosobo, 2024 (data diolah)



Proyeksi kebutuhan air bersih di Kabupaten Wonosobo berdasarkan pada jumlah penduduk. Dengan data tersebut, diproyeksikan kebutuhan air di 2025 adalah 1.134.739,71 m³/hari. Kebutuhan paling besar berada di Kecamatan Wonosobo. Kecamatan dengan jumlah penduduk tinggi, seperti Wonosobo, Kertek dan Kalikajar, memiliki kontribusi signifikan terhadap total kebutuhan air bersih. Untuk itu perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur penyediaan air bersih di kecamatan-kecamatan yang mengalami peningkatan kebutuhan.

**Tabel II. 60 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih
Kabupaten Wonosobo Tahun 2030-2035**

Kecamatan	Tahun 2030		Tahun 2035	
	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Pemenuhan air Bersih (m ³ /Hari)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Pemenuhan air Bersih (m ³ /Hari)
Wadaslintang	66.031	5.942,79	69.912	6.292,08
Kepil	70.122	6.310,98	72.510	6.525,90
Sapuran	68.627	96.077,80	71.014	99.419,60
Kalibawang	29.716	41.602,40	31.222	43.710,80
Kaliwiro	56.517	79.123,80	58.937	82.511,80
Leksono	51.955	72.737,00	54.351	76.091,40
Sukoharjo	38.838	54.373,20	39.749	55.648,60
Selomerto	60.326	84.456,40	63.250	88.550,00
Kalikajar	79.751	111.651,40	84.805	118.727,00
Kertek	101.162	141.626,80	105.769	148.076,60
Wonosobo	105.485	147.679,00	108.853	152.394,20
Watumalang	60.645	84.903,00	62.701	87.781,40
Mojotengah	75.938	106.313,20	78.951	110.531,40
Garung	63.272	88.580,80	66.174	92.643,60
Kejajar	51.876	72.626,40	53.650	75.110,00
Total	980.261	1.194.004,97	1.021.848	1.244.014,38

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Wonosobo, 2024 (data diolah)

Proyeksi kebutuhan air bersih dari 2025 ke 2030 dan dari 2030 ke 2035 mengalami peningkatan. Kecamatan dengan jumlah penduduk tinggi, seperti Wonosobo, Kertek dan Kalikajar, memiliki kontribusi yang terus meningkat terhadap total kebutuhan air bersih. Tren ini terus berlanjut untuk proyeksi 2040 dan 2045. Dengan proyeksi tren kebutuhan air yang terus meningkat, pemerintah Kabupaten Wonosobo dan dinas terkait perlu perencanaan infrastruktur penyediaan air, seperti menentukan ukuran dan kapasitas instalasi pengolahan air manajemen SDA terkait air dengan optimalisasi pelestarian sumber-sumber air, pengelolaan daerah tangkapan air, perlindungan ekosistem sungai, identifikasi potensi masalah seperti penurunan kualitas air, kekeringan, atau kerusakan ekosistem sungai.



Manfaat lain dalam perencanaan kebutuhan air adalah di bidang ekonomi, di mana ketersediaan air yang memadai sangat penting untuk mendukung kegiatan industri, pertanian dan sektor-sektor lain yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga perlu mengantisipasi risiko krisis air di masa depan dengan mengembangkan strategi mitigasi dan rencana darurat untuk menghadapi kekurangan air yang mungkin terjadi.

**Tabel II. 61 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih
Kabupaten Wonosobo Tahun 2040-2045**

Kecamatan	Tahun 2040		Tahun 2045	
	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Pemenuhan air Bersih (m ³ /Hari)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Pemenuhan air Bersih (m ³ /Hari)
Wadaslintang	73.168	6.585	75.892	6.830
Kepil	74.130	6.672	75.261	6.773
Sapuran	72.690	101.766	73.864	103.410
Kalibawang	32.406	45.368	33.363	46.708
Kaliwiro	60.702	84.983	62.076	86.906
Leksono	56.307	78.830	57.861	81.005
Sukoharjo	40.299	56.419	40.592	56.829
Selomerto	65.698	91.977	67.656	94.718
Kalikajar	89.264	124.970	93.014	130.220
Kertek	109.723	153.612	112.898	158.057
Wonosobo	111.484	156.078	113.341	158.677
Watumalang	64.285	89.999	65.408	91.571
Mojotengah	81.493	114.090	83.425	116.795
Garung	68.692	96.169	70.701	98.981
Kejajar	55.172	77.241	56.337	78.872
Total	1.055.513	1.284.758	1.081.689	1.316.354

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Wonosobo, 2024 (data diolah)

d. Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kabupaten Wonosobo

Proyeksi kebutuhan listrik di Kabupaten Wonosobo sangat penting karena listrik merupakan infrastruktur kunci yang mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pembangunan wilayah. Dengan memahami proyeksi kebutuhan listrik, pemerintah dan pihak terkait dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan infrastruktur energi yang memadai, berkelanjutan dan dapat mendukung pembangunan wilayah secara menyeluruh. Berikut adalah proyeksi kebutuhan listrik di Kabupaten Wonosobo hingga 2045:



Tabel II. 62 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045

Kecamatan	Kondisi Tahun 2023		Proyeksi Kebutuhan Listrik									
	Penduduk (Jiwa)	MWh	2025		2030		2035		2040		2045	
			Penduduk (Jiwa)	MWh	Penduduk (Jiwa)	MWh	Penduduk (Jiwa)	MWh	Penduduk (Jiwa)	MWh	Penduduk (Jiwa)	MWh
Wadaslintang	62.790	N/A	61,658	86,321.20	66,031	92,443.40	69,912	97,876.80	73,168	102,435.20	75,892	106,248.80
Kepil	66.420	N/A	67,241	94,137.40	70,122	98,170.80	72,510	101,514.00	74,130	103,782.00	75,261	105,365.40
Sapuran	62.880	N/A	65,723	92,012.20	68,627	96,077.80	71,014	99,419.60	72,690	101,766.00	73,864	103,409.60
Kalibawang	28.400	N/A	28,002	39,202.80	29,716	41,602.40	31,222	43,710.80	32,406	45,368.40	33,363	46,708.20
Kaliwiro	53.800	N/A	53,728	75,219.20	56,517	79,123.80	58,937	82,511.80	60,702	84,982.80	62,076	86,906.40
Leksono	47.960	N/A	49,160	68,824.00	51,955	72,737.00	54,351	76,091.40	56,307	78,829.80	57,861	81,005.40
Sukoharjo	36.420	N/A	37,663	52,728.20	38,838	54,373.20	39,749	55,648.60	40,299	56,418.60	40,592	56,828.80
Selomerto	55.760	N/A	56,909	79,672.60	60,326	84,456.40	63,250	88,550.00	65,698	91,977.20	67,656	94,718.40
Kalikajar	73.780	N/A	74,027	103,637.80	79,751	111,651.40	84,805	118,727.00	89,264	124,969.60	93,014	130,219.60
Kertek	93.710	N/A	95,773	134,082.20	101,162	141,626.80	105,769	148,076.60	109,723	153,612.20	112,898	158,057.20
Wonosobo	93.880	N/A	101,282	141,794.80	105,485	147,679.00	108,853	152,394.20	111,484	156,077.60	113,341	158,677.40
Watumalang	57.460	N/A	58,106	81,348.40	60,645	84,903.00	62,701	87,781.40	64,285	89,999.00	65,408	91,571.20
Mojotengah	69.740	N/A	72,288	101,203.20	75,938	106,313.20	78,951	110,531.40	81,493	114,090.20	83,425	116,795.00
Garung	59.310	N/A	59,847	83,785.80	63,272	88,580.80	66,174	92,643.60	68,692	96,168.80	70,701	98,981.40
Kejajar	47.360	N/A	49,734	69,627.60	51,876	72,626.40	53,650	75,110.00	55,172	77,240.80	56,337	78,871.80
Total	909.660	N/A	931,141	1,303,597.40	980,261	1,372,365.40	1,021,848	1,430,587.20	1,055,513	1,477,718.20	1,081,689	1,514,364.60

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Wonosobo, 2024 (data diolah)



Data proyeksi kebutuhan listrik di Kabupaten Wonosobo pada 2025 hingga 2045 menunjukkan peningkatan yang seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Dengan menggunakan acuan standar untuk 2025-2045: Perpres No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (1.400 KWh/ per kapita atau 1,4 MWh), maka diproyeksikan pada 2025 kebutuhan listrik adalah 1.303.597,40 MWh. Pada 2030 kebutuhan listrik meningkat menjadi 1.372.365,40 MWh atau mengalami kenaikan sebanyak 5,27%. Pada 2035 kebutuhan listrik meningkat 4,24% atau berada di jumlah 1.430.587,20 MWh. Tren kebutuhan listrik semakin meningkat di 2040 mencapai 1.477.718,20 MWh atau naik 2,39%. Di 2045, kebutuhan listrik meningkat hingga 1.514.364,60 MWh atau memiliki kenaikan sekitar 2,48%.

Analisis data ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Wonosobo perlu mempersiapkan infrastruktur kelistrikan yang memadai untuk mengakomodasi kebutuhan listrik yang terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Diperlukan perencanaan yang matang dalam pengembangan sumber energi dan distribusi listrik agar dapat menjawab tuntutan kebutuhan listrik masyarakat. Selain itu, penerapan teknologi energi terbarukan juga dapat menjadi solusi untuk menjaga keberlanjutan pasokan listrik di Kabupaten Wonosobo. Kerja sama antara pemerintah daerah, perusahaan listrik dan pihak terkait lainnya menjadi krusial untuk memastikan pasokan listrik yang andal, merata dan berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan wilayah Kabupaten Wonosobo.

e. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Wonosobo

Di Kabupaten Wonosobo, proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan sangat penting untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih terjangkau, cepat dan mudah. Berikut adalah proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan di Kabupaten Wonosobo hingga 2045:

Tabel II. 63 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	909,66	931,14	980,26	1.021,85	1.055,51	1.081,69
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
1. Tempat Tidur RS (unit)	553	931	980	1.022	1.056	1.082
2. Puskesmas (unit)	24	24	29	31	40	56
3. Pustu	46	46	80	140	200	265
3. Posyandu (unit)	1.284	1.325	1.590	1.600	1.630	1.650



Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
4. BKIA/Klinik Bersalin (unit)	2	4	8	10	15	30
5. Apotek/Rumah Obat (unit)	68	72	80	84	86	90
6. Tempat Praktik Dokter	67	186	196	204	236	265
7. Dokter (orang)	129	280	350	435	540	675
8. Perawat (orang)	694	822	1.027	1.282	1.602	2.596

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Wonosobo, 2024 (data diolah)

Berdasarkan proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan di Kabupaten Wonosobo, maka proyeksi hingga 2045 mengacu pada standar tertentu. Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan pun melibatkan beberapa parameter, yaitu tempat tidur, puskesmas, posyandu, klinik bersalin, apotek, tempat praktik, dokter dan perawat.

Standar pelayanan kesehatan di Kabupaten Wonosobo untuk proyeksi pada periode 2025-2045 mengacu pada beberapa acuan yang telah ditetapkan. Pertama, standar *World Health Organization* (WHO) menetapkan rasio satu tempat tidur rumah sakit untuk setiap 1.000 penduduk. Kedua, rasio puskesmas/puskesmas pembantu diatur dengan standar 1:30.000 jumlah penduduk, di mana setiap kecamatan harus memiliki minimal satu puskesmas. Ketiga, standar SNI 03-1733-2004 menetapkan rasio posyandu sebesar 1:1.250 penduduk. Keempat, rasio BKIS/klinik bersalin, rasio apotek/rumah obat dan rasio tempat praktek dokter memiliki standar masing-masing 1:30.000, 1:30.000 serta 1:5.000 penduduk.

Selain itu, standar Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa untuk setiap 1.000 penduduk, harus tersedia satu dokter dan 2,4 perawat. Dengan mengacu pada standar tersebut, Kabupaten Wonosobo perlu memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai sesuai dengan pertumbuhan penduduk. Peningkatan infrastruktur kesehatan, pemenuhan tenaga kesehatan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi di sektor kesehatan menjadi langkah-langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pelayanan kesehatan dan standar yang telah ditetapkan.

f. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Sarana Peribadatan Kabupaten Wonosobo

Kebutuhan fasilitas sarana peribadatan di Kabupaten Wonosobo melibatkan berbagai aspek yang mencakup kebutuhan masyarakat untuk menjalankan ibadah. Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Wonosobo beragama Islam, sehingga dibutuhkan proyeksi kebutuhan fasilitas sarana peribadatan muslim. Berikut proyeksi kebutuhan fasilitas sarana peribadatan Kabupaten Wonosobo.



**Tabel II. 64 Kebutuhan Fasilitas Sarana Peribadatan
Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Sarana Peribadatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	909,66	931,14	980,26	1.021,85	1.055,51	1.081,69
Proyeksi Sarana Peribadatan						
1. Musala/Langgar (unit)	N/A	3.725	3.921	4.087	4.222	4.327
2. Masjid Warga (unit)	N/A	372	392	409	422	433
3. Masjid Lingkungan Kelurahan (unit)	N/A	31	33	34	35	36
4. Masjid Kecamatan (unit)	N/A	8	8	9	9	9
5. Sarana ibadah agama lain	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2024 dan Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Wonosobo, 2024 (data diolah)

Proyeksi kebutuhan fasilitas sarana peribadatan di Kabupaten Wonosobo menunjukkan angka yang dihitung berdasarkan standar rasio sarana peribadatan untuk 2025-2045. Dengan meningkatnya populasi, maka fasilitas sarana juga harus dapat mengimbangi peningkatan jumlah penduduk tersebut. Proyeksi kebutuhan fasilitas sarana peribadatan di Kabupaten Wonosobo mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Standar tersebut memberikan pedoman yang jelas terkait rasio sarana peribadatan yang diharapkan sesuai dengan pertumbuhan penduduk. Pertama, rasio Musala/Langgar disesuaikan dengan standar SNI 03-1733-2004, di mana satu unit musala atau langgar diharapkan untuk melayani 250 penduduk. Kedua, rasio masjid warga mengikuti standar 1:2.500 penduduk, mencerminkan proporsi yang memadai untuk tempat ibadah umum. Ketiga, standar rasio masjid lingkungan (kelurahan) ditetapkan sebanyak 1:30.000 penduduk, menunjukkan pilihan untuk menjaga keseimbangan antara jumlah warga dan sarana peribadatan di tingkat kelurahan. Keempat, rasio masjid kecamatan memiliki standar 1:120.000 penduduk, menandakan bahwa tiap kecamatan sebaiknya memiliki satu masjid untuk memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat di tingkat lebih besar. Terakhir, untuk sarana ibadah agama lain, standar menegaskan bahwa rasio tersebut bergantung pada sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, memberikan fleksibilitas dalam perencanaan sesuai dengan keragaman kepercayaan dan praktik agama di masyarakat. Keseluruhan, penggunaan standar ini dalam proyeksi kebutuhan fasilitas sarana peribadatan memastikan bahwa pelayanan spiritual dapat disediakan secara merata dan proporsional sesuai dengan pertumbuhan penduduk dan keberagaman agama di Kabupaten Wonosobo.



g. Proyeksi Kebutuhan Sarana Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga di Kabupaten Wonosobo

Proyeksi kebutuhan sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga di Kabupaten Wonosobo merupakan langkah penting dalam perencanaan pembangunan wilayah. Beberapa aspek yang mempengaruhi pentingnya proyeksi ini di antaranya

Tabel II. 65 Proyeksi Kebutuhan Sarana Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga di Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Sarana Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	909,66	931,14	980,26	1.021,85	1.055,51	1.081,69
Proyeksi Sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga						
1. Taman untuk unit RT (unit)	N/A	3725	3921	4087	4222	4327
2. Taman untuk unit RW (unit)	N/A	372	392	409	422	433
3. Taman dan lapangan olah raga untuk unit Kelurahan (unit)	N/A	31	33	34	35	36
4. Taman dan lapangan olah raga untuk unit Kecamatan (unit)	N/A	8	8	9	9	9
5. Kuburan/TPU (unit)	N/A	8	8	9	9	9

Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2024 dan Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Wonosobo, 2024 (data diolah)

Proyeksi kebutuhan sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga di Kabupaten Wonosobo didasarkan pada standar yang telah ditetapkan. Data proyeksi ini memberikan gambaran tentang kebutuhan fasilitas untuk memberdayakan ruang publik dan mempromosikan gaya hidup sehat serta rekreasi dalam komunitas. Data proyeksi dibuat dengan melihat jumlah penduduk yang semakin meningkat juga mengacu pada acuan standar untuk 2025-2045, yaitu Standar SNI 03-1733-2004. Standar ini memberikan pedoman yang sangat berguna untuk proyeksi kebutuhan sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga di Kabupaten Wonosobo dari 2025 hingga 2045. Pertama, rasio unit RT untuk menyediakan ruang hijau yang cukup di tingkat permukiman terkecil, dengan satu taman untuk setiap 250 penduduk di tingkat RT. Kedua, rasio Taman untuk unit RW yang menyoroti pentingnya ruang terbuka bersama dalam skala yang lebih besar, dengan satu taman untuk setiap 2.500 penduduk di tingkat RW. Ketiga, rasio taman dan lapangan olah raga untuk unit kelurahan



menggarisbawahi upaya untuk menciptakan fasilitas rekreasi yang lebih luas di tingkat kelurahan, dengan satu taman dan lapangan olah raga untuk setiap 30.000 penduduk. Keempat, rasio taman dan lapangan olah raga untuk unit kecamatan memberikan perhatian pada tingkat kecamatan sebagai pusat kegiatan masyarakat yang lebih besar, dengan satu taman dan lapangan olah raga untuk setiap 120.000 penduduk. Terakhir, rasio kuburan/pemakaman umum menunjukkan perencanaan pemakaman yang memadai dengan satu kuburan untuk setiap 120.000 penduduk. Dengan mengikuti standar ini, Kabupaten Wonosobo dapat menciptakan lingkungan yang sehat, hijau dan berkelanjutan bagi masyarakat.

h. Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Hunian Tidak Bertingkat)

Proyeksi kebutuhan rumah/tempat tinggal penting untuk merencanakan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo dan memastikan ketersediaan hunian yang memadai bagi populasi yang berkembang dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Berikut adalah proyeksi kebutuhan permukiman secara umum di Kabupaten Wonosobo.

Tabel II. 66 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Hunian Tidak Bertingkat) di Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045

Uraian	Proyeksi Kebutuhan Rumah Tinggal				
	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	931.141	980.261	1.021.848	1.055.513	1.081.689
Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)	186.228	196.052	204.370	211.103	216.338

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, standar hunian meliputi 1 KK terkecil rata-rata yang terdiri dari 5 orang (ayah+ibu+3 anak) dengan luas kaveling minimal untuk 1 KK (5 orang) adalah 100 m², sehingga kebutuhan lahan untuk per orang minimal 20 m². Kebutuhan luas lantai minimum dihitung sebagai berikut:

- Luas lantai utama = $(2 \times 9,6) + (3 \times 4,8) \text{ m}^2 = 33,6 \text{ m}^2$
- Luas Lantai pelayanan = $50\% \times 33,6 \text{ m}^2 = 16,8 \text{ m}^2$
- Total luas lantai = 51 m^2

Jika koefisien dasar bangunan 50%, maka luas kaveling minimum untuk keluarga dengan anggota 5 orang sesuai rumus kebutuhan kaveling minimum sebesar 100 m².

Dalam perhitungan proyeksi menggunakan satuan unit sehingga menggunakan asumsi perhitungan jumlah kepala keluarga, di mana satu



Kepala Keluarga menempati satu unit rumah. Satu keluarga berdasarkan SNI Nomor 03-1733-2004 terdiri atas 5 orang (ayah+ibu+3 anak), sehingga untuk mendapatkan jumlah kebutuhan rumah dibagi antara jumlah penduduk dengan anggota keluarga (5 orang).

Proyeksi kebutuhan rumah tinggal di Kabupaten Wonosobo akan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Agar dapat menciptakan pemukiman yang berkelanjutan, perencanaan harus mempertimbangkan berbagai hal seperti ketersediaan lahan pemukiman yang mengacu pada RTRW dan aman dari risiko seperti banjir, tanah longsor dan bencana alam lainnya; memastikan ketersediaan lingkungan yang baik dan penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, sanitasi, pengolahan sampah dan transportasi untuk mendukung kebutuhan pemukiman; kemudahan akses-akses pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, pusat belanja dan area rekreasi secara inklusif; dan merancang pemukiman yang tahan terhadap perubahan iklim.

2.6. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Bab ini akan mendeskripsikan terkait agenda pengembangan pusat pertumbuhan dan arah kebijakan kewilayahan sebagai salah satu strategi Pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Strategi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan sekaligus mengatasi ketimpangan antarwilayah. Secara lebih spesifik, agenda tersebut dapat dilihat pada uraian sebagai berikut.

2.6.1. Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah

Bagian ini ditujukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana sesuai wilayah masing-masing berdasarkan Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Menuju Indonesia Emas yang tertuang dalam Bab V RPJPN Tahun 2025-2045.

Secara makro, dalam Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045 wilayah Jawa diarahkan untuk menjadi wilayah **“Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi dan Berkelanjutan”**. Pembangunan wilayah termasuk di Pulau Jawa difokuskan pada percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang didorong dengan peningkatan konektivitas fisik dan kualitas digital.

Wilayah Jawa merupakan pulau dengan tingkat kemajuan pembangunan tertinggi di Indonesia. Aksesibilitas dan kemajuan teknologi menjadikan pariwisata sebagai salah satu potensi utama Wilayah Jawa. Provinsi Jawa Tengah dalam konstelasi wilayah Jawa memiliki peran sebagai penumpu ketahanan pangan dan rantai industri nasional.



Kebijakan pada pengembangan wilayah Jawa yang diarahkan sebagai koridor “industri berbasis, riset dan teknologi”, yang terkait dengan wilayah Kabupaten Wonosobo yaitu pengembangan Kawasan Strategis Pertanian mendukung kemandirian pangan di Citanduy-Serayu yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi pertanian guna meningkatkan nilai komoditas pertanian dan menurunkan biaya benih. Kondisi geografis dan sosiologis Kabupaten Wonosobo yang terletak di dataran tinggi memiliki potensi besar bagi pengembangan agrobisnis dan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah sehingga mempunyai peran sebagai pusat agrikultur kemandirian pangan.

Berdasarkan dokumen RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, pembangunan wilayah diarahkan pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang sesuai tata ruang wilayah untuk memadukan fungsi budi daya dan lindung. Provinsi Jawa Tengah membagi sepuluh Wilayah Pembangunan (WP) dengan mempertimbangkan karakteristik geografis, interaksi wilayah dan pembagian ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah. Wonosobo masuk dalam WP Wonobanjar bersama Kabupaten Banjarnegara. Arah pengembangan terkait pada peningkatan kualitas lingkungan hidup Dataran Tinggi Dieng dalam rangka pengendalian risiko kerusakan Daerah Aliran Sungai sebagai kawasan penyangga di sekitarnya.

Pengembangan pusat permukiman dan perekonomian diarahkan melalui pengembangan koridor kawasan perkotaan Kertek-Wonosobo-Banjarnegara-Klampok dengan mempertimbangkan fungsi antarkawasan serta upaya mitigasi bencana alam seperti gunungapi dan gerakan tanah. Dalam konteks Kabupaten Wonosobo, pusat-pusat pertumbuhan wilayah dibangun dalam rangka pemerataan pembangunan, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dan difokuskan pada pengembangan sektor industri hasil pertanian dan kehutanan. Kawasan pusat pertumbuhan yang akan dikembangkan diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan nilai tambah serta perluasan lapangan kerja dengan menerapkan ekonomi hijau. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah difokuskan pada sentra dan kawasan berbasis potensi unggulan daerah yang didukung oleh kawasan perkotaan, meliputi: 1) sentra pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan sebagai pusat produksi, 2) kawasan industri unggulan sebagai pusat pengolahan sumber daya alam, 3) kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pusat pengembangan industri dan jasa pariwisata, 4) kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan, jasa dan perdagangan.

Secara umum, arah kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dalam tahap perencanaan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pembangunan wilayah dan dinamika pasar. Dalam tahap Pembangunan, diarahkan pada: i) pembangunan sentra produksi berbasis



komoditas unggulan, kawasan industri pengolahan serta kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi dengan mempertimbangkan kesiapan lahan, keterkaitan kawasan dengan *hinterland*, serta manajemen rantai nilai dan rantai pasok, ii) percepatan pembangunan infrastruktur dalam dan luar kawasan dengan menekankan pada prinsip sinergi sumber pendanaan dari APBN dan non-APBN, iii) penyediaan SDM yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dunia usaha; dan iv) penguatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan.

2.6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Berdasarkan RTRW Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Wonosobo sesuai RTRW Tahun 2023-2043 yaitu mewujudkan “**Kabupaten Berbasis Agroindustri dan Pariwisata yang Didukung oleh Pertanian Berkelanjutan**”. Penjelasan tujuan penataan ruang Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

- a. Agroindustri merupakan kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut.
- b. Sektor Pariwisata merupakan sektor unggulan di Kabupaten Wonosobo dengan potensi pemandangan alamnya, salah satunya Dataran Tinggi Dieng serta 5 Dieng Baru (Waduk Wadaslintang, Telaga Menjer, Telaga Warna, Taman Rekreasi Kalianget dan Gunung Lanang Mergolangu)
- c. Pertanian berkelanjutan merupakan faktor utama pendukung kegiatan agrobisnis maupun agroindustri. Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) merupakan salah satu upaya konservasi lahan pertanian terhadap alih fungsi lahan.

Arah pengembangan wilayah berdasarkan RTRW Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043 terbagi menjadi dua kawasan strategis kabupaten. Kawasan strategis ini berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

Kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi tentunya akan berhubungan dengan kawasan-kawasan yang akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonosobo. Wujud dari kawasan strategis ini berupa kawasan perkotaan yang meliputi:

- a. Kawasan Perkotaan Wonosobo sebagai pusat pemerintahan dan kawasan cepat tumbuh;
- b. Kawasan Perkotaan Kertek sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis agrobisnis;



- c. Kawasan Aglomerasi Selomerto-Leksono: sebagai pusat kawasan agropolitan yaitu pengembangan pertanian, agroindustri, permukiman, serta perdagangan dan jasa;
- d. Kawasan Aglomerasi Mojotengah-Garung: merupakan pusat kegiatan sosial dan budaya, yaitu pengembangan pendidikan, pariwisata, kebudayaan dan permukiman;
- e. Kawasan Aglomerasi Sapuran-Kepil: sebagai pengembangan kawasan peruntukan industri berbasis hasil pertanian, yaitu pengembangan pertanian, agroindustri dan permukiman;
- f. Kawasan Aglomerasi Wadaslintang-Kaliwiro: sebagai pusat konservasi dan pariwisata, yaitu pelestarian lingkungan hidup dan pengembangan pariwisata.

Detail dalam perencanaan kawasan strategis didetailkan dalam Rencana Sistem Pusat Permukiman meliputi penyediaan fasilitas pelayanan umum/sosial dengan mempertimbangkan pola persebaran serta ketersediaannya. Perencanaan sistem pusat permukiman ini dibagi menjadi beberapa kategori yaitu:

a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Berdasarkan RTRW Nasional di Kabupaten Wonosobo adalah Perkotaan Wonosobo. Penetapan Perkotaan Wonosobo sebagai PKW didukung oleh pusat kegiatan jasa yang melayani skala provinsi dan menjadi simpul transportasi yang melayani skala provinsi dan beberapa kabupaten. Perkotaan Wonosobo sebagai PKW dapat berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

b. Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL)

Merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL ini merupakan kawasan perkotaan yang berpotensi sebagai pusat kegiatan industri, jasa dan transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL di Kabupaten Wonosobo adalah Perkotaan Kertek yang meliputi Kecamatan Kertek, sebagian Kecamatan Wonosobo, sebagian Kecamatan Mojotengah dan sebagian Kecamatan Kalikajar.

c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Merupakan pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan. Penentuan PPK di Kabupaten Wonosobo berdasarkan analisis jumlah penduduk, sarana prasarana dan pusat pelayanan, sehingga ditetapkan/dikelompokkan menjadi beberapa aglomerasi. PPK di Kabupaten Wonosobo dibagi menjadi empat (4) kawasan, meliputi



Kawasan Perkotaan Selomerto, Kawasan Perkotaan Mojotengah, Kawasan Perkotaan Sapuran dan Kawasan Perkotaan Wadaslintang.

d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Merupakan pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala antardesa dan sekitarnya. Analisis dalam PPL memperhatikan kondisi fisik alam yang berupa perbukitan dan lembah. PPL dibagi menjadi 16 (enam belas) pusat pelayanan lingkungan menjadi:

- a. Pusat Pelayanan Lingkungan Lancar (Kecamatan Wadaslintang)
- b. Pusat Pelayanan Lingkungan Ropoh (Kecamatan Kepil)
- c. Pusat Pelayanan Lingkungan Dempel (Kecamatan Kalibawang)
- d. Pusat Pelayanan Lingkungan Lamuk (Kecamatan Kaliwiro)
- e. Pusat Pelayanan Lingkungan Sukoharjo (Kecamatan Sukoharjo)
- f. Pusat Pelayanan Lingkungan Tlogo (Kecamatan Sukoharjo)
- g. Pusat Pelayanan Lingkungan Kembaran (Kecamatan Kalikajar)
- h. Pusat Pelayanan Lingkungan Binangun (Kecamatan Watumalang)
- i. Pusat Pelayanan Lingkungan Wonoroto (Kecamatan Watumalang)
- j. Pusat Pelayanan Lingkungan Dieng (Kecamatan Kejajar)
- k. Pusat Pelayanan Lingkungan Kejajar (Kecamatan Kejajar).

2.6.3. Rencana Pola Penggunaan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 rencana pola ruang merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota guna mengatur pemanfaatan ruang kota yang menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan/atau kegiatan alam. Hingga tahun 2023 penggunaan lahan di Kabupaten Wonosobo didominasi oleh lahan pertanian yakni sebesar 79,5% atau seluas 78.350,3 hektar. Pola penggunaan wilayah di Kabupaten Wonosobo diwujudkan dalam bentuk kawasan lindung dan kawasan budi daya serta terdapat Kawasan khusus pola ruang yang pengaturan zonasinya telah diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043.

a. Kawasan Lindung

Kawasan lindung merupakan wilayah yang telah ditetapkan sebagai fungsi utama melindungi lingkungan hidup mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Berdasarkan kondisi perwilayahan yang ada di Kabupaten Wonosobo, kawasan lindung dibedakan menjadi:

i. Badan Air

Di wilayah Kabupaten Wonosobo badan air berupa sungai, danau dan waduk yang berada di wilayah kabupaten. Meliputi telaga Menjer, Telaga Cebong, Waduk Wadaslintang, Telaga Warna, Telaga Pengilon dan 155 sungai/anak sungai dengan total panjang 873,93 km. Luas badan air secara keseluruhan di Kabupaten Wonosobo adalah kurang lebih 1.864 Ha.



ii. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di Kabupaten Wonosobo berupa kawasan hutan lindung. Kawasan ini memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah. Kawasan hutan lindung sepenuhnya diperuntukkan bagi konservasi hidro-orologis. Kabupaten Wonosobo sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6605/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2020 memiliki Kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 4.598 Ha. Berada di Kecamatan Kepil, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Kertek, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Garung dan Kecamatan Kejajar.

iii. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Wonosobo berupa sempadan sungai dan danau atau waduk. Penetapan kawasan perlindungan setempat mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Kawasan ini bertujuan untuk melindungi danau maupun waduk dari kegiatan budi daya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya. Secara keseluruhan luas dari Kawasan Perlindungan Setempat di Kabupaten Wonosobo adalah kurang lebih 2.932 Ha. Kawasan Perlindungan Setempat pada sempadan sungai tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Wonosobo sementara perlindungan terhadap kawasan sekitar danau atau waduk di Kabupaten Wonosobo meliputi daerah:

- 1) Kawasan sekitar Waduk Wadaslintang di Kecamatan Wadaslintang;
- 2) Kawasan sekitar Waduk Bener di Kecamatan Kepil;
- 3) Kawasan sekitar Telaga Menjer di Kecamatan Garung;
- 4) Kawasan sekitar Telaga Warna/ Telaga Pengilon di Kecamatan Kejajar;
- 5) Kawasan sekitar Telaga Cebong di Kecamatan Kejajar.

iv. Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi yang ada di wilayah Kabupaten Wonosobo adalah Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Kawasan suaka alam di Kabupaten Wonosobo mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6605/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta



Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2020 yaitu Cagar Alam Pantodomas di Kecamatan Sapuran dengan luasan kurang lebih 4 Ha. Kawasan pelestarian alam di Kabupaten Wonosobo mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6605/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2020 yaitu Taman Wisata Alam (TWA) di Kompleks Taman Wisata Alam Telaga Warna/ Telaga Pengilon, Kecamatan Kejajar dengan luasan kurang lebih 36 Ha.

v. Kawasan Lindung Geologi

Kawasan imbuhan air tanah di Kabupaten Wonosobo berupa kawasan imbuhan dalam kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Wonosobo. Daerah imbuhan air tanah berada di bagian utara wilayah CAT Wonosobo, dari Kecamatan Kejajar ke arah utara dan dari lereng Gunungapi Sumbing yaitu Kecamatan Kalikajar ke arah timur laut hingga puncak Gunungapi Sumbing. Total luasan keseluruhan dari Kawasan Imbuhan Air Tanah di Kabupaten Wonosobo adalah kurang lebih 5.744 Ha. Kawasan imbuhan air tanah di Kabupaten Wonosobo merupakan kawasan yang perlu dipreservasi untuk melindungi ketersediaan air tanah yang tersebar di wilayah kabupaten, meliputi Kecamatan Kepil, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Kertek, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Garung dan Kecamatan Kejajar.

b. Kawasan Cagar Budaya

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Cagar budaya di Kabupaten Wonosobo baik yang berupa bangunan, struktur, situs maupun kawasan tersebar di seluruh kecamatan. Ketentuan tentang kawasan cagar budaya mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

c. Kawasan Budi Daya

Kawasan budi daya merupakan wilayah di kabupaten yang telah ditetapkan sebagai fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Berdasarkan kondisi perwilayahan yang ada, maka kawasan budi daya yang terdapat di Kabupaten Wonosobo dapat dibedakan menjadi:



i. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi di Kabupaten Wonosobo terdiri atas hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. Mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6605/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2020, kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Wonosobo dengan luas kurang lebih 9.326 Ha meliputi Kecamatan Wadaslintang, Kecamatan Kepil, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kaliwiro, Kecamatan Leksono, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Kertek, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Garung dan Kecamatan Kejajar. Sedangkan untuk kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Wonosobo dengan luas kurang lebih 6.041 Ha meliputi Kecamatan Wadaslintang, Kecamatan Kepil, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kaliwiro, Kecamatan Leksono, Kecamatan Selomerto, Kecamatan Kalikajar dan Kecamatan Kertek.

ii. Kawasan Perkebunan Rakyat

Perkebunan rakyat di Kabupaten Wonosobo direncanakan terdapat di seluruh kecamatan dengan total luasan kurang lebih 15.044 Ha. Komoditas perkebunan rakyat di Kabupaten Wonosobo didominasi oleh tanaman kayu dan buah-buahan antara lain kayu mahoni, kayu sengon, kakao, kopi, kelapa, durian dan tanaman lainnya. Tujuan utama dari pengembangan Kawasan ini adalah untuk mengangkat harkat hidup petani dengan cara meningkatkan produksi dan pendapatan usaha tani melalui pengembangan kebun.

iii. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian di Kabupaten Wonosobo meliputi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura dan kawasan perkebunan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan pertanian. Kawasan tanaman pangan di Kabupaten Wonosobo mempunyai luasan kurang lebih 20.445 Ha meliputi Kecamatan Wadaslintang, Kecamatan Kepil, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kaliwiro, Kecamatan Leksono, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Selomerto, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Kertek, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Mojotengah dan Kecamatan Garung. Kawasan hortikultura di Kabupaten Wonosobo berada di seluruh kecamatan dengan luasan kurang lebih kurang lebih 17.014 Ha, dan kawasan perkebunan seluas kurang lebih 723 Ha di Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Kertek, Kecamatan



Wonosobo, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Garung dan Kecamatan Kejajar.

iv. Kawasan Peruntukan Industri

Daerah yang dapat dikembangkan menjadi Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Wonosobo terletak di Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Kepil, Kecamatan Kertek, Kecamatan Leksono, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Sapuran dan Kecamatan Wonosobo dengan luas total kurang lebih 221 Ha.

v. Kawasan Pariwisata

Pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Wonosobo melalui Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK), Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK). Destinasi tersebut dapat dikembangkan di daerah berikut:

- 1) destinasi pariwisata Dieng dan sekitarnya;
- 2) destinasi pariwisata Kalianget dan sekitarnya;
- 3) destinasi pariwisata Sindoro-Sumbing dan sekitarnya;
- 4) destinasi pariwisata Pantodomas dan sekitarnya;
- 5) destinasi pariwisata Serayu dan sekitarnya; dan
- 6) destinasi pariwisata Lintang Winongsari dan sekitarnya.

vi. Kawasan Permukiman

Kawasan Permukiman di Kabupaten Wonosobo ini selanjutnya akan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman pedesaan. Kawasan permukiman perkotaan merupakan kawasan permukiman yang tumbuh dan berkembang pada daerah pusat-pusat kota, baik pusat kota kabupaten maupun pusat kota kecamatan yang pengembangannya tersebar di seluruh kecamatan. Sedangkan kawasan permukiman pedesaan pada dasarnya adalah tempat tinggal yang tidak dapat dipisahkan (atau letaknya tidak boleh terlalu jauh) dengan tempat usaha sehingga direncanakan tersebar di seluruh kecamatan.

vii. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Daerah yang dapat dijadikan kawasan pertahanan dan keamanan Kabupaten Wonosobo antara lain di area latihan militer di Kecamatan Kalibawang, perkantoran militer di seluruh kecamatan dan perkantoran kepolisian di seluruh kecamatan.

d. Kawasan khusus pola ruang

Kawasan khusus pola ruang memiliki pengaturan khusus yang menempati kawasan lainnya (*overlay*) yang tersebar di wilayah Kabupaten Wonosobo.



i. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)

KP2B merupakan bagian dari Kawasan tanaman pangan yang terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B). LP2B merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan untuk menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Total luas LP2B Kabupaten Wonosobo sebesar 10.168,57 ha. Sedangkan LCP2B Kabupaten Wonosobo berupa lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar sesuai dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan di masa yang akan datang. Luas LCP2B di Kabupaten Wonosobo sebesar 9.260,43 ha.

ii. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana yang ada di Kabupaten Wonosobo meliputi kawasan rawan bencana gerakan tanah dan kawasan rawan bencana letusan gunungapi yang terbagi menjadi kerawanan tingkat tinggi dan sedang. Kabupaten Wonosobo memiliki tiga gunungapi aktif yaitu Gunung Sindoro, Gunung Sumbing dan Gunung Dieng.

iii. Kawasan Resapan Air

Perlindungan terhadap kawasan resapan air dibutuhkan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan, kebutuhan air tanah, dan penanggulangan banjir. Kawasan ini tersebar di Kecamatan Garung, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Keping, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Wonosobo dan Kecamatan Kejajar

iv. Kawasan Sempadan

Kawasan sempadan terdiri dari kawasan sempadan sungai dan sempadan mata air. Sempadan sungai berada di sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan/ kanal/ saluran irigasi primer yang memiliki manfaat untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Kawasan sempadan sungai di Kabupaten Wonosobo meliputi sub DAS yang berada di seluruh kecamatan. Sempadan mata air berfungsi untuk melindungi mata air dari kegiatan pemanfaatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya. Terdapat 49 (empat puluh sembilan) mata air dengan debit sedang-tinggi dengan radius sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter.

v. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Kawasan khusus pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Wonosobo berupa potensi kawasan peruntukan pertambangan batuan. Terdapat potensi pasir dan batu pada badan air Sungai Serayu, Sungai Bogowonto dan Sungai Begaluh.



2.7. Arah Kebijakan Transformasi

2.7.1. Transformasi Sosial

Transformasi sosial yang akan dilakukan Indonesia termasuk di dalamnya Kabupaten Wonosobo selama dua puluh tahun ke depan menuntut adanya perubahan mendasar, termasuk perubahan dalam struktur, institusi, nilai, norma dan perilaku masyarakat. Transformasi sosial akan menjadi kunci dalam menangani perubahan, sehingga masyarakat dapat mengatasi tantangan yang lebih besar dan beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan. Transformasi sosial yang hendak diwujudkan, antara lain:

- a. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat;
- b. Perbaikan kualitas lingkungan sehat di permukiman kumuh kota;
- c. Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik dan konektivitas transportasi serta sarana prasarana penanganan limbah medis;
- d. Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya;
- e. Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat ke bekerjaan tinggi;
- f. Peningkatan literasi dan edukasi melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- g. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti industri dan jasa serta keterkaitannya dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI); peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal, terutama dalam percepatan peningkatan kualifikasi angkatan kerja;
- h. Pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah melalui perlindungan sosial adaptif dan peningkatan akses layanan dasar;
- i. Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui, antara lain penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.



2.7.2. Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi merupakan tuntutan sekaligus semangat zaman. Hal tersebut secara bertahap akan mengubah struktur ekonomi Indonesia termasuk Kabupaten Wonosobo yang kini berbasis pada komoditas bernilai tambah rendah menjadi ke depannya berbasis pada industri yang bernilai tambah tinggi didukung oleh teknologi dan inovasi, sehingga lebih produktif, efisien, dan berdaya saing tinggi. Selain itu, Wilayah Jawa difokuskan sebagai koridor ekonomi “**industri berbasis inovasi, riset dan teknologi**” yang diwujudkan melalui sejumlah kebijakan, seperti:

- a. Pengembangan industri jasa bernilai tambah tinggi dan industri berbasis inovasi, riset dan teknologi, seperti pertanian;
- b. Pengembangan pariwisata dengan konsep ekowisata yang diarahkan pada wilayah Jawa bagian Selatan yang memiliki karakteristik wisata agro dan bentang alam. Konsep Hub Kebudayaan dan industri kreatif juga perlu diadopsi dalam pengembangan pariwisata melalui penyelenggaraan *Meeting, Incentives, Conferences, and Exhibitions* (MICE) di wilayah-wilayah perkotaan;
- c. Pengembangan kawasan strategis pariwisata yang mengedepankan atraksi yang unik, serta amenitas, aksesibilitas dan *ancillary* yang baik antara, lain pada kawasan strategis pariwisata Magelang-Yogyakarta-Solo integrasi *cultural and heritage tourism, ecotourism* dan industri/ekonomi kreatif;
- d. Pengembangan sentra produksi pangan yang dilakukan secara kolektif antarwilayah, peningkatan produksi pangan lokal melalui pengembangan teknologi pertanian yang modern dan efisien, serta pemberian insentif dan dukungan bagi petani untuk menggunakan teknologi dan inovasi pertanian yang ramah lingkungan;
- e. Peningkatan *upskilling* dan *reskilling* SDM terkait industri, jasa, pariwisata dan pertanian, serta kemampuan digital; dan
- f. Peningkatan kapasitas tenaga kerja terampil, perluasan akses teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dan meningkatkan peluang lapangan kerja digital.

Kemudian, pembangunan juga dilakukan pada sektor ketenagalistrikan yang didasarkan pada keseimbangan regional dengan cara:

- a. Mengembangkan jaringan transmisi dan distribusi energi yang modern dan efisien (*smart grid*) untuk menghubungkan sistem energi terbarukan di Wilayah Jawa serta memastikan pasokan energi listrik yang stabil dan berkelanjutan;
- b. Meningkatkan fleksibilitas sistem ketenagalistrikan untuk mengadopsi energi terbarukan bervariasi (*variable renewable energy/VRE*) lebih banyak;
- c. Mengembangkan interkoneksi antarwilayah; dan



- d. Mendorong akses dan kualitas layanan untuk mendukung transportasi publik dan kendaraan pribadi berbasis listrik dalam rangka mengurangi dan memberhentikan penggunaan energi fosil.

Selain itu, pembangunan ekosistem digital juga perlu dilaksanakan dalam upaya mendorong transformasi digital yang mencakup, antara lain:

- a. Penuntasan dan penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan *broadband* hingga menjangkau ke seluruh pelosok;
- b. Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis; dan
- c. Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital *skill* (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, tinggi dan kepemimpinan digital).

2.7.3. Transformasi Tata Kelola

Transformasi tata kelola merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel dan didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum. Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel, sehingga mampu menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui sejumlah kebijakan, seperti:

- a. Optimasi regulasi termasuk proses pra regulasi yang memadai di daerah;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat;
- c. Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat;
- d. Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN dan pengelolaan aset daerah;
- e. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital;
- f. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan antikorupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi perizinan berbasis digital; dan
- g. Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.



2.7.4. Arah Kebijakan Landasan Transformasi

a. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

Keberhasilan transformasi secara holistik di level pusat maupun daerah perlu ditopang oleh penciptaan supremasi hukum, demokrasi substansial, keamanan nasional, stabilitas ekonomi, serta diplomasi tangguh sebagai faktor pendukung. Arah kebijakan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia diarahkan untuk:

1. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal;
2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif terutama KPBU, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; dan
3. Penguatan pengendalian inflasi daerah.

b. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Ketahanan sosial budaya dan ekologi merupakan ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan sekitarnya untuk bertahan dan menjaga keseimbangan dalam menghadapi berbagai dinamika perubahan agar daya dukung dan daya tampung lingkungan terus terjaga secara berkelanjutan dan setiap individu dapat hidup berkualitas dan berkontribusi dalam Pembangunan. Ketahanan sosial budaya dan ekologi di Kabupaten Wonosobo yang kokoh akan menjadi landasan penting guna mewujudkan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola. Arah kebijakan ketahanan sosial budaya yang dapat diadopsi oleh Kabupaten Wonosobo meliputi:

1. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama;
2. Revitalisasi kearifan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat Wilayah Jawa;
3. Pelestarian berbagai kebudayaan lokal di Wilayah Jawa melalui program pelatihan dan peningkatan literasi budaya, pameran seni dan budaya, serta memberikan dukungan bagi pelaku seni dan budaya lokal untuk mendorong inklusivitas;
4. Pendayagunaan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui hub kebudayaan dan industri kreatif untuk memperkuat warisan budaya dan ekspresi budaya serta memajukan perekonomian lokal di Wilayah Jawa;
5. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal;



6. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang;
7. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; serta
8. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan wilayah Jawa.

Selain itu, terdapat arah kebijakan ekologi yang akan ditujukan pada pengendalian polusi, penguatan kebijakan lingkungan, peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, serta peningkatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana.

1. Peningkatan pemantauan kualitas pengelolaan lingkungan hidup
2. Diversifikasi produk pangan melalui pengembangan pertanian organik, perikanan yang berkelanjutan dan pengolahan makanan olahan yang sehat dan berkualitas untuk mencapai kemandirian pangan;
3. Peningkatan ketersediaan air dan pengelolaan sumber daya air yang efisien;
4. Penerapan tata ruang permanen kawasan sentra produksi pangan untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian;
5. Mendorong inovasi dan penelitian dalam teknologi *clean energy* untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem energi terbarukan melalui pemberian insentif dan dukungan bagi para pengembang teknologi energi terbarukan;
6. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan energi terbarukan melalui kampanye sosialisasi dan edukasi;
7. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah pemanfaatan hutan, kesatuan lanskap yang ramah kaum rentan;
8. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung;
9. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana tsunami pada zona megathrust di pesisir Selatan Wilayah Jawa, termasuk mitigasi risiko pada wilayah perkotaan;
10. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi; dan



11. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam pemenuhan energi di wilayah Jawa.

Selain itu, terdapat juga arah kebijakan yang mendukung sumber daya air terpadu dan akan diwujudkan melalui:

1. Pembangunan bendungan baru untuk menunjang agenda modernisasi irigasi dan mempercepat transisi energi bersih di Wilayah Jawa dengan memanfaatkan sumber pendanaan Non-Rupiah Murni;
2. Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai;
3. Normalisasi Sungai yang melintas di tengah perkotaan;
4. Penerapan kebijakan Zero Delta Q; dan
5. Pemanfaatan prasarana publik sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir.

2.7.5. Kerangka Implementasi Transformasi

a. Agenda Kewilayahan dan Sarana Prasarana

Agenda percepatan pembangunan wilayah dan agenda sarana prasarana meliputi:

- a. Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Jawa;
- b. Penuntasan RDTR Kabupaten Wonosobo;
- c. Penguatan Pelabuhan Tanjung Emas (Jawa Tengah) sebagai pelabuhan logistik utama;
- d. Optimalisasi dan pengembangan bandara utama di Yogyakarta *International Airport*, Kulon Progo, DIY dan Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah.
- e. Pembangunan kereta antarkota serta pengembangan kereta angkutan barang terpadu dengan pengembangan Kawasan dan fasilitas antarmoda;
- f. Penurunan ketimpangan antara desa-kota dan wilayah utara-selatan di Wilayah Jawa terutama melalui peningkatan konektivitas antarwilayah;

Selain itu, wilayah Jawa juga memiliki tantangan besar dalam pengembangan sarana dan prasarana, yaitu layanan infrastruktur dasar yang belum menyeluruh dan masih terbatas. Dengan begitu, diperlukan peningkatan aksesibilitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar di wilayah Jawa. Arah kebijakan dalam penyediaan berbagai sarana dan prasarana dasar lainnya dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Pemenuhan rumah layak huni yang disesuaikan dengan karakteristik daerah dan kepadatan;



- b. Optimalisasi lahan;
- c. Peremajaan kota;
- d. Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif sesuai karakteristik daerah;
- e. Penyediaan air siap minum dari keran melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan;
- f. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga; dan
- g. Peningkatan komitmen daerah pada penyediaan layanan pengelolaan dan pemilahan sampah yang terpadu sejak dari sumber dengan target 100 persen sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi ekonomi sirkular serta sampah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis.

b. Kestinambungan Pembangunan

Kestinambungan pembangunan di Kabupaten Wonosobo merupakan hal yang penting dalam memastikan konsistensi dalam satu masa dan antarperiode pemerintahan terutama dalam menghadapi berbagai dinamika dan beragam perubahan sosial-politik yang mendasar serta memerlukan penguatan implementasi yang ditunjang oleh pembiayaan pembangunan. Kebijakan kestinambungan pembangunan yang dimaksud meliputi:

- a. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah;
- b. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW;
- c. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional;
- d. Penguatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko;
- e. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan; dan
- f. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*.



BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Masalah pembangunan merupakan kondisi ketidakseimbangan antara apa yang telah dicapai dalam proses pembangunan saat ini dengan target yang telah direncanakan, serta kesenjangan antara aspirasi untuk masa depan dengan kondisi aktual saat proses perencanaan dilakukan. Bertolak dari berbagai *gap* tersebut, dapat diidentifikasi sejumlah masalah dan isu strategis yang penting untuk pembangunan daerah dalam rentang waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. Permasalahan pembangunan daerah mencakup aspek geografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing, serta pelayanan umum.

Bab ini didasarkan pada analisis terhadap dokumen kebijakan terkait, data survei terhadap pelaku pembangunan dan pemangku kebijakan, evaluasi pencapaian kinerja pembangunan Kabupaten Wonosobo selama 20 (dua puluh) tahun terakhir.

3.1.1. Permasalahan Pembangunan dari Aspek Geografi

a. Belum Optimalnya Kualitas Lingkungan Hidup

- Gambaran kondisi kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Capaian IKLH Kabupaten Wonosobo tahun 2023 mencapai nilai 68,12 (angka non konversi). Angka ini masih di bawah capaian Jawa Tengah yang telah mencapai 68,59 dan juga masih dibawah capaian IKLH nasional sebesar 72,54. Komponen parameter yang menyebabkan capaian IKLH belum optimal yaitu rendahnya kualitas tutupan lahan (47,92). Tutupan lahan ini dihitung dari tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan dengan rincian tutupan vegetasi hutan, belukar, belukar, belukar rawa, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan hasil Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Rendahnya tutupan vegetasi *non* hutan diindikasikan dari kenampakan pola budi daya pertanian hortikultura pada lereng gunung/perbukitan yang tidak dilengkapi dengan pohon tegakan yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan resapan air/imbunan air tanah. Tutupan lahan yang baik akan mendukung proses peresapan air hujan ke dalam tanah dan mengendalikan banjir.
- Parameter IKLH yang masih menjadi permasalahan di Kabupaten Wonosobo yaitu kualitas air yang tercermin dari nilai indeks kualitas air (IKA). Hasil uji kualitas air di Kabupaten Wonosobo menunjukkan Indeks Kualitas Air (IKA) yang terukur mengalami fluktuasi. Namun, hasil perhitungan IKA di Kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 50,78 menjadi



52,50 tahun 2023. Meskipun terjadi peningkatan, namun indeks kualitas air masih dalam kategori “kurang baik”. Rendahnya IKA ini juga dipengaruhi oleh zat pencemar. Berdasarkan data pemantauan kualitas air, salah satu parameter yang berada di atas ambang batas yaitu *fecal coliform* dan *total coliform*. Parameter ini ditemukan jika tubuh air terkontaminasi limbah kotoran hewan dan/atau manusia. Limbah kotoran hewan diindikasikan dari kegiatan peternakan yang belum dilengkapi IPAL, atau dari residu penggunaan pupuk kotoran ayam (CM/ *Chicken Manure*) pada budi daya pertanian hortikultura yang terbawa aliran air. Kontaminasi dari limbah manusia berasal dari pembuangan saluran air limbah domestik yang tidak dilengkapi septictank/IPAL. Secara umum, kondisi sungai juga diperburuk dengan pembuangan sampah padat dan cair pada badan sungai. Hal ini juga menjadikan belum optimalnya kualitas air karena salah satunya tercemar dengan adanya sampah. Sampah yang tidak dikelola akan mengancam pencemaran tubuh air (sampah anorganik yang terbawa aliran sungai), bahkan air lindi (cairan hasil dari percampuran air hujan dengan sampah di tempat pembuangan akhir) akan mencemari tubuh air. Masih terdapat badan air yang memiliki pencemar melebihi nilai ambang batas. Contohnya nilai *Biological Oxygen Demand* (BOD) di Telaga Menjer yang berasal dari sektor pertanian, budi daya ikan dan wisata.

- Belum optimalnya pengelolaan sampah masih menjadi permasalahan penting di Kabupaten Wonosobo. Kinerja pengelolaan persampahan mengalami fluktuatif selama 5 (lima) tahun terakhir. Terdapat peningkatan capaian meskipun belum terlalu signifikan. Persentase sampah yang terkelola mengalami peningkatan dari 48,68% menjadi 50,63%. Meskipun capaiannya belum optimal, masih di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah yang sudah mencapai 59,15%. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di tingkat desa dan regional wilayah pengembangan menjadi hambatan dalam pengelolaan persampahan secara sistemik dari hulu ke hilir. Pengelolaan persampahan meliputi upaya pengurangan dan penanganan sampah. Penanganan sampah meliputi pemilahan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Dari sisi pengurangan sampah pun masih belum optimal ditandai dengan pengurangan sampah baru mencapai 14,9%. Upaya penanganan sampahpun baru mencapai 35,73% pada tahun 2023. Hingga tahun 2023 Kabupaten Wonosobo baru memiliki 22 TPS 3R (8,3% dari jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Wonosobo), dengan



kondisi ini timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah baru mencapai 9,53% atau sebanyak 12.661,93 ton dan timbulan sampah yang belum terolah sebesar 120.149,01 ton (90,47%).

- Terdapat kecenderungan peningkatan mata air yang rusak atau menurun debitnya. Pada tahun 2023 terdapat 12,07% mata air yang rusak dan menurun debitnya. mata air menjadi sumber air baku untuk air minum bagi penduduk di Kabupaten Wonosobo.
- Masih terbatasnya upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Potensi penurunan emisi gas rumah kaca yang tercatat di aplikasi AKSARA baru sebesar 7.080 TonCO₂eq. Masih perlu peningkatan aksi Kabupaten Wonosobo dalam mengatasi perubahan iklim dan mendukung pencapaian Indonesia *Net Zero Emission* di masa mendatang.
- Tingginya erosi dan sedimentasi yang disebabkan oleh pola budi daya pertanian hortikultura yang tidak ramah lingkungan.
- Belum optimalnya pengelolaan persampahan. Rantai pengelolaan persampahan yang masih bertumpu pada kumpul-angkut-buang dan minimnya upaya pengurangan menyebabkan tingginya timbulan sampah yang berakhir di TPA. TPA Wonorejo yang saat ini merupakan satu-satunya yang ada di Kabupaten Wonosobo mengalami kelebihan kapasitas sehingga perlu direvitalisasi. Permasalahan lainnya terkait persampahan yaitu kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana persampahan, terbatasnya opsi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- Masih rendahnya upaya pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3 menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pengelolaan limbah B3. Limbah B3 yang bersumber dari rumah tangga masih tercampur dengan sampah rumah tangga. Untuk limbah B3 yang berasal dari sebagian besar fasilitas layanan kesehatan telah mengelola limbah B3 dengan cara mengirimkan ke fasilitas pengolahan limbah B3 yang berada di luar kota. Saat ini baru mencapai 19,6% kegiatan usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3.
- Masih terbatasnya akses sanitasi layak dan aman. Hal ini dilihat dari capaian akses sanitasi layak dan aman yang masih rendah



dan belum merata. Pada Tahun 2023 akses sanitasi layak dan aman di Kabupaten Wonosobo sebesar 1,69%.

b. Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang

Pengelolaan tata ruang adalah aspek krusial dalam pembangunan berkelanjutan suatu daerah. Namun, beberapa tantangan masih dihadapi, yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus.

- Adanya tekanan kebutuhan lahan yang terus meningkat. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi, kebutuhan akan lahan terus meningkat sehingga dapat mengganggu kesesuaian lahan. Belum optimalnya kesesuaian lahan ini, tercermin dengan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Tahun 2023 sebesar 84,13%, sehingga perlu adanya upaya untuk menjaga kebutuhan lahan. Langkah yang dilakukan dengan tetap menjaga peruntukan lahan sesuai dengan tata ruang, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang belum. Saat ini, pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum terintegrasi dengan baik. Ketidaktepatan dalam penataan ruang dan pengawasan pemanfaatan lahan dapat mengakibatkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, merusak lingkungan dan menghambat pengembangan wilayah secara keseluruhan.
- Respons terhadap dampak negatif dari penataan ruang yang tidak optimal. Penataan ruang yang tidak optimal turut berdampak negatif pada berbagai aspek pengembangan wilayah, termasuk kerusakan lingkungan, konflik penggunaan lahan dan inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Hal ini dapat menghambat pembangunan berkelanjutan dan merugikan masyarakat setempat.
- Belum optimalnya upaya meningkatkan koordinasi dan pengawasan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan koordinasi dan pengawasan dalam penataan ruang.
- Belum optimalnya mekanisme pengawasan yang integratif. Mengembangkan mekanisme pengawasan yang terintegrasi sangat penting untuk memastikan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- Belum optimalnya penataan kawasan perkotaan. Hal ini ditandai dengan adanya kemacetan di beberapa titik pada saat tertentu dan parkir yang belum tertata dengan baik.



c. Kerusakan Lingkungan yang Berisiko terhadap Bencana

- Secara umum, Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Wonosobo mengalami perubahan dari kategori sedang (kurun waktu 2018-2022) ke tinggi pada 2023. Meskipun mengalami tren positif namun dari sisi kerentanan cenderung mengalami kenaikan sehingga perlu didukung dengan peningkatan resiliensi (ketangguhan bencana). Dari sisi kerawanan bencana, topografi Kabupaten Wonosobo yang curam dengan kemiringan hingga mencapai 40% menjadi faktor yang mempersulit upaya mitigasi bencana, memperbesar risiko terhadap longsor dan banjir.
- Kurangnya sarana dan prasarana mitigasi bencana adalah permasalahan yang perlu diatasi di Kabupaten Wonosobo, terutama dengan mempertimbangkan kondisi topografi dataran tinggi dan konektivitas yang belum baik.

3.1.2. Masalah Pembangunan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

- Dari 2005 hingga 2023, tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Tengah dan rata-rata nasional. Puncak selisih persentase terjadi pada 2006, dengan selisih 12,24% dari Provinsi Jawa Tengah dan 16,68% dari tingkat nasional. Meskipun demikian, data yang diuraikan per lima tahun dari 2005 hingga 2020 menunjukkan tren penurunan yang positif: 31,68% (2005), 23,15% (2010), 21,45% (2015) dan 17,36% (2020). Pada Tahun 2023, angka kemiskinan turun lebih lanjut menjadi 15,58%.
- Masalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Wonosobo, walaupun persentasenya fluktuatif dan cenderung menurun, angkanya selalu lebih baik dibandingkan Jawa Tengah dan nasional. Namun, apabila dibandingkan dengan nilai TPT kabupaten tetangga se-eks Karesidenan Kedu, nilai TPT Kabupaten Wonosobo lebih tinggi.
- Penduduk Kabupaten Wonosobo belum cukup produktif dalam menghasilkan nilai tambah, terbukti dari PDRB per kapita yang hanya 88% dari PDRB per kapita Jawa Tengah. Ini menunjukkan tingkat kesejahteraan di Kabupaten Wonosobo belum setara dengan tingkat provinsi maupun nasional.
- Ketimpangan antar pendapatan di Kabupaten Wonosobo dalam kategori sedang, dengan nilai Indeks Gini 0,365 (Tahun 2023). Angka menunjukkan bahwa 40% penduduk pendapatan terendah hanya menikmati 51% dari total PDRB.



- Ketimpangan di Kabupaten Wonosobo lebih rendah dari nasional. Pada periode 2007-2010, Indeks Gini di bawah 0,35 (kategori rendah). Namun, setelahnya hingga 2023, mengalami tren kenaikan dan stabil di kategori sedang. Faktor-faktor yang mempengaruhi rasio gini yang berada pada kategori sedang antara lain, ketidaksetaraan akses pendidikan dan kesehatan, kesenjangan kualifikasi SDM, akses ke pasar tenaga kerja, serta ketidaksetaraan pendapatan.
- Terkait struktur ekonomi, meskipun tren kontribusinya menurun, sektor pertanian tetap menjadi pilar utama ekonomi Kabupaten Wonosobo, menyumbang 30% PDRB per tahun. Selain itu, sektor perdagangan juga berkontribusi sebesar 16,9% per tahun pada periode 2010-2023. Namun, perhatian serius diperlukan terhadap tren penurunan sektor primer dan stabilnya kontribusi sektor tersier, karena keterkaitan keduanya penting untuk mendukung visi Kabupaten Wonosobo yang mengunggulkan agrobisnis.
- Aspek kesejahteraan sosial dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ketika disandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, level Kabupaten Wonosobo memiliki tren IPM lebih rendah. Skor IPM Kabupaten Wonosobo turun ketika pandemi Covid-19 melanda. Ini mengindikasikan pentingnya pengembangan skema-skema kebijakan yang memperkuat fondasi keberdayaan ekonomi serta kebijakan sosial agar ketika krisis serupa terjadi di masa depan, daya tahan capaian kualitas pendidikan, kesehatan dan kehidupan yang layak dapat dipertahankan.
- Selain itu, masih terjadi gap antara capaian pembangunan SDM perempuan dan laki-laki, yang menyebabkan ketidaksetaraan gender. Sebagai parameter yang memudahkan pemahaman, Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang berguna untuk membandingkan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara perempuan dan laki-laki. Selama periode 2012-2023, kendati terjadi peningkatan IPG sebesar 1,5 poin, dalam hulu masalah dari ketimpangan gender yang bersifat struktural dan kultural membutuhkan intervensi kebijakan dan program yang berkelanjutan. Ini penting agar isu ketidaksetaraan dalam mengakses pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, hingga masih adanya tindakan kekerasan dalam keluarga.



3.1.3. Permasalahan Daya Saing Daerah

Permasalahan Kabupaten Wonosobo berdasarkan aspek daya saing daerah adalah sebagai berikut:

a. Daya Saing Ekonomi Daerah Belum Optimal

Berdasarkan pilar-pilar pembentuk daya saing ekonomi daerah tampak bahwa secara umum ukuran pasar yang besar dan keterbukaan pasar produk menjadi keunggulan dari daya saing ekonomi Kabupaten Wonosobo. Ukuran pasar yang besar didominasi oleh sektor industri pengolahan, sektor pertanian dan sektor perdagangan sebagai sektor unggulan. Meskipun demikian sektor-sektor unggulan tersebut masih memiliki tantangan dalam pengembangannya antara lain:

- Permasalahan di sektor pertanian antara lain masih minimnya pemanfaatan teknologi dan inovasi serta penggunaan alat-alat pertanian modern dalam proses produksi, masih tingginya biaya produksi pertanian, minimnya kapasitas dan kompetensi petani, masih lambatnya regenerasi petani, serta adanya alih fungsi lahan pertanian.
- Permasalahan di sektor industri pengolahan antara lain rendahnya nilai tambah produk dan kapasitas produksi terutama dari industri kecil dan menengah (UKM), akses pasar yang masih terbatas, lemahnya kapasitas dan kompetensi pelaku usaha kecil dan menengah, masih minimnya kemitraan usaha, masih minimnya digitalisasi, serta masih perlunya pembiayaan/modal terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
- Permasalahan di sektor perdagangan yaitu belum optimalnya ekspor produk unggulan daerah sehingga masih diperlukan intervensi kebijakan dalam pengendalian harga dan sistem distribusi perdagangan
- Permasalahan di sektor pariwisata antara lain masih rendahnya kontribusi pendapatan sektor pariwisata yaitu hanya menyumbang 5,98% masih belum maksimalnya pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, masih minimnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, belum maksimalnya lama tinggal wisatawan yaitu 1,86 hari.
- Permasalahan pangan antara lain produksi pangan seperti padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar mengalami penurunan mulai tahun 2019, dari 423.288 ton menjadi 234.352 ton pada tahun 2023; meskipun nilai IKP Kabupaten Wonosobo sudah dalam kondisi baik namun ada kecenderungan angkanya menurun. Disamping itu



prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Wonosobo nilainya masih dalam kategori sedang dan nilainya lebih rendah nilai provinsi dan nasional.

b. Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Belum Optimal

- Pembangunan kesehatan yang tercermin dalam angka harapan hidup Kabupaten Wonosobo sudah cukup tinggi yaitu di angka 74,01 yang didukung dengan rendahnya angka kematian ibu yang menjadi faktor penopang daya saing SDM di Kabupaten Wonosobo. Meskipun dalam kategori tinggi, angka harapan hidup di Kabupaten Wonosobo masih di bawah angka provinsi dan nasional dengan meningkatnya angka kematian bayi di 5 (lima) tahun terakhir.
- Dari aspek keterampilan, Kabupaten Wonosobo masih memiliki tantangan yang besar terutama terhadap kualitas tenaga kerja yang siap memasuki pasar tenaga kerja. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah, rendahnya tingkat keterampilan lulusan serta sulitnya menemukan pekerja terampil akan menjadi permasalahan daya saing SDM Kabupaten Wonosobo. Masih perlu dilakukan peningkatan kualitas pendidikan, memastikan semua anak usia sekolah untuk bersekolah, memberikan kemudahan akses layanan pendidikan serta meningkatkan mutu pendidikan agar mampu menjawab kebutuhan pasar kerja dengan peningkatan kecakapan hidup, *soft skill*, kompetensi dan kemampuan keterampilan bagi tenaga kerja.

c. Daya Saing Infrastruktur yang Masih Rendah

- Ketersediaan infrastruktur menjadi pendukung penting dalam aktivitas perekonomian dan peningkatan produktivitas daerah, terutama terkait aspek distribusi barang dan jasa. Dilihat dalam perspektif daya saing daerah, infrastruktur Kabupaten Wonosobo tergolong rendah, terutama dilihat dari kualitas jalan (masih rendahnya jalan dalam kondisi baik). Beberapa wilayah kecamatan merupakan titik rawan longsor sehingga perlu dibangun infrastruktur jalan yang tangguh bencana.
- Secara khusus, kualitas layanan transportasi yang mendukung semua aktivitas pembangunan masih belum optimal. Hal ini dilihat dari kualitas layanan transportasi tersebut meliputi peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antardesa dan antarkecamatan, penghubung koridor prioritas, peningkatan keselamatan dan kelancaran perjalanan, serta peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum dan angkutan sungai danau dan penyeberangan



(ASDP) dalam hal ini berupa angkutan danau di Waduk Wadaslintang.

- Keterbatasan akses rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau. Pada tahun 2023 akses hunian layak baru mencapai 47,56%.
- Masih rendahnya jalan berkeselamatan di Kabupaten Wonosobo. Jalan status kabupaten di Kabupaten Wonosobo belum ada yang memenuhi standar minimal 60% dilengkapi fasilitas kelengkapan jalan seperti marka, rambu dan lain-lain. Adanya jalan berkeselamatan akan menjaga kendaraan tetap berada di jalurnya dengan selamat. Hal ini nantinya juga akan mengurangi angka fatalitas kecelakaan terutama pada Daerah Rawan Kecelakaan (DRK).
- Belum optimalnya tingkat kemajuan desa yang ditandai dengan rendahnya jumlah desa mandiri di Kabupaten Wonosobo meskipun sudah tidak ada lagi desa tertinggal. Sampai dengan tahun 2023, desa di Kabupaten Wonosobo sebagian besar masih dalam kategori maju dan 11% masih dalam kategori berkembang. Dengan melihat tingkat perkembangan desa tersebut, masih ada permasalahan ketimpangan pembangunan antar desa yang tentunya berpengaruh pula terhadap tingkat ketimpangan desa dan kota baik dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar yang mendukung perekonomian desa maupun kualitas SDM.

d. Daya Saing Iklim Investasi Masih Rendah

- Daya saing iklim investasi dalam perspektif Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya aspek institusi, adopsi teknologi informasi dan komunikasi, serta stabilitas ekonomi makro. Kondisi keamanan, kebijakan pemerintah, norma perilaku yang mempengaruhi pelaku ekonomi, kinerja instansi pemerintah, adopsi teknologi informasi serta pertumbuhan ekonomi sangat mempengaruhi keputusan untuk berinvestasi di suatu daerah.
- Dilihat dari kondisi keamanan, kinerja pemerintah serta pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo yang cenderung naik serta kapasitas fiskal daerah yang cukup baik menjadi faktor pendorong iklim investasi. Disisi lain, tingkat pengangguran terbuka yang masih cukup tinggi (4,95) serta belum efisiennya penggunaan investasi ditandai dengan tingginya nilai ICOR (4,24).
- Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagai salah satu indikator ekonomi yang menunjukkan nilai total investasi



dalam suatu wilayah pada periode tertentu terhadap PDRB masih berkisar pada angka 2,5 Triliun rupiah atau kurang lebih 20% dari PDRB. Meskipun nilai PMTB bertambah namun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir persentase PMTB cenderung menurun.

3.1.4. Aspek Pelayanan Umum

- Tren capaian indeks reformasi birokrasi masuk kategori “Baik”. Skor selama lima tahun terakhir adalah 66,88 (2019), 66,17 (2020), 67,35 (2021), 66,42 (2022) dan 67,00 (2023). Kendati fluktuatif, namun capaian ini belum meningkat ke predikat “sangat baik” (70-80) dan masih belum optimal karena berada di bawah capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah yang sudah mencapai nilai 83,13 (Sangat Baik).
- Indeks profesionalitas ASN yang mengukur kualitas ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan masih berada di level “rendah” pada tahun 2023, dengan skor 62,65 dari nilai maksimal 100. Komponen kompetensi menjadi penyumbang terbesar rendahnya capaian indeks profesionalitas ASN.
- Capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih belum optimal, berada pada nilai 3,54. Masih diperlukan perbaikan terutama pada domain kebijakan, tata kelola dan manajemen SPBE.
- Masih rendahnya Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023 yaitu nilai 32,2 dengan kriteria C (buruk).
- Rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan di Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu lima tahun masih berada pada kisaran 14%.
- Bidang pendidikan masih terdapat gap yang perlu dipenuhi antara kondisi sekarang dan proyeksi dua puluh (20) tahun ke depan agar semua anak usia sekolah dapat terakses pendidikan secara mudah, terjangkau serta kualitas yang sama. Jumlah siswa PAUD, SD/ sederajat dan SMP/ sederajat diproyeksikan meningkat dari 15.010, 66.758 dan 28.640 siswa pada 2025 menjadi 16.060, 85.522 dan 43.913 siswa pada 2045. Jumlah sekolah juga meningkat dari 356 PAUD, 461 SD/ sederajat dan 103 SMP/ sederajat pada 2025 menjadi 319 PAUD, 351 SD/ sederajat dan 125 SMP/ sederajat pada 2045. Pertumbuhan penduduk usia sekolah yang dinamis dan berbeda antarkecamatan akan



berdampak pada pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, dengan proyeksi kebutuhan guru pada 2045 mencapai 966 untuk PAUD, 4.226 untuk SD dan 2.197 untuk SMP, naik dari proyeksi 2025 yaitu 3.931 guru SD dan 1.794 guru SMP.

- Dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, kebutuhan fasilitas dan tenaga kesehatan diproyeksikan akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, sehingga secara bertahap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan perlu direncanakan. Pemenuhan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan juga perlu dengan memperhatikan struktur dan sebaran penduduk agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau semua wilayah dan semua masyarakat dapat terlayani sesuai kebutuhannya secara inklusif.



3.2. Isu Strategis

Identifikasi isu strategis Kabupaten Wonosobo, pertimbangan utama dilakukan dengan memperhatikan tantangan lingkungan strategis baik di level global, nasional, maupun provinsi, serta potensi yang relevan dengan pembangunan daerah dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Isu-isu tersebut menjadi titik fokus dalam merumuskan isu-isu strategis di daerah.

Tabel III. 1 Isu Strategis Global, Nasional, Provinsi dan Daerah

Isu Global SDGs	Isu Nasional (RPJPN)	Isu RPJPD Jawa Tengah	Isu KLHS RPJPD Wonosobo 2025-2045
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemiskinan; 2. Pangan dan Gizi; 3. Kesehatan; 4. Pendidikan; 5. Gender; 6. Air bersih dan sanitasi; 7. Energi; 8. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; 9. Infrastruktur; 10. Kesenjangan Kota dan Permukiman; 11. Produksi dan konsumsi berkelanjutan; 12. Perubahan iklim; 13. Sumber daya kelautan; 14. Ekosistem daratan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produktivitas rendah; 2. IPTEKIN dan riset lemah; 3. Deindustrialisasi dini; 4. Pariwisata di bawah potensinya; 5. Ekonomi laut belum optimal; 6. Kontribusi UMKM dan koperasi kecil; 7. Infrastruktur dan literasi digital rendah; 8. Pembangunan belum berkelanjutan; 9. Integrasi domestik terbatas; 10. Kualitas SDM yang makin rendah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan; 2. Ketahanan pangan yang berkelanjutan; 3. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; 4. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana; 5. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesejahteraan masyarakat yang aman, berkeadilan, inklusif dan berkelanjutan; 2. Daya saing dan kualitas SDM yang adaptif dan berkelanjutan; 3. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tanggap perubahan iklim dan tangguh bencana secara berkelanjutan; 4. Peningkatan aktualisasi penataan dan pemanfaatan ruang; 5. Implementasi infrastruktur merata, ramah lingkungan, berketahanan iklim dan berkelanjutan yang belum optimal;



Isu Global SDGs	Isu Nasional (RPJPN)	Isu RPJPD Jawa Tengah	Isu KLHS RPJPD Wonosobo 2025-2045
15. Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan dan membangun kelembagaan; 16. Kemitraan global.	11. Tata kelola pemerintahan belum optimal; 12. Kepastian dan penegakan hukum masih lemah; 13. Demokratisasi belum optimal; 14. Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa.	6. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat; 7. Tata kelola pemerintahan yang dinamis.	6. Akselerasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan adaptif terhadap teknologi 7. Produktivitas daerah yang belum optimal untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.



3.2.1. Isu Strategis Daerah

Perumusan isu-isu strategis dalam perencanaan jangka panjang Kabupaten Wonosobo dilakukan dengan merujuk pada evaluasi isu-isu global, nasional, provinsi dan KLHS serta tinjauan dokumen evaluasi atas RPJPD periode sebelumnya. Selain itu, proses ini melibatkan diskusi kelompok terfokus (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta pengamatan langsung di lapangan.

Berpedoman pada isu strategis di atas, potensi serta permasalahan di Kabupaten Wonosobo dalam mencapai pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan, Kabupaten Wonosobo memiliki isu strategis daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengidentifikasi dan mengembangkan potensi yang ada.

a. Agrobisnis dan Pariwisata yang Unggul

Agrobisnis yang unggul perlu didukung dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam setiap tahap produksi, perlu mendorong peningkatan nilai tambah produk pertanian menuju hilirisasi pertanian yang berkelanjutan. Harga komoditas pertanian yang terlalu rendah dan biaya produksi yang tinggi, sehingga petani tidak tertarik untuk melakukan inovasi dalam usaha taninya. Kondisi ini perlu diperhatikan agar produktivitas pertanian semakin meningkat. Regenerasi petani perlu diperhatikan melalui berbagai upaya di antaranya transformasi pendidikan vokasi pertanian, inisiasi program beasiswa wirausaha muda pertanian, penerapan modernisasi pertanian, pelaksanaan program pelatihan atau magang bagi petani muda dan pemberian insentif bagi generasi muda yang terjun di dunia pertanian.

Akses pasar dan fasilitasi kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan dalam rantai bisnis pertanian, baik dalam satu kabupaten, antarkabupaten, maupun di tingkat nasional, perlu mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah. Fasilitas pemerintah yang minim dalam sektor pertanian harus ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sektor pariwisata memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk menjaga pertumbuhan sektor pariwisata, sosial ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Agar lebih optimal menghasilkan manfaat sektor ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan, perlu konsep yang memadukan pariwisata dan pertanian yang berkelanjutan yang diwujudkan dalam *agroecoculture tourism*.

Infrastruktur dasar dan pendukung serta sarana prasarana secara bertahap perlu ditingkatkan agar simpul-simpul destinasi pariwisata dapat terhubung dengan baik. Peningkatan konektivitas



antarsimpul pariwisata juga diharapkan dapat mengembangkan usaha-usaha ekonomi penunjang, seperti industri makanan olahan hasil pertanian dan sektor tersier atau jasa yang terkait dengan pariwisata. *Factory outlet* dan sentra bisnis seperti pasar seni yang terletak di rute-rute jalan merupakan potensi destinasi wisata penunjang dan baru yang perlu dikembangkan.

Pelaku usaha pariwisata muda perlu diciptakan untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Wonosobo ke depannya. Adanya program studi pariwisata di perguruan tinggi lokal, pendirian jurusan manajemen pariwisata di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pelatihan keterampilan di luar lingkungan sekolah untuk mendorong minat generasi muda di sektor pariwisata.

Sejalan dengan digitalisasi pemerintahan, digitalisasi informasi pariwisata juga sangat penting agar informasi dapat tersedia, terbarukan dan mudah diakses. Kesadaran tentang pentingnya data juga diperlukan untuk tujuan pemasaran pariwisata, di mana inovasi diperlukan untuk pengembangan simpul-simpul pelaku, destinasi dan upaya bersama dalam pemasaran pariwisata. Kerja sama dan kontribusi dari pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta menjadi kunci.

Inovasi dalam mendorong elemen pemerintah desa dan perusahaan untuk mendukung inisiatif desa wisata sangat diperlukan. Kelompok UMKM yang bergerak dalam ekonomi kreatif juga perlu ditingkatkan pemberdayaannya untuk menciptakan nilai tambah dalam industri pariwisata.

Kabupaten Wonosobo dapat melakukan perbaikan aspek-aspek di atas melalui optimalisasi potensi pariwisata dengan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar untuk masyarakat.

b. Transformasi Menuju Ekonomi yang Inklusif, Produktif dan Berkelanjutan

Transformasi menuju ekonomi yang inklusif, produktif dan berkelanjutan merupakan isu strategis yang mendesak. Kendala dalam mencapai ekonomi inklusif ini adalah keterbatasan sumber daya manusia di sektor pertanian terutama petani, eksplorasi inovasi teknik pertanian berwawasan lingkungan yang didukung oleh teknologi tepat guna belum mencapai potensinya, praktik pertanian monokultur dan penggunaan input pertanian yang tidak ramah lingkungan masih berlanjut, basis ekonomi pertanian terus tergerus oleh pembangunan permukiman yang tidak patuh pada regulasi rencana tata ruang dan tata wilayah. Meskipun begitu, potensi



pertanian di Kabupaten Wonosobo memiliki kapasitas untuk menjadi solusi bagi tantangan ekonomi dan lingkungan yang dihadapi. Hal ini dapat tercapai melalui implementasi kebijakan yang berorientasi pada investasi riset dan teknologi, pengembangan sumber daya manusia di sektor pertanian, distribusi nilai tambah yang adil, serta fasilitasi penyediaan infrastruktur ekonomi yang mendukung. Dengan langkah-langkah tersebut, Kabupaten Wonosobo memiliki potensi untuk mencapai transformasi ekonomi yang inklusif, produktif dan berkelanjutan.

c. Tata Kelola Pemerintah yang Dinamis Ditopang oleh *Smart Government*

Tata kelola pemerintahan menjadi pilar utama dalam pelaksanaan pembangunan dan penyediaan layanan publik. Ketersediaan, aksesibilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan harus direspons dengan agenda reformasi birokrasi daerah berbasis teknologi yang berakar pada prinsip-prinsip demokrasi, adaptif dan berorientasi pada jangka panjang. Konteks pertumbuhan populasi, perubahan profil demografi di mana generasi masa depan semakin *melek* teknologi, serta kondisi topografi Kabupaten Wonosobo mengharuskan upaya peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan agar makin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pilar kunci tata kelola pemerintahan mencakup ketersediaan sumber daya manusia, keuangan dan infrastruktur yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Sumber daya ini dibutuhkan untuk menunjang kemampuan pemerintah memberikan layanan yang merata, inklusif dan efisien.

Pilar selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi digital. Elemen utama digitalisasi adalah sistem dan kelembagaan untuk membangun kesadaran akan pentingnya data dan integrasi data dalam proses administrasi dan pembuatan kebijakan. Elemen utama ini mendasari pembangunan portal dan pengembangan aplikasi integratif. Pemanfaatan digitalisasi tidak hanya berorientasi pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan administrasi dan pelayanan publik, tetapi juga berorientasi pada pengembangan demokrasi, di mana teknologi digital memfasilitasi partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Secara khusus, terkait reformasi birokrasi sebagai organisasi pelaksanaan pemerintahan, sejumlah langkah diperlukan. Terkait sumber daya manusia, dibutuhkan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meliputi perencanaan kebutuhan dan pengembangan kompetensi SDM, inovasi yang mendukung produktivitas kinerja, penegakan meritokrasi, sistem dan mekanisme monitoring dan



evaluasi kinerja, hingga penyebaran praktik inovasi antarorganisasi pemerintahan daerah.

Berkaitan dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah perlu menyeimbangkan dan menyelaraskan pendekatan *top-down*, *bottom-up*, teknokratis, politis dan partisipatif dengan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Segenap elemen pemerintahan daerah baik legislatif maupun eksekutif, akademisi, dunia usaha, media serta masyarakat penting untuk memiliki kesadaran visi yang sama melalui aksi kolaborasi *pentahelix*.

d. Konektivitas Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur yang Andal Menuju Kabupaten Layak Huni

Konektivitas wilayah yang baik dapat meningkatkan aksesibilitas, tetapi aksesibilitas juga bergantung pada faktor-faktor lain seperti ketersediaan transportasi dan kondisi fisik dari infrastruktur yang ada. Pemerataan akses dan kualitas infrastruktur merupakan tantangan penting yang harus diatasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Wonosobo membutuhkan peningkatan aksesibilitas, konektivitas dan kualitas infrastruktur transportasi intrawilayah dan antarwilayah. Aksesibilitas dan konektivitas wilayah memiliki peran yang sangat penting untuk mengoptimalkan potensi wisata dan agrobisnis. Konektivitas wilayah terdiri atas konektivitas antarwilayah dan intrawilayah kabupaten.

Kabupaten Wonosobo yang berada di jalur lintas tengah Provinsi Jawa Tengah memiliki keterbatasan konektivitas antarwilayah dibanding wilayah Jateng yang dilalui jalur tol trans Jawa/pantura dan pansela. Konektivitas antarwilayah lebih menekankan pada pengembangan hubungan dan transportasi yang mendukung integrasi regional dan nasional serta aliran barang dan orang antarwilayah yang berbeda (antarkabupaten/kota dalam provinsi dan luar provinsi, simpul transportasi regional seperti bandara, stasiun dan pelabuhan terdekat). Terbatasnya konektivitas antarwilayah ini menjadi kendala dalam pengembangan pariwisata dan agrobisnis karena pergerakan wisatawan, produk pertanian/komoditas unggulan kabupaten menjadi lebih lama jarak dan waktu tempuhnya.

Konektivitas intrawilayah dikaitkan dengan pengembangan infrastruktur yang menghubungkan wilayah perkotaan dengan perdesaan dalam kabupaten seperti jalan, jembatan dan fasilitas transportasi publik lainnya. Hal Ini bertujuan untuk mempermudah mobilitas penduduk dan barang. Dalam kaitannya dengan potensi agrobisnis dan pariwisata, maka koridor transportasi yang perlu



diprioritaskan yaitu pada koridor akses langsung/terhubung secara jaringan dalam mendukung rantai pasok menuju pusat kegiatan perekonomian daerah (permukiman, pasar, pusat perdagangan, sentra produksi), akses langsung terhubung secara jaringan menuju simpul-simpul transportasi dalam kabupaten, akses langsung terhubung secara jaringan menuju pusat pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), akses langsung/terhubung secara jaringan menuju pusat kabupaten dan kecamatan (pusat pelayanan publik pemerintahan), akses langsung/terhubung secara jaringan menuju lokasi tematik pengembangan agrobisnis/sentra produksi pangan dan destinasi pariwisata prioritas. Peningkatan konektivitas dapat dilaksanakan melalui peningkatan kualitas jalan pada koridor tersebut. Selain koridor jalan darat, di Kabupaten Wonosobo juga terdapat angkutan penyeberangan di Waduk Wadaslintang yang menghubungkan desa-desa di sekitar waduk. Peningkatan konektivitas melalui jalur waduk juga diperlukan selain melalui jalur darat.

Aspek lainnya yang terkait konektivitas adalah peningkatan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru di Wonosobo yang diarahkan mengikuti Wilayah Pengembangan (WP) dan rencana tata ruang untuk mendekatkan layanan barang dan jasa bagi masyarakat. Dalam kaitannya wilayah pengembangan ini nantinya perlu ada peningkatan keterkaitan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Keterkaitan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara kawasan perkotaan dan perdesaan sehingga pembangunan dan kemajuan ekonomi serta sosial dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan di seluruh Kabupaten Wonosobo.

Kawasan perkotaan utama di Wonosobo berdasarkan hierarki orde sistem kota tertinggi dalam tata ruang yaitu perkotaan Wonosobo sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Intensitas tata guna lahan di Kawasan Perkotaan Wonosobo saat ini sudah cukup tinggi sehingga pergerakan di Kawasan Perkotaan Wonosobo juga semakin padat. Pada jam-jam tertentu, bangkitan dan tarikan lalu lintas antar tata guna lahan di Kawasan Perkotaan Wonosobo cukup intens. Dengan adanya potensi strategis yang dimiliki Kawasan Perkotaan Wonosobo, dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan intensitas tata guna lahan di Kawasan Perkotaan Wonosobo akan semakin berkembang. Hal ini menyebabkan mobilitas penduduk di Kawasan Perkotaan Wonosobo akan semakin meningkat serta beban lalu lintas juga akan semakin tinggi. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kawasan perkotaan ibukota kabupaten, namun juga mulai muncul di kawasan perkotaan di kecamatan lainnya di Kabupaten Wonosobo (terutama yang



menjadi delineasi kawasan perkotaan dalam RDTR) serta koridor menuju destinasi wisata Dieng.

Peningkatan jumlah dan aktivitas penduduk perkotaan akan mengakibatkan transformasi perkotaan. Transformasi perkotaan dapat dilihat dalam bentuk renovasi bangunan, pembangunan gedung baru, peningkatan fasilitas publik, perubahan pola/zona tata ruang dan perubahan kebiasaan atau kegiatan masyarakat. Transformasi perkotaan yang terjadi diharapkan tetap terkendali dan berkelanjutan dan dapat mendukung terwujudnya kabupaten yang layak huni. Isu terkait dengan infrastruktur dan penataan kota juga telah diselaraskan dengan "Agenda Baru Perkotaan (*New Urban Agenda*) Tahun 2030", yaitu mewujudkan perkotaan dan permukiman yang memberikan hak dan kesempatan yang sama, mendorong inklusivitas dan memastikan penduduk tanpa diskriminasi yang mampu menempati dan menciptakan kota dan permukiman yang berkeadilan, aman, sehat, mudah diakses, terjangkau, berketahanan dan berkelanjutan. Demikian halnya dengan kawasan perdesaan yang juga agar tetap dikembangkan sesuai dengan potensi lokal. Peningkatan keterkaitan perkotaan dan perdesaan, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah di Kabupaten Wonosobo.

Terkait infrastruktur untuk mendukung kabupaten layak huni yaitu peningkatan penyediaan akses air minum dan sanitasi (khususnya air limbah domestik) untuk semua. Meskipun secara capaian untuk akses air minum layak sudah tinggi namun ada ancaman dengan ketersediaan dan kontinuitas layanan jika pengelolaan konservasi sumber mata air tidak terjaga dengan baik. Demikian pula untuk akses air minum kategori aman yang masih perlu untuk ditingkatkan. Ketersediaan sarana prasarana air minum aman serta sanitasi layak dan aman masih perlu ditingkatkan untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks penataan perumahan dan kawasan permukiman, selain akses hunian layak, perlu diperhatikan terkait upaya pencegahan dan pengurangan kawasan pemukiman kumuh di Kabupaten Wonosobo untuk perwujudan kabupaten yang layak huni.

Koordinasi dan sinergi lintas sektor, lintas daerah, hubungan pusat dan daerah diperlukan dalam peningkatan kualitas, distribusi dan pengelolaan infrastruktur yang lebih merata. Peningkatan infrastruktur terutama ditujukan pada layanan dasar dan konektivitas seperti sarana prasarana air minum, sanitasi, hunian layak, jalan dan irigasi.



Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang inklusif penting memperhatikan penyediaan prasarana dan sarana transportasi serta infrastruktur layanan dasar seperti fasilitas publik yang ramah bagi seluruh kelompok masyarakat khususnya kelompok rentan dan berkebutuhan khusus. Selain itu, pembangunan infrastruktur harus menerapkan prinsip ramah lingkungan dan mengikuti rencana tata ruang untuk memastikan keberlanjutan dan mendukung wilayah kabupaten yang layak huni. Infrastruktur juga perlu dirancang agar tahan terhadap bencana alam, termasuk jalan, jembatan dan bangunan yang mampu menghadapi risiko seperti banjir dan longsor

e. Akselerasi Sumber Daya Manusia Unggul

Melanjutkan capaian RPJPD periode sebelumnya, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah pada Tahun 2045 akan menjadi indikator utama dalam mengukur dampak pembangunan pendidikan. Sumber daya manusia sebagai penggerak pembangunan perlu disiapkan secara cermat untuk memastikan semua masyarakat dapat mengakses pendidikan dengan kualitas yang sama di masing-masing wilayah sehingga tidak ada kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah. Penting untuk memastikan ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai, tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi, serta muatan pendidikan yang relevan dengan potensi Wonosobo. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta sumber daya manusia yang berkarakter, terdidik dan terampil.

Konteks pembangunan kesehatan masyarakat diprioritaskan untuk meningkatkan usia harapan hidup yang berimplikasi terhadap kesiapan penyediaan layanan yang berkualitas pada semua siklus kehidupan. Harapan hidup yang tinggi dipengaruhi oleh penurunan tingkat kematian, angka kesakitan, kualitas lingkungan yang sehat dan faktor kecukupan gizi masyarakat. Pembangunan kesehatan 20 (dua puluh) tahun ke depan diharapkan dapat memberikan akses layanan yang mudah, terjangkau dan inovatif serta sistem kesehatan yang siap menghadapi ancaman kesehatan baru. Jaminan pelayanan kesehatan menuju Jaminan Kesehatan Nasional juga menjadi isu penting dalam konteks pembiayaan kesehatan agar semua masyarakat dapat terlayani dengan memastikan akses yang merata dan terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat, pembangunan kesehatan dapat mencapai sasaran yang lebih luas dan berkelanjutan.

Kesetaraan gender juga menjadi isu penting dalam pembangunan sumber daya manusia. *Gap* pembangunan sumber daya manusia antara laki-laki dan perempuan tercermin dalam dimensi pendidikan, kesehatan ekonomi dan partisipasi publik di



mana ada kesenjangan dalam pencapaian rata-rata lama sekolah, partisipasi angkatan kerja perempuan dan partisipasi perempuan dalam parlemen.

f. Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Status Sosial Ekonomi

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo tahun 2045 perlu dioptimalkan dengan lebih baik. Kabupaten Wonosobo memiliki banyak potensi sumber daya ekonomi lokal yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Secara bertahap, berbagai tantangan perlu diatasi melalui langkah-langkah pembangunan yang efektif.

Kemiskinan bersifat multidimensional dan tidak hanya sekedar tidak mampu secara ekonomi, namun juga ketidakmampuan untuk mengakses layanan pendidikan dan layanan kesehatan, hunian layak, air bersih, sanitasi, energi dan partisipasi sosial. Salah satu kendala utama adalah topografi wilayah yang menyebabkan kesulitan untuk mengakses layanan publik dan sumber-sumber ekonomi. Dalam hal ini, perbaikan infrastruktur dan akses transportasi menjadi sangat penting.

Potensi sumber daya manusia perlu direspons dengan pemberian pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada masyarakat. Hal ini akan membantu mereka lebih siap dalam menghadapi tuntutan ekonomi yang semakin kompleks, memperluas kesempatan kerja dan kemandirian ekonomi agar lebih berdaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan dan pelatihan harus menjadi prioritas untuk mempersiapkan generasi masa depan.

g. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Isu strategis selanjutnya yang membutuhkan perhatian serius adalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, mengingat peran posisi strategis Kabupaten Wonosobo yang berada di hulu DAS. Isu ini juga selaras dengan aspek ketahanan ekologi dan air dalam ranah RPJPN dan isu strategis RPJPD Provinsi Jawa Tengah yaitu keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana. Isu strategis aspek lingkungan hidup ini tidak terlepas dari daya dukung dan daya tampung yang pada saat ini belum terlampaui dan perlu diantisipasi dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Daya dukung pangan dan air berbasis grid di Kabupaten Wonosobo merupakan faktor krusial yang mempengaruhi kesejahteraan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang juga tercantum dalam dokumen KLHS RPJPD disebutkan bahwa daya dukung pangan dan air berbasis grid, kondisi daya



dukung air dan pangan saat ini dan proyeksi Tahun 2045, wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki status belum terlampaui/surplus. Meskipun saat ini daya dukung pangan dan air belum terlampaui atau surplus, tantangan utama adalah menjaga agar daya dukung ini tetap stabil dan tidak menurun di masa depan.

Saat ini pembangunan dan aktivitas ekonomi masih bergantung pada energi fosil yang bersifat eksploitatif terhadap sumber daya alam serta penanganan polusi dan limbah yang tidak memadai. Jika dikaitkan dengan kualitas tutupan lahan, meski daya dukung pangan dan pangan belum terlampaui, namun sudah ada peringatan terkait dengan tingginya erosi dan sedimentasi. Jika hal ini terus dibiarkan saja tanpa ada pengelolaan yang baik, maka daya dukung air, pangan dan daya dukung lainnya dapat menurun. Keberlanjutan pembangunan perlu didukung dengan terjaganya sumber daya alam dan lingkungan hidup. Upaya menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat dilakukan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas. Lingkungan hidup yang berkualitas bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kapasitas sumber daya alam dan kondisi lingkungan. Keseimbangan ini penting agar sistem dapat beradaptasi, pulih dan terus menyediakan layanan lingkungan, serta mendukung pengembangan kemampuan manusia, masyarakat yang beretika, moral dan berbudaya, serta keluarga yang mampu mengelola sumber daya dan lingkungan dengan baik. Selain itu, upaya ini juga diperlukan untuk mencegah konflik sosial dan kerusakan lingkungan, sehingga generasi mendatang dapat menikmati hasil pembangunan dan merasakan kualitas hidup yang baik.

Selain itu, perubahan kondisi lingkungan seperti perubahan tata guna lahan, perubahan produktivitas lahan, perubahan iklim, tingginya tingkat sedimentasi dan erosi merupakan tantangan yang harus diantisipasi. Sarana prasarana persampahan dan pengelolaan limbah merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Kurangnya fasilitas pengolahan sampah dan limbah di beberapa wilayah berdampak buruk terhadap kualitas lingkungan. Di samping itu, emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Wonosobo diperkirakan akan terus meningkat jika pendekatan pembangunan tidak mengalami perubahan. Pengelolaan lingkungan yang tidak tepat akan menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan dan dampak paling besar terjadinya bencana terutama yang disebabkan oleh bencana hidrometeorologis (banjir, tanah longsor, kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan). Oleh karena itu, penting dan mendesak



untuk beralih ke pembangunan rendah karbon yang berfokus pada ketahanan iklim guna mengurangi risiko perubahan iklim

3.3. Tantangan Pembangunan Daerah

3.3.1. Megatren

Kekuatan global yang besar dan transformatif mempengaruhi ekonomi, masyarakat, budaya dan kehidupan individu secara mendalam, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional seperti Jawa Tengah dan kabupaten-kota seperti Wonosobo. Megatren ini merupakan proses perubahan jangka panjang dengan dampak yang berjangka panjang pula. Karena skala kekuatan pengaruh yang sedemikian besar, strategi mengantisipasi megatren perlu melibatkan berbagai yurisdiksi pemerintahan (vertikal) serta berbagai entitas sektor publik, privat dan komunitas (horizontal).

Dalam dua puluh tahun mendatang, setidaknya terdapat empat megatren yang menjadi sumber tantangan bagi Wonosobo dalam melaksanakan agenda Pembangunan jangka panjang. Megatren tersebut adalah sebagai berikut :

a. Demografi

Diproyeksikan rasio ketergantungan di Kabupaten Wonosobo setelah 2030 akan melampaui angka 50, yang menandakan berakhirnya bonus demografi. Implikasinya, beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif dalam mendukung kelompok lansia yang bergantung akan meningkat. Misalnya, proyeksi untuk 2045 menunjukkan bahwa satu orang usia produktif akan menanggung beban 51 orang *non*-produktif. Hal ini merupakan tantangan yang harus direspons dengan serius.

Agenda pertama untuk menghadapi tantangan di atas adalah mengoptimalkan berbagai kebijakan dan program pembangunan manusia sehingga bonus demografi dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang besar. Di sektor ekonomi, pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja dengan memperluas dan memperkuat industri kecil dan menengah, mendukung pertanian berkelanjutan, serta mengembangkan sektor pariwisata. Selain itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan juga diperlukan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Agenda kedua, hasil dari bonus demografi harus dijadikan sebagai pilar pembiayaan bagi penyiapan kebijakan sosial yang pro-lansia, seperti jaminan pelayanan kesehatan dan program santunan pendapatan bagi lansia. Dengan demikian, perubahan demografis dapat dihadapi dengan lebih baik.



b. Terobosan Teknologi

Artificial Intelligence (AI) menghadirkan tantangan pembangunan terkait dengan penyiapan sumber daya manusia agar adaptif terhadap perubahan peran manusia dalam kegiatan ekonomi. AI menghadirkan otomatisasi pekerjaan di mana kinerja algoritma menggantikan tugas-tugas manual yang sebelumnya diperankan oleh tenaga kerja manusia. Efisiensi tidak hanya terjadi dalam bidang ekonomi melainkan juga bidang-bidang lain termasuk pelayanan publik dan berbagai fungsi lain dalam politik dan pemerintahan. Karena itu, terobosan teknologi terutama terkait dengan AI perlu direspons secara cepat. Pada prinsipnya, hilangnya peran/fungsi manusia sejatinya diikuti dengan munculnya peluang pekerjaan baru terkait pengembangan dan manajemen sistem AI serta pekerjaan-pekerjaan ekonomi kreatif. Konsekuensinya, kebijakan pemerintah perlu merespons tantangan dan peluang tersebut dengan investasi pendidikan yang menyiapkan SDM agar memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam bentuk-bentuk baru pekerjaan di masa mendatang.

Sementara dari sisi sosial dan politik, terobosan teknologi dapat mengganggu tatanan dan ketertiban yang dibutuhkan bagi kelangsungan pembangunan. Fenomena teknologi manipulasi media yang menggunakan AI untuk membuat multimedia palsu yang tampak *otentik* berisiko menyebarkan disinformasi, kampanye hitam, manipulasi opini publik, hingga membahayakan integritas institusi demokrasi. Untuk merespons tantangan ini, diperlukan sejumlah langkah-langkah penting, antara lain peningkatan pendidikan literasi digital, penguatan regulasi, penegakan transparansi platform media sosial dan pembuatan mekanisme akuntabilitas.

c. Geopolitik

Geopolitik adalah studi mengenai hubungan antara faktor geografis, politik, ekonomi dan strategis dalam konteks hubungan internasional. Ini mencakup analisis tentang bagaimana kekuatan politik dan ekonomi suatu negara mempengaruhi keputusan politik, pertahanan, perdagangan dan konflik di tingkat global. Dampaknya terhadap warga lokal dapat bervariasi. Misalnya, ketegangan geopolitik di kawasan Laut Cina Selatan bisa berdampak pada perdagangan internasional yang dapat mempengaruhi ekonomi lokal dan lapangan kerja yang bergantung pada ekspor.

Pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran penting tentang dampak wabah global terhadap geopolitik. Baik pemerintah maupun warga lokal, termasuk di Kabupaten Wonosobo, tidak luput dari risiko



dampak ini. Banyak negara telah mengubah prioritas kebijakan luar negeri mereka, terlibat dalam persaingan dan ketegangan terkait sumber daya medis, serta mengalami peningkatan nasionalisme dan proteksionisme terhadap pasokan barang dan transportasi. Meskipun kewenangan utama terkait geopolitik berada di tingkat pusat, penting bagi pemerintah daerah untuk secara konsisten berkomitmen pada mitigasi yang tidak terbatas pada bencana alam saja melainkan juga bencana kesehatan publik seperti pandemi.

d. Pergeseran Kekuatan Ekonomi Global

Pergeseran kekuatan ekonomi global dapat berdampak pada warga lokal, termasuk Kabupaten Wonosobo. Kondisi ekonomi global juga mempengaruhi pertumbuhan bisnis lokal, pertumbuhan ekonomi global yang kuat dapat meningkatkan permintaan produk dan jasa lokal, sementara perlambatan dapat membuat bisnis lokal sulit berkembang. Selain itu, pergeseran kekuatan ekonomi global juga dapat mempengaruhi stabilitas sosial lokal, ketidakstabilan ekonomi global bisa menciptakan ketidakpastian dan kecemasan, berpotensi memicu ketegangan sosial yang mengganggu stabilitas yang dibutuhkan untuk pembangunan yang lancar.

3.3.2. Perubahan Iklim, Daya Dukung dan Daya Tampung

Perubahan iklim adalah proses global yang melibatkan pemanasan atmosfer bumi akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca dalam jangka waktu tertentu. Faktor-faktor seperti aktivitas manusia, pola alam dan perubahan dalam sistem atmosfer berkontribusi pada fenomena ini. Dampaknya sangat signifikan bagi kehidupan manusia, termasuk perubahan cuaca ekstrem, kenaikan suhu global, naiknya permukaan air laut dan gangguan terhadap ekosistem.

Selama periode 2018-2022, terjadi fluktuasi emisi gas rumah kaca (GRK) di Kabupaten Wonosobo. Pada 2022, jumlah total emisi yang dihasilkan mencapai 216,73 Gg CO₂, dengan sektor energi 298,53 Gg CO₂ dan sektor pertanian sebesar 285,48 Gg CO₂ sebagai kontributor utama. Masih rendahnya aksi penurunan emisi gas rumah kaca di Kabupaten Wonosobo ditandai dengan capaian Tahun 2023 sebesar 7.080,22 TonCO₂eq.

Perubahan iklim ini menghadirkan tantangan bagi pengembangan sektor unggulan Kabupaten Wonosobo. Dampak terhadap pengembangan agrobisnis melalui risiko bencana alam, gangguan siklus pertumbuhan tanaman, peningkatan serangan hama dan penyakit, serta ketidakpastian dalam produksi dan pasokan. Sementara, perubahan iklim dapat menjadi tantangan besar bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Wonosobo, melalui perubahan cuaca, lanskap, kerusakan



destinasi wisata dan dampak alamiah lainnya yang mengganggu aktivitas pariwisata. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menjadi kunci dalam menjaga ketahanan agrobisnis dan pariwisata yang berwawasan lingkungan.



BAB 4 VISI DAN MISI DAERAH

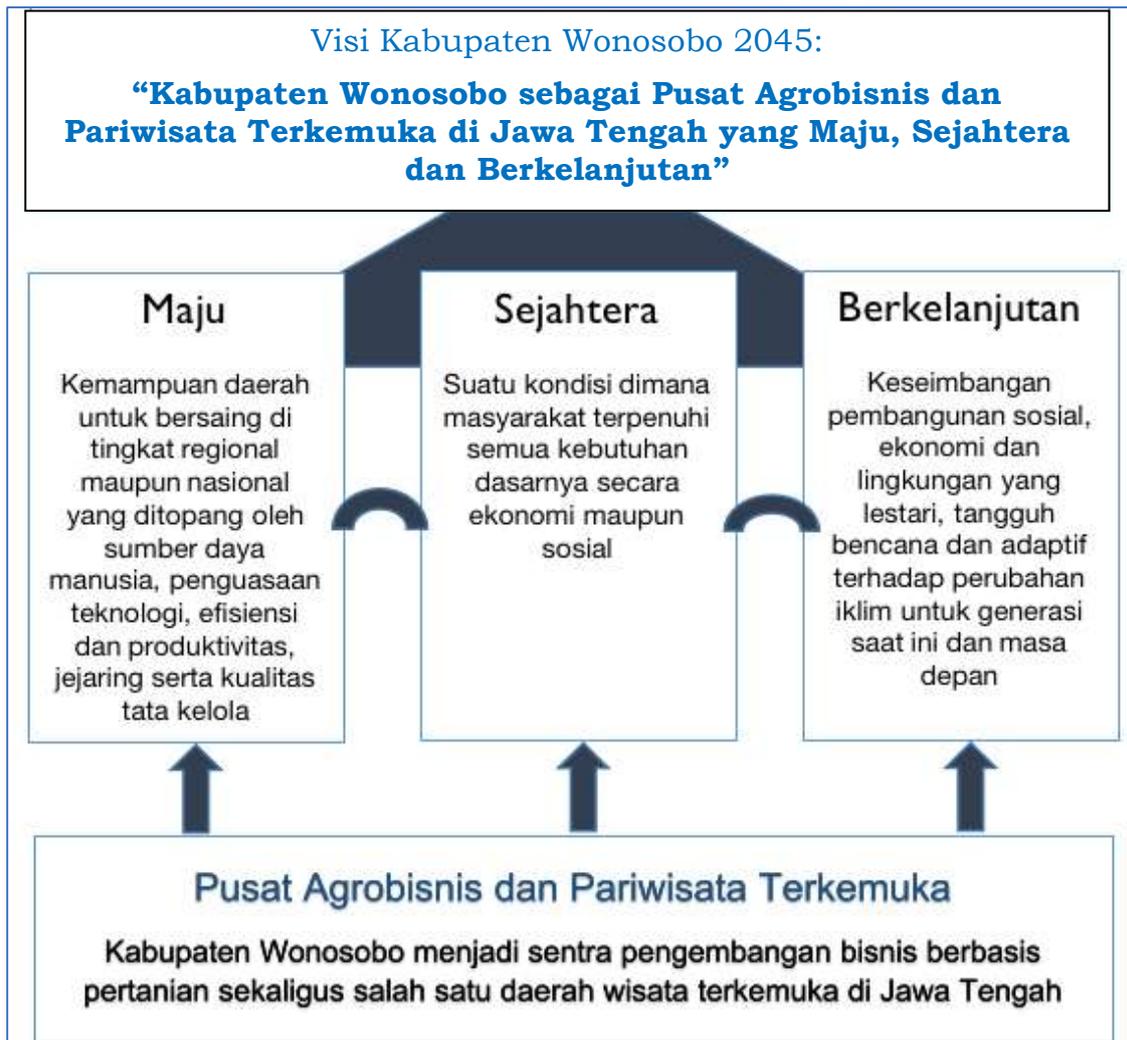
Pernyataan visi dan misi merupakan bagian krusial dalam dokumen RPJPD. Secara prinsip, visi menggambarkan aspirasi mengenai kondisi ideal yang diharapkan dapat terwujud di masa depan. Situasi yang lebih baik tersebut didasarkan pada isu-isu strategis yang dihadapi daerah maupun tantangan dan peluang baik yang ada di tingkat lokal, regional, nasional dan global. Sementara itu, misi menggambarkan serangkaian upaya strategis yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut. Dengan demikian, secara substantif, rumusan visi dan misi dalam RPJPD adalah manifestasi kolektif yang dilakukan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mewujudkan kondisi kehidupan yang dicita-citakan bersama.

4.1. Visi Daerah

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Wonosobo periode 2025-2045 merupakan upaya untuk mendorong lompatan pembangunan dalam periode 20 (dua puluh) tahun ke depan. Analisis terhadap capaian berbagai indikator pembangunan menjadi pijakan penting bagi penentuan arah dan upaya pembangunan Kabupaten Wonosobo 2 (dua) dekade mendatang. Berbagai analisis ini dituangkan dalam dokumen evaluasi RPJPD Wonosobo periode 2005-2025, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis Wonosobo, yang menjadi bagian integral dalam penyusunan RPJPD sebagaimana telah diuraikan pada Bab II dan III.

Perkembangan berbagai ranah lingkungan strategis Kabupaten Wonosobo juga menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan visi dan misi pembangunan daerah. Konteks geografis, demografis, sosial, ekonomi, tata kelola pemerintahan, hingga daya dukung lingkungan, menjadi pertimbangan penting. Selain mengacu pada kondisi dan konteks strategis di tingkat kabupaten, perumusan dokumen RPJPD Kabupaten Wonosobo juga memperhatikan arah pembangunan di tingkat provinsi dan nasional untuk memastikan keselarasan serta mendukung capaian pembangunan pada level regional maupun nasional.

Berdasarkan pertimbangan berbagai permasalahan daerah dan isu-isu strategis sebagaimana yang telah dibahas di bab ketiga, visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Wonosobo periode 2025-2045 adalah sebagai berikut: **“Kabupaten Wonosobo sebagai Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”**.



Gambar IV. 1 Bagan Visi Kabupaten Wonosobo Periode 2025-2045

4.1.1. Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka

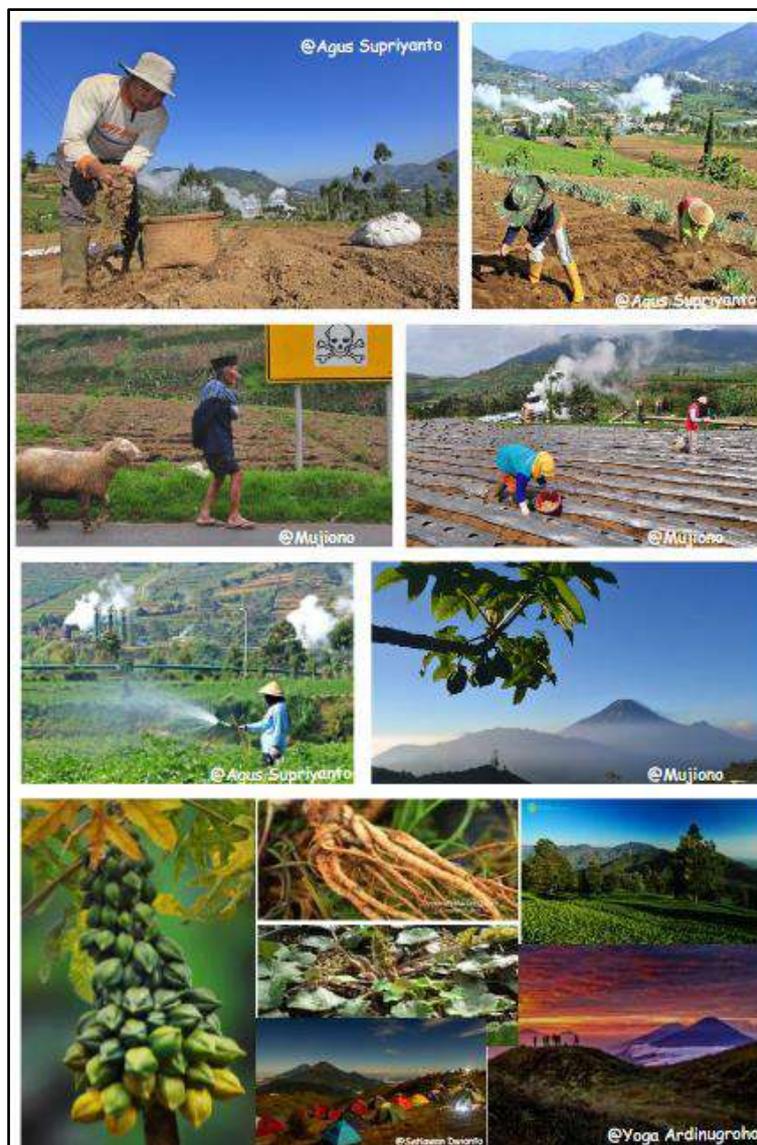
Visi Kabupaten Wonosobo yang ditopang oleh dua sektor unggulan yakni agrobisnis dan pariwisata. Visi “**Pusat Agrobisnis**” ini sangat relevan dan kontekstual mengingat Kabupaten Wonosobo telah dikenal sebagai salah satu penghasil utama komoditas pertanian di Provinsi Jawa Tengah. Wilayah yang subur dengan topografi pegunungan menjadikan kawasan Wonosobo ideal bagi pengembangan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Visi menjadi “**Pusat Agrobisnis**” ditandai oleh semakin meningkatnya kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan dalam struktur PDRB Kabupaten.

Sementara, visi “**Pariwisata Terkemuka**” ini ditopang oleh potensi-potensi alam dan sosio-kultural yang strategis untuk dikembangkan lebih lanjut. Target dari visi ini adalah menjadikan Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu dari lima destinasi pariwisata utama di Provinsi Jawa Tengah.



Selain itu, visi menjadi **“Pariwisata Terkemuka”** juga tercermin dari meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB Kabupaten Wonosobo.

Potensi destinasi yang dimiliki Kabupaten Wonosobo, dalam dua puluh tahun ke depan diharapkan akan terwujud kolaborasi setiap destinasi wisata melalui paket wisata yang terintegrasi antardestinas wisata, menumbuhkan desa wisata berbasis masyarakat, *agroecoculture tourism* (agropariwisata berbasis pertanian, lingkungan dan budaya), *wellnes tourism* (pariwisata untuk kebugaran dan kesehatan), wisata edukasi yang inklusif dan berkelanjutan didukung dengan keunggulan teknologi, inovasi tiada henti, SDM berkualitas dan kelembagaan yang kuat.



Gambar IV. 2 Kegiatan Pertanian dan Obyek Wisata di Kabupaten Wonosobo



4.1.2. Maju

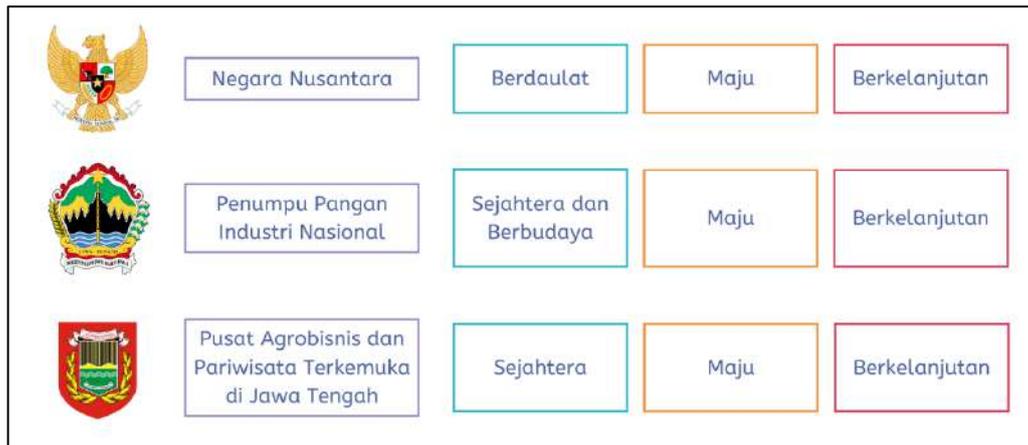
Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Wonosobo diarahkan untuk menuju pada kondisi masyarakat yang maju secara menyeluruh. Visi “Maju” mengindikasikan bahwa Kabupaten Wonosobo mampu berdaya saing untuk mengoptimalkan keunggulan komparatif, kompetitif, mandiri dan inovatif dalam memajukan perekonomian dan kemandirian daerah. Visi “Maju” diwujudkan melalui pengembangan potensi sektor agrobisnis dan pariwisata berbasis riset, teknologi dan inovasi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Pengembangan ekonomi ini didukung dengan aspek sumber daya manusia yang sehat dan terdidik, pemerintah yang bersih (*clean government*) dan tata kelola pemerintahan baik (*good governance*), infrastruktur yang mantap, merata dan terkoneksi.

4.1.3. Sejahtera

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Wonosobo diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh tanpa ada satupun yang tertinggal (*no one left behind*). Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu misi abadi bagi pemerintah. Kata ‘sejahtera’ merujuk pada suatu kondisi di mana masyarakat terpenuhi semua kebutuhan dasarnya secara ekonomi maupun sosial. Masyarakat Wonosobo yang sejahtera dicerminkan dengan masyarakat yang terdidik, berkarakter, sehat dan makmur. Oleh karena itu, kesejahteraan mencakup berbagai dimensi seperti kesehatan fisik dan mental, keamanan finansial dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, hubungan sosial yang baik dengan sesama anggota masyarakat dan mampu berpartisipasi.

4.1.4. Berkelanjutan

Rangkaian kalimat visi dalam RPJPD Kabupaten Wonosobo ditutup dengan kata ‘berkelanjutan’. Visi ‘berkelanjutan’ merujuk pada pandangan bahwa aktivitas dan kebijakan yang dijalankan saat ini akan menciptakan manfaat jangka panjang tanpa merusak sumber daya atau lingkungan alam. Visi berkelanjutan berfokus keseimbangan pembangunan sosial ekonomi, kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, tangguh bencana dan adaptif terhadap perubahan iklim agar pembangunan dapat dinikmati oleh generasi saat ini maupun masa depan. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat dunia saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan global, seperti perubahan iklim, penipisan sumber daya alam dan ketidaksetaraan sosial. Penempatan kata berkelanjutan pada akhir kalimat visi RPJPD Wonosobo sekaligus menekankan bahwa seluruh upaya pembangunan yang akan dilakukan dalam dua puluh tahun ke depan didasarkan pada semangat keberlanjutan dan kepentingan antargenerasi.



Gambar IV. 3 Keterkaitan Pokok Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kabupaten Wonosobo

Tabel IV. 1 Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Wonosobo dengan Visi RPJPD Jawa Tengah Tahun 2025-2045

Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah	Visi RPJPD Kabupaten Wonosobo
Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan	Kabupaten Wonosobo sebagai Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan
a. Maju, meliputi substansi: <ul style="list-style-type: none"> - Daya saing - Modern - Inovatif - Mandiri - Tangguh - Aman 	Maju, meliputi substansi: <ul style="list-style-type: none"> - Berdaya saing - Unggul - Kompetitif - Komparatif - Mandiri - Inovatif
b. Berkelanjutan, meliputi substansi: <ul style="list-style-type: none"> - Kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup - Risiko bencana 	Berkelanjutan, meliputi substansi: <ul style="list-style-type: none"> - Keseimbangan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang lestari - Kepentingan antargenerasi - Tangguh bencana - Adaptif
c. Tema khusus: <ul style="list-style-type: none"> - Penumpu Pangan dan Industri Nasional 	c. Tema khusus: <ul style="list-style-type: none"> - Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah



4.2. Sasaran Visi Daerah

Pencapaian Visi Wonosobo sebagai Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan ditandai dengan tercapainya sasaran-sasaran utama yakni rumusan kinerja beserta indikator dan target capaiannya.



Gambar IV. 4 Sasaran Visi Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045

Sasaran pertama (Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka yang Berdaya Saing); menjadi pusat agrobisnis & pariwisata terkemuka di Jawa Tengah sekaligus merupakan strategi Kabupaten Wonosobo untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya. Indikator dalam sasaran visi ini adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

Sasaran kedua (Peningkatan kesejahteraan); peningkatan kesejahteraan masyarakat Wonosobo ditandai dengan Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menurunnya ketimpangan. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi capaian sasaran visi ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Gini (rasio gini).

Sasaran ketiga (Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan); peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan ditujukan untuk memastikan terjaganya keseimbangan antara pembangunan ekonomi sosial dengan kelestarian lingkungan sehingga keberlanjutan pembangunan dapat terus terjaga. Pencapaian sasaran ini ditandai dengan Indeks Pembangunan Berkelanjutan.



**Tabel IV. 2 Penyelarasan Sasaran Visi dan Indikator
RPJPD Kabupaten Wonosobo dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025-2045**

No.	RPJPD Provinsi Jawa Tengah		RPJPD Kabupaten Wonosobo	
	Sasaran Visi	Indikator	Sasaran Visi	Indikator
1.	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB per Kapita (Rp.Juta)	Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka yang Berdaya Saing	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) (Angka)		
		Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)		
2.	Kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat	Kapasitas Institusi (Angka)		
3.	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	Peningkatan Kesejahteraan	Indeks Gini
		Rasio Gini (Angka)		
		Kontribusi PDRB Provinsi (%)		
4.	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia (Angka)		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
5.	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Berkelanjutan



Secara ringkas sasaran visi RPJPD Wonosobo 2025-2045 beserta indikator kinerjanya, baseline dan target capaiannya di akhir tahun perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel IV. 3 Indikator dan Target Capaian Sasaran Visi RPJPD
Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045**

Visi	Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Baseline	Target			
				2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2039-2045
Kabupaten Wonosobo sebagai Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan	1. Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka yang Berdaya Saing	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,35	3,36-3,50	3,51-3,65	3,66-3,80	3,81-4,00
	2. Peningkatan kesejahteraan	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	70,18	73,11	76,28	78,16	81,51
		Rasio Gini	Angka	0,365	0,355-0,351	0,350-0,344	0,345-0,338	0,337-0,330
	3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Pembangunan Berkelanjutan	Angka	52,90	58,14	58,28	60,75	77,50

4.3. Misi Daerah

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan misi RPJPD merujuk kepada pokok visi RPJPD yang akan diwujudkan, respons atas isu strategis dan permasalahan pembangunan, selaras dengan misi atau agenda pembangunan pada RPJPN, serta sejalan dengan misi yang termuat dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo merumuskan lima visi yang merupakan upaya-upaya umum yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi sebagaimana dituangkan di atas. Kelima misi tersebut masing-masing berkenaan dengan aspek sumber daya manusia, pengembangan sektor ekonomi unggulan yakni pertanian dan pariwisata, penguatan infrastruktur, peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan serta berkaitan dengan kelestarian lingkungan. Perumusan kelima misi tersebut disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis baik internal maupun eksternal daerah.



Tabel IV. 4 Penyelarasan Misi RPJPD Kabupaten Wonosobo dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045

Misi RPJPN Tahun 2025-2045	Misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045	Misi RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045
2. Transformasi ekonomi	2. Transformasi ekonomi	1. Mewujudkan agrobisnis dan pariwisata yang unggul, kreatif, inovatif dan berkelanjutan
3. Transformasi tata kelola	3. Transformasi tata kelola	2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas
4. Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	4. Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	
8. Kestinambungan pembangunan	8. Kestinambungan pembangunan	
6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	3. Mewujudkan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan
7. Sarana prasarana berkualitas dan ramah lingkungan	7. Sarana prasarana berkualitas dan ramah lingkungan	
1. Transformasi sosial	1. Transformasi sosial	4. Mewujudkan Pembangunan Sosial yang Inklusif serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing
5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi	5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi	4. Mewujudkan Pembangunan Sosial yang Inklusif serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing 5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan



Misi 1: Mewujudkan Agrobisnis dan Pariwisata yang Unggul, Kreatif, Inovatif dan Berkelanjutan

Agrobisnis dan pariwisata menjadi sektor unggulan yang diharapkan dapat menjadi lokomotif bagi pembangunan Kabupaten Wonosobo. Upaya mewujudkan agrobisnis dan pariwisata yang unggul, kreatif dan inovatif memerlukan perencanaan yang cermat dan implementasi yang tepat. Upaya tersebut memerlukan dukungan dari berbagai sektor lainnya antara lain yang terkait dengan aspek pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, pemanfaatan teknologi, partisipasi masyarakat, serta kerja sama dengan berbagai pihak dan pemangku kepentingan.

Optimalisasi sektor unggulan tersebut juga perlu ditopang oleh pengembangan unit penelitian dan pelatihan keterampilan guna menopang hilirisasi produk, perluasan pasar, serta mendorong pemberdayaan komunitas lokal dengan memperhatikan aspek lingkungan. Pengembangan program-program yang mendorong sinergi sektor unggulan tersebut juga perlu memperoleh perhatian serius. Dengan demikian pengembangan agrobisnis dan pariwisata di Kabupaten Wonosobo dapat dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas

Tata kelola pemerintahan merupakan faktor krusial bagi pencapaian visi Kabupaten Wonosobo. Perwujudan visi misi pembangunan akan sangat ditentukan oleh komitmen politik para pemangku kepentingan yang akan ditindaklanjuti pada level implementasi oleh aparatur pemerintah. Proses yang sinergis, transparan, adaptif, serta akuntabel didukung oleh SDM aparatur yang berkompeten untuk pemenuhan pelayanan publik menjadi kata kunci. Selain itu komitmen seluruh pihak untuk mendorong sistem yang bebas korupsi, serta menjunjung tinggi etika dan norma-norma yang berlaku juga sangat penting untuk ditekankan. Untuk itu, selain penegakkan sistem hukum yang independen, upaya kuat juga harus dilakukan pada ranah hulu, melalui literasi penegakan hukum, penerapan kode etik serta memfasilitasi tumbuhnya ruang-ruang publik yang kritis dan konstruktif.

Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan

Ketersediaan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah yang baik merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur tersebut antara lain meliputi jalan, air minum, sanitasi, hunian layak, irigasi, sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Ketersediaan dan pemerataan akses terhadap seluruh infrastruktur dasar tersebut akan sangat menentukan pencapaian visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Wonosobo. Pengembangan infrastruktur yang inklusif diharapkan dapat memberikan akses yang sama



bagi penyandang disabilitas, perempuan, lanjut usia, anak dan kelompok rentan lainnya.

Pembangunan infrastruktur inklusif dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah yaitu pada aspek konektivitas wilayah. Dalam hal konektivitas wilayah, pembangunan infrastruktur jalan diarahkan untuk meningkatkan kualitas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten (konektivitas dan aksesibilitas intrawilayah pada jalan status kewenangan kabupaten). Peningkatan kualitas jalan diarahkan pada koridor konektivitas sentra produksi pertanian dan destinasi pariwisata serta konektivitas intrawilayah (antardesa, antarkecamatan, kawasan pinggiran/perbatasan, interkoneksi perdesaan dan perkotaan). Peningkatan infrastruktur konektivitas intrawilayah dan pelayanan dasar juga akan diarahkan pada upaya pemerataan penyediaan sarana dan prasarana yang merata.

Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah kabupaten dan pusat regional lainnya yang dihubungkan oleh jalan serta moda transportasi kewenangan provinsi dan pusat dapat diwujudkan dengan peningkatan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait, misalnya pada rencana reaktivasi kereta api trase Purwokerto-Wonosobo, pembangunan jalan nasional berupa jalan tol Wonosobo-Magelang, jalan nasional bukan jalan tol seperti jalan lingkar Kertek (Wonosobo) dan jalan Wonosobo-Borobudur, serta pengembangan jalan status provinsi yang ada di Kabupaten Wonosobo.

Penyediaan infrastruktur juga diarahkan untuk menopang visi pembangunan berkelanjutan. Pengembangan infrastruktur diarahkan pada infrastruktur pendukung agrobisnis dan pariwisata yang inklusif, berketahanan bencana dan berkelanjutan. Poin ketahanan bencana ini penting untuk digarisbawahi mengingat topografi Kabupaten Wonosobo yang cukup rentan terhadap bencana alam seperti banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem (puting beliung), gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, aktivitas gunungapi, kekeringan dan tanah longsor. Hal ini mengingat bahwa kondisi jalan-jalan Kabupaten Wonosobo berada di daerah rawan longsor. Beberapa segmen badan jalan kabupaten, mengalami longsor di antaranya terjadi di Kecamatan Watumalang, Kecamatan Kaliwiro dan Kecamatan Wadaslintang. Fenomena lain yaitu amblesan/lubang khususnya pada segmen jalan yang terdapat gorong-gorong karena derasnya limpasan air sungai/saluran air saat musim hujan. Oleh karena itu, dalam pencapaian visi perlu adanya pembangunan dan pengembangan infrastruktur dengan pendekatan tangguh bencana akan lebih berkelanjutan. Pemerataan akses sarana prasarana publik berketahanan iklim disertai kemampuan adaptasi mitigasi (kebencanaan dan perubahan iklim), khususnya bagi kelompok rentan.



Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Sosial yang Inklusif serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing

Pembangunan sosial yang inklusif bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan kesejahteraan merata bagi semua warga. Dengan menyediakan layanan pendidikan, kesehatan dan peluang kerja yang setara, inklusivitas ini memungkinkan setiap individu berkembang secara optimal. Hal ini berhubungan erat dengan pengembangan SDM yang berdaya saing karena akses yang merata terhadap sumber daya dan kesempatan pendidikan akan menghasilkan generasi yang kompeten dan siap bersaing di tingkat lokal maupun global, mendorong kemajuan daerah secara keseluruhan.

Sumber daya manusia merupakan fondasi utama bagi upaya mewujudkan kemajuan daerah. Sumber daya manusia yang sehat, cerdas, sejahtera, andal, kompetitif, berkarakter dan berintegritas, berperan penting dalam upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. SDM yang unggul menjadi penggerak inovasi dan kreativitas guna memajukan kesejahteraan bersama. Upaya pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Wonosobo 20 (dua puluh) tahun ke depan didasarkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat serta modal sosial.

Misi 5: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan

Prinsip keberlanjutan menjadi dasar bagi pencapaian visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Wonosobo. Untuk itu upaya-upaya strategis dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan perlu dirancang untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan kelestarian lingkungan. Prinsip etika lingkungan dalam pertanian dan pariwisata perlu menjadi kesadaran seluruh pihak. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi salah satu kata kunci, misalnya dalam mendorong pertanian dan pariwisata yang berkelanjutan serta dikombinasikan dengan penguatan kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan.

Kabupaten Wonosobo perlu mendorong dan mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah dalam pemanfaatan energi terbarukan. Transisi energi ini sangat krusial sebagai langkah konkret untuk mengurangi emisi karbon dan dampak perubahan iklim. Selain energi, upaya pelestarian sumber daya air dan sumber daya lahan juga menjadi agenda penting bagi Kabupaten Wonosobo yang dikenal sebagai kawasan hulu dari lima Daerah Aliran Sungai (DAS). Langkah-langkah konkret pelestarian sumber daya air dan sumber daya lahan sekaligus dapat menopang keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Wonosobo.



Selain pelestarian sumber daya air dan sumber daya lahan, salah satu aspek penting dalam mencapai lingkungan berkelanjutan ditandai dengan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien. Pengelolaan sampah yang baik berkontribusi pada konservasi sumber daya alam sehingga berdampak nyata pada kelangsungan hidup dan pembangunan generasi masa kini dan masa mendatang.

4.4. Upaya Super Prioritas (*Game Changers*)

Selain telah merumuskan visi dan misi, Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga memetakan sejumlah upaya transformatif super prioritas untuk merespons berbagai permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya. Merujuk pada RPJPN Tahun 2025-2045, upaya transformatif super prioritas ini disebut *game changers*. Perumusan *game changers* ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk menemukan sejumlah terobosan dan inovasi agar masalah-masalah pembangunan yang berlarut dapat segera teratasi dengan baik. *Game changers* ini diharapkan dapat mengubah ritme pembangunan yang selama ini dilakukan sehingga dapat menghasilkan dampak yang lebih signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rumusan *game changers* dalam konteks perencanaan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 setidaknya memuat dua pemaknaan sebagai berikut.

- Pertama, *game changers* bisa berarti terobosan atau inovasi yang canggih, terkini dan *out of the box* dalam menjawab permasalahan serta isu-isu strategis pembangunan. Misalnya, ide inovatif pertanian cerdas (*smart farming*). Contohnya adalah penggunaan teknologi informasi berbasis digital seperti sensor tanah dan cuaca. Sensor ini mengumpulkan data secara *real-time* tentang kondisi lingkungan di lokasi bercocok tanam, seperti kelembaban dan suhu udara, tingkat kelembaban tanah, pH, nutrisi, curah hujan dan kecepatan angin. Data dari sensor ini membantu petani membuat keputusan yang lebih cerdas dan tepat waktu berbasis bukti ilmiah dalam mengelola pertumbuhan tanaman.
- Kedua, *game changers* juga bisa merujuk pada upaya yang tampak biasa atau rutin dalam kebijakan, strategi, atau program pemerintah. Kendati demikian, yang tampak rutin tersebut sebenarnya bernilai strategis bagi keberhasilan pembangunan. Sebab selama ini, pemerintah dan masyarakat gagal melaksanakan hal yang tampak rutin itu dengan baik. Sebagai contoh, dalam RPJPN Tahun 2025-2045, salah satu *game changers* pada aspek "Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi" adalah "Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir." Meskipun "terintegrasi" dan "hulu ke hilir" terdengar seperti hal yang sewajarnya dilakukan, substansi ini sangat strategis karena baik pemerintah maupun



masyarakat belum optimal pelaksanaannya sampai saat ini. Di masyarakat, upaya edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan praktik seperti perilaku 3R (*reduce, reuse, recycle*) serta pemilahan sampah masih rendah.

Upaya super prioritas tersebut adalah:

4.4.1. Kolaborasi Pengarusutamaan Agrobisnis dan Pariwisata

Kolaborasi Pengarusutamaan Agrobisnis dan Pariwisata menjadi salah satu prioritas demi tercapainya Misi 1 yaitu Mewujudkan Agrobisnis dan Pariwisata yang Unggul, Kreatif, Inovatif dan Berkelanjutan. Agrobisnis dan pariwisata yang dikelola secara kolaboratif akan menciptakan sinergi yang memperkuat nilai tambah pada sektor-sektor tersebut. Pengarusutamaan agrobisnis dan pariwisata dimulai dari keluarga, integrasi muatan lokal pada semua jenjang dan jenis pendidikan, penyelenggaraan pemerintahan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan. Dukungan dan komitmen dari berbagai pihak akan berdampak besar terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat karena dapat memudahkan akses pelaku industri pada pasar yang lebih luas dan mengurangi tantangan yang terjadi pada sektor agrobisnis dan pariwisata.

Kolaborasi dapat dilakukan antara pemerintah dengan swasta, melibatkan lembaga-lembaga yang mampu mendorong keberhasilan pengembangan agrobisnis dan pariwisata seperti pendidikan, industri, pertanian, keuangan, kebudayaan dan pariwisata, komunikasi serta komunitas lokal. Pengarusutamaan agrobisnis dan pariwisata akan membawa pada perubahan pola pikir, perilaku, kebiasaan dan budaya masyarakat untuk perwujudan visi Kabupaten Wonosobo.

4.4.2. Hilirisasi Industri Pertanian dan Ekonomi Sirkular

Perubahan pola pikir, perilaku, kebiasaan dan budaya masyarakat atas pengarusutamaan agrobisnis dan pariwisata merupakan modal menuju hilirisasi industri pertanian dan pengembangan ekonomi sirkular. Hilirisasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Hilirisasi industri pertanian dan pengembangan ekonomi sirkular menjadi *game changer* pada Misi 1 yaitu Mewujudkan Agrobisnis dan Pariwisata yang Unggul, Kreatif, Inovatif dan Berkelanjutan karena membawa terobosan baru dalam pengelolaan sektor-sektor ekonomi unggulan. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain pemetaan komoditas pertanian sesuai kondisi geografis, identifikasi jenis komoditas pertanian yang dapat dihilirisasikan, pengembangan infrastruktur penunjang pertanian dan sarana prasarana pertanian, pengembangan teknologi digital dan inovasi melalui pendampingan dan pengembangan keterampilan para wirausaha lokal serta mengembangkan ekonomi



sirkular dalam rangka mendukung *green economy*, penguatan sumber daya manusia, kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan industri lokal termasuk mempromosikan produk lokal baik di tingkat regional maupun nasional, kerjasama dan pengembangan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.

Pengembangan ekonomi sirkular dilakukan melalui optimalisasi sumber daya, penggunaan bibit unggul, penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan pertanian, pengolahan produk industri berbasis komoditas pertanian, pengurangan limbah dan polusi dengan mempertahankan penggunaan faktor-faktor produksi selama mungkin sehingga ekspansi lahan pertanian dan konversi lahan pertanian untuk peruntukkan lain dapat dikurangi.

4.4.3. Transformasi Digital Sektor Publik

Transformasi Digital dalam Pengelolaan Sektor Publik membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas sesuai dengan Misi 2 yaitu Transformasi Digital Sektor Publik. Implementasi sistem *e-government* akan terus ditingkatkan untuk mengurangi rantai layanan birokrasi dan memudahkan administrasi serta mendorong keterbukaan sektor publik. Transformasi digital juga akan membantu penguatan kelembagaan utamanya pada sektor agrobisnis dan pariwisata.

Beberapa strategi yang akan diterapkan antara lain optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*. Guna mempercepat dan membuat birokrasi menjadi lebih efisien, penggunaan *Big Data* dan Kecerdasan Buatan (AI) juga harus semakin dipopulerkan. AI dapat dimanfaatkan untuk memprediksi kebutuhan masyarakat, memperbaiki proses pengambilan keputusan dan mengoptimalkan pelayanan publik. Selain mendorong pelayanan yang lebih cepat dan efektif, pemanfaatan teknologi dalam mendorong partisipasi masyarakat juga menjadi bagian dari agenda super prioritas. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi dengan masyarakat, mendengarkan umpan balik (pengaduan *online*) dan menyampaikan informasi secara efektif. Selanjutnya data dari sistem pengaduan online dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan dalam penyelenggaraan layanan publik. Lebih lanjut bahkan teknologi *blockchain* dapat diadopsi untuk memastikan transparansi dan keamanan transaksi pemerintahan seperti manajemen kontrak, sistem insentif pegawai, hingga pemilihan umum. Untuk memungkinkan itu semua terlaksana, peningkatan kapasitas SDM birokrasi sangat diperlukan agar pegawai pemerintah mampu mengelola dan memanfaatkan teknologi secara efektif. Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendorong peluang kolaborasi dengan perusahaan



teknologi dan *startup* untuk mengembangkan solusi inovatif untuk meningkatkan tata pemerintahan.

4.4.4. Reformasi Sumber Pendapatan Asli Daerah

Saat ini, pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo hanya menyumbang sekitar 14% dari total pendapatan daerah. Oleh karena itu, reformasi sumber pendapatan asli daerah sangat mendesak dilakukan. Reformasi ini mencakup upaya untuk memperbaiki, memperluas dan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan daerah dengan digitalisasi sebagai pilar pentingnya.

Upaya super prioritas untuk mengubah kondisi tersebut antara lain dapat dilakukan melalui:

- Memperkuat regulasi untuk mendorong percepatan digitalisasi transaksi penerimaan pendapatan;
- Digitalisasi pembayaran retribusi dan pajak dengan penerapan pembayaran secara elektronik seperti *tapping box* dan *e-ticketing*;
- Membangun Kesadaran Pajak (*Tax Awareness*) untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui kewajiban pajak pada semua struktur dan lapisan masyarakat;
- Integrasi Data untuk penggalan potensi wajib pajak dengan fokus pada integrasi data potensi pajak dan data kependudukan;
- Pemberian Insentif (*Tax Appreciation*) untuk memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang taat secara masif sehingga menjadi role model bagi masyarakat;
- Optimalisasi deviden dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- Optimalisasi pengelolaan aset daerah secara profesional;
- Meningkatkan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam sebagai dasar Perhitungan Bagi Hasil;
- Optimalisasi sumber pendapatan asli daerah dengan mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi;
- Pengembangan sistem pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap pembayaran pajak dan retribusi;
- Kerjasama dengan sektor swasta untuk mengembangkan proyek-proyek yang dapat menghasilkan pendapatan.

Melalui reformasi sumber pendapatan asli daerah, diharapkan dapat mencapai kemandirian fiskal, meningkatkan pendapatan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

4.4.5. Infrastruktur Pendukung Agrobisnis dan Pariwisata

Peningkatan infrastruktur pendukung Agrobisnis dan Pariwisata terkait konektivitas sentra produksi pertanian dan destinasi pariwisata sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses terhadap layanan. *Game changer* ini membantu pencapaian Misi 3



yaitu Mewujudkan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan. Perencanaan wilayah terintegrasi yang menghubungkan perdesaan dan perkotaan dapat didorong dengan mengidentifikasi peluang pembangunan koridor-koridor ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata. Agenda super prioritas ini antara lain dapat difokuskan pada membangun dan meningkatkan jaringan jalan pada koridor penghubung sentra produksi pertanian dan destinasi pariwisata prioritas serta menyediakan transportasi yang terjangkau dan efisien.

Selain konektivitas transportasi, koneksi terhadap jaringan internet di daerah-daerah sentra produksi pertanian dan destinasi pariwisata juga menjadi agenda super prioritas yang mendukung pencapaian agenda-agenda super prioritas lain. Pemerintah daerah dapat menyediakan program pendanaan dan pembiayaan alternatif yang mendukung proyek-proyek infrastruktur di daerah sentra produksi pertanian dan destinasi pariwisata sebagai bagian pengembangan pusat-pusat ekonomi agrobisnis maupun pariwisata untuk menarik investasi dan meningkatkan aksesibilitas. Upaya ini bisa disertai dengan menyediakan fasilitas bisnis dan perdagangan yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi lokal.

Peningkatan konektivitas dan jaringan infrastruktur ini juga sebagai dukungan untuk penumbuhan desa-desa wisata, integrasi antardestinasi wisata, *agroecoculture tourism*, *wellnes tourism*, wisata edukasi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian kesenjangan antarwilayah akan semakin menurun dan semua desa mampu mandiri dan berdaya dengan karakter dan potensinya masing-masing

4.4.6. Pengentasan Kemiskinan Terintegrasi

Pengentasan kemiskinan terintegrasi berbasis Satu Data Wonosobo merupakan suatu upaya dalam rangka mendorong pengentasan kemiskinan yang lebih efektif demi mewujudkan pembangunan sosial yang inklusif serta SDM yang berdaya saing sesuai dengan Misi 4 yaitu Mewujudkan Pembangunan Sosial yang Inklusif serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing. Penyelenggaraan Satu Data Wonosobo dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih terarah, meningkatkan ketepatan sasaran, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas program dalam pengentasan kemiskinan. Beberapa aspek yang perlu dilakukan antara lain: pencatatan data terpadu yang terintegrasi berbasis teknologi dan penerapan standar keamanan dan privasi yang tinggi.

Pengentasan kemiskinan terintegrasi juga berfokus pada intervensi berbasis tuntas keluarga sesuai dengan diagnosa dan kerentanan yang dialami. Fokus pengentasan kemiskinan terintegrasi berbasis tuntas keluarga adalah peningkatan kualitas hidup kelompok fakir miskin melalui



pemberian jaminan sosial dan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan status pendidikan, kemudahan untuk mengakses sumber-sumber ekonomi dan pemberdayaan menuju kemandirian ekonomi. Strategi tuntas keluarga ini juga diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana wilayah serta penyediaan sarana transportasi untuk kemudahan mengakses layanan publik.

Pengentasan kemiskinan terintegrasi memerlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan mengingat banyaknya dimensi kerentanan dalam keluarga yang harus diselesaikan. Kolaborasi ini juga mencakup kepedulian sosial masyarakat terhadap permasalahan fakir miskin.

4.4.7. Ketahanan Keluarga dan Kesetaraan Gender

Ketahanan keluarga dan kesetaraan gender merupakan aspek penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan Misi 4 yaitu Mewujudkan Pembangunan Sosial yang Inklusif Serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing. Ketahanan keluarga dapat dimaknai sebagai kemampuan menghadapi dan mengelola masalah dalam situasi sulit agar fungsi keluarga tetap berjalan dengan harmonis, untuk mencapai kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin anggotanya sehingga menciptakan SDM yang unggul dan berintegritas.

Peningkatan ketahanan keluarga difokuskan pada membangun keluarga berkualitas agar dapat hidup sehat, kemandirian ekonomi, berpendidikan tinggi, memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan, sadar terhadap hak dan kewajibannya. Disaat bersamaan, memastikan keluarga tetap religius dan menjaga kearifan lokal, berkarakter dan memiliki kapabilitas untuk perencanaan pembangunan keluarga serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Ketahanan keluarga juga bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang menghormati kesetaraan gender, melindungi dan memenuhi hak anak, meningkatkan kualitas dan peran pemuda yang berprinsip keadilan dan inklusivitas.

Penguatan ketahanan keluarga dalam menciptakan SDM yang berdaya saing dan unggul pada sektor pendidikan difokuskan pada integrasi muatan lokal pertanian dan pariwisata serta *entrepreneur* dalam pendidikan di semua jenjang dan jenis pendidikan untuk mendukung visi daerah, peningkatan inovasi layanan pendidikan berbasis teknologi digital untuk meluaskan jangkauan dan kualitas layanan serta peningkatan pendidikan kecakapan hidup dan *entrepreneur* berbasis pesantren, afirmasi pada peningkatan partisipasi pendidikan tinggi vokasi serta peningkatan kualitas *output* pendidikan sesuai kebutuhan pasar kerja.

Kesehatan difokuskan pada pemenuhan layanan kesehatan berbasis siklus hidup secara inklusif, pemberdayaan masyarakat untuk



peningkatan status kesehatan, peningkatan inovasi layanan kesehatan yang mendukung pariwisata, pemanfaatan layanan digital untuk mempermudah akses, pemenuhan jaminan kesehatan serta peningkatan sistem ketahanan kesehatan untuk menghadapi ancaman penyakit baru.

Memperkuat ketahanan keluarga melalui pengarusutamaan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga, agar setiap anak dalam keluarga memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi, mengenyam pendidikan, kesehatan dan dapat beraktualisasi diri. Ketahanan keluarga dalam kesetaraan juga memastikan perempuan memiliki hak yang sama dalam mengakses pekerjaan, meningkatkan kesehatan reproduksi dan literasi. Upaya super prioritas dalam peningkatan ketahanan keluarga dilakukan dengan penguatan kesiapan membangun keluarga, perlindungan dari kekerasan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas perempuan dan pemuda, penyediaan lingkungan pendukung untuk penanaman nilai positif dan perubahan perilaku, penyediaan sarana dan prasarana publik inklusif, penghormatan hak anak, perempuan, disabilitas dan kelompok rentan lainnya serta afirmasi kebijakan yang mendorong kesetaraan gender dan inklusi sosial.

Upaya super prioritas dalam mendorong ketahanan keluarga dan peningkatan kesadaran kesetaraan gender memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta dan organisasi internasional.

4.4.8. Pertanian dan Pariwisata Ramah Lingkungan

Pertanian dan pariwisata ramah lingkungan adalah suatu pendekatan yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, konservasi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi upaya super prioritas Kabupaten Wonosobo mengingat tingginya potensi ancaman degradasi lingkungan akibat pola tanam dan pemanfaatan lahan pertanian selama ini yang kurang memperhatikan aspek keberlanjutan. Upaya strategis ini mendukung pencapaian Misi 5 yaitu Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan melalui penerapan praktik-praktik pertanian berkelanjutan, seperti rotasi tanaman, penggunaan tanaman penutup tanah, penggunaan pupuk organik dan pembatasan penggunaan pestisida dan pengolahan tanah sesuai kontur.

Pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan agrobisnis antara lain melalui pemanfaatan sensor dan monitoring pertanian (kondisi tanah, suhu, kelembaban dan lainnya), pemanfaatan *Global Positioning System* (GPS) untuk pengelolaan lahan dan penanaman secara presisi, penggunaan *Internet of Things (IoT)* untuk pengintegrasian data dan informasi *real time* kepada petani, hingga pemanfaatan *e-commerce* atau pasar digital guna memasarkan produk-produk pertanian. Praktik



pemanfaatan teknologi digital perlu didukung dengan peningkatan kualitas SDM petani. Pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan strategi-strategi pembelajaran digital yang efektif bagi para petani, di antaranya adalah optimalisasi program petani muda.

Pengembangan industri pertanian akan diintegrasikan dengan pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Pengintegrasian ini sekaligus sebagai bagian dari diversifikasi tujuan wisata untuk mengurangi tekanan pada destinasi yang *overload* pengunjung. Hal tersebut akan didorong dengan kolaborasi antardestinas, kemitraan antara sektor publik, swasta dan masyarakat sipil untuk mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan. Beberapa hal taktis yang akan dilakukan antara lain melakukan sertifikasi dan standarisasi usaha-usaha wisata, mendorong pelaku industri pariwisata untuk menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan serta mengkampanyekan etika lingkungan dan tanggung jawab sosial sebagai bagian integral dari pengembangan industri pariwisata dan pertanian.

4.4.9. Reformasi Pengelolaan Sampah

Reformasi pengelolaan sampah merupakan suatu upaya sistematis untuk memperbaiki cara sampah dikelola dari hulu ke hilir dimulai dari rumah tangga yang diprioritaskan pada upaya pemilahan sumber, perbaikan retribusi mendukung pembiayaan persampahan dan penerapan teknologi tepat guna pada tempat penampungan sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Kebijakan ke depan tidak akan menambah TPA baru, namun akan menambah jumlah TPS 3R dan TPST atau sejenisnya.

Implementasi terhadap paradigma baru terhadap konteks pengelolaan sampah yaitu ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular secara sederhana adalah suatu model ekonomi yang berusaha mempertahankan nilai produk, bahan baku dan sumber daya semaksimal mungkin. Pengelolaan sampah dengan prinsip ekonomi sirkular memungkinkan terjadinya siklus material yang mendukung nilai guna barang lebih panjang. Dengan kondisi ini, penerapan ekonomi sirkular bagi pengelolaan sampah akan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan.

Reformasi pengelolaan sampah harus dilakukan secara holistik dan sejalan dengan pendekatan *Quick Wins* yang dilakukan pemerintah meliputi peningkatan kualitas perencanaan dan partisipasi pemangku kepentingan, perbaikan pengelolaan data persampahan, peningkatan kapasitas pemangku kepentingan, fleksibilitas kelembagaan, pendanaan dan *binding mechanism*.



Strategi pengelolaan ini yang tepat akan berkontribusi pada kesejahteraan sosial masyarakat dan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Upaya ini juga sesuai dengan pencapaian misi kelima tentang Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan.



BAB 5 ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. Arah Kebijakan Daerah

Kerangka kerja pembangunan jangka panjang Kabupaten Wonosobo diklasifikasikan menjadi empat tahapan arah kebijakan untuk mendukung visi dan misi daerah. Setiap tahapan didesain untuk mendukung pembangunan berkelanjutan antara satu periode dengan periode berikutnya. Berikut penjabaran arah kebijakan setiap tahapan lima tahunan.

Tabel V. 1 Arah Kebijakan

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029)	Periode II (2030-2034)	Periode III (2035-2039)	Periode IV (2040-2045)
Kabupaten Wonosobo sebagai Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan		Penguatan Landasan Transformasi Ekosistem Agrobisnis dan Pariwisata Yang Maju	Akselerasi Transformasi Ekosistem Agrobisnis dan Pariwisata yang Menyejahterakan	Pemantapan Transformasi Pusat Agrobisnis dan Pariwisata yang Berkelanjutan	Perwujudan Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan
	Mewujudkan Agrobisnis dan Pariwisata yang Unggul, Kreatif, Inovatif dan Berkelanjutan	Penguatan fondasi ekosistem inovasi agrobisnis yang berkelanjutan	Akselerasi dan perluasan kerjasama dalam pengembangan agrobisnis yang berkelanjutan untuk kesejahteraan	Pemantapan Pengarusutamaan pengembangan agrobisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan	Perwujudan pusat agrobisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan
		Penguatan ekosistem pariwisata berbasis potensi daerah	Akselerasi Pengembangan destinasi wisata super prioritas berbasis kemitraan	Pemantapan kolaborasi antara pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang kompetitif dan berkelanjutan	Perwujudan ekspansi pariwisata sebagai lokomotif perekonomian untuk kesejahteraan
		Penyiapan tenaga kerja yang berdaya saing di sektor agrobisnis dan pariwisata	Akselerasi peningkatan kapasitas tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar lokal dan global	Pemantapan produktivitas tenaga kerja	Perwujudan tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing
		Penumbuhan penguatan ekonomi masyarakat	Akselerasi penguatan ekonomi masyarakat	Pemantapan ekonomi masyarakat	Perwujudan ekonomi masyarakat yang sejahtera



Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029)	Periode II (2030-2034)	Periode III (2035-2039)	Periode IV (2040-2045)
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas	Penguatan landasan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas	Akselerasi transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas	Pemantapan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas	Perwujudan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas
	Mewujudkan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan	Akselerasi dan pemerataan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan	Pemantapan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan	Perwujudan kualitas infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan
	Mewujudkan Pembangunan Sosial yang Inklusif serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing	Pemenuhan standar pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh	Akselerasi peningkatan kualitas sistem pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial	Pemantapan ekosistem pendidikan, kesehatan berdaya saing dan kesejahteraan sosial yang inklusif dan berintegritas	Perwujudan SDM yang tangguh terhadap dinamika lokal dan global
	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan	Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim serta kolaborasi antarpemangku kepentingan	Akselerasi penguatan keterpaduan dalam upaya menumbuhkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemantapan dan akselerasi resiliensi terhadap risiko bencana dan perubahan iklim	Perwujudan daerah yang berketahanan iklim dan bencana
		Perlindungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Akselerasi perlindungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Pemantapan perlindungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Perwujudan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan



5.1.1. Arah Kebijakan Periode 1 (2025–2029)

Lima tahun pertama pelaksanaan RPJPD dititikberatkan pada **“Penguatan Landasan Transformasi Ekosistem Agrobisnis dan Pariwisata Yang Maju”**. Langkah ini diambil dengan pertimbangan potensi besar yang dimiliki oleh sektor agrobisnis dan pariwisata dalam meningkatkan perekonomian serta memperkuat daya saing daerah. Tahap pertama ini dilakukan dengan arah kebijakan setiap misi pada periode ini adalah sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan Agrobisnis dan Pariwisata yang Unggul, Kreatif, Inovatif dan Berkelanjutan

Diarahkan pada penguatan fondasi ekosistem inovasi agrobisnis yang berkelanjutan, penguatan ekosistem pariwisata berbasis potensi lokal, penyiapan tenaga kerja yang berdaya saing di sektor agrobisnis dan pariwisata serta penumbuhan penguatan ekonomi masyarakat.

Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas

Diarahkan pada penguatan landasan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas.

Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan

Diarahkan pada peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan.

Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Sosial yang Inklusif serta SDM yang Berdaya Saing

Diarahkan untuk mewujudkan pembangunan sosial yang inklusif serta SDM yang berdaya saing untuk pemenuhan standar pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Misi 5: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan.

Diarahkan pada peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana, perubahan iklim, kolaborasi antarpemangku kepentingan dan perlindungan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.



5.1.2. Arah Kebijakan Periode 2 (2030–2034)

Arah kebijakan pembangunan lima tahunan kedua difokuskan pada **“Akselerasi Transformasi Ekosistem Agrobisnis dan Pariwisata yang Menyejahterakan”**. Dalam tema tersebut, arah kebijakan pembangunan masing-masing misi disusun sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan Agrobisnis dan Pariwisata yang Unggul, Kreatif, Inovatif dan Berkelanjutan

Diarahkan pada akselerasi dan perluasan kerjasama dalam pengembangan agrobisnis yang berkelanjutan untuk kesejahteraan, akselerasi pengembangan destinasi wisata super prioritas berbasis kemitraan, akselerasi peningkatan kapasitas tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar lokal dan global serta akselerasi penguatan ekonomi masyarakat.

Misi 2 Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas

Diarahkan pada akselerasi transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas.

Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan

Diarahkan pada akselerasi dan pemerataan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan.

Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Sosial yang Inklusif serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing

Diarahkan pada Akselerasi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Misi 5: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan

Diarahkan pada akselerasi penguatan keterpaduan dalam upaya menumbuhkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim dan akselerasi perlindungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.



5.1.3. Arah Kebijakan Periode 3 (2035–2039)

Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ketiga dititikberatkan pada **“Pemantapan Transformasi Pusat Agrobisnis dan Pariwisata yang Berkelanjutan”**. Arah pengembangan masing-masing visi adalah sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan Agrobisnis dan Pariwisata yang Unggul, Kreatif, Inovatif dan Berkelanjutan

Diarahkan pada pemantapan pengarusutamaan pengembangan agrobisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan, pemantapan kolaborasi antara pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang kompetitif, berdaya saing dan berkelanjutan, pemantapan produktivitas tenaga kerja dan pemantapan ekonomi masyarakat.

Misi 2: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas

Diarahkan pada pemantapan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas.

Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan

Diarahkan pada pemantapan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan.

Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Sosial yang Inklusif serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing

Diarahkan pada pemantapan ekosistem pendidikan, kesehatan berdaya saing dan kesejahteraan sosial yang inklusif dan berintegritas.

Misi 5: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan

Diarahkan pada pemantapan dan akselerasi resiliensi terhadap risiko bencana dan perubahan iklim dan pemantapan perlindungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.



5.1.4. Arah Kebijakan Periode 4 (2040–2045)

Dalam rangka mencapai tema arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke-IV, yaitu **“Perwujudan Kabupaten Wonosobo Sebagai Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”**, maka disusunlah beberapa arah kebijakan sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan Agrobisnis dan Pariwisata yang Unggul, Kreatif, Inovatif dan Berkelanjutan

Diarahkan pada perwujudan pusat agrobisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan, perwujudan ekspansi pariwisata sebagai lokomotif perekonomian untuk kesejahteraan, perwujudan tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing serta perwujudan ekonomi masyarakat yang sejahtera.

Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Adaptif dan Berintegritas

Diarahkan pada perwujudan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas.

Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan

Diarahkan pada perwujudan kualitas infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan.

Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Sosial yang Inklusif serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing

Diarahkan pada perwujudan SDM yang tangguh terhadap dinamika lokal dan global.

Misi 5: Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Diarahkan pada arah kebijakan perwujudan daerah yang berketahanan iklim dan bencana dan perwujudan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.



5.2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025–2045

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif. Sasaran pokok RPJPD ini memuat arah pembangunan, arah kebijakan dan indikator utama pembangunan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo ditetapkan 5 (lima) sasaran pokok dan 12 (dua belas) arah pembangunan.



Gambar V. 1 Keterkaitan Misi, Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Wonosobo Periode 2025-2045

5.2.1. Sasaran Pokok 1: Terwujudnya pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata yang maju dan berkelanjutan

Sasaran pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata yang maju dan berkelanjutan menjadi sasaran pokok di bidang ekonomi yang harus diwujudkan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang periode 2025-2045. Sasaran pokok tersebut dilaksanakan secara bertahap untuk mendorong perwujudan **Misi 1** yaitu **“Mewujudkan Agrobisnis dan Pariwisata yang Unggul, Kreatif, Inovatif dan Berkelanjutan”** melalui



percepatan pembangunan sektor agrobisnis dan pariwisata dalam rangka peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing. Upaya yang dilakukan fokus pada peningkatan produktivitas ekosistem agrobisnis dan pariwisata yang berkelanjutan berbasis riset, teknologi dan inovasi serta didukung produktivitas tenaga kerja dan kondisi ekonomi masyarakat yang kuat. Upaya ini diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin merata. Sasaran pokok ini difokuskan pada dua arah pembangunan sebagai berikut:

a. Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Unggulan serta Kemandirian Pangan

Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing, perlu adanya peningkatan inovasi dan produktivitas ekonomi di sektor unggulan yaitu sektor agrobisnis dan pariwisata. Kedua sektor tersebut mempunyai potensi besar dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Wonosobo yang difokuskan pada peningkatan produktivitas ekosistem agrobisnis dan pariwisata yang didukung peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Sektor agrobisnis yang meliputi sektor pertanian (dalam arti luas), sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan dilakukan dengan mendorong pertanian berkelanjutan (dari sisi hulu) yang maju, mandiri dan modern serta berbasis riset, teknologi dan inovasi untuk mendukung kemandirian pangan dan hilirisasi pertanian berbasis riset, teknologi dan inovasi dengan didukung kemudahan akses pemasaran serta digitalisasi yang memadai sesuai spesifikasi wilayah, juga penguatan kelembagaan agrobisnis berbasis usaha/koperasi serta perwujudan ekonomi sirkular untuk mendukung *green economy*.

Ketiga aspek agrobisnis tersebut sangat berpengaruh terhadap kemandirian pangan yaitu produksi pertanian (dalam arti luas), distribusi pangan serta pengolahan produk pertanian menjadi produk pangan yang aman dan bergizi. Melalui peningkatan ketiga aspek tersebut diharapkan bisa menjamin pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat sehingga akan tercipta masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Sektor pariwisata yang meliputi sektor akomodasi makan minum, sektor transportasi dan sektor jasa lainnya dilakukan melalui pengembangan *smart tourism* serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.

Perwujudan produktivitas agrobisnis dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan perlu didukung dengan produktivitas tenaga kerja yang optimal.



Untuk menunjang produktivitas agrobisnis dan pariwisata serta produktivitas sektor lainnya dibutuhkan riset dan inovasi. Melalui riset dan inovasi akan menciptakan nilai tambah sehingga meningkatkan daya beli masyarakat terhadap suatu produk. Upaya memperkuat riset dan inovasi dilakukan dengan mendorong dan memajukan perekonomian daerah berbasis iptek.

Arah kebijakan dari arah pembangunan Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Unggulan serta Kemandirian Pangan, sebagai berikut:

i. Sektor Agrobisnis

Agrobisnis terdapat tiga sektor utama yaitu sektor pertanian (dalam arti luas), sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Sektor pertanian dalam dua puluh tahun ke depan masih akan menjadi sektor unggulan untuk menopang perekonomian Kabupaten Wonosobo. Kebijakan peningkatan produktivitas sektor pertanian dilakukan antara lain melalui 1) peningkatan produksi pertanian dengan mengoptimalkan penggunaan dan penyediaan sarana produksi pertanian (pupuk organik, bibit/benih unggul, pestisida organik) secara mandiri, perbaikan infrastruktur pertanian (embung, saluran irigasi, jalan pertanian) serta pengembangan teknologi pasca panen dalam rangka efisiensi produksi, kemandirian pangan serta peningkatan kesejahteraan petani dalam arti luas, 2) peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui digitalisasi dan modernisasi pertanian berbasis riset, teknologi dan inovasi melalui *smart farming*, *smart fishing*, teknologi pakan dan *system logistic* serta ekonomi sirkular, 3) pengembangan pertanian (dalam arti luas) sesuai kawasan pengembangan pertanian kabupaten dan penumbuhan sentra produksi pertanian berbasis komoditas yang diatur melalui regulasi terkait pertanian, 4) identifikasi komoditas dalam rangka hilirisasi pertanian untuk meningkatkan nilai tambah, 5) penguatan kelembagaan petani berbasis korporasi dalam rangka perluasan akses pembiayaan, 6) pengembangan kemitraan (*closed loop*), 7) regenerasi pelaku usaha sektor pertanian, 8) perluasan diversifikasi pertanian, 9) perlindungan terhadap petani dari ancaman gagal panen (asuransi pertanian), 10) standarisasi dan sertifikasi komoditas maupun usaha pertanian, 11) penyusunan regulasi pertanian (dalam arti luas) serta pengembangan riset dan inovasi dalam rangka mendukung modernisasi pertanian dan kemandirian pangan, 12) perluasan kerjasama antarstakeholders untuk penerapan pertanian ramah lingkungan dan riset berbasis teknologi dan inovasi, 13) penerapan insentif dan disinsentif bagi investor di sektor pertanian.



Peningkatan produktivitas sektor pertanian tidak bisa berdiri sendiri tapi harus dikolaborasikan dengan sektor industri melalui hilirisasi pertanian, hal ini merupakan salah satu kebijakan penting dalam transformasi ekonomi yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pertanian. Kebijakan peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan melalui hilirisasi komoditas pertanian antara lain: 1) pengembangan industri pengolahan berbahan baku komoditas pertanian lokal berbasis riset, teknologi dan inovasi, 2) Penguatan industri kecil dan menengah berbasis sentra dan potensi lokal dengan unit usaha koperasi, 3) peningkatan dan penyediaan infrastruktur pendukung industri yang ramah lingkungan, 4) penguatan kelembagaan, kapasitas dan kompetensi pelaku industri pengolahan untuk mendorong produktivitas industri pengolahan dan pengembangan kemitraan, 5) digitalisasi industri pengolahan, 6) penumbuhan wirausaha baru dan sentra industri pengolahan baru, 7) penguatan standarisasi dan sertifikasi produk unggulan sehingga mampu bersaing di pasar nasional dan global.

Komoditas pertanian dan produk industri pengolahan dengan keunggulan kompetitif dan komparatifnya merupakan input sektor perdagangan untuk mendukung aktivitas perekonomian daerah. Kebijakan di sektor perdagangan antara lain: 1) peningkatan akses dan keterjangkauan pangan pokok bagi masyarakat dan akses bahan baku bagi industri pengolahan, 2) peningkatan manajemen dan pelayanan infrastruktur perdagangan, 3) pengembangan ekspor komoditas pertanian, 4) penguatan sistem distribusi produk perdagangan dan 5) penguatan iklim kemitraan pasar produk unggulan.

ii. Kemandirian Pangan

Dua puluh tahun ke depan Kabupaten Wonosobo diharapkan bisa mencapai kemandirian pangan, melalui penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan dari hulu ke hilir secara dinamis dan berkelanjutan. Arah kebijakan untuk mewujudkan kemandirian pangan antara lain: 1) penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan dengan pendekatan *eco-agriculture* (pertanian berbasis lingkungan), 2) pengembangan diversifikasi pangan lokal, 3) peningkatan akses pangan yang terjangkau, cukup, beragam, bergizi, seimbang dan aman secara berkelanjutan, 4) penguatan sistem distribusi pangan, 5) perbaikan kualitas konsumsi pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan, 6) penguatan dan penyempurnaan regulasi terkait pangan, 7) pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*).



iii. Sektor Pariwisata

Pariwisata dalam PDRB terdiri dari sektor akomodasi makan minum, sektor transportasi dan sektor jasa lainnya. Ketiga sektor tersebut menjadi pendukung *core* bisnis pariwisata Kabupaten Wonosobo. Pariwisata Kabupaten Wonosobo terkenal dengan keindahan alam dan keragaman budayanya. Tantangan dalam menghadapi persaingan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing pariwisata semakin mendesak sehingga pembangunan pariwisata ke depan menjadi sangat penting sebagai bentuk transformasi ekonomi Kabupaten Wonosobo. Arah kebijakan pembangunan pariwisata Kabupaten Wonosobo dalam dua puluh tahun ke depan antara lain: 1) pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, pengembangan destinasi prioritas 5 (lima) Dieng baru, pengembangan *Geopark* Nasional Dieng, *Global Geopark* Dieng, *local herbs* dan *Nature Eco Wellness Adventure* (NEWA) serta pengembangan *Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions* (MICE), 2) peningkatan kualitas destinasi wisata dan peningkatan serta perbaikan sarana prasarana destinasi wisata dan ekonomi kreatif yang memadai, 3) peningkatan promosi wisata dan ekonomi kreatif berbasis digital, 4) peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas serta konektivitas dan integrasi antardestinas wisata, 5) penguatan SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif serta penguatan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif, 6) pengembangan kemitraan destinasi wisata, 7) pengembangan *event* dan festival pariwisata multiskala, 8) peningkatan pelayanan dan kualitas layanan melalui digitalisasi sarana penunjang pariwisata, 9) pengembangan regulasi serta riset dan inovasi yang mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif, 10) peningkatan akses permodalan bagi para pelaku pariwisata dan sektor-sektor jasa pendukungnya dan 11) perlindungan, pemanfaatan, pengembangan dan peningkatan cagar budaya, kesenian dan warisan budaya lokal.

iv. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas sektor agrobisnis dan pariwisata harus didukung dengan tenaga kerja yang kompeten, adaptif dan inovatif. Untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, arah kebijakan yang dilaksanakan dalam dua puluh tahun ke depan antara lain: 1) pengembangan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dan kewirausahaan, 2) peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja dan pelaku usaha agrobisnis dan pariwisata, 3) penguatan kemitraan sistem magang kerja, pelatihan, transfer teknologi, 4) penciptaan lingkungan kerja yang sehat, aman serta perlindungan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja.



v. Penguatan Riset dan Inovasi

Riset dan inovasi berperan penting dalam peningkatan pertumbuhan produktivitas pembangunan di segala bidang. Penerapan inovasi teknologi berpotensi menciptakan nilai tambah yang besar sehingga daya beli masyarakat terhadap produk yang dihasilkan akan meningkat. Upaya pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk mendorong serta memajukan perekonomian daerah berbasis iptek akan terus didorong dalam dua puluh tahun ke depan melalui arah kebijakan sebagai berikut: 1) penguatan peran dan kapasitas lembaga litbang, 2) peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang dinamis dan produktif, 3) penguatan kerangka regulasi dan kebijakan riset dan inovasi, 4) pembinaan tata kelembagaan riset dan inovasi, 5) peningkatan kolaborasi dan kerjasama riset antarlembaga litbang dan *non* litbang, 6) peningkatan budaya riset berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah, 7) peningkatan difusi/penyebaran, adopsi dan pemanfaatan hasil riset, teknologi dan inovasi, 8) peningkatan diseminasi dan publikasi hasil riset.

Ketercapaian sasaran pokok “terwujudnya pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata yang maju dan berkelanjutan” pada arah pembangunan “inovasi dan produktivitas ekonomi unggulan serta kemandirian pangan” diukur dengan indikator utama pembangunan sebagai berikut: 1) rasio PDRB sektor pertanian, 2) prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, 3) indeks ketahanan pangan 4) rasio PDRB industri pengolahan, 5) Rasio kewirausahaan daerah, 6) rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB, 7) rasio PDRB sektor perdagangan, 8) rasio PDRB sektor pariwisata, 9) rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum, 10) jumlah tamu wisatawan mancanegara, 11) jumlah tamu wisatawan nusantara, 12) rata-rata lama tinggal wisatawan, 13) persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan, 14) jumlah pengunjung tempat bersejarah, 15) persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir, 16) tingkat pengangguran terbuka dan 17) kapabilitas inovasi.

b. Stabilitas Ekonomi Daerah

Stabilitas ekonomi daerah diharapkan akan mendorong terwujudnya perekonomian Kabupaten Wonosobo yang lebih produktif dan tumbuh optimal yang akan berdampak pada penguatan ekonomi masyarakat. Stabilitas ekonomi daerah merupakan fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, pembangunan ekonomi harus difokuskan pada sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi besar untuk



mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan. Salah satu arah pembangunan yang strategis adalah mengembangkan ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata. Kebijakan terkait stabilitas ekonomi daerah Kabupaten Wonosobo dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada: 1) pengendalian harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, 2) penguatan investasi yang adaptif, baik investasi pemerintah melalui penyediaan infrastruktur dasar, penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan kemandirian industri, maupun investasi swasta melalui penanaman modal, 3) memperluas investasi sektor *riil* serta dukungan pengembangannya melalui kebijakan usaha dan perbaikan infrastruktur. Pengendalian inflasi dan penguatan investasi ini diharapkan akan meningkatkan transaksi keuangan di perbankan baik itu kredit maupun tabungan yang dilakukan oleh masyarakat, yang akan berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Ketercapaian sasaran pokok “terwujudnya pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata yang maju dan berkelanjutan” pada arah pembangunan “stabilitas ekonomi daerah” diukur dengan indikator utama pembangunan sebagai berikut: 1) pertumbuhan ekonomi, 2) PDRB per kapita, 3) disparitas harga, 4) pembentukan modal tetap bruto, 5) total dana pihak ketiga pada bank milik kabupaten/kota per PDRB, 6) total kredit pada bank milik kabupaten per PDRB.



Tabel V. 2 Sasaran pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata yang Maju dan Berkelanjutan Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target 2045	
Terwujudnya pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata yang maju dan berkelanjutan	Inovasi dan produktivitas ekonomi unggulan serta kemandirian pangan	Rasio PDRB sektor Pertanian	%	28,76	26,10	
		Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	%	11,16	2,90	
		Indeks Ketahanan Pangan	Angka	78,23	82,97	
		Rasio PDRB Industri pengolahan	%	18,50	21,42	
		Rasio Kewirausahaan daerah	%	4,62	5,43	
		Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	6,34	19,58	
		Rasio PDRB sektor Perdagangan	%	16,65	18,95	
		Rasio PDRB Sektor Pariwisata	%	6,94	8,90	
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	3,35	6,94	
		Jumlah Tamu wisatawan mancanegara	Ribu orang	0,68	4,70	
		Jumlah tamu wisatawan nusantara	Ribu orang	1.743	2.750	
		Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Angka (hari)	1,88	2,17	
		Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan	%	60,46	76,91	
		Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	144.000	204.000	
		Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	21,35	30,92	
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,00-3,00	2,98-2,68	
		Kapabilitas Inovasi	Angka	2,82	3,25	
	Stabilitas Ekonomi Daerah		Pertumbuhan Ekonomi	%	4,30	4,00-5,00
			Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita	Juta rupiah	27,37-27,56	140,18-164,64
			Disparitas Harga	%	±10,00	±10,00
Pembentukan Modal Tetap Bruto			%	19,26	21,13	
Total dana pihak ketiga pada bank milik kabupaten/kota per PDRB			%	6,47	4,13	
Total kredit pada bank milik kabupaten per PDRB			%	7,31	4,51	



5.2.2. Sasaran Pokok 2: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas

Pencapaian sasaran pokok terkait tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas untuk mendorong pencapaian **Misi 2** yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas”**. Sasaran ini merupakan tantangan yang memerlukan komitmen kuat dari pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Pemerintahan adaptif dan berintegritas mendorong pemerintahan terselenggara secara transparan dan akuntabel. Keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut akan memastikan bahwa pemerintah berfungsi secara efektif dalam memastikan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas, ditandai oleh kemampuan berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi dan teknologi, seiring dengan terus melakukan reformasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Pemerintahan yang berintegritas menegakkan transparansi, akuntabilitas, etika publik, kemandirian daerah serta memiliki komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi melalui kebijakan yang jelas dan sistem pengawasan yang efektif. Pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui tiga arah pembangunan sebagai berikut :

a. Ketentraman dan Ketertiban

Ketentraman dan ketertiban menjadi faktor penting dalam melaksanakan pembangunan daerah. Selama dua puluh tahun ke depan arah pembangunan ketentraman dan ketertiban akan difokuskan pada arah kebijakan: penguatan keamanan dan ketertiban untuk menjaga wilayah yang kondusif.

Ketercapaian sasaran pokok “terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas” pada arah pembangunan “ketentraman dan ketertiban” diukur dengan indikator utama pembangunan: Jumlah kejadian konflik SARA.

b. Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif dan Kolaboratif

Tata kelola yang berintegritas, adaptif dan kolaboratif menjadi kunci penting di level daerah. Kabupaten Wonosobo akan lebih responsif dan membangun koordinasi dengan pemangku kebijakan. Arah pembangunan dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada kebijakan meliputi : 1) penguatan sistem akuntabilitas organisasi pemerintah, 2) penguatan manajemen organisasi dan proses bisnis yang efektif dan berorientasi pada hasil serta berbasis riset, 3) penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko, 4) penguatan manajemen talenta aparatur



berbasis sistem merit, 5) penguatan kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk sinergi program dan pembiayaan pembangunan daerah, 6) pengembangan struktur dan proses kerja organisasi pemerintah daerah agar efektif, efisien, adaptif, kolaboratif dan berintegritas, 7) peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik agar inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, 8) penyederhanaan dan penguatan regulasi yang mendukung prioritas daerah, 9) integrasi dan digitalisasi data potensi pendapatan, diversifikasi sumber pendapatan, peningkatan manajemen pemanfaatan aset, 10) pengembangan sistem transaksi elektronik pada pemungutan pajak dan retribusi daerah, 11) peningkatan kinerja BUMD untuk mendukung pendapatan daerah.

Ketercapaian sasaran pokok “terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas” pada arah pembangunan “regulasi dan tata kelola yang adaptif dan kolaboratif” diukur dengan indikator utama pembangunan sebagai berikut: 1) Indeks Reformasi Birokrasi, 2) Indeks Integritas Nasional, 3) Indeks Pelayanan Publik, 4) Indeks Reformasi Hukum, 5). Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB dan 6) *Return on Asset (RoA)* BUMD.

c. Transformasi Digital

Era perkembangan teknologi informasi, arah pembangunan transformasi digital menjadi bagian penting sebagai roda akselerasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas. Arah kebijakan dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada kebijakan meliputi: 1) digitalisasi tata kelola pemerintahan dan 2) penguatan regulasi dan kerjasama untuk meningkatkan kapasitas dan akses informasi bagi masyarakat.

Ketercapaian sasaran pokok “terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas” pada arah pembangunan “transformasi digital” diukur dengan indikator utama pembangunan sebagai berikut: 1) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan 2) persentase rumah tangga dengan akses internet.



Tabel V. 3 Sasaran pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target 2045
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas	Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	0,00	0,00
		Tata Kelola yang berintegritas Adaptif Kolaboratif	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	68,12
	Indeks Integritas Nasional	Angka	75,28	91,56	
	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,14	5,00	
	Indeks Reformasi Hukum	Angka	38,20	90,00	
	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,55	0,52	
	<i>Return on Assets (RoA)</i> BUMD	%	3,18	7,87	
	Transformasi Digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,60	4,50
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	70,00	100,00

5.2.3. Sasaran Pokok 3: Terwujudnya Infrastruktur Layanan Dasar dan Pendukung Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Pencapaian sasaran pokok terkait infrastruktur layanan dasar dan pendukung ekonomi yang inklusif untuk mendorong pencapaian **Misi 3** yaitu **“Mewujudkan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Perwujudan sasaran pokok dilakukan secara bertahap dan secara terus menerus untuk mendorong ketersediaan infrastruktur layanan dasar dan pendukung ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Infrastruktur layanan dasar dalam hal ini berupa rumah layak huni, air minum, sanitasi (air limbah domestik). Infrastruktur pendukung ekonomi dalam hal ini berupa irigasi dan sarana dan prasarana sumber daya air, infrastruktur transportasi (jalan, kelengkapan jalan, sarana dan prasarana transportasi lainnya). Sasaran pokok ini dimaksudkan juga untuk mendukung misi yang lain guna mendukung pertumbuhan ekonomi pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, sasaran pokok ini digunakan untuk memastikan bahwa akses dan kualitas infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan dapat meningkatkan daya saing dan



kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok tersebut difokuskan pada arah pembangunan:

Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan perkotaan dan perdesaan memiliki keterkaitan satu sama lain (*urban rural linkage*). Keterkaitan ini misalnya bahwa kawasan perdesaan sebagai penghasil produk pertanian yang dibutuhkan di kota. Produk-produk ini dipasarkan di pasar kota/pusat kawasan perdesaan melalui sistem distribusi yang menghubungkan desa dengan kota. Sementara itu, kawasan perkotaan berfungsi sebagai pusat ekonomi dengan berbagai aktivitas perdagangan dan jasa. Peran ini menciptakan permintaan produk dan jasa dari perdesaan serta membuka peluang kerja bagi penduduk desa di kota. Keterkaitan antara kawasan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Wonosobo terutama dihubungkan dengan jaringan transportasi konektivitas wilayah. Jaringan transportasi yang baik menghubungkan kawasan perkotaan dan perdesaan, memfasilitasi pergerakan barang dan orang antara kedua kawasan ini. Salah satu upaya untuk mendukung pemerataan pembangunan wilayah dengan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Ketersediaan infrastruktur jalan, angkutan umum dan infrastruktur transportasi lainnya memainkan peran penting dalam keterkaitan ini. Infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah perkotaan dan perdesaan, di Kabupaten Wonosobo dapat meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan produktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan antarwilayah dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk semua lapisan masyarakat. Kebijakan secara umum pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi terutama diarahkan pada: 1) peningkatan infrastruktur pada sektor transportasi, pekerjaan umum dan pelayanan dasar lainnya, 2) peningkatan konektivitas antarwilayah perdesaan dan perkotaan, 3) peningkatan pelayanan transportasi umum (darat dan penyeberangan waduk) pendukung kegiatan agrobisnis dan pariwisata, 4) peningkatan kemantapan jalan koridor pendukung agrobisnis dan pariwisata, 5) peningkatan jalan berkeselamatan dan penataan parkir, 6) peningkatan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder di tingkat kabupaten, 7) pemenuhan akses terhadap hunian layak dan terjangkau, 8) peningkatan kualitas kawasan permukiman, 9) peningkatan akses air minum layak dan aman, 10) pengembangan potensi desa mandiri, 11) advokasi pemenuhan infrastruktur inklusif,



12) peningkatan sinergi kolaborasi dan sinergi pendanaan infrastruktur, 13) penguatan dan implementasi kerangka regulasi insentif dan disinsentif retribusi perizinan pembangunan infrastruktur/fasilitas pendukung sektor agrobisnis dan pariwisata berdasarkan aturan tata ruang, 14) peningkatan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang (RTRW dan RDTR), 15) transformasi penataan kawasan perkotaan berkelanjutan, 16) peningkatan koridor pertumbuhan wilayah dan penguatan koridor pemerataan wilayah, 17) penguatan peran lembaga desa dalam pemberdayaan, peningkatan ekonomi dan kapasitas aparatur desa dan 18) peningkatan Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP).

Ketercapaian sasaran pokok “terwujudnya infrastruktur layanan dasar dan pendukung ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan” pada arah pembangunan “perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi” diukur dengan indikator utama pembangunan sebagai berikut: 1) persentase panjang jalan kabupaten kondisi permukaan mantap, 2) persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota, 3) indeks kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten, 4) rumah tangga dengan akses hunian layak, 5) akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan dan 6) persentase akses air minum layak, 7) persentase desa mandiri.

Tabel V. 4 Sasaran pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Infrastruktur Layanan Dasar dan Pendukung Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target 2045
Terwujudnya Infrastruktur Layanan Dasar dan Pendukung Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Permukaan Mantap	%	63,27	75,00
		Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota	%	1,10	23,08
		Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	angka	66,95	75,00
		Rumah tangga dengan akses hunian layak	%	47,56	100,00
		Persentase desa mandiri	%	33,90	97,46



Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target 2045
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaian	%	41,89	100,00
		Persentase Akses Air Minum Layak	%	95,81	100,00

5.2.4. Sasaran Pokok 4: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sejahtera dan Berkualitas

Sasaran pokok terkait dengan terwujudnya sumber daya manusia unggul yang sejahtera dan berkualitas dimaksudkan untuk mendukung **Misi 4** yaitu “**Mewujudkan Pembangunan Sosial yang Inklusif serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing**”. Sasaran pokok ini juga ditujukan untuk memastikan sumber daya manusia Wonosobo unggul dalam aspek pendidikan, kesehatan dan standar hidup. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya sumber daya manusia yang sejahtera dan berkualitas difokuskan pada empat arah pembangunan sebagai berikut:

a. Kesehatan untuk Semua

Perwujudan Kesehatan untuk Semua merupakan perwujudan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan pemenuhan pelayanan kesehatan yang kontinu, inklusif dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat berdasarkan siklus hidup. Upaya ini juga disertai dengan pelibatan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif serta memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat.

Peningkatan kolaborasi *pentahelix* juga dibutuhkan untuk perluasan dukungan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang berkelanjutan seperti dalam penyediaan ruang-ruang publik dan penataan ruang kabupaten yang layak huni dan sehat. Kebijakan untuk mewujudkan Kesehatan untuk Semua diarahkan antara lain: 1) transformasi dan integrasi pelayanan kesehatan primer untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), 2) peningkatan sistem kesehatan terintegrasi, 3) peningkatan upaya kesehatan ibu dan anak, 4) peningkatan status gizi dan kualitas pangan masyarakat, 5) peningkatan inovasi layanan kesehatan yang mendukung pemajuan pariwisata dan agrobisnis, 6) perluasan akses dan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan, 7) peningkatan riset dan penelitian bidang kesehatan, 8) memperkuat sistem ketahanan kesehatan untuk



penanganan ancaman penyakit baru, 9) eliminasi penyakit menular, 10) pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat secara mandiri, 11) serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang aktivitas fisik dan ruang terbuka publik.

Ketercapaian sasaran pokok “terwujudnya sumber daya manusia yang sejahtera dan berkualitas” pada arah pembangunan “kesehatan untuk semua” diukur dengan indikator utama pembangunan sebagai berikut: 1) usia harapan hidup, 2) jumlah kematian ibu, 3) prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita, 4) cakupan penemuan dan pengobatan tuberkulosis (*treatment coverage*), 5) angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*), 6) cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, 7) prevalensi gizi buruk dan 8) angka kelangsungan hidup bayi.

b. Pendidikan Berkualitas secara Inklusif

Pendidikan merupakan hal fundamental dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia. Hal ini karena pendidikan memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 dalam pencapaian pendidikan yang berkualitas secara inklusif diarahkan pada: 1) pendekatan layanan pendidikan formal dan informal, 2) pemerataan kualitas pendidikan antarsatuan pendidikan yang inklusif untuk meningkatkan partisipasi pendidikan, 3) percepatan wajib belajar 13 tahun, 4) peningkatan kualitas output pendidikan, 5) pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), 6) pengintegrasian muatan lokal *life skills* yang mendukung upaya pemajuan sektor pertanian dan pariwisata, 7) pemenuhan dukungan pada upaya perluasan akses pendidikan vokasi tematik pariwisata dan agrobisnis dan afirmasi peningkatan akses pendidikan vokasi sebagai bentuk insentif usaha pertanian, 8) peningkatan inovasi layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, 9) penguatan kualitas output pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berdaya saing dan memiliki kecakapan hidup, 10) penguatan sistem pendidikan yang inklusif dan bermutu untuk menjamin semua masyarakat terakses pendidikan yang berkualitas, 11) penguatan literasi dan edukasi masyarakat termasuk dalam pemajuan budaya dan kearifan lokal, teknologi informasi dan *science*, dan 12) penguasaan *future skill* dan penguasaan bahasa internasional.



Ketercapaian sasaran pokok “terwujudnya sumber daya manusia yang sejahtera dan berkualitas” pada arah pembangunan “pendidikan berkualitas secara inklusif” diukur dengan indikator utama pembangunan sebagai berikut: 1) persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada *asesmen* tingkat nasional, 2) rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun, 3) harapan lama sekolah, 4) proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi, 5) angka partisipasi sekolah 5-6 tahun, dan 6) tingkat pemanfaatan perpustakaan.

c. Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Ketahanan Sosial Budaya

Perlindungan sosial dan ketahanan sosial budaya ditujukan untuk memangkas tingkat kerentanan dengan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak warga negara yang adil dan inklusif. Hal ini mencakup berbagai upaya untuk melindungi individu dan kelompok yang rentan dari berbagai risiko sosial, ekonomi dan lingkungan serta meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.

Perwujudan perlindungan sosial yang adaptif dan ketahanan sosial budaya diarahkan pada: 1) transformasi layanan kesejahteraan sosial melalui integrasi satu data kesejahteraan sosial untuk memastikan ketepatan program, 2) pemenuhan SPM, 3) penguatan skema pendampingan dan perlindungan sosial menuju kemandirian sosial dan ekonomi secara inklusif berdasarkan siklus hidup, 4) peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi dengan strategi intervensi beragam yang berkeadilan, 5) perluasan cakupan dan akses bagi penerima manfaat, 6) pemberdayaan masyarakat dan desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian berbasis potensi lokal.

Ketercapaian sasaran pokok “terwujudnya sumber daya manusia yang sejahtera dan berkualitas” pada arah pembangunan “perlindungan sosial yang adaptif dan ketahanan sosial budaya” diukur dengan indikator utama pembangunan sebagai berikut: 1) persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan, 2) tingkat kemiskinan, 3) distribusi pengeluaran kriteria bank dunia, 4) cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

d. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Inklusifitas

Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan inklusifitas ditujukan untuk menciptakan keluarga sebagai unit dasar masyarakat yang sejahtera dan berdaya, mendorong kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan dan memastikan inklusifitas dengan memberikan akses yang adil terhadap sumber daya, layanan dan kesempatan bagi semua kelompok masyarakat. Ketiga hal di atas



saling terkait dan penting untuk memastikan kualitas hidup yang berpengaruh pada perkembangan SDM. Arah kebijakan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan inklusifitas adalah: 1) penguatan ketahanan dan kualitas keluarga, 2) penguatan kelembagaan penyelenggara pelayanan sosial, 3) peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pelayanan sosial, 4) penguatan pengarusutamaan gender, pemenuhan dan perlindungan hak anak, dan 5) peningkatan kualitas dan partisipasi serta prestasi pemuda,

Ketercapaian sasaran pokok “terwujudnya sumber daya manusia yang sejahtera dan berkualitas” pada arah pembangunan “keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan inklusifitas” diukur dengan indikator utama pembangunan sebagai berikut: 1) Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga), 2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, dan 3) Indeks Ketimpangan Gender.

Tabel V. 5 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sejahtera dan Berkualitas di Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target 2045	
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sejahtera dan Berkualitas	Kesehatan Untuk Semua	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,23	80,15	
		Jumlah Kasus Kematian Ibu	Angka (kasus)	4,00	1,00	
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	%	20,65	5,70	
		Cakupan Penemuan dan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	90,00	100,00	
		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	90,00	95,00	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	97,66	99,50	
		Prevalensi Gizi Buruk	%	0,60	0,32	
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi	%	98,75	99,46	
	Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif	a. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				
		i. Literasi Membaca SD	%	73,29	98,57	



Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target 2045
		i. Literasi Membaca SMP	%	83,14	97,00
		II. Numerasi SD	%	61,04	95,63
		II. Numerasi SMP	%	77,38	98,20
		b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Angka (Tahun)	7,94	9,79 - 10,09
		c. Harapan Lama Sekolah	Angka (Tahun)	12,22	13,89
		Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	4,76	6,76
		Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun	%	96,41	100,00
		Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,56	0,73
	Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Ketahanan Sosial Budaya	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	87,00	91,45
		Tingkat Kemiskinan	%	13,45-14,20	0,00-0,69
		Distribusi pengeluaran kriteria bank dunia	%	19,95-20,15	25,95-28,15
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	60,50	76,00
	Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan inklusifitas	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	61,82-64,38	76,55- 79,71
		Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	%	63,83	79,90
		Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,47 – 0,46	0,24- 0,17

5.2.5. Sasaran Pokok 5: Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Berketahanan Iklim dan Bencana

Pencapaian sasaran pokok terkait terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, berketahanan iklim dan bencana akan mendukung Kabupaten Wonosobo yang berkelanjutan untuk mendorong pencapaian **Misi 5** yaitu **“Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan”**. Hal ini terkait dengan sumber daya alam hayati dan *nonhayati* yang terkelola dengan baik dan lestari akan membantu keberlanjutan pembangunan. Dengan



melestarikan sumber daya alam dan menjaga lingkungan hidup, risiko bencana akan berkurang. Arah pembangunan difokuskan pada dua arah pembangunan sebagai berikut:

a. Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup yang berkualitas dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup. Lingkungan hidup berkualitas diarahkan pada keseimbangan antara kemampuan sumber daya alam dan lingkungan. Hal tersebut juga diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik sosial dan kerusakan alam sehingga generasi mendatang dapat menikmati hasil pembangunan dan merasakan kualitas hidup yang baik. Kebijakan dalam upaya terwujudnya lingkungan hidup berkualitas diarahkan pada: 1) perlindungan, akselerasi dan pemantapan dalam pemulihan kualitas lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, 2) peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui perubahan perilaku masyarakat menuju gaya hidup berkelanjutan, 3) pemulihan/rehabilitasi lahan yang mengalami degradasi lingkungan, 4) penerapan praktik pertanian berkelanjutan, 5) peningkatan konservasi tanah dan air, 6) pengelolaan tata kelola sumber daya air berkelanjutan, 7) pelestarian keanekaragaman hayati, 8) fasilitasi sinergi pengembangan perhutanan sosial berkelanjutan (*agrosilvopastura*, *agroforestry* dan lain sebagainya), 9) peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem seperti wisata alam, air dan panas bumi sesuai kewenangan, 10) pengembangan instrumen pemulihan lingkungan hidup (skema imbal jasa lingkungan), 11) peningkatan akses air limbah domestik layak dan aman, 12) peningkatan pengelolaan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan limbah medis, 13) peningkatan pengelolaan persampahan, 14) peningkatan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), 15) penerapan ekonomi sirkular persampahan sebagai dukungan ekonomi hijau, 16) peningkatan kolaborasi multipihak dalam pengelolaan lingkungan, dan 17) sinergi pengembangan energi baru terbarukan.

Ketercapaian sasaran pokok “terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, berketahanan iklim dan bencana” pada arah pembangunan “lingkungan hidup berkualitas” diukur dengan indikator utama pembangunan sebagai berikut: 1) timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah, 2) rumah tangga dengan akses sanitasi aman, dan 3) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.



b. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim penting untuk diperhatikan. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, tidak dapat dihindari dan dapat terjadi sewaktu-waktu akibat perubahan iklim, sementara aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan dapat memperburuk dampaknya. Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko penyakit menular seperti yang dibawa oleh nyamuk/hewan lainnya dan/atau ancaman penyakit baru. Fenomena ini perlu menjadi perhatian yang serius untuk ketercapaian visi Kabupaten Wonosobo menjadi pusat agrobisnis dan pariwisata terkemuka di Jawa Tengah. Perubahan iklim diindikasikan dapat menyebabkan perubahan pola tanam, penurunan produktivitas pertanian, peningkatan biaya produksi pertanian, dan ancaman kerusakan alam/atau panorama pariwisata.

Kebijakan dalam upaya terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim diarahkan pada: 1) peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim serta kolaborasi antarpemangku kepentingan, 2) penguatan keterpaduan, pemantapan dan akselerasi resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, 3) pengembangan infrastruktur hijau dan tangguh bencana 4) peningkatan prinsip pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim dengan penerapan *smart agriculture*, pertanian konservasi dan pertanian regeneratif, 5) pengembangan pembangunan gedung dan hunian yang rendah karbon, 6) pengembangan transportasi ramah lingkungan (angkutan massal), 7) peningkatan kesiapsiagaan dan ketangguhan menghadapi bencana, dan 8) peningkatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan bencana.

Ketercapaian sasaran pokok “terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, berketahanan iklim dan bencana” pada arah pembangunan “resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim” diukur dengan indikator utama pembangunan sebagai berikut: 1) Indeks Risiko Bencana, dan 2) penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).



Tabel V. 6 Sasaran pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target 2045
Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Berketahanan Iklim dan Bencana	Lingkungan hidup berkualitas	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	9,53	90,00
		Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	4,53	84,53
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	76,62	77,50
	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana	%	75,00	50,00
		Penurunan emisi GRK	TonCO ₂ eq (kumulatif)	1.691.201,89	24.322.537,31*

* Estimasi target penurunan Emisi GRK Kumulatif dari periode tahun 2010-2045 di wilayah Kab Wonosobo adalah 24.322.537,31 TonCO₂eq yg ditetapkan berdasarkan angka proyeksi sementara penurunan emisi GRK dalam skenario Ambisius yang diterapkan oleh BAPPENAS dalam pemodelan dinamika sistem yang menggambarkan penerapan beragam bentuk kebijakan pembangunan rendah karbon yang didukung oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten Kota dan pihak non pemerintah

Tabel V. 7 Penyelarasan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Wonosobo dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

RPJPD Provinsi Jawa Tengah		RPJPD Kabupaten Wonosobo	
Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
Terwujudnya sumber daya manusia unggul dan berdaya saing yang inklusif	CJ01. Kesehatan untuk semua	4. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sejahtera dan Berkualitas	Kesehatan untuk semua
	CJ02. Pendidikan berkualitas secara inklusif		Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif
	CJ03. Perlindungan sosial yang adaptif		Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Ketahanan Sosial Budaya
Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing	CJ04. Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi	1. Terwujudnya pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata yang maju dan berkelanjutan	Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Unggulan serta Kemandirian Pangan
	CJ05. Penerapan ekonomi hijau		



RPJPD Provinsi Jawa Tengah		RPJPD Kabupaten Wonosobo	
Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
inklusif dan berkelanjutan	CJ07. Integral ekonomi domestik dan global		
	CJ06. Transformasi digital	2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas	Transformasi digital
	CJ08. Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	3. Terwujudnya Infrastruktur Layanan Dasar dan Pendukung Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Perkotaan dan Perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis	CJ09. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas, adaptif dan kolaboratif	2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas	Tata Kelola yang berintegritas adaptif kolaboratif
Terwujudnya kondusifitas wilayah didukung stabilitas ekonomi makro daerah	CJ10. Ketentraman dan ketertiban, serta demokrasi substansial	2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas	Ketentraman dan Ketertiban
	CJ11. Stabilitas ekonomi makro daerah	1. Terwujudnya pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Stabilitas ekonomi daerah
	CJ12. Daya saing daerah dan ketahanan wilayah		
Terwujudnya masyarakat berkarakter dan berketahanan sosial	CJ13. Pemajuan kebudayaan dan pendidikan karakter	1. Terwujudnya pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Unggulan serta Kemandirian Pangan
		4. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sejahtera dan Berkualitas	Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Ketahanan Sosial Budaya
	CJ14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	4. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sejahtera dan Berkualitas	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan inklusifitas
Terwujudnya ketahanan sumber daya alam, lingkungan hidup dan bencana	CJ15. Lingkungan hidup berkualitas	5. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan	Lingkungan hidup berkualitas
	CJ17. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim		Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
	CJ16. Ketahanan energi, air dan kemandirian pangan	3. Terwujudnya Infrastruktur Layanan Dasar dan Pendukung Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Perkotaan dan Perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi



Tabel V. 8 Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045

No IUP	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Sumber Data	Satuan	Baseline (2025)	Target 2045
1.1	Rasio PDRB sektor Pertanian	BPS	%	28,76	26,10
1.2	Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi pangan	BPS	%	11,16	2,90
1.3	Indeks ketahanan pangan	Badan Pangan Nasional (BAPANAS)	Angka	78,23	82,97
1.4	Rasio PDRB Industri pengolahan	BPS	%	18,50	21,42
1.5	Rasio Kewirausahaan daerah	Sakernas BPS	%	4,62	5,43
1.6	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	Volume usaha koperasi, urusan Koperasi dan UKM	%	6,34	19,58
1.7	Rasio PDRB sektor Perdagangan	BPS	%	16,65	18,95
1.8	Rasio PDRB Sektor Pariwisata	BPS	%	6,94	8,90
1.9	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	BPS	%	3,35	6,94
1.10	Jumlah Tamu wisatawan Manca negara	Disparbud	ribu orang	0,68	4,70
1.11	Jumlah tamu wisatawan nusantara	Disparbud	ribu orang	1.743	2.750
1.12	Rata - Rata Lama Tinggal Wisatawan	Disparbud	hari	1,88	2,17
1.13	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan	Disparbud	%	60,46	76,91
1.14	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Disparbud	orang	144.000,00	204.000,00
1.15	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	Disdikpora	%	21,35	30,92
1.16	Tingkat Pengangguran Terbuka	BPS	%	4,00 - 3,00	2,98 - 2,68
1.17	Kapabilitas Inovasi	BRIN	Angka	2,82	3,25
1.18	Pertumbuhan Ekonomi	BPS	%	4,30	4,00 - 5,00
1.19	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita	BPS	juta rupiah	27,37 - 27,56	140,18-164,64
1.20	Disparitas Harga	Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP)	%	± 10,00	± 10,00



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045

No IUP	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Sumber Data	Satuan	Baseline (2025)	Target 2045
1.21	Pembentukan Modal Tetap Bruto	BPS	%	19,26	21,13
1.22	Total dana pihak ketiga pada bank milik kabupaten/kota per PDRB	Total DPK pada bank Milik Kabupaten/Kota: Laporan Keuangan (<i>Audited</i>) Perbankan PDRB: BPS	%	6,47	4,13
1.23	Total kredit pada bank milik kabupaten per PDRB	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota: Laporan Keuangan (<i>Audited</i>) Perbankan PDRB: BPS	%	7,31	4,51
2.1	Jumlah kejadian konflik SARA	Bakesbangpol	Kali	0,00	0,00
2.2	Indeks Reformasi Birokrasi	Kementerian PAN-RB	Angka	68,12	80,00
2.3	Indeks integritas nasional	Survey Penilaian Integritas KPK RI	Angka	75,28	91,56
2.4	Indek pelayanan publik	Kementerian PAN-RB	Angka	4,14	5,00
2.5	Indeks reformasi hukum	Kementerian Hukum dan HAM	Angka	38,2	90,00
2.6	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	BPS, SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah), LRA (Laporan Realisasi Anggaran)	%	0,55	0,52
2.7	<i>Return on Assets (RoA)</i> BUMD	Laporan Keuangan BUMD, BPS	%	3,18	7,87
2.8	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Angka	3,60	4,50
2.9	Persentase rumah tangga dengan akses internet	BPS	%	70,00	100,00
3.1	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Permukaan Mantap	DPUPR	%	63,27	75,00
3.2	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota	Dinas Permukimhub	%	1,10	23,08
3.3	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	ePAKSI Ditjen SDA Kemen PUPR	Angka	66,95	75,00
3.4	Rumah tangga dengan akses hunian layak	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS	%	47,56	100,00



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045

No IUP	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Sumber Data	Satuan	Baseline (2025)	Target 2045
3.5	Persentase desa mandiri	BPS dan Kementerian Desa PDTT	%	33,9	97,46
3.6	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	PDAM	%	41,89	100,00
3.7	Persentase akses air minum layak	DPUPR	%	95,81	100,00
4.1	Usia Harapan Hidup	BPS	Tahun	74,23	80,15
4.2	Jumlah kematian ibu	Pelaporan MPDN (Dinkes)	Kasus	4,00	1,00
4.3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Survey Kesehatan Indonesia (SKI)	%	20,65	5,70
4.4	Cakupan penemuan dan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	Pelaporan (Dinkes)	%	90,00	100,00
4.5	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	Pelaporan (Dinkes)	%	90,00	95,00
4.6	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	BPJS Kesehatan	%	97,66	99,50
4.7	Prevalensi Gizi Buruk	Dinas Kesehatan	%	0,60	0,32
4.8	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	Dinas Kesehatan	%	98,75	99,46
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				
4.9	i. Literasi Membaca SD	Kemendikbud (Rapor Pendidikan)	%	73,29	98,57
4.10	i. Literasi Membaca SMP	Kemendikbud (Rapor Pendidikan)	%	83,14	97,00
4.11	ii. Numerasi SD	Kemendikbud (Rapor Pendidikan)	%	61,04	95,63
4.12	ii. Numerasi SMP	Kemendikbud (Rapor Pendidikan)	%	77,38	98,20
4.13	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	BPS	Tahun	7,94	9,79 - 10,09
4.14	Harapan Lama Sekolah	BPS	Tahun	12,22	13,89
4.15	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	BPS	%	4,76	6,76
4.16	Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun	BPS	%	96,41	100,00
4.17	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	Dinas Arpusda	%	0,56	0,73



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045

No IUP	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Sumber Data	Satuan	Baseline (2025)	Target 2045
4.18	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	Disdikpora	%	87,00	91,45
4.19	Tingkat Kemiskinan	BPS	%	13,45 - 14,20	0,00 - 0,69
4.20	Distribusi pengeluaran kriteria bank dunia	BPS	%	19,95 - 20,15	25,95 - 28,15
4.21	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	BPS Ketenagakerjaan	%	60,50	76,00
4.22	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	BKKBN	Angka	61,82 - 64,38	76,55 - 79,71
4.23	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	Sakernas BPS	%	63,83	79,90
4.24	Indeks Ketimpangan Gender	BPS	Angka	0,47 - 0,46	0,24 - 0,17
5.1	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	%	9,53	90,00
5.2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	DPUPR	%	4,53	84,53
5.3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	KLHK	Angka	76,62	77,50
5.4	Indeks Risiko Bencana	BNPB	Angka	75,00	50,00
5.5	Penurunan Emisi GRK	Aplikasi AKSARA BAPPENAS	TonCO ₂ eq (kumulatif)	1.691.201,89	24.322.537,31*

* Estimasi target penurunan Emisi GRK Kumulatif dari periode tahun 2010-2045 di wilayah Kab Wonosobo adalah 24.322.537,31 TonCO₂eq yg ditetapkan berdasarkan angka proyeksi sementara penurunan emisi GRK dalam skenario Ambisius yang diterapkan oleh BAPPENAS dalam pemodelan dinamika sistem yang menggambarkan penerapan beragam bentuk kebijakan pembangunan rendah karbon yang didukung oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten Kota dan pihak non pemerintah



Tabel V. 9 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Visi	Sasaran Visi	Indikator Sasaran Visi	Misi	Pentahapan/ Tema				Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No IUP	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Sumber Data	Satuan	Baseline (2025)	Target										
				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4								2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	Target 2045						
				Penguatan Landasan Transformasi Ekosistem Agrobisnis dan Pariwisata Yang Maju	Akselerasi Transformasi Ekosistem Agrobisnis dan Pariwisata yang Menyejahterakan	Pemantapan Transformasi Pusat Agrobisnis dan Pariwisata yang Berkelanjutan	Perwujudan Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan																		
				Arah Kebijakan																					
Kabupaten Wonosobo sebagai Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan	1. Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka yang Berdaya Saing	1. Indeks Daya Saing Daerah	1. Mewujudkan Agrobisnis dan Pariwisata yang Unggul, Kreatif, Inovatif dan Berkelanjutan	Penguatan fondasi ekosistem inovasi agrobisnis yang berkelanjutan	Akselerasi dan perluasan kerjasama dalam pengembangan agrobisnis yang berkelanjutan untuk kesejahteraan	Pemantapan Pengarusutamaan pengembangan agrobisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan	Perwujudan pusat agrobisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan	1. Terwujudnya pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata yang maju dan berkelanjutan	1. Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Unggulan serta Kemandirian Pangan	1.1	Rasio PDRB sektor Pertanian	BPS	%	28,76	28,30	27,60	26,80	26,10	26,10						
													1.2	Prevalensi ketidacukupan Konsumsi pangan	BPS	%	11,16	9,64	7,14	4,93	2,90	2,90			
														1.3	Indeks ketahanan pangan	Badan Pangan Nasional (BAPANAS)	Angka	78,23	79,20	80,80	81,90	82,97	82,97		
														1.4	Rasio PDRB Industri pengolahan	BPS	%	18,50	19,10	20,25	20,95	21,42	21,42		
														1.5	Rasio Kewirausahaan daerah	Sakernas BPS	%	4,62	4,70	5,00	5,25	5,43	5,43		
														1.6	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	Volume usaha koperasi, urusan Koperasi dan UKM;	%	6,34	9,00	14,00	17,00	19,58	19,58		
														1.7	Rasio PDRB sektor Perdagangan	BPS	%	16,65	17,35	18,2	18,7	18,95	18,95		
														1.8	Kapabilitas inovasi	BRIN	Angka	2,82	2,90	3,05	3,15	3,25	3,25		
										Penguatan ekosistem pariwisata berbasis potensi daerah	Akselerasi Pengembangan destinasi wisata super prioritas berbasis kemitraan	Pemantapan kolaborasi antara pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang kompetitif dan berkelanjutan	Perwujudan ekspansi pariwisata sebagai lokomotif perekonomian untuk kesejahteraan			1.9	Rasio PDRB Sektor Pariwisata	BPS	%	6,94	7,40	8,15	8,55	8,90	8,90
																1.10	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	BPS	%	3,35	3,85	5,60	6,30	6,94	6,94
																1.11	Jumlah Tamu wisatawan manca negara	Disparbud	ribu orang	0,68	1,40	2,70	3,80	4,70	4,70
																1.12	Jumlah tamu wisatawan nusantara	Disparbud	ribu orang	1.743	1.800	2.200	2.500	2.750	2.750
																1.13	Rata - Rata Lama Tinggal Wisatawan	Disparbud	hari	1,88	1,92	2,05	2,11	2,17	2,17
																1.14	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan	Disparbud	%	60,46	63,90	68,20	72,50	76,91	76,91
																1.15	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Disparbud	orang	144.000,00	159.000,00	174.000,00	189.000,00	204.000,00	204.000,00
																1.16	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	Disdikpora	%	21,35	24,35	25,85	28,35	30,92	30,92
										Penyiapan tenaga kerja yang berdaya saing di sektor agrobisnis dan pariwisata	Akselerasi peningkatan kapasitas tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar lokal dan global	Pemantapan produktivitas tenaga kerja	Perwujudan tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing			1.17	Tingkat Pengangguran Terbuka	BPS	%	4,00 - 3,00	3,80 - 2,94	3,50 - 2,86	3,3 - 2,78	2,98 - 2,68	2,98 - 2,68
				Penumbuhan penguatan ekonomi masyarakat	Akselerasi penguatan ekonomi masyarakat	Pemantapan ekonomi masyarakat	Perwujudan ekonomi masyarakat yang sejahtera	2. Stabilitas ekonomi daerah		1.18	Pertumbuhan Ekonomi	BPS	%	4,30	4,50 - 5,10	5,50 - 6,50	5,00 - 6,00	4,00 - 5,00	4,00 - 5,00						
										1.19	PDRB per kapita	BPS	juta rupiah	27,37 - 27,56	50,00 - 51,00	90,00 - 100,00	130,00 - 140,00	140,18 - 164,64	140,18 - 164,64						
										1.20	Disparitas Harga	Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP)	%	± 10,00	± 10,00	± 10,00	± 10,00	± 10,00	± 10,00						
										1.21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	BPS	%	19,26	19,6	20,3	20,8	21,13	21,13						
										1.22	Total dana pihak ketiga pada bank milik kabupaten/kota per PDRB	Total DPK pada bank Milik Kabupaten/Kota: Laporan Keuangan (Audited) Perbankan PDRB: BPS	%	6,47	5,98	5,36	4,75	4,13	4,13						
										1.23	Total kredit pada bank milik kabupaten per PDRB	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota: Laporan Keuangan (Audited) Perbankan PDRB: BPS	%	7,31	6,72	5,99	5,25	4,51	4,51						



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo 2025-2045

Visi	Sasaran Visi	Indikator Sasaran Visi	Misi	Pentahapan/ Tema				Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No IUP	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Sumber Data	Satuan	Baseline (2025)	Target							
				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4								2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	Target 2045			
			2.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas	Penguatan Landasan Transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas	Akselerasi transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas	Pemantapan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas	Perwujudan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas	2.Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas	3.Tata Kelola yang berintegritas adaptif kolaboratif	2.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Kementerian PAN-RB	Angka	68,12	70,00	74,00	77,00	80,00	80,00			
										2.2	Indeks integritas nasional	Survey Penilaian Integritas KPK RI	Angka	75,28	80,00	85,00	88,50	91,56	91,56			
										2.3	Indek pelayanan publik	Kementerian PAN-RB	Angka	4,14	4,40	4,60	4,80	5,00	5,00			
										2.4	Indeks reformasi hukum	Kementerian Hukum dan HAM	Angka	38,2	60,00	73,00	82,00	90,00	90,00			
										2.5	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	BPS, SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah), LRA (Laporan Realisasi Anggaran)	%	0,55	0,55	0,55	0,53	0,52	0,52			
										2.6	Return on Assets (RoA) BUMD	Laporan Keuangan BUMD, BPS	%	3,18	3,50	5,20	6,60	7,87	7,87			
										4. Transformasi Digital	2.7	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Angka	3,60	3,80	4,10	4,30	4,50	4,50		
											2.8	Persentase rumah tangga dengan akses internet	BPS	%	70,00	79,00	90,00	95,00	100,00	100,00		
						3.Mewujudkan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan	Akselerasi dan pemerataan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan	Pemantapan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan	Perwujudan kualitas infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan	3.Terwujudnya Infrastruktur Layanan Dasar dan Pendukung Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	2.9	Jumlah kejadian konflik SARA	Bakesbangpol	Kali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													3.1	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Permukaan Mantap	DPUPR	%	63,27	66,31	69,57	72,29	75,00	75,00
													3.2	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota	Dinas Perbukit	%	1,10	5,49	10,99	16,48	23,08	23,08
													3.3	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	ePAKSI Ditjen SDA Kem PUPR	Angka	66,95	68,56	70,98	72,99	75,00	75,00
													3.4	Rumah tangga dengan akses hunian layak	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS	%	47,56	60,69	73,73	86,86	100,00	100,00
													3.5	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	PDAM	%	41,89	53,51	70,95	85,47	100,00	100,00
3.6	Persentase akses air minum layak	DPUPR											%	95,81	96,85	97,89	98,93	100,00	100,00			
	2.Peningkatan kesejahteraan	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	4. Mewujudkan Pembangunan Sosial yang Inklusif serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing	Pemenuhan standar pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh	Akselerasi peningkatan kualitas sistem pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial	Pemantapan ekosistem pendidikan, kesehatan berdaya saing dan kesejahteraan sosial yang inklusif dan berintegritas	Perwujudan SDM yang tangguh terhadap dinamika lokal dan global	4.Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sejahtera dan Berkualitas	7. Kesehatan Untuk Semua	3.7	Persentase desa mandiri	BPS dan Kementerian Desa PDTT	%	33,9	67,62	76,27	84,75	97,46	97,46			
										4.1	Usia Harapan Hidup	BPS	Tahun	74,23	75,54	76,81	78,09	80,15	80,15			
										4.2	Jumlah kematian ibu	Pelaporan MPDN (Dinkes)	Kasus	4,00	4,00	4,00	3,00	2,00	1,00			
										4.3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Survey Kesehatan Indonesia (SKI)	%	20,65	17,25	12,49	8,84	5,70	5,70			
										4.4	Cakupan penemuan dan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	Pelaporan (Dinkes)	%	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
										4.5	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	Pelaporan (Dinkes)	%	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00			
										4.6	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	BPJS Kesehatan	%	97,66	97,67	97,72	98,00	99,00	99,50			
										4.7	Prevalensi Gizi Buruk	Dinas Kesehatan	%	0,60	0,54	0,44	0,36	0,32	0,32			
									4.8	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	Dinas Kesehatan	%	98,75	98,68	98,96	99,21	99,46	99,46				



5.3. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah

Arah kebijakan pembangunan wilayah mengacu pada visi dan misi pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan wilayah Pulau Jawa, serta mempertimbangkan kondisi dan juga potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Wonosobo. Keberadaan arah kebijakan pembangunan wilayah dalam dokumen RPJPD menjadi penjelasan strategi untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkelanjutan, sejalan dengan upaya mengatasi ketimpangan antarwilayah.

Arah kebijakan pembangunan wilayah diterjemahkan melalui strategi-strategi agar dapat diimplementasikan secara efektif di setiap wilayah. Implementasi kebijakan ini memerlukan kerja sama yang terorganisir dengan baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan pembangunan wilayah di Kabupaten Wonosobo tidak berdiri sendiri, perlu bersinergi dan berkolaborasi dengan multipihak.

Kebijakan pada pengembangan wilayah Jawa yang diarahkan sebagai koridor “industri berbasis, riset dan teknologi”, yang terkait dengan wilayah Kabupaten Wonosobo yaitu pengembangan Kawasan Strategis Pertanian mendukung kemandirian pangan di Citanduy-Serayu yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi pertanian guna meningkatkan nilai komoditas pertanian dan menurunkan biaya benih. Kondisi geografis dan sosiologis Kabupaten Wonosobo yang terletak di dataran tinggi memiliki potensi besar bagi pengembangan agrobisnis dan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah sehingga mempunyai peran sebagai pusat agrikultur kemandirian pangan.

Berdasarkan dokumen RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, pembangunan wilayah diarahkan pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang sesuai tata ruang wilayah untuk memadukan fungsi budi daya dan lindung. Provinsi Jawa Tengah membagi sepuluh Wilayah Pembangunan (WP) dengan mempertimbangkan karakteristik geografis, interaksi wilayah dan pembagian ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah. Wonosobo masuk dalam WP Wonobanjar bersama Kabupaten Banjarnegara. Arah pengembangan terkait pada peningkatan kualitas lingkungan hidup Dataran Tinggi Dieng dalam rangka pengendalian risiko kerusakan Daerah Aliran Sungai sebagai kawasan penyangga di sekitarnya.

Pengembangan pusat permukiman dan perekonomian diarahkan melalui pengembangan koridor kawasan perkotaan Kertek-Wonosobo-Banjarnegara-Klampok dengan mempertimbangkan fungsi antarkawasan serta upaya mitigasi bencana alam seperti gunungapi dan gerakan tanah. Dalam konteks Kabupaten Wonosobo, pusat-pusat pertumbuhan wilayah dibangun dalam rangka memeratakan pembangunan, meningkatkan



perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dan difokuskan pada pengembangan sektor industri hasil pertanian dan kehutanan.

Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan kewilayahan di setiap hierarki (Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota) diharapkan dapat menciptakan orkestrasi kebijakan kewilayahan yang berdampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat.

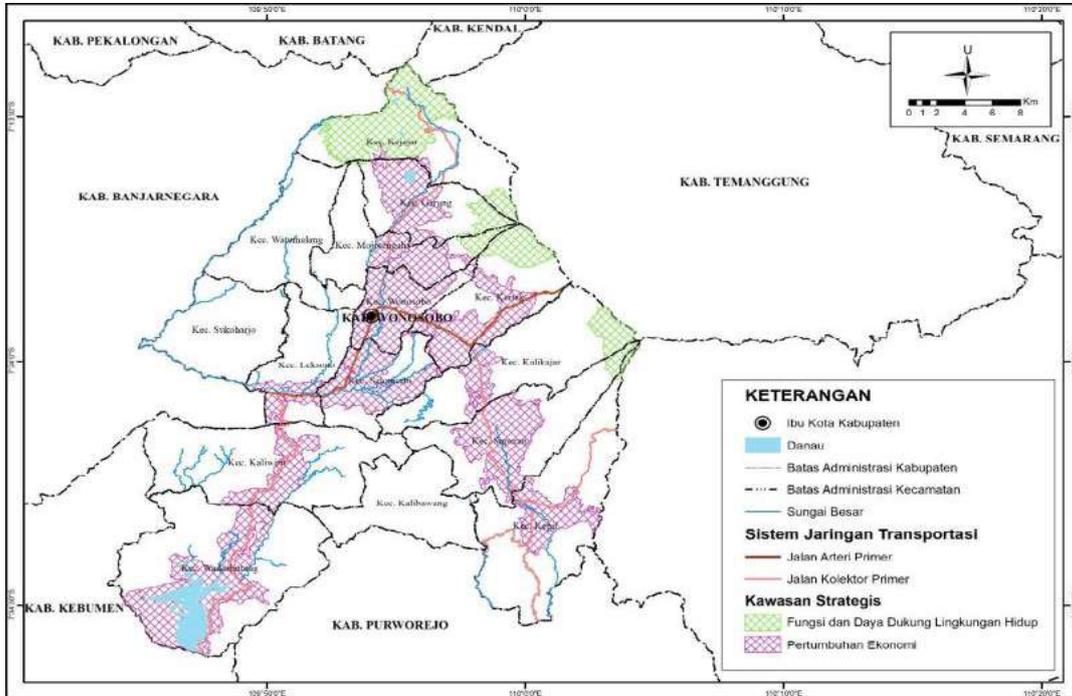
5.3.1. Kawasan Strategis dan Wilayah Pengembangan

Kawasan Strategis di Kabupaten Wonosobo mengacu pada RTRW yang meliputi kawasan strategis provinsi di Kabupaten Wonosobo yang meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial dan budaya, dan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Untuk kawasan strategis dilihat dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan yaitu Kawasan sekitar Dataran Tinggi Dieng dan kawasan sekitar Sindoro-Sumbing. Adapun kawasan strategis kabupaten berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang meliputi kawasan perkotaan dan kawasan aglomerasi perkotaan yang tercantum dalam RTRW kabupaten. Perwujudan Kawasan strategis dapat tercapai dengan strategi dan program pembangunan yang terpadu yaitu melalui wilayah pengembangan (WP). Pembentukan karakteristik utama dalam wilayah pengembangan yaitu memiliki kesamaan dalam karakteristik dan potensial pembangunan, sehingga dapat saling menopang dalam pengembangan wilayah. Pembentukan WP Kabupaten Wonosobo ini dapat memberikan dampak terhadap perekonomian dan pengembangan wilayah di Kabupaten Wonosobo. Wilayah Pengembangan di Kabupaten Wonosobo dibagi menjadi lima (5), yaitu:

1. Kejajar, Garung dan Mojotengah (JAGATENGAH): pertanian hortikultura berbasis konservasi, pariwisata berbasis konservasi (pengembangan *geopark*), pendidikan vokasi, kebudayaan, pengembangan kawasan perdesaan Margomarem (Desa Maron, Desa Tlogo, Desa Mlandi dan Desa Menjer) dan permukiman.
2. Watumalang, Sukoharjo, Selomerto, Leksono (TUJOSENO): pertanian tanaman pangan, agroindustri, permukiman serta perdagangan dan jasa.
3. Kertek dan Wonosobo (KERSO): *urban farming*, perkantoran, perdagangan dan jasa, permukiman, ekowisata, religi/ rohani dan agroindustri.
4. Kalikajar, Sapuran dan Kepil (JARANKEPIL): pertanian terintegrasi, agroindustri, pengembangan kawasan perdesaan Kanigara (Desa Bener, Desa Burat dan Desa Gandingrejo) dan permukiman.

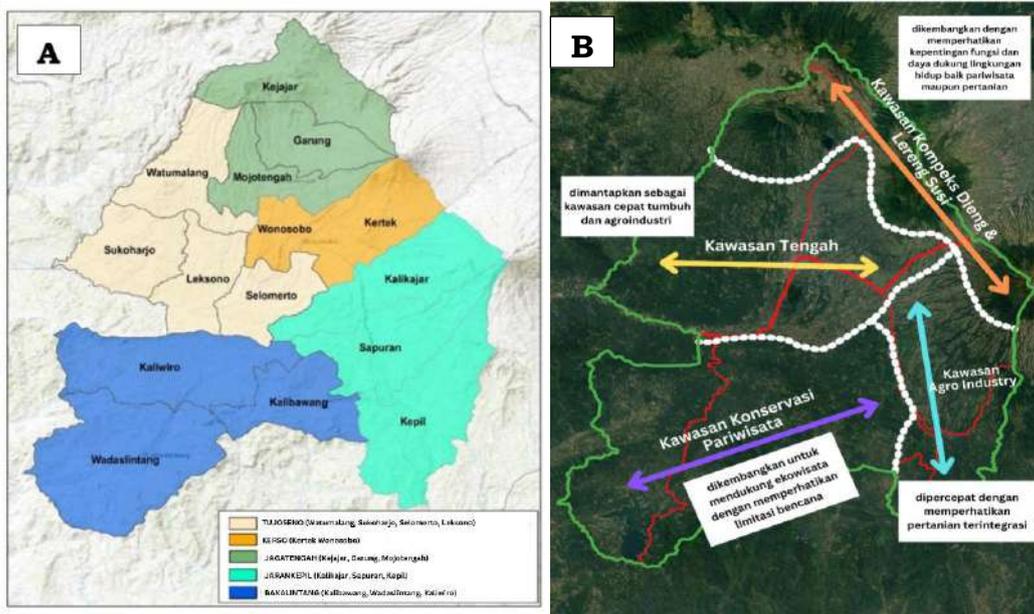


5. Kalibawang, Kaliwiro dan Wadaslintang (BAKALINTANG): perkebunan, ekowisata dan pengembangan perdesaan Kusalamo (Desa Kumejing, Dusun Sanggrahan Desa Plunjaran, Desa Lancar dan Desa Somogede).



Gambar V. 2 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Wonosobo dalam RTRW Tahun 2023-2043

Sumber: DPUPR Kabupaten Wonosobo, 2023



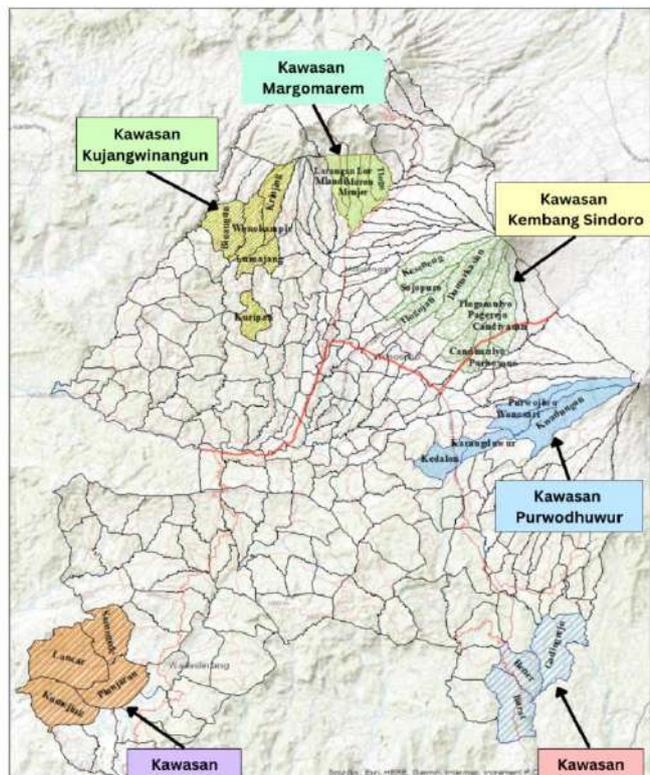
Gambar V. 3 Wilayah Pengembangan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045, B. Kondisi Fisiografis Pengembangan Kabupaten Wonosobo

Sumber: Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2024



Pengembangan Wilayah di Kabupaten Wonosobo juga mendasarkan pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP). Perencanaan pembangunan kawasan perdesaan ini sebagai pedoman/acuan bagi pelaksanaan pembangunan di kawasan perdesaan. Pembangunan desa dengan pendekatan kawasan perdesaan akan membentuk sebuah poros pembangunan dan menghilangkan ego setiap desa, sehingga akan terbentuk suatu kesatuan antardesa (kawasan) dalam perencanaan serta pembangunan di kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mengembangkan potensi dan pembangunan yang ada di desa. Pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Wonosobo meliputi 6 (enam) kawasan yaitu Kusalamo, Kujang Kiwangun, Margomarem, Kanigara, Kembang Sindoro dan Purwadhuwur. Pengembangan keenam kawasan perdesaan tersebut didasarkan pada potensi pertanian dan pariwisata yang ada di setiap wilayah selaras dengan visi RPJPD. Konsep pengembangan pertanian dan pariwisata di setiap kawasan diharapkan dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dengan tetap memperhatikan kondisi kelestarian lingkungan. Keenam kawasan perdesaan tersebut memiliki detail sebagai berikut:

- a. Kawasan Kusalamo terdiri dari Desa Kumejing, Dusun Sanggrahan Desa Plunjaran, Desa Lancar dan Desa Somogede (Kecamatan Wadaslintang). Tema pengembangan kawasan ini adalah pertanian berbasis pariwisata (Agrowisata);
- b. Kawasan Kujang Kiwangun terdiri dari Desa Kuripan, Desa Lumajang, Desa Krinjing, Desa Wonokampir dan Desa Binangun (Kecamatan Watumalang). Tema pengembangan kawasan ini adalah pertanian, peternakan dan pariwisata (agroecotourism);



Gambar V. 4 Persebaran Lokasi Pengembangan Kawasan Perdesaan yang sudah ditetapkan Bupati Tahun 2024

Sumber: Dinsos PMD, 2024



- c. Kawasan Margomarem terdiri dari Desa Maron, Desa Tlogo, Desa Menjer, Desa Larangan Lor, Desa Mlandi (Kecamatan Garung). Tema pengembangan kawasan ini adalah pariwisata (bagian *geopark Dieng*) dan pertanian hortikultura, sehingga potensi tersebut dikembangkan dalam konsep pembangunan kawasan perdesaan berbasis *agrogeowisata*;
- d. Kawasan Kanigara terdiri dari Desa Bener, Desa Burat, Desa Gadingrejo (Kecamatan Kepil). Tema pengembangan kawasan ini adalah *ecotourism* dan pertanian. Posisi kawasan ini berada di jalur alternatif KSPN Borobudur-Dieng serta proyek *greenbelt* dan genangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendung Bener yang saat ini masih dalam tahapan konstruksi;
- e. Kawasan Kembang Sindoro terdiri dari Desa Candiyan, Desa Purbosono, Desa Candimulyo, Desa Pagerejo, Desa Tlogomulyo, Desa Damarkasih (Kecamatan Kertek), Desa Keseneng, Desa Sojopuro (Kecamatan Mojotengah) dan Desa Tlojojati (Kecamatan Wonosobo). Tema pengembangan kawasan ini adalah berupa jalur wisata (perkebunan teh bedakah, Telaga Bedakah, wisata alam), pengembangan ekonomi jalur Candiyan-Keseneng dan Pertanian;
- f. Kawasan Purwadhuwur terdiri dari Desa Purwojiwo, Desa Wonosari, Desa Kwadungan, Desa Karangdhuwur dan Desa Kedalon (Kecamatan Kalikajar). Tema pengembangan kawasan ini adalah agro khususnya hortikultura yang ditunjang dengan pariwisata edukasi pertanian.

5.3.2. Kawasan Pengembangan Pertanian

Secara umum, kawasan pengembangan pertanian mengikuti ketentuan pada kawasan peruntukan pertanian pada aturan RTRW. Wilayah WP yang berada di hulu (JAGATENGAH) diarahkan sebagai wilayah pengembangan pertanian hortikultura yang berbasis konservasi. Berbeda dengan wilayah WP TUJOSENO, WP KERSO, WP JARANKEPIL yang diarahkan menjadi pertanian tanaman pangan terintegrasi serta wilayah *urban farming* (wilayah kota).

WP JAGATENGAH yang berada diwilayah hulu DAS Serayu dikembangkan sebagai wilayah dilindungi, sehingga pertanian hortikultura berbasis konservasi ditekankan diwilayah ini. Pertanian hortikultura berbasis konservasi merupakan pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan yang dapat menekan erosi serta keseimbangan air. Pertanian berbasis konservasi ini menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan dalam pertanian khususnya di WP JAGATENGAH agar dapat menekan degradasi lahan, erosi tanah serta meningkatkan kesuburan tanah. Secara jangka panjang pertanian hortikultura berbasis konservasi ini akan dapat menjaga kelestarian lingkungan di wilayah WP JAGATENGAH serta meningkatkan kesejahteraan petani.



Pertanian yang dikembangkan di WP KERSO dikembangkan menjadi pertanian *urban farming*. Wilayah perkotaan di Kecamatan Kertek dan Kecamatan Wonosobo ditekankan menjadi pertanian perkotaan karena jumlah lahan yang terbatas. Keterbatasan lahan yang terdapat di wilayah perkotaan Kertek dan Wonosobo ini diterapkan dengan teknik pertanian yang hanya membutuhkan lahan yang sempit seperti teknik *hidroponik*, *vertikultur* maupun *aquaponik*. Teknik-teknik tersebut digunakan agar masyarakat yang berada di perkotaan tetap dapat melakukan usaha pertanian baik di rumah, perkantoran, sekolah maupun fasilitas umum.

WP TUJOSENO dan WP JARANKEPIL diarahkan menjadi pertanian yang terintegrasi. Pertanian integrasi ini menyatukan pertanian, perikanan dan peternakan. Wilayah pengembangan ini dikembangkan tersebut karena memiliki lahan yang masih luas serta wilayahnya memenuhi untuk pengembangan pertanian terintegrasi. Pengembangan pertanian, perikanan dan peternakan dalam pertanian terintegrasi tersebut dapat saling menguntungkan satu dengan yang lainnya.

Pertanian yang dikembangkan di WP BAKALINTANG lebih difokuskan ke sub sektor perkebunan. Wilayah pengembangan ini merupakan dataran rendah dengan tanah yang subur, suhu tidak terlalu dingin atau panas dan kelembaban udara yang tidak terlalu tinggi atau rendah, sehingga cocok untuk budidaya perkebunan terutama hortikultura buah dan biofarmaka.

5.3.3. Pengembangan Pariwisata

Kawasan yang menjadi super prioritas pengembangan Pariwisata yaitu pada WP JAGATENGAH dan WP BAKALINTANG. Hal ini untuk menghidupkan dua kutub pertumbuhan wilayah di utara dan selatan Wonosobo. Untuk WP KERSO, WASUSOLE, JARANKEPIL menjadi pendukung antara dua kutub pertumbuhan wilayah pariwisata dan dikembangkan sesuai arahan rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten.

Pariwisata berbasis konservasi merupakan pariwisata yang dikembangkan untuk pelestarian alam dan budaya. Konsep ini digunakan dalam jangka panjang untuk WP JAGATENGAH untuk mencegah terjadinya degradasi lahan di wilayah tersebut. Konsep konservasi ini juga dapat dikembangkan bersama dengan pertanian untuk WP JAGATENGAH sehingga tidak hanya digunakan sebagai sektor pariwisata saja, namun dikembangkan untuk pertanian berkelanjutan.

Adanya Geopark Dieng di WP JAGATENGAH menjadikan konsep pariwisata konservasi dapat dikembangkan. Geopark Dieng menyajikan informasi terkait warisan geologi wilayah Dieng serta keindahan alam, keragaman hayati dan budaya. Wujud pariwisata konservasi yang akan



dikembangkan jangka panjang di WP JAGATENGAH yang digabungkan dengan Geopark Dieng dapat berupa trekking/kunjungan di site wisata geologi dan atraksi budaya.

Pengembangan pariwisata di WP BAKALINTANG ditekankan menggunakan konsep ekowisata, kawasan cagar alam geologi dan inisiasi taman bumi/geopark. Potensi wilayah selatan Kabupaten Wonosobo ini terdapat Waduk Wadaslintang, Gunung Lanang Desa Mergolangu, Curug Winong menjadi wilayah potensi yang dikembangkan dalam jangka panjang. Ekowisata yang dikembangkan dapat menggabungkan unsur edukasi dan rekreasi yang berada di wilayah WP BAKALINTANG ini. Jangka panjang pengembangan wisata di kawasan ini selain dapat melakukan rekreasi, juga mendapatkan informasi edukasi pengetahuan yang ditekankan dalam site-site wisata pada kawasan WP BAKALINTANG

5.4. Keterkaitan Upaya Super Prioritas (*Game Changers*) dengan Arah Kebijakan

Upaya super prioritas (*game changers*) merupakan program-program prioritas dan unggulan yang dirancang untuk mendorong terjadinya perubahan besar dan transformasi dalam pembangunan suatu daerah. Program-program ini biasanya bersifat lintas sektoral dan membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Sedangkan, arah kebijakan dalam RPJPD dimaknai sebagai rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai selama lima tahun (satu periode) untuk empat periode.

Arah kebijakan ini disusun berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi dan potensi daerah, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Kabupaten Wonosobo. Keterkaitan antara upaya super prioritas dengan arah kebijakan dalam RPJPD dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

- Aspek tujuan: Upaya super prioritas harus selaras dengan tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJPD.
- Aspek sasaran: Upaya super prioritas harus memiliki sasaran yang jelas dan terukur, serta selaras dengan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJPD.
- Aspek strategi: Upaya super prioritas harus memiliki strategi yang tepat dan efektif untuk mencapai sasarannya, serta selaras dengan strategi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJPD.
- Aspek indikator: Upaya super prioritas harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas, serta selaras dengan indikator keberhasilan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJPD.



Berikut ini merupakan tabel yang mencerminkan keterkaitan antara upaya super prioritas dengan arah kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Wonosobo:

Tabel V. 10 Keterkaitan Antara Upaya Super Prioritas (*Game Changers*) dengan Arah Kebijakan

No	Upaya Super Prioritas (<i>Game Changers</i>)	Arah Kebijakan			
		Periode 1	Periode 2	Periode 3	Periode 4
		(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2045)
		Penguatan Landasan Transformasi Ekosistem Agrobisnis dan Pariwisata Yang Maju	Akselerasi Transformasi Ekosistem Agrobisnis dan Pariwisata yang Menyejahterakan	Pemantapan Transformasi Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Yang Berkelanjutan	Perwujudan Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan
1	Kolaborasi pengarusutamaan agrobisnis dan pariwisata	V	V	V	V
2	Hilirisasi industri pertanian dan ekonomi sirkular	V	V	V	V
3	Transformasi digital sektor publik	V	V	V	V
4	Reformasi sumber pendapatan asli daerah	V	V	V	V
5	Infrastruktur pendukung agrobisnis dan pariwisata	V	V	V	V
6	Pengentasan kemiskinan terintegrasi	V	V	V	V
7	Ketahanan keluarga dan kesetaraan gender	V	V	V	V
8	Pertanian dan pariwisata ramah lingkungan	V	V	V	V
9	Reformasi Pengelolaan Sampah	V	V	V	V



BAB 6 PENUTUP

Dokumen RPJPD ini merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang. RPJPD Tahun 2025-2045 juga dijadikan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Wonosobo untuk turut andil dalam pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi **“Kabupaten Wonosobo sebagai Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”** sangat ditentukan oleh beberapa hal berikut: 1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis, 2) konsistensi kebijakan pemerintah, 3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat, 4) peran partisipasi aktif dan kolaborasi multipihak dalam memasuki era pembangunan baru yang penuh tantangan dan peluang.

Berpedoman pada prinsip keadilan sosial, perlindungan lingkungan dan partisipasi masyarakat, kami berharap dapat mengatasi berbagai tantangan dan menciptakan peluang bagi seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo. Dalam perjalanan panjang ini, kami menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kondisi-kondisi yang ingin dicapai tersebut disusun dalam bentuk perencanaan kinerja dengan menggunakan kerangka logis yang bertujuan untuk memastikan perencanaan yang disusun memiliki hubungan yang logis antara pemetaan masalah, isu strategis, visi, misi, sasaran pokok, arah pembangunan dan arah kebijakan.

Kaidah pelaksanaan merupakan peraturan atau patokan yang harus diikuti dalam pelaksanaan RPJPD Kabupaten Wonosobo tahun 2025-2045. Kaidah-kaidah yang dirumuskan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan rencana jangka panjang adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen bersama, pemerintah, masyarakat dan swasta berkewajiban mendukung cita-cita RPJPD Kabupaten Wonosobo tahun 2025-2045, baik dalam bentuk kebijakan, program, maupun kegiatan yang sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing pihak;
2. Setiap Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban memedomani dokumen RPJPD Kabupaten Wonosobo tahun 2025-2045 dalam perumusan visi dan misi serta program prioritas;
3. Setiap Perangkat Daerah (PD) atau unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo berkewajiban memedomani dokumen



- RPJPD Kabupaten Wonosobo tahun 2025-2045 dalam setiap perumusan kebijakan;
4. Unsur Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang memiliki kewenangan di bidang perencanaan atau unit organisasi yang ditugaskan sesuai peraturan yang berlaku, berkewajiban menjamin konsistensi antara dokumen RPJPD Kabupaten Wonosobo tahun 2025-2045 dengan dokumen perencanaan lainnya;
 5. Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan harus didukung dengan konsistensi perencanaan dan pendanaan yang memperhatikan manajemen risiko, dilakukan atas tujuan strategis pemerintah daerah jangka menengah, tujuan strategis perangkat daerah dan tujuan strategis pada tingkatan kegiatan;
 6. Kerangka pengendalian dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan partisipasi pihak-pihak terkait melalui sistem informasi manajemen yang meliputi: a) pengendalian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan, b) pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta c) pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko;
 7. Apabila dalam pelaksanaan RPJPD Kabupaten Wonosobo tahun 2025-2045 setelah ditetapkan, terjadi perubahan kondisi yang berakibat pada tidak tercapainya cita-cita atau tujuan yang ingin diwujudkan dan/atau kondisi yang menyebabkan RPJPD Kabupaten Wonosobo tahun 2025-2045 tidak dapat dilaksanakan, maka perubahan RPJPD Kabupaten Wonosobo tahun 2025-2045 dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perubahan yang dilakukan hanya pada penyesuaian kebijakan, sasaran, indikator dan target, sedangkan cita-cita yang ingin diwujudkan berupa visi dan misi tidak dilakukan perubahan;
 - b. Perubahan yang dilakukan hanya pada penyesuaian isu strategis yang sesuai dengan perkembangan zaman;
 - c. Jika dokumen perencanaan pembangunan yang dipedomani dalam penyusunan RPJPD tahun 2025-2045 berbeda perodesasinya dan/atau masa berlakunya berakhir lebih cepat dari masa berlaku RPJPD, seperti SDGs, RTRW dan rencana sektoral lainnya, maka pemerintah daerah dapat menggunakan kebijakannya yang dianggap masih relevan dan penting sesuai kondisi daerah sebagai acuan dalam perumusan kebijakan atau perencanaan turunannya, tanpa harus melakukan perubahan dokumen RPJPD tahun 2025-2045;
 - d. Perubahan dokumen RPJPD harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Keberhasilan mewujudkan visi pembangunan ini akan menjadi cerminan dari kekompakan, kreativitas dan keberanian kita dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul di masa depan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 ini. Mari kita bersama-sama mewujudkan cita-cita luhur demi terciptanya Kabupaten Wonosobo yang lebih baik untuk generasi mendatang.

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT